



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1

#### **Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dihitung dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan Rencana Kerja Tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun dengan Pendekatan Kinerja atau *Performance Budget System*.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Daerah mempunyai kewenangan yang didasarkan pada azas otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, serta azas tugas pembantuan yang merupakan penugasan dari pemerintah provinsi untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan. Akan tetapi otonomi tersebut belum sepenuhnya diserahkan dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi tahapan yang sangat krusial dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya guna mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat yang lebih baik. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan melalui proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan. Pendanaan yang terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut berasal dari transfer pusat dalam bentuk dana perimbangan seperti Dana Alokasi Umum.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2024 disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Sedangkan pengesahan dalam peraturan bupati adalah Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 121 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2024, Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

Penyusunan APBD Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun Anggaran 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan pelaksanaan APBD disusun berdasarkan asas akuntabilitas dan transparansi. Sesuai peraturan perundang-undangan tentang keuangan, pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan APBD dalam bentuk laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan APBD selama satu tahun anggaran.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 disusun dengan berbasis akrual.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 berbasis akrual dimaksud adalah Laporan Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Operasional. Sesuai dengan definisi basis akrual, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat menyajikan Aset, Kewajiban, Pendapatan Operasional dan Beban Operasional pada saat telah timbulnya hak atau kewajiban Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Sedangkan untuk Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Laporan Arus Kas disajikan dengan basis kas.

Selain itu, tujuan penyusunan laporan keuangan adalah memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan. Keputusan tersebut merupakan keputusan ekonomi, sosial, maupun politik sebagai bentuk pertanggungjawaban ataupun akuntabilitas publik.

Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten Bangka Barat memberikan gambaran dan informasi kepada masyarakat melalui DPRD Kabupaten Bangka Barat mengenai beberapa hal, antara lain:

1. Informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. Informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
3. Informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

- kegiatan pemerintah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Informasi mengenai bagaimana Pemerintah Kabupaten Bangka Barat mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
  5. Informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
  6. Informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan

## 1.2

### **Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Penyusunan Laporan Keuangan ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

## 1.3

### **Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

Sistematika penulisan yang digunakan dalam Catatan atas Laporan Keuangan diawali dengan Bab 1 Pendahuluan yang berisi maksud dan tujuan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan. Bab 2 Ekonomi Makro yang menjelaskan kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD. Bab 3 Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan yang menjelaskan tentang ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Bab 4



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

Kebijakan Akuntansi yang berisikan entitas pelaporan keuangan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan. Bab 5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan yang menjelaskan rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan yang terdiri dari pos pendapatan LRA, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LO, beban, komponen-komponen laporan arus kas dan Bab 6 Penutup.



## PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

### BAB 2

#### EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

##### 2.1

##### **Ekonomi Makro**

Ekonomi Makro adalah studi tentang ekonomi yang menjelaskan perubahan ekonomi yang dapat mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk mempengaruhi target-target kebijakan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan.

Kabupaten Bangka Barat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, dan Kabupaten Bangka Barat. Kabupaten Bangka Barat saat ini terdiri dari 6 kecamatan yaitu Kecamatan Mentok, Kecamatan Simpang Teritip, Kecamatan Jebus, Kecamatan Kelapa, Kecamatan Tempilang dan Kecamatan Parittiga, serta 6 kelurahan yaitu Kelurahan Sungai Baru, Kelurahan Sungai Daeng, Kelurahan Tanjung, Kelurahan Kelapa, Kelurahan Menjelang dan Kelurahan Keranggan dan 60 desa serta didukung 150 dusun/lingkungan.

Berdasarkan data tahun 2024 dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Barat dengan luas wilayah sekitar 2.851,408 km<sup>2</sup> atau 288.141 Ha dengan jumlah penduduk pada Tahun 2024 sebanyak 217.859 jiwa. Dari 217.859 jiwa tersebut tersebar di 6 (enam) Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Mentok dengan 56.160 jiwa. Di Kecamatan Parittiga yaitu 38.258 jiwa, berikutnya di Kecamatan Kelapa berjumlah 35.963 jiwa, Kecamatan Simpang Tertip berjumlah 32.883 jiwa, Kecamatan Tempilang berjumlah 30.380 jiwa dan paling sedikit penduduknya Kecamatan Jebus 24.215 jiwa. Tingkat kepadatan penduduk pada akhir tahun 2024 adalah 41,92 orang per km<sup>2</sup>.

Nilai PDRB atas dasar harga konstan dengan tahun dasar 2010 pada tahun 2024 adalah sebesar 11.395.650,00 rupiah, meningkat dibandingkan pada tahun 2023 sebesar 10.804.720,00 rupiah. Perkembangan PDRB atas dasar harga konstan merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

a. Tabel PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)

Kategori Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.777,85	1.923,30	2.167,70	2.399,96	2.664,00
B. Pertambangan dan Penggalian	1.007,12	1.345,49	1.332,66	1.242,99	1.352,99
C. Industri Pengolahan	5.761,64	6.956,87	7.481,71	7.675,16	9.147,22
D. Pengadaan Listrik dan Gas	11,60	12,52	12,27	12,84	13,26
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	1,17	1,23	1,28	1,32	1,47
F. Konstruksi	1.050,24	1.106,14	1.186,65	1.315,44	1.301,32
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.892,64	2.049,36	2.410,50	2.663,87	2.662,17
H. Transportasi dan Pergudangan	124,39	139,01	160,56	189,49	200,36
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	187,60	203,20	228,70	262,09	277,47
J. Informasi dan Komunikasi	61,02	65,16	71,48	80,93	87,76
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	63,12	69,56	82,42	93,79	98,47
L. Real Estat	313,19	330,37	368,92	404,13	425,44
M,N. Jasa Perusahaan	20,37	21,81	24,30	26,84	27,90
O. Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib	692,13	727,36	727,58	780,58	837,42
P. Jasa Pendidikan	282,51	296,81	310,77	332,45	369,69
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	122,49	135,84	142,03	151,35	151,93
R,S,T,U. Jasa Lainnya	45,90	47,56	51,90	58,62	65,45
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>13.414,98</b>	<b>15.431,59</b>	<b>16.761,43</b>	<b>17.691,85</b>	<b>19.684,30</b>

b. Tabel PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)

Kategori Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.343,58	1.343,75	1.399,21	1.464,0	1.515,03
B. Pertambangan dan Penggalian	1.050,30	1.156,46	1.177,51	1.142,29	1.112,87
C. Industri Pengolahan	4.971,03	4.749,29	4.700,26	4.712,66	5.278,02
D. Pengadaan Listrik dan Gas	5,48	5,95	5,73	5,99	6,19
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,72	0,74	0,77	0,77	0,80
F. Konstruksi	603,87	614,18	625,66	671,11	659,92
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.172,70	1.240,84	1.355,18	1.431,62	1.377,94
H. Transportasi dan Pergudangan	79,38	85,97	95,72	104,42	108,03
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	109,76	116,67	128,27	144,55	148,85
J. Informasi dan Komunikasi	47,98	50,82	55,13	62,22	67,07
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	39,45	41,56	45,14	50,48	51,28
L.. Real Estate	208,91	217,88	235,73	252,10	259,68
M,N. Jasa Perusahaan	12,27	12,78	13,84	14,62	15,19



## PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

Kategori Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
O. Administrasi Pemerintahan, Pertanahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	400,73	419,31	415,41	445,06	474,16
P. Jasa Pendidikan	160,74	163,72	168,70	176,92	194,07
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	77,07	84,19	86,43	90,73	89,96
R,S,T,U. Jasa Lainnya	28,26	28,89	31,02	33,95	36,61
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>10.312,23</b>	<b>10.333,00</b>	<b>10.539,71</b>	<b>10.804,72</b>	<b>11.395,65</b>

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan kesehatan pendidikan dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu Umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak.

Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bangka Barat tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

2022	2023	2024
70,12	71,13	71,36

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Bangka Barat tahun 2024 sebesar 70,36 persen artinya sebesar 70 persen penduduk usia kerja aktif secara ekonomi. Adapun tingkat pengangguran terbuka untuk Kabupaten Bangka Barat tahun yang sama sebesar 4,88 artinya dari 100 penduduk yang termasuk angkatan kerja, secara rata-rata 4 orang diantaranya pencari kerja.

Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bangka Barat tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

2022	2023	2024
4,86	4,77	4,88

Untuk mengukur angka kemiskinan di Kabupaten Bangka Barat menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK) yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan.

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.



## PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

Garis Kemiskinan di Kabupaten Bangka Barat tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin (%)
2022	635.861,00	5.300	2,46
2023	681.517,00	5.910	2,71
2024	720.398,00	5.710	2,59

### 2.2

#### **Kebijakan Keuangan**

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam kerangka pendapatan, belanja dan pembiayaan. Hal tersebut menjadikan keuangan daerah merupakan salah satu faktor penentu dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan Keuangan diarahkan untuk meningkatkan struktur keuangan yang lebih baik melalui peningkatan target penerimaan serta peningkatan efektifitas dan efisiensi belanja.

Kebijakan Umum Keuangan Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2024 tertuang dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2024. Kebijakan Umum APBD terdiri atas 3 (tiga) kebijakan yaitu kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Kebijakan tersebut berkaitan dengan fungsi pemerintahan yang bertugas memfasilitasi, membuat regulasi, dan menyediakan barang dan jasa yang sifatnya publik. Kebijakan dibidang belanja daerah secara umum masih sama dengan kebijakan pada tahun sebelumnya, yaitu diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut :

1. Seluruh OPD diarahkan untuk menggunakan anggaran yang telah diamanatkan dengan lebih efisien dan efektif, dan mempertanggungjawabkannya melalui hasil (*output*) yang lebih terukur dan berkesinambungan (*sustainable*),
2. Mengarahkan kegiatan-kegiatan OPD supaya lebih fokus terhadap upaya pengurangan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, dan perbaikan kualitas lingkungan hidup,
3. Mengupayakan agar seluruh kegiatan yang dilakukan oleh setiap OPD ada interkoneksi, sehingga kegiatan yang satu dengan yang lainnya bersifat melengkapi dan bersinergi satu sama lain dan bermuara pada satu tujuan yang telah ditetapkan,
4. Mengarahkan kepada seluruh OPD agar dapat memisahkan kegiatan yang merupakan urusan pemerintah (*public domain*) dan urusan individu (*private domain*), sehingga kegiatan yang dilakukan lebih bermanfaat dan berdampak lebih luas,



## PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

5. Mengkaji kembali efektivitas bentuk-bentuk bantuan (finansial maupun barang) yang selama ini dilakukan oleh pemerintah, dan mengembangkan bentuk intervensi yang lebih signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan tidak menciptakan ketergantungan masyarakat kepada pemerintah,
6. Prioritas belanja daerah diarahkan untuk menyediakan barang dan jasa yang tidak dapat disediakan oleh masyarakat, terutama yang berkaitan erat dengan upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM),
7. Untuk mendorong partisipasi masyarakat, pemerintah menyerahkan pengelolaan kegiatan yang berskala kecil kepada masyarakat (swakelola), misalnya rehabilitasi sarana desa melalui tugas alokasi dana desa ataupun dana sharing PNPM,
8. Alokasi Dana Desa (ADD) diarahkan untuk dipergunakan secara efektif dan efisien untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang merupakan kewenangan/urusan desa,
9. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan,
10. Belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial,
11. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran,
12. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawabnya,
13. Penggunaan dana perimbangan diprioritaskan untuk kebutuhan sebagai berikut:
  - a. Penerimaan dana bagi hasil pajak agar diprioritaskan untuk mendanai perbaikan lingkungan pemukiman di perkotaan dan di pedesaan, pembangunan irigasi, jaringan, dan jembatan,
  - b. Penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam agar diutamakan pengalokasianya untuk mendanai pelestarian lingkungan areal pertambangan, perbaikan, dan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial, fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk tercapainya standar pelayanan minimal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan,
  - c. Dana Alokasi Umum agar diprioritaskan penggunaannya untuk mendanai gaji dan tunjangan pegawai, kesejahteraan pegawai, kegiatan operasi dan pemeliharaan serta pembangunan fisik sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum yang dibutuhkan masyarakat,
  - d. Dana Alokasi Khusus digunakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah.



## PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

Alokasi belanja Tahun Anggaran 2024 tetap lebih menekankan pada pelayanan publik, yang tercermin dari cukup besarnya anggaran yang disediakan untuk bidang pendidikan yang mencapai sekitar 26,36% dari total anggaran dan bidang kesehatan yang mencapai sekitar 19,77% dari total anggaran. Pembelanjaan kegiatan-kegiatan untuk kepentingan publik dan bantuan-bantuan sosial yang dititik beratkan pada bidang pendidikan maupun kesehatan tersebut lebih diarahkan untuk peningkatan sarana dan prasarana pada bidang pendidikan dan kesehatan. Program bantuan operasional sekolah, bantuan untuk siswa keluarga kurang mampu, siswa dan guru berprestasi, bantuan untuk keluarga miskin, dan hibah kepada organisasi-organisasi yang mendukung program pemerintah.

Dalam memenuhi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kabupaten Bangka Barat telah menganggarkan klaster Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang merupakan salah satu klaster dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dirancang untuk menjaga masyarakat di Kabupaten Bangka Barat yang terdampak secara ekonomi agar dapat terus memenuhi kebutuhan dasarnya dan terhindar dari resiko akibat kesenjangan yang lebih dalam.

### 2.3

#### **Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD**

Secara umum pencapaian target kinerja APBD Kabupaten Bangka Barat telah berjalan cukup baik, sebagian besar program kegiatan dari masing-masing OPD dapat berjalan tepat waktu dan sesuai dengan apa yang diharapkan baik dari segi tolak ukur kinerja seperti input, output, dan *outcome*-nya. Realisasi pendapatan tahun 2024 secara keseluruhan adalah 91,01% dari target yang direncanakan, sedangkan daya serap belanja dan transfer tahun 2024 adalah sebesar 100,00%. Keberhasilan pencapaian target kinerja tersebut dapat diukur berdasarkan efektifitas dan efisiensi yang dicapai dan tidak terlepas dari faktor-faktor yang mendorong seperti tingkat SDM yang cukup termasuk mental, pengawasan intern dari masyarakat yang cukup baik dan perencanaan yang cukup matang.

Adapun faktor yang menghambat sehingga terjadinya beberapa program kegiatan yang tidak mencapai target kinerja seperti yang diharapkan antara lain, SDM dari pihak ketiga maupun aparatur yang kurang kompetensinya, pengawasan kurang baik, terjadinya sesuatu tidak sesuai rencana atau karena faktor alam. Namun faktor-faktor penghambat tersebut tidak dapat dijadikan alasan atas tidak tercapainya target yang diharapkan. Semua faktor hambatan tersebut bagi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat merupakan tantangan yang harus dapat diatasi ditahun-tahun yang akan datang untuk tercapainya masyarakat Bangka Barat yang sejahtera.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

## BAB 3

### IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

#### 3.1

#### **Pendapatan**

Setiap Pemerintah Daerah wajib meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah. Untuk membangun daerah diperlukan pembiayaan yang bersumber dari pendapatan. Pendapatan dapat berasal dari potensi daerah yang bersangkutan maupun dari propinsi dan pusat. Pendapatan yang digunakan untuk mendanai aktivitas Pemerintah dapat dibagi menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan), dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Target Pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2024 setelah perubahan adalah sebesar Rp1.023.453.390.292,30,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp931.349.736.005,08 atau mencapai 91,00% sedangkan realisasi Pendapatan tahun 2023 adalah sebesar Rp969.076.700.336,41 atau mengalami penurunan sebesar Rp37.726.964.331,33.

Rincian pendapatan tahun 2024 sebagai berikut:

##### 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Tahun 2024 PAD ditargetkan sebesar Rp95.825.769.123,19 dan terealisasi sebesar Rp86.390.002.146,08 atau sebesar 90,15%, sedangkan tahun 2023 terealisasi sebesar Rp71.795.673.410,41 atau mengalami kenaikan sebesar Rp14.594.328.735,67. Pendapatan Asli Daerah tahun 2024 terdiri dari:

###### a. Pajak Daerah

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2024 ditargetkan penerimaan dari Pajak Daerah sebesar Rp34.250.000.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp32.340.169.274,00 atau sebesar 94,42%, sedangkan tahun 2023 terealisasi sebesar Rp26.506.009.473,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp5.834.159.801,00. Kenaikan tersebut disebabkan meningkatnya kesadaran masyarakat membayar pajak dan adanya peningkatan jumlah objek pajak.

###### b. Retribusi Daerah

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2024 ditargetkan penerimaan dari Retribusi Daerah sebesar Rp15.457.241.681,19 dapat terealisasi sebesar Rp15.032.696.814,68 atau sebesar 97,25%, sedangkan tahun 2023 terealisasi sebesar Rp7.781.270.518,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp7.251.426.296,68. Kenaikan ini dikarenakan meningkatnya penerimaan retribusi pelayanan pasar.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan  
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2024 ditargetkan penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp7.545.000.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp5.966.951.097,57 atau sebesar 79,08%, sedangkan tahun 2023 terealisasi sebesar Rp6.844.661.601,09 atau mengalami penurunan sebesar Rp877.710.503,52 dikarenakan penurunan laba operasional PT.BPD Sumsel Babel.
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah  
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2024 ditargetkan penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp38.573.527.442,00 dapat terealisasi sebesar Rp33.050.184.959,83 atau sebesar 85,68%, sedangkan tahun 2023 terealisasi sebesar Rp30.663.731.818,32 atau mengalami kenaikan sebesar Rp2.386.453.141,51. Kenaikan ini dikarenakan bertambahnya pendapatan pada BLUD RSUD Sejiran Setason.
2. Pendapatan Transfer  
Pendapatan Transfer pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp923.317.621.169,11 dan terealisasi sebesar Rp840.905.403.685,00 atau sebesar 91,07%, sedangkan tahun 2023 terealisasi sebesar Rp886.513.895.807,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp45.608.492.122,00. Pendapatan Transfer terdiri dari :
- a. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan  
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp809.530.394.436,00 dan terealisasi sebesar Rp727.730.577.985,00 atau sebesar 89,90%, sedangkan tahun 2023 terealisasi sebesar Rp706.546.362.625,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp21.184.215.360,00. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan tahun 2024 terdiri dari:
    - 1) Dana Bagi Hasil Pajak  
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp56.810.763.268,00 dapat terealisasi sebesar Rp32.127.798.000,00 atau 56,55%, sedangkan tahun 2023 terealisasi sebesar Rp34.630.338.277,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp2.502.540.277,00.
    - 2) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)  
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp149.933.987.168,00 dan terealisasi sebesar Rp110.285.200.000,00 atau sebesar 73,56%, sedangkan tahun 2023 terealisasi sebesar Rp93.415.826.636,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp16.869.373.364,00. Kenaikan ini dikarenakan bertambahnya



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

Transfer dari Pemerintah Pusat untuk Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty.

3) Dana Alokasi Umum

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp477.599.585.000,00 dan terealisasi sebesar Rp468.444.230.163,00 atau sebesar 98,08%, sedangkan tahun 2023 terealisasi sebesar Rp434.631.148.780,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp33.813.081.383,00.

4) Dana Alokasi Khusus

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp125.186.059.000,00 dan terealisasi sebesar Rp116.873.349.822,00 atau sebesar 93,36%, sedangkan tahun 2023 terealisasi sebesar Rp143.869.048.932,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp26.995.699.110,00.

b. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Transfer Pemerintah Pusat lainnya berupa Dana Penyesuaian sebesar Rp62.101.997.000,00 dan terealisasi sebesar Rp62.101.997.000,00 atau 100,00%, sedangkan tahun 2023 terealisasi sebesar Rp81.391.689.000,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp19.289.692.000,00. Transfer Pemerintah Pusat lainnya tahun 2024 merupakan pendapatan Dana Penyesuaian yang terdiri dari :

1) Dana Desa

Dana Desa tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp54.949.231.000,00 dan terealisasi sebesar Rp54.949.231.000,00 atau 100,00%, sedangkan tahun 2023 terealisasi sebesar Rp54.434.722.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp514.509.000,00.

2) Insentif Fiskal

Insentif Fiskal tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp7.152.766.000,00 dan terealisasi sebesar Rp7.152.766.000,00 atau 100,00%, sedangkan tahun 2023 tidak ada realisasi.

c. Transfer Pemerintah Provinsi

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi yaitu Pendapatan Bagi Hasil Pajak. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp51.685.229.733,11 dapat direalisasikan sebesar Rp51.072.828.700,00 atau sebesar 98,82%, sedangkan tahun 2023 terealisasi sebesar Rp98.575.844.182,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp47.503.015.482,00. Transfer Pemerintah Provinsi tahun 2024 terdiri dari:



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Pendapatan Bagi Hasil Pajak tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp51.685.229.733,11 dan terealisasi sebesar Rp51.072.828.700,00 atau 98,82%, sedangkan tahun 2023 terealisasi sebesar Rp63.044.686.182,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp11.971.857.482,00.

2) Pendapatan Transfer Provinsi Lainnya

Pendapatan Transfer Provinsi Lainnya tahun 2024 tidak dianggarkan, sedangkan tahun 2023 terealisasi sebesar Rp35.531.158.000,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp35.531.158.000,00.

3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Yang Sah merupakan pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp4.310.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp4.054.330.174,00 atau sebesar 94,07%, sedangkan tahun 2023 terealisasi sebesar Rp10.767.131.119,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp6.712.800.945,00. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah tahun 2024 terdiri dari :

a. Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah tahun 2024 tidak dianggarkan, sedangkan tahun 2023 terealisasi Rp452.000.000,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp452.000.000,00 .

b. Pendapatan Lainnya

Pendapatan Lainnya merupakan Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Pendapatan Klaim FKTP Non BLUD. Pendapatan Lainnya tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp4.310.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp4.054.330.174,00 atau sebesar 94,07%, sedangkan tahun 2023 terealisasi sebesar Rp10.315.131.119,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp6.260.800.945,00.

### 3.2

#### **Belanja**

Jumlah Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp1.080.116.362.306,00 dan terealisasi sebesar Rp974.249.760.516,87 atau sebesar 90,20%, sedangkan tahun 2023 Belanja Daerah terealisasi sebesar Rp1.019.712.330.093,42 atau mengalami penurunan sebesar Rp45.462.569.576,55. Rincian Belanja Daerah tahun 2024 sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp827.112.140.756,00 dan terealisasi Rp746.410.478.657,23 atau sebesar 90,24%, sedangkan tahun 2023 terealisasi sebesar Rp739.131.258.388,49 atau mengalami kenaikan sebesar Rp7.279.220.268,74. Belanja Operasi terdiri dari:



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp426.183.197.744,00 dan terealisasi Rp412.676.783.361,00 atau sebesar 96,83%, sedangkan untuk tahun 2023 terealisasi sebesar Rp349.617.465.878,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp63.059.317.483,00.

b. Belanja Barang

Belanja Barang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp344.222.671.372,00 dan terealisasi sebesar Rp283.275.145.984,23 atau sebesar 82,29%, sedangkan untuk tahun 2023 terealisasi sebesar Rp340.820.573.704,49 atau mengalami penurunan sebesar Rp57.545.427.720,26.

c. Belanja Hibah

Belanja Hibah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp50.579.011.640,00 dan terealisasi sebesar Rp45.025.644.850,00 atau sebesar 89,02%, sedangkan untuk tahun 2023 terealisasi sebesar Rp45.044.038.570,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp18.393.720,00.

d. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp6.127.260.000,00 dan terealisasi sebesar Rp5.463.594.462,00 atau 89,17%, sedangkan untuk tahun 2023 terealisasi sebesar Rp3.649.180.236,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp1.814.414.226,00.

2. Belanja Modal

Belanja Modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp131.477.791.830,00 terealisasi sebesar Rp107.059.382.139,64 atau sebesar 81,43%, sedangkan untuk tahun 2023 Belanja Modal terealisasi sebesar Rp162.934.017.467,93 atau mengalami penurunan sebesar Rp55.874.635.328,29. Belanja Modal terdiri dari:

a) Belanja Tanah

Belanja Tanah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp700.000.000,00 namun tidak terealisasi, sedangkan untuk tahun 2023 tidak terealisasi.

b) Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Peralatan dan Mesin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp22.443.143.417,00 dan terealisasi sebesar Rp20.170.550.842,00 atau sebesar 89,87%, sedangkan untuk tahun 2023 terealisasi sebesar Rp31.054.707.102,86 atau mengalami penurunan sebesar Rp10.884.156.260,86.

c) Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja Gedung dan Bangunan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp35.058.178.921,00 dan terealisasi sebesar Rp32.599.542.695,00 atau sebesar 92,99%,



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

sedangkan untuk tahun 2023 terealisasi sebesar Rp61.751.185.849,07 atau mengalami penurunan sebesar Rp29.151.643.154,07.

d) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp66.807.113.161,00 dan terealisasi sebesar Rp48.440.286.471,64 atau 72,51%, sedangkan untuk tahun 2023 terealisasi sebesar Rp65.901.977.241,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp17.461.690.769,36.

e) Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja Aset Tetap Lainnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp6.469.356.331,00 dan terealisasi sebesar Rp5.849.002.131,00 atau 90,41%, sedangkan untuk tahun 2023 terealisasi sebesar Rp4.226.147.275,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp1.622.854.856,00.

f) Belanja Aset Lainnya

Belanja Aset Lainnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 tidak dianggarkan.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp774.220.000,00 namun tidak terealisasi, sedangkan untuk tahun 2023 juga tidak terdapat realisasi.

### 3.3 Transfer

Transfer dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp120.752.209.720,00 dan terealisasi sebesar Rp120.749.209.720,00 atau sebesar 100,00%, sedangkan untuk tahun 2023 terealisasi sebesar Rp117.647.054.237,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp3.102.155.483,00.

#### 3.3.1 Bagi Hasil Ke Desa

Bagi Hasil Ke Desa merupakan Bagi Hasil yang diberikan kepada Desa atas Pendapatan objek Pajak dan Retribusi yang terdapat pada Desa. Bagi Hasil Ke Desa tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp4.183.439.920,00 dan terealisasi sebesar Rp4.183.439.920,00 atau sebesar 100,00% sedangkan tahun 2023 terealisasi sebesar Rp3.728.428.749,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp455.011.171,00. Bagi Hasil Ke Desa terdiri dari :

1. Bagi Hasil Pajak

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp3.331.739.920,00 dan terealisasi sebesar Rp3.331.739.920,00 atau sebesar 100,00%, sedangkan untuk tahun 2023 terealisasi sebesar Rp2.915.678.750,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp416.061.170,00.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

2. Bagi Hasil Retribusi

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp851.700.000,00 dan terealisasi sebesar Rp851.700.000,00 atau sebesar 100,00%, sedangkan untuk tahun 2023 terealisasi sebesar Rp812.749.999,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp38.950.001,00.

**3.3.2 Transfer Kepada Desa**

Transfer Kepada Desa merupakan Transfer Pemerintah Daerah ke Pemerintah Desa. Tahun 2024 Transfer Kepada Desa dianggarkan sebesar Rp116.568.769.800,00 dan terealisasi sebesar Rp116.565.769.800,00 atau sebesar 100,00% sedangkan tahun 2023 Transfer Kepada Desa terealisasi sebesar Rp113.918.625.488,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp2.647.144.312,00.

**3.3.3 Transfer Antar Daerah**

Transfer Antar Daerah merupakan Transfer Pemerintah Daerah ke Pemerintah Daerah Lainnya. Tahun 2024 Transfer Antar Daerah tidak dianggarkan.

**3.4 Pembiayaan**

**3.4.1 Penerimaan Pembiayaan**

Pada Tahun Anggaran 2024 Penerimaan Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp56.662.972.013,70 dan terealisasi sebesar Rp56.592.472.013,70 atau sebesar 99,88%, sedangkan untuk tahun 2023 terealisasi sebesar Rp107.198.601.770,71 atau mengalami penurunan sebesar Rp50.606.129.757,01. Penurunan ini disebabkan karena terjadinya penurunan Silpa tahun berjalan dibandingkan tahun sebelumnya.

Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:

a. Penggunaan SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya

Pada tahun 2024 Penggunaan SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya dianggarkan sebesar Rp56.562.972.013,70 dan terealisasi sebesar Rp56.562.972.013,70 atau 100,00%, sedangkan untuk tahun 2023 terealisasi sebesar Rp107.191.801.770,71 atau mengalami penurunan sebesar Rp50.628.829.757,01.

b. Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah

Pada tahun 2024 Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp29.500.000,00 atau sebesar 29,50%, sedangkan untuk tahun 2023 terealisasi sebesar Rp6.800.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp22.700.000,00. Penerimaan kembali pinjaman daerah merupakan pengembalian pokok pinjaman perkuatan modal.

**3.4.2 Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran pembiayaan Tahun 2024 tidak dianggarkan.

Berdasarkan perhitungan antara surplus/defisit pendapatan dan belanja dengan pembiayaan netto maka didapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2024 sebesar Rp13.692.447.501,91 sedangkan untuk tahun 2023 Sisa Lebih



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp56.562.972.013,70 atau mengalami penurunan sebesar Rp42.870.524.511,79.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

## BAB 4

### KEBIJAKAN AKUNTANSI

#### 4.1

#### **Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat merupakan organisasi yang mandiri dan menjadi pusat pertanggungjawaban yang harus bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat dengan susunan sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah Tipe A;
2. Sekretariat DPRD Tipe C;
3. Inspektorat Daerah Tipe B;
4. Dinas Daerah Kabupaten Bangka Barat sebanyak 16 dinas, terdiri dari :
  - a. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
  - b. Dinas Kesehatan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan umum dan penataan ruang dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
  - d. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - e. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan urusan pemerintahan sub kebakaran;
  - f. Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang sebelumnya Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan dan urusan pemerintahan, bidang perumahan dan kawasan permukiman;
  - g. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan urusan pemerintahan bidang pertanian;
  - h. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang sebelumnya adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

- i. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang karsipan;
  - j. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
  - k. Dinas Perikanan yang sebelumnya adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
  - l. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - m. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik;
  - n. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - o. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
  - p. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan yang sebelumnya Dinas Koperasi ,Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Tipe B yang menyelenggarakan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan urusan pemerintahan bidang Perdagangan;
  - q. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja;
5. Badan Daerah sebanyak 6 badan, terdiri dari:
    - a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
    - b. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
    - c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
    - d. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang sebelumnya adalah Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penelitian dan pengembangan;
    - e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan sub urusan bidang bencana;



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

- f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan urusan bidang Politik.
6. Kecamatan sebanyak 6 kecamatan, terdiri dari:
  - a. Kecamatan Mentok dengan Tipe A;
  - b. Kecamatan Parittiga dengan Tipe A;
  - c. Kecamatan Kelapa dengan Tipe A;
  - d. Kecamatan Simpang Teritip dengan Tipe A;
  - e. Kecamatan Jebus dengan Tipe A; dan
  - f. Kecamatan Tempilang dengan Tipe A.

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat memiliki 1 (satu) Rumah Sakit Umum yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason yang telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah pada tahun 2015 dan 4 (empat) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yaitu Puskesmas Mentok, Puskesmas Kelapa, Puskesmas Tempilang dan Puskesmas Sekar Biru yang telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah pada tahun 2024.

Masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan entitas akuntansi. OPD bertanggung jawab terhadap anggaran yang ada pada OPD tersebut termasuk dalam pencatatan akuntansinya. Bentuk pertanggungjawaban OPD disusun dalam Laporan Keuangan OPD yang harus dilaporkan dan disampaikan secara rutin kepada fungsi Bendahara Umum Daerah/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ataupun Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam hal ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat terdiri dari 60 (enam puluh) Desa dan 6 (enam) Kelurahan. Desa merupakan bentuk Pemerintahan tersendiri yang pengelolaan keuangannya terpisah dari Pemerintah Kabupaten Bangka Barat walaupun sumber Keuangan Desa sebagian besar bersumber dari dana transfer Pemerintah Kabupaten ke Desa. Sedangkan Kelurahan merupakan entitas yang pencatatan akuntansinya tergabung dalam entitas akuntansi Kecamatan.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan instansi lainnya yang pencatatan akuntansinya tergabung ke OPD yang menaunginya, yaitu:

1. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Dikpora)  
Dikpora memiliki 6 (enam) Koordinator Pendidikan Wilayah di enam kecamatan. Selain itu, Dikpora juga memiliki 38 (tiga puluh delapan) SMP, 136 (seratus tiga puluh enam) SD, dan 41 (empat puluh satu) TK.
2. Dinas Kesehatan  
Dinas Kesehatan memiliki 1 (satu) Rumah Sakit Umum, 8 (delapan) Puskesmas dan 19 (sembilan belas) Puskesmas Pembantu.
3. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah memiliki 3 (tiga) UPT di tiga kecamatan (Jebus, Kelapa, Mentok) dan 3 (tiga) Unit Layanan (UL) yaitu Parittiga, Tempilang, Simpang Teritip.

4. Dinas Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki 2 (dua) UPT yaitu UPT Balai Benih Ikan di Kecamatan Kelapa dan UPT Pasar Pendaratan Ikan di Kecamatan Mentok.

5. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki 1 (satu) UPT yaitu UPTD PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak).

6. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Dinas Pertanian dan Pangan memiliki 2 (dua) UPT Balai Penyuluh di dua kecamatan.

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat memiliki 2 (dua) Badan Usaha Milik Daerah yaitu :

1. PDAM Tirta Sejiran Setason

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sejiran Setason didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 16 Tahun 2011 tentang PDAM Tirta Sejiran Setason. Susunan Direksi PDAM Tirta Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 sebagai berikut :

Direktur	Najamuddin, SH
Kabag. Administrasi, Keuangan dan Umum	Fatra Jaya
Kabag. Teknik	Agus Vinus

Sedangkan susunan Badan Pengawas PDAM Tirta Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat terdiri dari:

Badan Pengawas	Ir. Suharli
----------------	-------------

2. PD Bangka Barat Sejahtera

PD Bangka Barat Sejahtera didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah dan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 32.A Tahun 2011 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bangka Barat Sejahtera. Pada Tahun 2024 Bupati Bangka Barat menetapkan Surat Keputusan Nomor : 188.45/258/SETDAIII/2024 tanggal 7 Oktober 2024 tentang Pembentukan Satuan Tugas Persiapan Pembubaran Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah Bangka Barat Sejahtera Kabupaten Bangka Barat.

Sebagai entitas pelaporan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Barat menyajikan Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### **4.2**

#### **Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan Pendapatan-LO, Beban, aset, kewajiban, dan ekuitas.

##### **1. Pendapatan-LRA.**

Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada kas daerah. Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

##### **2. Pendapatan-LO**

Pendapatan-LO diakui saat timbulnya hak pemerintah Kabupaten Bangka Barat tanpa melihat pendapatan tersebut diterima di kas daerah. Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

##### **3. Belanja**

Belanja adalah semua pengeluaran Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas.

##### **4. Beban**

Beban diakui saat timbulnya kewajiban Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tanpa melihat pengeluaran kas dari kas daerah. Akuntansi Beban dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

##### **5. Transfer**

Transfer adalah semua pengeluaran Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah. Transfer diakui pada saat terjadi pengeluaran kas.

##### **6. Pembiayaan**

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

##### **7. Kas dan Setara Kas**

Kas merupakan uang tunai dan saldo di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah yang sangat likuid serta bebas



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

dari resiko perubahan nilai yang signifikan. Setara Kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang sangat signifikan.

**8. Piutang**

Piutang merupakan hak Pemerintah untuk menerima pembayaran dari Entitas lain termasuk Wajib pajak atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah

**9. Persediaan**

Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

**10. Investasi**

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, deviden, royalty atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

**11. Aset dan Penyusutan**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan aset non lancar. Suatu aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar. Aset diakui (1) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Bangka barat dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, dan (2) pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

**12. Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan yang mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya atau pembangunannya belum selesai sampai pada tahun anggaran.

**13. Dana Cadangan**

Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif besar dan tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

**14. Aset Lainnya**

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

15. Properti Investasi

Properti Investasi merupakan properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh Masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
- dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

16. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.

17. Ekuitas Dana

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

18. Koreksi Kesalahan

Koreksi Kesalahan merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

19. Prinsip-prinsip penyusunan laporan keuangan konsolidasi

Prinsip-prinsip penyusunan laporan keuangan konsolidasi merupakan acuan konsolidasi laporan keuangan. Konsolidasi laporan keuangan daerah merupakan penggabungan dua laporan keuangan entitas pelaporan yaitu laporan keuangan Pemerintah Daerah dan laporan keuangan BLUD.

**4.3**

**Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tahun 2024 salah satunya mencakup seluruh transaksi keuangan yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bangka Barat yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Rincian APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Pos Anggaran	APBD Perubahan 2024 (Rp)	APBD 2024 (Rp)
1	Pendapatan	1.023.453.390.292,30	897.422.732.000,00
2	Belanja dan Transfer	1.080.116.362.306,00	1.095.265.737.993,00
3	Penerimaan Pembiayaan	56.662.972.013,70	197.843.005.993,00
4	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00

Pada Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 telah mengakomodir anggaran Badan Layanan Umum Daerah RSUD Sejiran Setason, Dana Desa dan Dana Bantuan Operasional Sekolah yang bersumber dari APBN, baik pendapatan maupun belanja.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

Kebijakan basis pengukuran atau penyusunan pos-pos laporan keuangan daerah seperti aset, kewajiban, dan ekuitas, dinilai sesuai nilai perolehan historis, yaitu aset dicatat/diukur sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat/diukur sebesar nilai nominal dan ekuitas dicatat/diukur sebesar selisih antara aset dengan kewajiban.

Aset tetap dinilai berdasarkan harga perolehan pada buku inventaris bidang aset yang merupakan rekap dari daftar inventaris OPD. Harga perolehan memasukkan biaya-biaya lain seperti honorarium panitia, ATK, biaya perjalanan dinas serta biaya-biaya lainnya untuk memperoleh aset tetap tersebut.

**4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan**

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat telah menyusun Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 59 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Properti Investasi. Kebijakan akuntansi yang telah diterapkan, secara umum telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pada penyusunan laporan keuangan daerah tahun 2024 ini, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

**4.5 Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat merupakan konsolidasi Laporan Keuangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah. Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah yang dikonsolidasikan adalah laba/rugi operasional yang mempengaruhi penyertaan modal pemerintah daerah. Laba/rugi operasional dimaksud adalah untuk BUMD yang penilaian penyertaan modalnya menggunakan metode ekuitas. Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Sedangkan untuk laporan keuangan BLUD, khusus untuk laporan arus kas tidak dikonsolidasikan dengan laporan keuangan pemerintah daerah.

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam menyusun laporan keuangan tahun 2024 menggunakan aplikasi SIPD Kementerian Dalam Negeri dan SIMDA BMD Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

## BAB 5

### PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

#### **5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

##### **5.1.1 Pendapatan-LRA**

###### **5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LRA**

Pendapatan Asli Daerah-LRA merupakan pendapatan yang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Anggaran Pendapatan Asli Daerah-LRA Kabupaten Bangka Barat tahun 2024 sebesar Rp95.825.769.123,19 dengan realisasi sebesar Rp86.390.002.146,08 atau sebesar 90,15%.

###### **5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LRA**

Pendapatan Pajak Daerah-LRA merupakan pendapatan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang berasal dari pajak yang dipungut dari wajib pajak berdasarkan subjek dan objek pajak. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah merupakan organisasi perangkat daerah yang mengelola pajak daerah. Pendapatan Pajak-LRA diakui dengan basis kas, dengan artian bahwa Pendapatan Pajak-LRA merupakan pendapatan pajak yang telah diterima di Kas Daerah pada tahun pelaporan, baik pendapatan pajak atas penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) tahun pelaporan dan pendapatan pajak dari pelunasan piutang pajak.

Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dapat merealisasikan penerimaan daerah melalui pajak daerah sebesar Rp32.340.169.274,00 dan berkontribusi sebesar 37,40% dari total Pendapatan Asli Daerah. Dari 11 (sebelas) sumber pajak daerah, kontribusi tertinggi terdapat pada pajak penerangan jalan yaitu sebesar Rp16.891.086.694,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak daerah di tahun 2023, realisasi penerimaan pajak di Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp5.834.159.801,00 atau 22,01%. Kenaikan penerimaan pajak daerah di Tahun 2024 dikarenakan meningkatnya penggunaan layanan penerangan listrik dan meningkatnya transaksi perolehan hak atas tanah dan bangunan di Kabupaten Bangka Barat.

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Nomor Referensi	Jenis Pajak	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/penurunan (Rp)	% Kenaikan/penurunan
1.1.1.1.1	Pajak Hotel	110.000.000,00	82.905.733,00	164.261.141,00	(81.355.408,00)	49,53
1.1.1.1.2	Pajak Restoran	1.560.000.000,00	2.630.742.684,00	2.642.093.271,00	(11.350.587,00)	0,43
1.1.1.1.3	Pajak Hiburan	70.000.000,00	25.950.000,00	30.239.325,00	(4.289.325,00)	14,18
1.1.1.1.4	Pajak Reklame	400.000.000,00	348.034.599,00	294.189.774,00	53.844.825,00	18,30



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

Nomor Referensi	Jenis Pajak	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/penurunan (Rp)	% Kenaikan/penurunan
1.1.1.1.5	Pajak Penerangan Jalan	18.000.000.000,00	16.891.086.694,00	14.463.924.454,00	2.427.162.240,00	16,78
1.1.1.1.6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.500.000.000,00	767.687.438,00	807.064.162,00	(39.376.724,00)	4,88
1.1.1.1.7	Pajak Parkir	10.000.000,00	9.600.000,00	5.388.400,00	4.211.600,00	78,16
1.1.1.1.8	Pajak Air Tanah	100.000.000,00	117.110.200,00	109.316.975,00	7.793.225,00	7,13
1.1.1.1.9	Pajak Sarang Burung Walet	500.000.000,00	270.829.025,00	318.079.700,00	(47.250.675,00)	14,85
1.1.1.1.10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	6.500.000.000,00	5.979.623.241,00	5.062.837.371,00	916.785.870,00	18,11
1.1.1.1.11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	5.500.000.000,00	5.216.599.660,00	2.608.614.900,00	2.607.984.760,00	99,98
	<b>Total</b>	<b>34.250.000.000,00</b>	<b>32.340.169.274,00</b>	<b>26.506.009.473,00</b>	<b>5.834.159.801,00</b>	<b>22,01</b>

#### **1. Pajak Hotel**

Pajak Hotel tahun 2024 terealisasi sebesar Rp82.905.733,00 sedangkan tahun 2023 terealisasi sebesar Rp164.261.141,00 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp81.355.408,00 atau sebesar 49,53%. Pendapatan Pajak Hotel di tahun 2024 mengalami penurunan di bandingkan tahun 2023, hal ini dikarenakan tahun 2024 pengguna jasa hotel di Kabupaten Bangka Barat menurun dibandingkan dengan tahun 2023.

#### **2. Pajak Restoran**

Pajak Restoran tahun 2024 terealisasi sebesar Rp2.630.742.684,00 sedangkan tahun 2023 terealisasi sebesar Rp2.642.093.271,00 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp11.350.587,00 atau sebesar 0,43%.

#### **3. Pajak Hiburan**

Pajak Hiburan tahun 2024 terealisasi sebesar Rp25.950.000,00 sedangkan tahun 2023 terealisasi sebesar Rp30.239.325,00 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp4.289.325,00 atau sebesar 14,18%. Penurunan ini dikarenakan menurunnya aktivitas hiburan seperti pasar malam, pameran dan balapan.

#### **4. Pajak Reklame**

Pajak Reklame tahun 2024 terealisasi sebesar Rp348.034.599,00 sedangkan tahun 2023 terealisasi sebesar Rp294.189.774,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp53.844.825,00 atau sebesar 18,30%. Hal ini dikarenakan kenaikan pemasangan reklame oleh wajib pajak di Kabupaten Bangka Barat.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

**5. Pajak Penerangan Jalan**

Pajak Penerangan Jalan tahun 2024 terealisasi sebesar Rp16.891.086.694,00 sedangkan tahun 2023 terealisasi sebesar Rp14.463.924.454,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp2.427.162.240,00 atau sebesar 16,78%. Kenaikan ini dikarenakan bertambahnya pelanggan baru PLN yang menjadi sumber penghasilan baru yang dikenakan pajak.

**6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun 2024 terealisasi sebesar Rp767.687.438,00 sedangkan tahun 2023 terealisasi sebesar Rp807.064.162,00 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp39.376.724,00 atau sebesar 4,88%. Penurunan ini dikarenakan menurunnya pengerjaan konstruksi fisik di Kabupaten Bangka Barat.

**7. Pajak Parkir**

Pajak Parkir tahun 2024 terealisasi sebesar Rp9.600.000,00 sedangkan tahun 2023 terealisasi sebesar Rp5.388.400,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp4.211.600,00 atau sebesar 78,16%. Kenaikan ini dikarenakan meningkatnya penggunaan jasa parkir oleh masyarakat sehingga berdampak pada meningkatnya penerimaan pajak parkir.

**8. Pajak Air Tanah**

Pajak Air Tanah tahun 2024 terealisasi sebesar Rp117.110.200,00 sedangkan tahun 2023 terealisasi sebesar Rp109.316.975,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp7.793.225,00 atau sebesar 7,13%. Kenaikan ini dikarenakan meningkatnya jumlah wajib pajak Air Tanah.

**9. Pajak Sarang Burung Walet**

Pajak Sarang Burung Walet tahun 2024 terealisasi sebesar Rp270.829.025,00 sedangkan tahun 2023 terealisasi sebesar Rp318.079.700,00 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp47.250.675,00 atau sebesar 14,85%. Penurunan dari penerimaan Pajak Sarang Burung Walet dikarenakan menurunnya hasil panen sarang burung walet.

**10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan**

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2024 terealisasi sebesar Rp5.979.623.241,00 sedangkan tahun 2023 terealisasi sebesar Rp5.062.837.371,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp916.785.870,00 atau sebesar 18,11%. Kenaikan dari Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dikarenakan bertambahnya wajib pajak dan meningkatnya kesadaran dari wajib pajak untuk membayar pajak.

**11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan**

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan tahun 2024 terealisasi sebesar Rp5.216.599.660,00 sedangkan tahun 2023 terealisasi sebesar Rp2.608.614.900,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp2.607.984.760,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

atau sebesar 99,98%. Kenaikan ini dikarenakan meningkatnya transaksi perolehan atas hak tanah dan bangunan.

#### **5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah-LRA**

Pendapatan Retribusi Daerah-LRA merupakan pendapatan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Berikut adalah jenis retribusi dan organisasi perangkat daerah yang mengelola retribusi:

Jenis Retribusi	OPD
Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan
Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan Paritiga, Kecamatan Jebus,Kecamatan Kelapa
Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	
Pengujian Kendaraan Bermotor	
Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	
Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	
Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	
Retribusi Pelayanan Pasar	
Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	
Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	
Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	Dinas Perikanan
Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan	Dinas Perikanan
Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Retribusi Kios	
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	
Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	

Pendapatan Retribusi-LRA diakui dengan basis kas, dengan artian bahwa Pendapatan Retribusi-LRA merupakan pendapatan retribusi yang telah diterima di Kas Daerah pada tahun pelaporan, baik pendapatan retribusi atas penerbitan Surat



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) tahun pelaporan dan pendapatan retribusi dari pelunasan piutang retribusi.

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Nomor Referensi	Jenis Retribusi	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	% Kenaikan /Penurunan
1.1.1.2.1	Pelayanan Kesehatan	10.372.842.481,19	10.195.506.836,68	3.280.462.700,00	6.915.044.136,68	210,79
1.1.1.2.2	Pelayanan Persampahan	1.172.000.000,00	792.953.000,00	733.847.000,00	59.106.000,00	8,05
1.1.1.2.3	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	100.000.000,00	84.422.000,00	104.873.000,00	(20.451.000,00)	19,50
1.1.1.2.4	Pelayanan Pasar	401.210.400,00	428.117.238,00	307.208.200,00	120.909.038,00	39,36
1.1.1.2.5	Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	99.128.700,00	(99.128.700,00)	100,00
1.1.1.2.6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	120.000.000,00	22.763.500,00	26.536.000,00	(3.772.500,00)	14,22
1.1.1.2.7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	0,00	297.240.000,00	(297.240.000,00)	100,00
1.1.1.2.8	Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	522.995.627,00	(522.995.627,00)	100,00
1.1.1.2.9	Pemakaian Kekayaan Daerah	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.10	Pasar Grosir/Pertokoan	78.112.000,00	109.927.750,00	229.084.396,00	(119.156.646,00)	52,01
1.1.1.2.11	Tempat Pelelangan	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.12	Retribusi Terminal-Fasilitas Lainnya di Terminal	127.172.800,00	69.024.800,00	92.512.000,00	(23.487.200,00)	25,39
1.1.1.2.13	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	675.707.000,00	711.362.000,00	1.044.938.000,00	(333.576.000,00)	31,92
1.1.1.2.14	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	50.000.000,00	11.700.000,00	34.088.000,00	(22.388.000,00)	65,68
1.1.1.2.15	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	322.000.000,00	322.226.000,00	647.633.000,00	(325.407.000,00)	50,25
1.1.1.2.16	Penjualan Produksi Usaha Daerah	25.000.000,00	0,00	7.900.000,00	(7.900.000,00)	100,00
1.1.1.2.17	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	454.904.000,00	453.701.250,00	0,00	453.701.250,00	0,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

Nomor Referensi	Jenis Retribusi	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	% Kenaikan /Penurunan
1.1.1.2.18	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	874.293.000,00	470.437.000,00	0,00	470.437.000,00	0,00
1.1.1.2.19	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	188.000.000,00	180.760.000,00	0,00	180.760.000,00	0,00
1.1.1.2.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	0,00	78.500.000,00	0,00	78.500.000,00	0,00
1.1.1.2.21	Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	352.823.895,00	(352.823.895,00)	100,00
1.1.1.2.22	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	356.000.000,00	1.044.145.440,00	0,00	1.044.145.440,00	0,00
1.1.1.2.23	IMTA	15.000.000,00	57.150.000,00	0,00	57.150.000,00	0,00
	<b>Total</b>	<b>15.457.241.681,19</b>	<b>15.032.696.814,68</b>	<b>7.781.270.518,00</b>	<b>7.585.002.296,68</b>	<b>93,19</b>

Tahun 2024 realisasi pendapatan retribusi daerah sebesar Rp15.032.696.814,68 dan berkontribusi sebesar 17,40% dari total PAD. Dari sumber-sumber retribusi daerah, kontribusi tertinggi terdapat pada Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp10.195.506.836,68. Pada umumnya capaian retribusi daerah Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2024 meningkat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

### 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan

Retribusi Pelayanan Kesehatan tahun 2024 terealisasi sebesar Rp10.195.506.836,68 sedangkan tahun 2023 terealisasi sebesar Rp3.280.462.700,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp6.915.044.136,68 atau sebesar 210,79%. Kenaikan ini dikarenakan adanya program *Universal Health Coverage* (UHC) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sehingga masyarakat di Kabupaten Bangka Barat telah memiliki jaminan kesehatan yang menjadi dasar perhitungan dana kapitasi yang diterima oleh FKTP. Program UHC ini hanya bisa digunakan oleh masyarakat yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Bangka Barat. Terdapat realisasi pendapatan BLUD pada Puskesmas Mentok, Puskesmas Tempilang, Puskesmas Kelapa dan Puskesmas Sekar Biru Triwulan IV yang disajikan pada Retribusi Pelayanan Kesehatan.

### 2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan tahun 2024 terealisasi sebesar Rp792.953.000,00 sedangkan tahun 2023 terealisasi sebesar Rp733.847.000,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp59.106.000,00 atau sebesar 8,05%. Kenaikan ini dikarenakan bertambahnya wajib retribusi persampahan yang menggunakan jasa retribusi persampahan/kebersihan.

### 3. Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum tahun 2024 terealisasi sebesar Rp84.422.000,00 sedangkan tahun 2023 terealisasi sebesar



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

Rp104.873.000,00 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp20.451.000,00 atau sebesar 19,50%.

**4. Retribusi Pelayanan Pasar**

Retribusi Pelayanan Pasar tahun 2024 terealisasi sebesar Rp428.117.238,00 sedangkan tahun 2023 terealisasi sebesar Rp307.208.200,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp120.909.038,00 atau sebesar 39,36%.

**5. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tahun 2024 tidak terealisasi sedangkan tahun 2023 terealisasi sebesar Rp99.128.700,00 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp99.128.700,00 atau sebesar 100,00%. Penurunan dari penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor disebabkan karena Pemerintah Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2024 tidak melaksanakan pungutan atas Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

**6. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus**

Retribusi Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus pada tahun 2024 terealisasi Rp22.763.500,00, sedangkan tahun 2023 terealisasi sebesar Rp26.536.000,00 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp3.772.500,00 atau sebesar 14,22%. Penurunan ini disebabkan menurunnya jumlah penggunaan penyedotan kakus di Kabupaten Bangka Barat.

**7. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang**

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang tahun 2024 tidak terealisasi sedangkan tahun 2023 terealisasi sebesar Rp297.240.000,00 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp297.240.000,00 atau sebesar 100,00%.

**8. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi**

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tahun 2024 tidak terealisasi sedangkan tahun 2023 terealisasi sebesar Rp522.995.627,00 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp522.995.627,00 atau sebesar 100,00%.

**9. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tahun 2024 dan 2023 tidak terealisasi dikarenakan tidak adanya penyewaan alat berat oleh masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

**10. Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan**

Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan tahun 2024 terealisasi sebesar Rp109.927.750,00 sedangkan tahun 2023 terealisasi sebesar Rp229.084.396,00 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp119.156.646,00 atau sebesar 52,01%. Hal ini dikarenakan menurunnya pembayaran retribusi pasar grosir oleh wajib retribusi.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

**11. Retribusi Tempat Pelelangan**

Tahun 2024 Retribusi Tempat Pelelangan tidak terealisasi.

**12. Retribusi Terminal-Fasilitas Lainnya di Terminal**

Retribusi Terminal-Fasilitas Lainnya di Terminal Umum tahun 2024 terealisasi sebesar Rp69.024.800,00 sedangkan tahun 2023 terealisasi sebesar Rp92.512.000,00 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp23.487.200,00 atau sebesar 25,39%. Penurunan ini disebabkan fasilitas-fasilitas yang berada didalam terminal banyak yang tidak beroperasi.

**13. Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir**

Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir tahun 2024 terealisasi sebesar Rp711.362.000,00 sedangkan tahun 2023 terealisasi sebesar Rp1.044.938.000,00 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp333.576.000,00 atau sebesar 31,92%. Penurunan ini dikarenakan menurunnya jumlah kendaraan yang masuk ke wilayah pasar.

**14. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila**

Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila merupakan sewa penginapan/bungalow milik Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang berada di lokasi wisata Batu Rakit. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila tahun 2024 terealisasi sebesar Rp11.700.000,00 sedangkan tahun 2023 terealisasi sebesar Rp34.088.000,00 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp22.388.000,00 atau sebesar 65,68%. Penurunan ini dikarenakan adanya penurunan jumlah sewa penginapan di lokasi wisata Batu Rakit.

**15. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga**

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga tahun 2024 terealisasi sebesar Rp322.226.000,00 sedangkan tahun 2023 terealisasi sebesar Rp647.633.000,00 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp325.407.000,00 atau sebesar 50,25%. Hal ini dikarenakan menurunnya jumlah masyarakat yang berkunjung ke tempat rekreasi di Kabupaten Bangka Barat.

**16. Penjualan Produksi Usaha Daerah**

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah tahun 2024 merupakan retribusi penjualan produksi usaha daerah berupa bibit atau benih ikan tidak terealisasi sedangkan tahun 2023 terealisasi sebesar Rp7.900.000,00 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp7.900.000,00 atau sebesar 100,00%. Penurunan ini dikarenakan tidak ada penjualan benih ikan pada BBI di Kecamatan Kelapa.

**17. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya**

Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp453.701.250,00 sedangkan tahun 2023 tidak terealisasi.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

**18. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan**

Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp470.437.000,00 sedangkan tahun 2023 tidak terealisasi.

**19. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga**

Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp180.760.000,00 sedangkan tahun 2023 tidak terealisasi.

**20. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah**

Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada tahun 2024 merupakan atas penggunaan fasilitas aset daerah yang disewa oleh masyarakat terealisasi sebesar Rp78.500.000,00 sedangkan tahun 2023 tidak terealisasi.

**21. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan**

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tahun 2024 tidak terealisasi sedangkan tahun 2023 terealisasi sebesar Rp352.823.895,00 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp352.823.895,00 atau sebesar 100,00%.

**22. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung**

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp1.044.145.440,00 sedangkan tahun 2023 tidak terealisasi.

**23. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing**

Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp57.150.000,00 sedangkan tahun 2023 tidak terealisasi.

Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat melakukan pemungutan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagai pengganti Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang dipungut pada tahun sebelumnya. Perbedaan utama antara Izin Mendirikan Bangunan dan Persetujuan Bangunan Gedung terletak pada fokus dan cakupan perizinannya. Izin Mendirikan Bangunan fokus pada izin sebelum memulai konstruksi, sedangkan Persetujuan Bangunan Gedung lebih luas, mengatur seluruh siklus hidup bangunan, termasuk konstruksi, penggunaan, pemeliharaan, dan pembongkaran.

**5.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA**

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah-LRA yang Dipisahkan merupakan pendapatan berupa dividen atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bangka Barat pada Lembaga Keuangan. Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah sebagai berikut:



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/penurunan (Rp)	% Kenaikan/Penurunan
1.1.1.3	Dividen atas Penyertaan Modal pada Lembaga Keuangan	7.545.000.000,00	5.966.951.097,57	6.844.661.601,09	877.710.503,52	12,82
	<b>Total</b>	<b>7.545.000.000,00</b>	<b>5.966.951.097,57</b>	<b>6.844.661.601,09</b>	<b>877.710.503,52</b>	<b>12,82</b>

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA tahun 2024 terealisasi sebesar Rp5.966.951.097,57 sedangkan tahun 2023 terealisasi sebesar Rp6.844.661.601,09 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp877.710.503,52 atau sebesar 12,82%. Realisasi tersebut merupakan dividen atas penyertaan modal pada PT. BPD Sumatera Selatan Bangka Belitung untuk tahun buku 2023.

Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tidak menerima Dividen dari PT. BPR Syariah Bangka Belitung, hal ini dikarenakan PT. BPR Syariah Bangka Belitung mengalami permasalahan keuangan, sehingga masih dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperbaiki kinerja keuangan dari bank tersebut.

#### **5.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA**

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer.

Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Nomor Referensi	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	% Kenaikan/ Penurunan
1.1.1.4.1	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	700.000.000,00	5.230.500,00	606.364.500,00	(601.134.000,00)	99,14
1.1.1.4.2	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	100.000.000,00	66.010.000,00	92.755.000,00	(26.745.000,00)	28,83
1.1.1.4.3	Jasa Giro pada Kas Daerah	6.500.000.000,00	1.029.774.199,79	848.161.950,04	181.612.249,75	21,41
1.1.1.4.4	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	4.500.000.000,00	404.109.663,00	2.792.589.004,00	(2.388.479.341,00)	85,53
1.1.1.4.5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	500.000.000,00	18.630.474,00	109.401.533,00	(90.771.059,00)	82,97
1.1.1.4.6	Pendapatan Denda Pajak Hotel	50.000.000,00	4.884.773,00	1.408.236,00	3.476.537,00	246,87
1.1.1.4.7	Pendapatan Denda Pajak Restoran	0,00	0,00	7.246.840,00	(7.246.840,00)	100,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

Nomor Referensi	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	% Kenaikan/ Penurunan
1.1.1.4.8	Pendapatan Denda Pajak Reklame	0,00	0,00	10.167.065,00	(10.167.065,00)	100,00
1.1.1.4.9	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	0,00	0,00	1.152.225,00	(1.152.225,00)	100,00
1.1.1.4.10	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	0,00	0,00	1.440.900,00	(1.440.900,00)	100,00
1.1.1.4.11	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	0,00	1.115.200,00	(1.115.200,00)	100,00
1.1.1.4.12	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	40.000.000,00	141.148.067,00	0,00	141.148.067,00	0,00
1.1.1.4.13	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	25.000.000,00	364.140,00	0,00	364.140,00	0,00
1.1.1.4.14	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.15	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.16	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	0,00	10.621.250,00	(10.621.250,00)	100,00
1.1.1.4.17	Pendapatan BLUD	23.442.352.442,00	27.555.808.473,11	23.582.074.721,49	3.973.733.751,62	16,85
1.1.1.4.18	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	171.000.000,00	20.589.614,00	0,00	20.589.614,00	0,00
1.1.1.4.19	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	5.175.000,00	207.054.220,34	0,00	207.054.220,34	0,00
1.1.1.4.20	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	2.500.000.000,00	3.596.580.835,59	2.599.233.393,79	997.347.441,80	38,37
<b>Total</b>		<b>38.573.527.442,00</b>	<b>33.050.184.959,83</b>	<b>30.663.731.818,32</b>	<b>2.397.074.391,51</b>	<b>7,78</b>

Berikut penjelasan terkait kenaikan maupun penurunan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA :



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

**1. Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-LRA**

Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-LRA merupakan penerimaan atas pelelangan dari Barang Milik Daerah. Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin tahun 2024 terealisasi sebesar Rp5.230.500,00 sedangkan pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp606.364.500,00 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp601.134.000,00 atau sebesar 99,14%. Penurunan ini dikarenakan menurunnya jumlah pelelangan kendaraan di Kabupaten Bangka Barat.

**2. Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD-LRA**

Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD-LRA merupakan pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya. Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD tahun 2024 terealisasi sebesar Rp66.010.000,00 sedangkan tahun 2023 terealisasi sebesar Rp92.755.000,00 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp26.745.000,00 atau sebesar 28,83%. Penurunan ini dikarenakan berkurangnya jumlah Pemanfaatan BMD di Kabupaten Bangka Barat.

**3. Jasa Giro pada Kas Daerah-LRA**

Jasa Giro pada Kas Daerah -LRA merupakan penerimaan jasa giro rekening kas daerah dan penerimaan jasa giro rekening bendahara pengeluaran Organisasi Perangkat Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Penerimaan Jasa Giro-LRA tahun 2024 terealisasi sebesar Rp1.029.774.199,79 sedangkan di tahun 2023 terealisasi sebesar Rp848.161.950,04 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp181.612.249,75 atau sebesar 21,41%. Kenaikan ini dikarenakan bertambahnya dana yang terdapat pada Giro Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

**4. Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LRA**

Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LRA merupakan Penerimaan Bunga Deposito atas penempatan dana Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam bentuk deposito di BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Penerimaan Bunga Deposito tahun 2024 terealisasi sebesar Rp404.109.663,00 sedangkan di tahun 2023 terealisasi sebesar Rp2.792.589.004,00 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp2.388.479.341,00 atau sebesar 85,53%. Penurunan ini dikarenakan menurunnya penempatan Deposito yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

**5. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LRA**

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LRA merupakan pendapatan atas keterlambatan penyelesaian paket pekerjaan fisik berdasarkan kontrak yang telah disepakati. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan tahun 2024 terealisasi sebesar Rp18.630.474,00 sedangkan tahun 2023 terealisasi sebesar Rp109.401.533,00 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp90.771.059,00 atau sebesar 82,97%. Penurunan ini



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

dikarenakan menurunnya pekerjaan fisik di Kabupaten Bangka Barat yang mengalami keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan.

**6. Pendapatan Denda Pajak Hotel-LRA**

Pendapatan Denda Pajak Hotel-LRA merupakan pendapatan atas keterlambatan pembayaran pajak hotel. Pendapatan Denda Pajak Hotel tahun 2024 terealisasi sebesar Rp4.884.773,00 sedangkan di tahun 2023 terealisasi sebesar Rp1.408.236,00, sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp3.476.537,00 atau sebesar 246,87%. Kenaikan ini dikarenakan keterlambatan penyetoran pajak hotel di Kabupaten Bangka Barat.

**7. Pendapatan Denda Pajak Restoran-LRA**

Pendapatan Denda Pajak Restoran-LRA merupakan pendapatan atas keterlambatan pembayaran pajak restoran. Pendapatan Denda Pajak Restoran tahun 2024 tidak terealisasi sedangkan di tahun 2023 terealisasi sebesar Rp7.246.840,00.

**8. Pendapatan Denda Pajak Reklame-LRA**

Pendapatan Denda Pajak Reklame-LRA merupakan pendapatan atas keterlambatan pembayaran pajak reklame. Pendapatan Denda Pajak Reklame tahun 2024 tidak terealisasi sedangkan di tahun 2023 terealisasi sebesar Rp10.167.065,00.

**9. Pendapatan Denda Pajak Air Tanah-LRA**

Pendapatan Denda Pajak Air Tanah-LRA merupakan pendapatan atas keterlambatan pembayaran pajak air tanah. Pendapatan Denda Pajak Air Tanah tahun 2024 tidak terealisasi sedangkan di tahun 2023 terealisasi sebesar Rp1.152.225,00.

**10. Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet-LRA**

Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet-LRA merupakan pendapatan atas keterlambatan pembayaran pajak sarang burung walet. Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet tahun 2024 tidak terealisasi sedangkan di tahun 2023 terealisasi sebesar Rp1.440.900,00.

**11. Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LRA**

Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LRA merupakan pendapatan atas keterlambatan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan. Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun 2024 tidak terealisasi sedangkan di tahun 2023 terealisasi sebesar Rp1.115.200,00.

**12. Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)**

Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) merupakan pendapatan atas keterlambatan Pajak Bumi dan Bangunan



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2). Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp141.148.067,00 sedangkan pada tahun 2023 tidak terealisasi.

**13. Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum**

Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum merupakan pendapatan atas keterlambatan Retribusi atas kepentingan umum pada masyarakat. Di Kabupaten Bangka Barat Denda Retribusi Jasa Umum adalah keterlambatan Retribusi atas Pelayanan Persampahan/ Kebersihan. Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum pada tahun 2024 terealisasi Rp364.140,00 sedangkan pada tahun 2023 tidak terealisasi.

**14. Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha**

Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha merupakan denda keterlambatan atas pungutan daerah atas layanan yang diberikan pemerintah daerah dengan prinsip komersial. Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha pada tahun 2024 tidak terealisasi.

**15. Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu**

Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu merupakan denda keterlambatan pungutan yang dibayarkan kepada pemerintah daerah atas pemberian izin tertentu. Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu pada tahun 2024 tidak terealisasi.

**16. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LRA**

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LRA merupakan pendapatan atas kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan tahun sebelumnya. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan tahun 2024 tidak terealisasi sedangkan tahun 2023 terealisasi sebesar Rp10.621.250,00 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp10.621.250,00 atau sebesar 100,00%. Penurunan ini dikarenakan Bendahara Pengeluaran lebih teliti dalam menghitung pembayaran gaji ASN di Kabupaten Bangka Barat dibandingkan tahun sebelumnya.

**17. Pendapatan BLUD-LRA**

Pendapatan BLUD-LRA merupakan Pendapatan yang bersumber dari Jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, APBD dan Lain-lain pendapatan BLUD yang sah. Pendapatan BLUD tahun 2024 terealisasi sebesar Rp27.555.808.473,11 sedangkan tahun 2023 terealisasi sebesar Rp23.582.074.721,49 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp3.973.733.751,62 atau sebesar 16,85%. Kenaikan ini dikarenakan adanya perubahan status 4 (empat) FKTP Puskesmas yang sebelumnya Non BLUD menjadi BLUD.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

**18. Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain**

Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain merupakan Pendapatan BLUD dari hasil kerjasama antara pihak Badan Umum Milik Negara dan swasta. Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp20.589.614,00 sedangkan pada tahun 2023 tidak terealisasi.

**19. Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah**

Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah merupakan pendapatan pendapatan selain hibah, kerja sama, dan penerimaan tunai/non tunai. Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp207.054.220,34 sedangkan pada tahun 2023 tidak terealisasi.

**20. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah – LRA**

Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah – LRA merupakan pendapatan daerah yang dikarenakan pelanggaran terhadap peraturan daerah yang telah ditetapkan, pendapatan atas pengembalian belanja tahun sebelumnya, pendapatan atas pengembalian kekurangan volume dan pendapatan yang tidak diklasifikasikan pada jenis pendapatan sebagaimana telah disebutkan di atas. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah tahun 2024 terealisasi sebesar Rp3.596.580.835,59 dan pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp2.599.233.393,79 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp997.347.441,80 atau sebesar 38,37%. Kenaikan ini dikarenakan adanya pembayaran kekurangan volume pekerjaan tahun sebelumnya.

Dari Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebesar Rp3.596.580.835,59 terdapat pendapatan yang tidak dapat ditelusuri sumber penerimaannya sebesar Rp283.636.289,00

**5.1.1.2 Pendapatan Transfer-LRA**

Pendapatan Transfer-LRA adalah Pendapatan Transfer yang berasal dari entitas lain, seperti Pemerintah Pusat atau daerah otonom lain.

**5.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LRA**

Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LRA merupakan penerimaan Daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu Daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat dan Daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar-Daerah. Ketiga komponen Dana Perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh.

Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LRA tahun 2024 adalah sebagai berikut :



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ penurunan (Rp)	%
<b>1.1.2.1.1 Bagi Hasil Pajak</b>						
1.1.2.1.1.1	Pajak Bumi dan Bangunan	37.209.452.000,00	22.764.703.000,00	26.903.306.418,00	(4.138.603.418,00)	15,38
1.1.2.1.1.2	Pajak Penghasilan Orang Pribadi/PPh 21 s.d. 29	19.601.311.268,00	9.363.095.000,00	7.727.031.859,00	15.037.671.141,00	194,61
	<i>Sub total</i>	<b>56.810.763.268,00</b>	<b>32.127.798.000,00</b>	<b>34.630.338.277,00</b>	<b>(2.502.540.277,00)</b>	<b>7,23</b>
<b>1.1.2.1.2 Bagi Hasil Sumber Daya Alam</b>						
1.1.2.1.2.1	Bagi Hasil Sumber Daya Hutan	9.097.010.000,00	9.103.037.000,00	10.311.024.803,00	(1.207.987.803,00)	11,72
1.1.2.1.2.2	Bagi Hasil Pungutan Hasil Perikanan	2.459.932.000,00	2.459.932.000,00	2.984.826.211,00	(524.894.211,00)	17,59
1.1.2.1.2.3	Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi	944.288.227,00	721.155.000,00	1.072.747.922,00	(351.592.922,00)	32,77
1.1.2.1.2.6	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	133.919.921.226,00	94.874.667.000,00	79.047.227.700,00	15.827.439.300,00	20,02
1.1.2.1.2.8	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	3.506.808.715,00	3.126.409.000,00	0	3.126.409.000,00	100,00
1.1.2.1.2.11	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	6.027.000,00	0	0	0	100,00
	<i>Sub Total</i>	<b>149.933.987.168,00</b>	<b>110.285.200.000,00</b>	<b>93.415.826.636,00</b>	<b>16.869.373.364,00</b>	<b>18,06</b>
1.1.2.1.3	<b>Dana Alokasi Umum</b>	<b>477.599.585.000,00</b>	<b>468.444.230.163,00</b>	<b>434.631.148.780,00</b>	<b>33.813.081.383,00</b>	<b>7,78</b>
1.1.2.1.4	<b>Dana Alokasi Khusus</b>	<b>125.186.059.000,00</b>	<b>116.873.349.822,00</b>	<b>143.869.048.932,00</b>	<b>(26.995.699.110,00)</b>	<b>18,76</b>
	<b>Total</b>	<b>809.530.394.436,00</b>	<b>727.730.577.985,00</b>	<b>706.546.362.625,00</b>	<b>21.184.215.360,00</b>	<b>3,00</b>

Tahun 2024 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan-LRA Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dianggarkan sebesar Rp809.530.394.436,00 dan terealisasi sebesar Rp727.730.577.985,00 sedangkan tahun 2023 terealisasi sebesar Rp706.546.362.625,00 sehingga terdapat Kenaikan sebesar Rp21.184.215.360,00 atau sebesar 3,00%. Kenaikan ini dikarenakan meningkatnya alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

### 1. Dana Bagi Hasil Pajak

Transfer Pemerintah Pusat pada pendapatan Bagi Hasil Pajak merupakan bagian dari transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan yang berupa bagi hasil dari PBB, Pajak Penghasilan Pasal 21. Pada Tahun 2024 Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dianggarkan sebesar Rp56.810.763.268,00 dan terealisasi sebesar Rp32.127.798.000,00 sedangkan tahun 2023 terealisasi sebesar Rp34.630.338.277,00, sehingga terdapat penurunan sebesar Rp2.502.540.277,00 atau sebesar 7,23%.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

## **2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam**

Pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak / SDA adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan SDA Kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi dan Pertambangan umum. Pada Tahun 2024 pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber daya alam Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dianggarkan sebesar Rp149.933.987.168,00 dan terealisasi sebesar Rp110.285.200.000,00 sedangkan tahun 2023 terealisasi sebesar Rp93.415.826.636,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp16.869.373.364,00 atau sebesar 18,06%. Kenaikan ini dikarenakan meningkatnya transfer Bagi Hasil Sumber Daya Alam dari Pemerintah Pusat yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat.

## **3. Dana Alokasi Umum**

Dana Alokasi Umum merupakan jenis transfer dari Pemerintah Pusat yang dialokasikan kepada pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dalam rangka pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pada Tahun 2024 Dana Alokasi Umum Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dianggarkan sebesar Rp477.599.585.000,00 dan terealisasi sebesar Rp468.444.230.163,00 sedangkan tahun 2023 terealisasi sebesar Rp434.631.148.780,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp33.813.081.383,00 atau sebesar 7,78%.

## **4. Dana Alokasi Khusus**

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pada Tahun 2024 Dana Alokasi Khusus Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dianggarkan sebesar Rp125.186.059.000,00 dan terealisasi sebesar Rp116.873.349.822,00 sedangkan tahun 2023 terealisasi sebesar Rp143.869.048.932,00 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp26.995.699.110,00 atau sebesar 18,76%. Kenaikan ini dikarenakan meningkatnya alokasi Transfer Dana Alokasi Khusus yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

Rincian anggaran dan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) per jenis tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik</b>			
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	499.788.000,00	465.325.000,00	93,1
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	3.874.716.000,00	3.218.470.500,00	83,06
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	3.525.344.000,00	3.310.641.630,00	89,86



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	13.069.390.000,00	12.668.492.335,00	96,93
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	1.199.970.000,00	1.170.723.000,00	97,56
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan Stunting	1.610.274.000,00	1.548.422.800,00	96,16
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	4.837.000.000,00	4.817.000.000,00	99,59
<b>Sub Total</b>	<b>28.616.482.000,00</b>	<b>27.199.075.265,00</b>	<b>95,05</b>
<b>Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik</b>			
DAK Non Fisik-BOS Reguler	31.815.060.000,00	31.794.947.051,00	99,94
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.928.560.000,00	1.877.500.000,00	97,35
DAK Non Fisik-TPG PNSD	38.726.614.000,00	38.726.614.000,00	100
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.873.788.000,00	1.873.788.000,00	100
DAK Non Fisik-BOP PAUD	3.811.140.000,00	3.794.400.000,00	99,56
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	871.980.000,00	778.900.000,00	89,33
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	2.764.966.000,00	2.525.292.650,00	91,33
DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	381.631.000,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan	1.123.000.000,00	849.972.000,00	75,69
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	409.605.000,00	302.964.000,00	73,96
DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	342.000.000,00	200.535.374,00	58,64
DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	1.719.002.000,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-PK2UMK	593.798.000,00	568.140.376,00	95,68
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	75.000.000,00	75.000.000,00	100
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	90.000.000,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	3.549.980.000,00	2.274.460.214,00	64,07



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	6.493.453.000,00	4.031.760.892,00	62,09
<b>Sub Total</b>	<b>96.569.577.000,00</b>	<b>89.674.274.557,00</b>	<b>92,86</b>

#### 5.1.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRA

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRA merupakan penerimaan Dana Penyesuaian berupa Dana Desa dan Dana Insentif Daerah. Pada tahun 2024 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRA Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dianggarkan sebesar Rp62.101.997.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 62.101.997.000,00,00 atau sebesar 100,00% sedangkan tahun 2023 terealisasi sebesar Rp81.391.689.000,00 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp19.289.692.000,00. Penurunan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRA dikarenakan Kabupaten Bangka Barat tidak menerima Dana Insentif Daerah dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1.1.2.2.1.2.1	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	26.956.967.000,00	(26.956.967.000,00)	100,00
1.1.2.2.1.2.2	Dana Desa	54.949.231.000,00	54.949.231.000,00	54.434.722.000,00	514.509.000,00	0,95
1.1.2.2.1.2.3	Insentif Fiskal	7.152.766.000,00	7.152.766.000,00	0,00	7.152.766.000,00	3,99
	<b>Total</b>	<b>62.101.997.000,00</b>	<b>62.101.997.000,00</b>	<b>81.391.689.000,00</b>	<b>(19.289.692.000,00)</b>	<b>23,70</b>

#### 5.1.1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi-LRA

Transfer Pemerintah Provinsi-LRA merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Pendapatan Transfer Provinsi Lainnya yang diterima pemerintah kabupaten dari pemerintah provinsi. Transfer Pemerintah Provinsi tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp51.685.229.733,11 dan terealisasi sebesar Rp51.072.828.700,00,00 atau sebesar 98,82%.

Rincian realisasi Transfer Pemerintah Provinsi tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi

No	Periode	Pajak Kendaraan Bermotor (Rp)	Bea balik nama kend. Bermotor (Rp)	Pajak Air Permukaan (Rp)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Rp)	Pajak Rokok (Rp)	Nomor Surat Keputusan Gubernur	Tanggal
1	Triwulan IV Tahun 2023	0,00	1.448.310.955,00	143.476.676,00	5.968.543.899,00	0,00	188.44/21/BAKUDA/2023	15 Maret 2024
2	Triwulan IV Tahun 2023	2.357.227.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.44/21/BAKUDA/2023	20 Maret 2024
3	Triwulan I Tahun 2024	2.191.352.567,00	1.369.798.321,00	83.308.269,00	0,00	0,00	188.44/31/BAKUDA/2023	21 Juni 2023



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

No	Periode	Pajak Kendaraan Bermotor (Rp)	Bea balik nama kend. Bermotor (Rp)	Pajak Air Permukaan (Rp)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Rp)	Pajak Rokok (Rp)	Nomor Surat Keputusan Gubernur	Tanggal
4	Masa Desember 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761.851.663,00	188.44/32/BAKUDA/2023	17 Mei 2024
5	Triwulan I Tahun 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2.764.127.298,00	188.44/32/BAKUDA/2023	17 Mei 2024
6	Triwulan I Tahun 2024	0,00	0,00	0,00	6.243.588.209,00	0,00	188.44/35/BAKUDA/2023	27 Mei 2024
7	Triwulan II Tahun 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2.402.896.192,00	188.44/45/BAKUDA/2023	01 Agustus 2024
8	Triwulan II Tahun 2024	2.151.541.498,00	1.348.957.206,00	82.134.790,00	5.651.076.959,00	0,00	188.44/49/BAKUDA/2023	10 Oktober 2024
9	Triwulan III Tahun 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2.771.427.120,00	188.44/64/BAKUDA/2023	30 Oktober 2024
10	Triwulan III Tahun 2024	2.347.846.809,00	1.061.567.074,00	90.590.251,00	0,00	0,00	188.44/72/BAKUDA/2023	04 Desember 2024
11	Triwulan III Tahun 2024	0,00	0,00	0,00	5.834.930.694,00	0,00	188.44/73/BAKUDA/2023	04 Desember 2024
12	Over target Tahun 2023	0,00	167.244.653	362.569.63	1.422.785.287	0,00	188.44/69/BAKUDA/2023	26 November 2024
13	Over target Tahun 2023	1.371.988.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.44/69/BAKUDA/2023	03 Desember 2024
Total		10.419.956.221,00	5.395.878.209,00	435.766.949,00	25.120.925.048,00	9.700.302.273,00		

### 5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA

Lain-lain Pendapatan yang Sah-LRA merupakan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat dan Pendapatan Lainnya berupa Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Lain-lain Pendapatan yang Sah-LRA tahun 2024 Kabupaten Bangka Barat dianggarkan sebesar Rp4.310.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp4.054.330.174,00 atau sebesar 94,07%.

Rincian anggaran dan realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.1.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2	Pendapatan Lainnya	4.310.000.000,00	4.054.330.174,00	94,07
Total		4.310.000.000,00	4.054.330.174,00	94,07

### 5.1.2 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun berjalan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah. Pada Tahun 2024 Belanja-LRA Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat dianggarkan sebesar Rp959.364.152.586,00 dan terealisasi sebesar Rp853.500.550.796,87 atau sebesar 88,97%. Rincian Anggaran dan Realisasi belanja per Organisasi Perangkat Daerah tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	284.750.411.240,00	277.037.026.625,00	97,29



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Kesehatan	213.545.172.867,00	190.413.196.905,98	89,17
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100.627.710.800,00	74.836.460.799,89	74,37
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan	1.038.384.472,00	1.038.384.472,00	100,00
Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	18.931.808.746,00	16.391.915.235,00	86,58
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	10.859.621.000,00	10.156.421.302,00	93,52
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.684.782.500,00	4.369.091.574,00	93,26
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	10.203.739.500,00	9.315.375.394,00	91,29
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	16.549.148.760,00	14.719.537.398,00	88,94
Dinas Lingkungan Hidup	15.626.302.010,00	14.914.580.066,00	95,45
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.862.442.020,00	5.386.313.878,00	91,88
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10.668.668.300,00	9.732.992.927,00	91,23
Dinas Komunikasi dan Informatika	8.967.798.000,00	6.914.387.231,00	77,1
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	948.874.658,00	948.841.967,00	100,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	7.336.731.838,00	6.400.733.391,00	87,24
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	824.510.129,00	821.880.129,00	99,68
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.049.922.608,00	4.175.531.061,00	82,69
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	7.195.867.837,00	6.037.656.275,00	83,9
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	14.410.198.500,00	12.975.677.717,00	90,05
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.764.723.614,00	5.364.440.496,00	93,06
Dinas Kelautan dan Perikanan	525.543.121,00	524.588.121,00	99,82
Dinas Perikanan	3.786.328.257,00	3.252.763.649,00	85,91
Sekretariat Daerah	40.583.368.550,00	36.406.572.348,00	89,71
Sekretariat DPRD	72.726.777.186,00	53.402.968.287,00	73,43
Kecamatan Muntok	11.586.960.000,00	10.059.405.348,00	86,82
Kecamatan Simpang Teritip	2.930.057.000,00	2.708.249.584,00	92,43
Kecamatan Jebus	4.294.750.800,00	3.894.971.527,00	90,69
Kecamatan Kelapa	5.358.679.300,00	4.814.666.687,00	89,85
Kecamatan Tempilang	3.083.465.000,00	2.825.289.570,00	91,63
Kecamatan Parittiga	3.461.530.000,00	3.238.353.275,00	93,55
Inspektorat Kabupaten	7.017.699.000,00	6.626.047.230,00	94,42



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	699.072.260,00	699.072.038,00	100,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	5.684.350.163,00	5.018.299.353,00	88,28
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	7.905.518.350,00	6.145.296.798,00	77,73
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	7.998.521.800,00	6.443.975.964,00	80,56
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	7.458.170.500,00	6.432.903.482,00	86,25
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	30.416.541.900,00	29.056.682.692,00	95,53
<b>Total</b>	<b>959.364.152.586,00</b>	<b>853.500.550.796,87</b>	<b>88,97</b>

### 5.1.2.1 Belanja Operasi

Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi adalah sebagai berikut :

Kode Rek.	Uraian	Anggaran		Realisasi 2024		Realisasi 2023		Kenaikan/ (Rp)	% Kenaikan/ Penurunan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)		
1.2.1.1	Belanja Pegawai	426.183.197.744,00	412.676.783.361,00	349.617.465.878,00	63.059.317.483,00			18,04	
1.2.1.2	Belanja Barang	344.222.671.372,00	283.275.145.984,23	340.820.573.704,49	(57.545.427.720,26)			16,88	
1.2.1.3	Belanja Hibah	50.579.011.640,00	45.025.644.850,00	45.044.038.570,00	(18.393.720,00)			0,04	
1.2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	6.127.260.000,00	5.463.594.462,00	3.649.180.236,00	1.814.414.226,00			49,72	
	<b>Total</b>	<b>827.112.140.756,00</b>	<b>746.441.168.657,23</b>	<b>739.131.258.388,49</b>	<b>7.309.910.268,74</b>			<b>0,99</b>	

Tahun 2024 Belanja Operasi Kabupaten Bangka Barat dianggarkan sebesar Rp827.112.140.756,00 dan terealisasi sebesar Rp746.441.168.657,23, sedangkan tahun 2023 terealisasi sebesar Rp739.131.258.388,49 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp7.309.910.268,74 atau sebesar 0,99%. Kenaikan ini dikarenakan meningkatnya realisasi dari Belanja Pegawai dan Belanja Bantuan Sosial.

#### 5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai, Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil, Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH, Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah dan Belanja Pegawai BOS. Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp426.183.197.744,00 dan terealisasi sebesar Rp412.676.783.361,00 atau sebesar 96,83% sedangkan di tahun 2023 terealisasi sebesar Rp349.617.465.878,00,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp63.059.317.483,00 atau sebesar 18,04%.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

Rincian Objek anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Gaji Pokok ASN	173.798.892.610,00	172.012.618.410,00	98,97
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	16.819.413.289,00	16.364.273.501,00	97,29
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	4.453.057.744,00	3.989.246.400,00	89,58
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	16.956.873.266,00	16.430.094.000,00	96,89
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	1.153.606.500,00	920.910.000,00	79,83
Belanja Tunjangan Beras ASN	10.120.115.279,00	9.811.820.788,00	96,95
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.017.700.897,00	711.715.569,00	69,93
Belanja Pembulatan Gaji ASN	11.475.872,00	2.532.865,00	22,07
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	12.800.673.600,00	11.917.474.661,00	93,10
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	497.571.335,00	355.223.856,00	71,39
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.212.117.358,00	1.068.930.737,00	88,19
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	600.110.708,00	0,00	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	36.461.156.288,00	35.022.712.100,00	96,05
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	22.928.325.256,00	21.700.419.100,00	94,64
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	6.470.000.000,00	6.447.409.401,00	99,65
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	54.505.032.100,00	52.818.659.000,00	96,91
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	724.595.625,00	259.275.000,00	35,78
Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	299.934.979,00	52.035.625,00	17,35
Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	42.641.784.960,00	42.589.358.700,00	99,88
Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.986.250.500,00	1.855.250.000,00	93,40
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	729.998.028,00	630.269.187,00	86,34
Belanja Honorarium	6.130.000,00	5.380.000,00	87,77
Belanja Uang Representasi DPRD	909.930.000,00	584.430.000,00	64,23
Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	94.050.600,00	60.272.100,00	64,08
Belanja Tunjangan Beras DPRD	147.736.800,00	69.378.360,00	46,96
Belanja Uang Paket DPRD	99.550.500,00	50.421.000,00	50,65
Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.179.937.500,00	847.423.500,00	71,82
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	106.057.350,00	61.387.200,00	57,88
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	110.350.800,00	14.890.050,00	13,49
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.402.600.000,00	3.307.500.000,00	97,21
Belanja Tunjangan Reses DPRD	882.000.000,00	567.000.000,00	64,29
Belanja Pembebaran PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	2.800.000,00	109.161,00	3,90
Belanja Pembulatan Gaji DPRD	70.000,00	0,00	0,00
Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.522.340.000,00	2.460.340.074,00	97,54
Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.806.000.000,00	4.703.020.000,00	97,86



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	239.925.000,00	230.160.000,00	95,93
Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	64.500.000,00	54.600.000,00	84,65
Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	9.800.000,00	2.940.000,00	30,00
Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	99.000.000,00	98.280.000,00	99,27
Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	10.500.000,00	2.607.120,00	24,83
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	5.000.000,00	2.058.250,00	41,17
Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	200.000,00	1.680,00	0,84
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	7.000.000,00	5.342.400,00	76,32
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	2.000.000,00	112.320,00	5,62
Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	2.000.000,00	336.960,00	16,85
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	220.500.000,00	73.461.250,00	33,32
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	76.653.000,00	0,00	0,00
Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	184.800.000,00	91,67
Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	373.300.000,00	93,33
Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00
Belanja Pegawai BLUD	4.386.280.000,00	3.957.003.036,00	90,21
<b>Total</b>	<b>426.183.197.744,00</b>	<b>412.676.783.361,00</b>	<b>96,83</b>

Rincian Belanja Pegawai tahun 2024 per OPD adalah sebagai berikut :

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	202.508.761.000,00	201.822.823.673,00	99,66
Dinas Kesehatan	93.464.966.283,00	92.757.662.509,00	99,24
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.646.932.812,00	4.421.916.438,00	95,16
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan	595.319.218,00	595.319.218,00	100,00
Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	3.198.905.000,00	2.736.190.119,00	85,54
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	4.288.600.000,00	3.939.171.190,00	91,85
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.231.000.000,00	2.045.232.662,00	91,67
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	3.584.845.864,00	3.134.578.896,00	87,44
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	11.772.417.700,00	11.521.641.636,00	97,87
Dinas Lingkungan Hidup	3.547.180.000,00	3.190.607.329,00	89,95



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.261.200.000,00	2.907.278.101,00	89,15
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.122.900.000,00	2.981.237.225,00	95,46
Dinas Komunikasi dan Informatika	3.294.000.000,00	2.635.162.181,00	80,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	661.708.367,00	661.675.676,00	100,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	2.558.719.639,00	2.495.321.122,00	97,52
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	615.577.172,00	615.577.172,00	100,00
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.511.580.320,00	2.005.487.752,00	79,85
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	908.796.837,00	844.645.973,00	92,94
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.382.100.000,00	3.197.528.001,00	94,54
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.017.980.214,00	2.801.569.847,00	92,83
Dinas Kelautan dan Perikanan	402.649.378,00	402.649.378,00	100,00
Dinas Perikanan	2.006.800.000,00	1.592.533.227,00	79,36
Sekretariat Daerah	11.589.800.000,00	10.866.780.310,00	93,76
Sekretariat DPRD	17.643.622.892,00	15.734.413.283,00	89,18
Kecamatan Mentok	4.525.500.000,00	4.169.835.028,00	92,14
Kecamatan Simpang Teritip	1.975.400.000,00	1.753.726.874,00	88,78
Kecamatan Jebus	3.125.360.000,00	2.733.562.727,00	87,46
Kecamatan Kelapa	3.020.000.000,00	2.661.112.195,00	88,12
Kecamatan Tempilang	2.185.900.000,00	1.929.975.190,00	88,29
Kecamatan Parittiga	2.014.700.000,00	1.840.678.087,00	91,36
Inspektorat Kabupaten	4.916.000.000,00	4.601.887.300,00	93,61
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	548.968.173,00	548.968.173,00	100,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	3.359.300.000,00	2.830.882.459,00	84,27
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.894.300.000,00	3.683.194.410,00	94,58
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	4.375.106.875,00	3.852.099.795,00	88,05
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	4.336.800.000,00	3.757.060.146,00	86,63
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.089.500.000,00	2.406.798.059,00	77,90



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>Total</b>	<b>426.183.197.744,00</b>	<b>412.676.783.361,00</b>	<b>96,83</b>

#### **5.1.2.1.2 Belanja Barang**

Akun Belanja Barang merupakan belanja operasional yang terdiri dari belanja persediaan, belanja jasa, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas. Belanja Barang Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp344.222.671.372,00 dan terealisasi sebesar Rp283.275.145.984,23 atau sebesar 82,29%.

Rincian Belanja Barang per Objek Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Barang Pakai Habis	48.256.632.004,00	38.921.641.223,00	80,66
Belanja Barang Tak Habis Pakai	55.440.000,00	36.000.000,00	64,94
Belanja Jasa Kantor	110.487.936.723,00	100.629.237.349,00	91,08
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	36.722.484.716,00	24.606.519.260,00	67,01
Belanja Sewa Tanah	166.500.000,00	162.450.000,00	97,57
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.957.623.000,00	1.380.682.250,00	70,53
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.330.793.860,00	983.348.403,00	73,89
Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	0	0
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.285.863.985,00	2.026.206.195,25	47,28
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.345.265.000,00	829.720.000,00	61,68
Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	24.000.000,00	6.523.427,00	27,18
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.432.167.000,00	780.642.000,00	54,51
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	428.293.125,00	99.388.750,00	23,21
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	74.292.892,00	28.908.300,00	38,91
Belanja Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00	0
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.269.751.183,00	1.750.163.657,00	77,11
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.467.749.399,00	1.949.226.750,00	78,99
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.189.322.700,00	5.502.363.639,00	88,9
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	18.200.000,00	18.200.000,00	100
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	59.505.771.630,00	43.520.637.934,00	73,14
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	90.900.000,00	88.315.508,00	97,16



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	843.190.000,00	674.624.196,00	80,01
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.114.081.091,00	3.907.341.445,00	63,91
Belanja Barang dan Jasa BOS	24.014.599.880,00	23.950.145.434,00	99,73
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	5.276.132.584,00	4.351.176.373,00	82,47
Belanja Barang dan Jasa BLUD	30.865.680.600,00	27.071.683.890,98	87,71
<b>Total</b>	<b>344.222.671.372,00</b>	<b>283.275.145.984,23</b>	<b>82,29</b>

#### 5.1.2.1.3 Belanja Hibah

Belanja hibah merupakan belanja berupa uang yang diberikan kepada penerima hibah, baik individu, kelompok masyarakat maupun instansi pemerintah. Anggaran Belanja Hibah tahun 2024 sebesar Rp50.579.011.640,00 dan terealisasi sebesar Rp45.025.644.850,00 atau 89,02%.

Rincian Belanja Hibah per Objek Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00
Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	7.611.130.000,00	4.562.003.000,00	59,94
Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	20.039.164.900,00	19.879.124.920,00	99,20
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.097.600.000,00	2.096.465.400,00	99,95
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	7.379.369.750,00	5.327.781.280,00	72,20
Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	3.734.920.000,00	3.683.274.000,00	98,62
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.520.426.250,00	1.520.426.250,00	100,00
Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	3.391.280.740,00	3.295.780.000,00	97,18
Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	805.120.000,00	660.790.000,00	82,07
<b>Total</b>	<b>50.579.011.640,00</b>	<b>45.025.644.850,00</b>	<b>89,02</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

#### **5.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial**

Belanja Bantuan Sosial merupakan belanja bantuan berupa uang dan/atau barang yang diberikan kepada organisasi kemasyarakatan, kelompok masyarakat maupun perorangan baik bantuan sosial yang tidak terencana maupun bantuan sosial terencana. Tahun 2024, Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dianggarkan sebesar Rp6.127.260.000,00 dan terealisasi sebesar Rp5.463.594.462,00 atau 89,17%.

Rincian Belanja Bantuan Sosial per Objek tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	4.540.240.000,00	4.381.940.000,00	96,51
Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	1.079.520.000,00	867.154.462,00	80,33
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	214.500.000,00	214.500.000,00	100,00
Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	3.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	290.000.000,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>6.127.260.000,00</b>	<b>5.463.594.462,00</b>	<b>89,17</b>

#### **5.1.2.2 Belanja Modal**

Belanja Modal merupakan belanja investasi atau belanja yang menambah aset pemerintah daerah. Tahun 2024, anggaran Belanja Modal adalah sebesar Rp131.477.791.830,00 dan terealisasi sebesar Rp107.059.382.139,64 atau 81,43%.

Rincian Belanja Modal per Objek tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Kode Rek	Jenis Belanja Modal	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.2.2.1	Belanja Modal Tanah	700.000.000,00	0,00	0,00
1.2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	22.443.143.417,00	20.170.550.842,00	89,87
1.2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	35.058.178.921,00	32.599.542.695,00	92,99
1.2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	66.807.113.161,00	48.440.286.471,64	72,51
1.2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	6.469.356.331,00	5.849.002.131,00	90,41
<b>Total</b>		<b>131.477.791.830,00</b>	<b>107.059.382.139,64</b>	<b>81,43</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

Uraian Belanja Modal Tahun 2024 per OPD adalah sebagai berikut :

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	16.560.184.820,00	13.761.828.850,00	83,1
Dinas Kesehatan	13.963.489.409,00	12.805.054.053,00	91,7
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	74.949.411.688,00	57.731.496.411,64	77,03
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan	0,00	0,00	0,00
Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	6.803.340.000,00	5.386.361.500,00	79,17
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	157.400.000,00	152.579.968,00	96,94
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	224.600.000,00	220.880.000,00	98,34
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	105.200.000,00	104.000.000,00	98,86
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	20.000.000,00	19.900.000,00	99,5
Dinas Lingkungan Hidup	1.482.153.000,00	1.401.850.000,00	94,58
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	164.152.000,00	164.152.000,00	100,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.369.685.000,00	1.322.037.949,00	96,52
Dinas Komunikasi dan Informatika	195.700.000,00	136.792.500,00	69,9
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	0,00	0,00	0,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	18.600.000,00	13.600.000,00	73,12
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	585.390.000,00	560.837.393,00	95,81
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	3.105.750.000,00	2.906.591.560,00	93,59
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.884.378.000,00	2.752.330.665,00	95,42
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	130.400.000,00	130.157.000,00	99,81
Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00
Dinas Perikanan	20.000.000,00	0,00	0,00
Sekretariat Daerah	760.300.000,00	498.421.000,00	65,56
Sekretariat DPRD	6.199.057.913,00	5.636.896.290,00	90,93
Kecamatan Muntok	855.280.000,00	489.640.000,00	57,25
Kecamatan Simpang Teritip	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Kecamatan Jebus	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
Kecamatan Kelapa	198.520.000,00	144.175.000,00	72,62
Kecamatan Tempilang	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00
Kecamatan Parittiga	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00
Inspektorat Kabupaten	0,00	0,00	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	0,00	0,00	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	84.000.000,00	84.000.000,00	100,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	65.000.000,00	64.600.000,00	99,38
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	82.800.000,00	80.200.000,00	96,86
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	355.000.000,00	353.000.000,00	99,44
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00
<b>Total</b>	<b>131.477.791.830,00</b>	<b>107.059.382.139,64</b>	<b>81,43</b>

Uraian realisasi jenis belanja modal tahun 2024 per OPD adalah sebagai berikut:

Uraian	Belanja Modal Tanah (Rp)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Rp)	Belanja Modal Gedung dan Bangunan (Rp)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan (Rp)	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya (Rp)
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	0,00	4.682.803.789,00	4.382.703.930,00	0,00	4.696.321.131,00
Dinas Kesehatan	0,00	9.413.037.992,00	2.480.823.801,00	42.142.260,00	869.050.000
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	77.800.000,00	15.933.571.200,00	41.720.125.211,64	0,00
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	0,00	16.800.000,00	460.001.000,00	4.909.560.500,00	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	0,00	152.579.968,00	0,00	0,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	160.300.000,00	60.580.000,00	0,00	0,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	0,00	104.000.000,00	0,00	0,00	0,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

Uraian	Belanja Modal Tanah (Rp)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Rp)	Belanja Modal Gedung dan Bangunan (Rp)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan (Rp)	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya (Rp)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	19.900.000,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	1.401.850.000,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	164.152.000,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	538.067.000,00	783.970.949,00	0,00	0,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	136.792.500,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	0,00	13.600.000,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	560.837.393,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	0,00	608.220.000,00	2.298.371.560,00	0,00	0,00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	0,00	45.000.000,00	1.421.042.065,00	1.286.288.600,00	0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	130.157.000,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sekretariat Daerah	0,00	214.790.000,00	0,00	0,00	283.631.000,00
Sekretariat DPRD	0,00	1.006.813.200,00	4.615.553.190,00	14.529.900,00	0,00
Kecamatan Muntok	0,00	22.000.000,00	0,00	467.640.000,00	0,00
Kecamatan Simpang Teritip	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Jebus	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Kelapa	0,00	20.000.000,00	124.175.000,00	0,00	0,00
Kecamatan Tempilang	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Parittiga	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Inspektorat Kabupaten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

Uraian	Belanja Modal Tanah (Rp)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Rp)	Belanja Modal Gedung dan Bangunan (Rp)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan (Rp)	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya (Rp)
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	0,00	84.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	25.850.000,00	38.750.000,00	0,00	0,00
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	0,00	80.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0,00	353.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>20.170.550.842,00</b>	<b>32.599.542.695,00</b>	<b>48.440.286.471,64</b>	<b>5.849.002.131,00</b>

### 5.1.2.3 Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga dialokasikan dalam APBD dalam upaya penanganan atau penanggulangan akibat dari bencana alam, bencana sosial maupun kejadian yang tidak diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah. Belanja Tak Terduga dianggarkan pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Belanja Tak Terduga Kabupaten Bangka Barat tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp774.220.000,00 namun tidak terealisasi. Hal tersebut disebabkan tidak ada kejadian tidak terduga akibat dari bencana alam, bencana sosial maupun kejadian yang tidak diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah.

Anggaran dan realisasi Belanja Tak Terduga Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Tak Terduga	774.220.000,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>774.220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 5.1.3 Transfer

#### 5.1.3.1 Bagi Hasil ke Desa

Bagi Hasil ke Desa merupakan belanja bagi hasil pajak dan belanja bagi hasil retribusi yang dihitung berdasarkan penerimaan pajak/retribusi di desa. Bagi Hasil ke



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

Desa direalisasikan berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Bangka Barat tahun Anggaran 2024. Tahun 2024 Bagi Hasil ke Desa Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dianggarkan sebesar Rp120.752.209.720,00 dan terealisasi sebesar Rp120.749.209.720,00 atau 100,00%.

Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil ke Desa tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Kode Rek	Jenis Bagi Hasil	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.3.1.1	Bagi Hasil Pajak	3.331.739.920,00	3.331.739.920,00	100,00
1.3.1.2	Bagi Hasil Retribusi	851.700.000,00	851.700.000,00	100,00
	<b>Total</b>	<b>4.183.439.920,00</b>	<b>4.183.439.920,00</b>	<b>100,00</b>

Rincian Realisasi Bagi Hasil ke Desa Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Desa	Kecamatan	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (Rp)
1	Air Putih	Muntok	146.404.640,00
2	Air Belo	Muntok	88.308.580,00
3	Belo Laut	Muntok	203.234.909,00
4	Air Limau	Muntok	65.726.009,00
5	Pelangas	Simpang Teritip	81.077.490,00
6	Kundi	Simpang Teritip	61.147.157,00
7	Mayang	Simpang Teritip	72.529.307,00
8	Peradong	Simpang Teritip	52.776.936,00
9	Air Nyatoh	Simpang Teritip	53.308.150,00
10	Berang	Simpang Teritip	63.210.145,00
11	Rambat	Simpang Teritip	51.974.092,00
12	Simpang Gong	Simpang Teritip	53.384.147,00
13	Simpang Tiga	Simpang Teritip	56.218.055,00
14	Ibul	Simpang Teritip	55.927.074,00
15	Pangek	Simpang Teritip	76.097.110,00
16	Bukit Terak	Simpang Teritip	50.117.648,00
17	Air Menduyung	Simpang Teritip	53.528.108,00
18	Jebus	Jebus	100.326.203,00
19	Sungai Buluh	Jebus	65.676.112,00
20	Tumbak Petar	Jebus	59.161.416,00
21	Limbung	Jebus	53.312.490,00
22	Rukam	Jebus	55.529.832,00
23	Ranggi Asam	Jebus	68.661.147,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

No	Desa	Kecamatan	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (Rp)
24	Ketap	Jebus	58.368.742,00
25	Mislak	Jebus	57.497.465,00
26	Pebuar	Jebus	57.400.651,00
27	Sinar Manik	Jebus	62.662.421,00
28	Air Kuang	Jebus	58.835.143,00
29	Mancung	Kelapa	53.989.464,00
30	Kayu Arang	Kelapa	53.929.837,00
31	Pusuk	Kelapa	58.258.814,00
32	Dendang	Kelapa	61.667.931,00
33	Kacung	Kelapa	64.647.338,00
34	Sinar Sari	Kelapa	51.414.239,00
35	Beruas	Kelapa	52.428.507,00
36	Tebing	Kelapa	56.074.417,00
37	Terentang	Kelapa	62.051.171,00
38	Tuik	Kelapa	51.007.862,00
39	Tugang	Kelapa	54.472.336,00
40	Air Bulin	Kelapa	67.659.193,00
41	Pangkal Beras	Kelapa	54.850.843,00
42	Tempilang	Tempilang	98.191.815,00
43	Tanjung Niur	Tempilang	60.918.209,00
44	Sangku	Tempilang	68.422.430,00
45	Buyan Kelumbi	Tempilang	59.357.279,00
46	Penyampak	Tempilang	58.855.763,00
47	Benteng Kota	Tempilang	80.175.255,00
48	Air Lintang	Tempilang	81.057.559,00
49	Sinar Surya	Tempilang	59.392.703,00
50	Simpang Yul	Tempilang	60.102.319,00
51	Sekar Biru	Parittiga	99.618.523,00
52	Telak	Parittiga	59.786.321,00
53	Cupat	Parittiga	62.291.190,00
54	Bakit	Parittiga	64.344.129,00
55	Puput	Parittiga	222.207.809,00
56	Air Gantang	Parittiga	67.259.312,00
57	Kelabat	Parittiga	54.578.458,00
58	Kapit	Parittiga	75.569.702,00
59	Semulut	Parittiga	63.969.522,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

No	Desa	Kecamatan	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (Rp)
60	Teluk Limau	Parittiga	62.488.491,00
<b>Total</b>			<b>4.183.439.920,00</b>

#### **5.1.3.1 Transfer ke Desa**

Transfer Ke Desa merupakan Transfer Alokasi Dana Desa dan Dana Desa serta Insentif Badan Permusyawaratan Desa yang diberikan kepada Pemerintah Desa. Transfer Ke Desa tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp116.568.769.800,00 dan terealisasi sebesar Rp116.565.769.800,00 atau sebesar 100,00% yang diberikan kepada 60 (enam puluh) desa di Kabupaten Bangka Barat.

Transfer Ke Desa bertujuan untuk menunjang pembiayaan Program dan Kegiatan Pemerintahan Desa, Pembangunan dan meningkatkan kemampuan keuangan desa dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan.

Rincian Transfer Ke Desa tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Alokasi Dana Desa dan Dana Desa	113.652.457.800,00	113.649.457.800,00	100,00
Insentif Badan Permusyawaratan Desa	2.916.312.000,00	2.916.312.000,00	100,00
<b>Total</b>	<b>116.568.769.800,00</b>	<b>116.565.769.800,00</b>	<b>100,00</b>

##### **5.1.3.1.1 Alokasi Dana Desa dan Dana Desa**

Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp113.652.457.800,00 dan terealisasi sebesar Rp113.649.457.800,00 yang diberikan kepada 60 (enam puluh) Desa pada 6 (enam) kecamatan di wilayah Kabupaten Bangka Barat. Penyaluran Alokasi Dana Desa berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024.

Rincian realisasi Alokasi Dana Desa tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Desa	Kecamatan	Realisasi (Rp)
1	Air Putih	Muntok	976.817.729,00
2	Air Belo	Muntok	1.176.287.236,00
3	Belo Laut	Muntok	2.323.924.643,00
4	Air Limau	Muntok	907.429.485,00
5	Pelangas	Simpang Teritip	974.359.228,00
6	Kundi	Simpang Teritip	969.954.755,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

No	Desa	Kecamatan	Realisasi (Rp)
7	Mayang	Simpang Teritip	1.052.683.210,00
8	Peradong	Simpang Teritip	1.024.413.516,00
9	Air Nyatoh	Simpang Teritip	1.182.766.645,00
10	Berang	Simpang Teritip	1.350.912.866,00
11	Rambat	Simpang Teritip	762.768.232,00
12	Simpang Gong	Simpang Teritip	836.974.919,00
13	Simpang Tiga	Simpang Teritip	1.091.219.485,00
14	Ibul	Simpang Teritip	1.114.279.123,00
15	Pangek	Simpang Teritip	931.784.326,00
16	Bukit Terak	Simpang Teritip	830.237.615,00
17	Air Menduyung	Simpang Teritip	1.001.652.929,00
18	Jebus	Jebus	902.818.676,00
19	Sungai Buluh	Jebus	836.204.214,00
20	Tumbak Petar	Jebus	936.380.754,00
21	Limbung	Jebus	803.328.776,00
22	Rukam	Jebus	879.745.483,00
23	Ranggi Asam	Jebus	997.599.051,00
24	Ketap	Jebus	888.267.801,00
25	Mislak	Jebus	889.860.759,00
26	Pebuar	Jebus	774.769.570,00
27	Sinar Manik	Jebus	875.685.691,00
28	Air Kuang	Jebus	845.477.506,00
29	Mancung	Kelapa	851.561.769,00
30	Kayu Arang	Kelapa	867.366.209,00
31	Pusuk	Kelapa	872.822.497,00
32	Dendang	Kelapa	1.242.630.704,00
33	Kacung	Kelapa	978.998.608,00
34	Sinar Sari	Kelapa	816.613.648,00
35	Beruas	Kelapa	857.346.327,00
36	Tebing	Kelapa	807.841.425,00
37	Terentang	Kelapa	948.639.903,00
38	Tuik	Kelapa	765.800.093,00
39	Tugang	Kelapa	982.942.260,00
40	Air Bulin	Kelapa	888.251.573,00
41	Pangkal Beras	Kelapa	949.292.307,00
42	Tempilang	Tempilang	1.036.168.373,00
43	Tanjung Niur	Tempilang	1.159.660.533,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

No	Desa	Kecamatan	Realisasi (Rp)
44	Sangku	Tempilang	940.139.206,00
45	Buyan Kelumbi	Tempilang	890.482.280,00
46	Penyampak	Tempilang	961.072.607,00
47	Benteng Kota	Tempilang	977.118.150,00
48	Air Lintang	Tempilang	1.024.069.343,00
49	Sinar Surya	Tempilang	934.504.676,00
50	Simpang Yul	Tempilang	1.005.678.957,00
51	Sekar Biru	Parittiga	1.031.776.407,00
52	Telak	Parittiga	820.464.544,00
53	Cupat	Parittiga	1.141.460.916,00
54	Bakit	Parittiga	856.203.006,00
55	Puput	Parittiga	1.077.496.498,00
56	Air Gantang	Parittiga	1.115.818.459,00
57	Kelabat	Parittiga	982.211.850,00
58	Kapit	Parittiga	829.436.394,00
59	Semulut	Parittiga	886.766.891,00
60	Teluk Limau	Parittiga	1.060.986.164,00
<b>Total</b>			<b>58.700.226.800,00</b>

Penyaluran Dana Desa didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024.

Rincian Dana Desa tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Desa	Kecamatan	Realisasi (Rp)
1	Air Putih	Muntok	902.642.000,00
2	Air Belo	Muntok	902.447.000,00
3	Belo Laut	Muntok	1.725.666.000,00
4	Air Limau	Muntok	813.387.000,00
5	Pelangas	Simpang Teritip	1.019.950.000,00
6	Kundi	Simpang Teritip	1.193.620.000,00
7	Mayang	Simpang Teritip	955.510.000,00
8	Peradong	Simpang Teritip	940.259.000,00
9	Air Nyatoh	Simpang Teritip	921.695.000,00
10	Berang	Simpang Teritip	875.140.000,00
11	Rambat	Simpang Teritip	756.185.000,00
12	Simpang Gong	Simpang Teritip	706.877.000,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

No	Desa	Kecamatan	Realisasi (Rp)
13	Simpang Tiga	Simpang Teritip	1.120.144.000,00
14	Ibul	Simpang Teritip	958.149.000,00
15	Pangek	Simpang Teritip	775.810.000,00
16	Bukit Terak	Simpang Teritip	1.082.410.000,00
17	Air Menduyung	Simpang Teritip	1.044.615.000,00
18	Jebus	Jebus	867.324.000,00
19	Sungai Buluh	Jebus	786.790.000,00
20	Tumbak Petar	Jebus	785.370.000,00
21	Limbung	Jebus	909.527.000,00
22	Rukam	Jebus	903.046.000,00
23	Ranggi Asam	Jebus	865.858.000,00
24	Ketap	Jebus	879.973.000,00
25	Mislak	Jebus	1.171.287.000,00
26	Pebuar	Jebus	846.779.000,00
27	Sinar Manik	Jebus	1.000.031.000,00
28	Air Kuang	Jebus	904.221.000,00
29	Mancung	Kelapa	727.449.000,00
30	Kayu Arang	Kelapa	779.800.000,00
31	Pusuk	Kelapa	781.002.000,00
32	Dendang	Kelapa	973.694.000,00
33	Kacung	Kelapa	804.578.000,00
34	Sinar Sari	Kelapa	741.733.000,00
35	Beruas	Kelapa	805.207.000,00
36	Tebing	Kelapa	1.096.361.000,00
37	Terentang	Kelapa	839.160.000,00
38	Tuik	Kelapa	745.053.000,00
39	Tugang	Kelapa	1.017.275.000,00
40	Air Bulin	Kelapa	928.319.000,00
41	Pangkal Beras	Kelapa	941.479.000,00
42	Tempilang	Tempilang	883.566.000,00
43	Tanjung Niur	Tempilang	1.020.711.000,00
44	Sangku	Tempilang	810.748.000,00
45	Buyan Kelumbi	Tempilang	837.092.000,00
46	Penyampak	Tempilang	804.600.000,00
47	Benteng Kota	Tempilang	1.123.655.000,00
48	Air Lintang	Tempilang	835.218.000,00
49	Sinar Surya	Tempilang	836.500.000,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

No	Desa	Kecamatan	Realisasi (Rp)
50	Simpang Yul	Tempilang	878.047.000,00
51	Sekar Biru	Parittiga	1.050.758.000,00
52	Telak	Parittiga	769.920.000,00
53	Cupat	Parittiga	890.040.000,00
54	Bakit	Parittiga	785.596.000,00
55	Puput	Parittiga	875.171.000,00
56	Air Gantang	Parittiga	1.002.975.000,00
57	Kelabat	Parittiga	1.262.143.000,00
58	Kapit	Parittiga	765.603.000,00
59	Semulut	Parittiga	803.402.000,00
60	Teluk Limau	Parittiga	917.664.000,00
<b>Total</b>			<b>54.949.231.000,00</b>

#### **5.1.3.1.2 Insentif Badan Permusyawaratan Desa**

Insentif Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp2.916.312.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.916.312.000,00 atau sebesar 100,00%. Penyaluran Insentif Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Bangka Barat tahun 2024 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/25/DINSOSPM/2024 Tanggal 10 Januari 2024 Tentang Penetapan Besaran Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Desa Untuk Dana Tambahan Tunjangan Kedudukan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2024.

Insentif Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Desa	Kecamatan	Realisasi (Rp)
1	Air Putih	Muntok	39.042.000,00
2	Air Belo	Muntok	52.386.000,00
3	Belo Laut	Muntok	65.730.000,00
4	Air Limau	Muntok	39.042.000,00
5	Pelangas	Simpang Teritip	52.386.000,00
6	Kundi	Simpang Teritip	52.386.000,00
7	Mayang	Simpang Teritip	39.042.000,00
8	Peradong	Simpang Teritip	39.042.000,00
9	Air Nyatoh	Simpang Teritip	52.386.000,00
10	Berang	Simpang Teritip	65.730.000,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

No	Desa	Kecamatan	Realisasi (Rp)
11	Rambat	Simpang Teritip	39.042.000,00
12	Simpang Gong	Simpang Teritip	39.042.000,00
13	Simpang Tiga	Simpang Teritip	52.386.000,00
14	Ibul	Simpang Teritip	52.386.000,00
15	Pangek	Simpang Teritip	52.386.000,00
16	Bukit Terak	Simpang Teritip	39.042.000,00
17	Air Menduyung	Simpang Teritip	39.042.000,00
18	Jebus	Jebus	39.042.000,00
19	Sungai Buluh	Jebus	39.042.000,00
20	Tumbak Petar	Jebus	52.386.000,00
21	Limbung	Jebus	39.042.000,00
22	Rukam	Jebus	39.042.000,00
23	Ranggi Asam	Jebus	52.386.000,00
24	Ketap	Jebus	39.042.000,00
25	Mislak	Jebus	39.042.000,00
26	Pebuar	Jebus	39.042.000,00
27	Sinar Manik	Jebus	39.042.000,00
28	Air Kuang	Jebus	39.042.000,00
29	Mancung	Kelapa	39.042.000,00
30	Kayu Arang	Kelapa	39.042.000,00
31	Pusuk	Kelapa	52.386.000,00
32	Dendang	Kelapa	65.730.000,00
33	Kacung	Kelapa	52.386.000,00
34	Sinar Sari	Kelapa	39.042.000,00
35	Beruas	Kelapa	39.042.000,00
36	Tebing	Kelapa	39.042.000,00
37	Terentang	Kelapa	52.386.000,00
38	Tuik	Kelapa	39.042.000,00
39	Tugang	Kelapa	52.386.000,00
40	Air Bulin	Kelapa	39.042.000,00
41	Pangkal Beras	Kelapa	39.042.000,00
42	Tempilang	Tempilang	65.730.000,00
43	Tanjung Niur	Tempilang	65.730.000,00
44	Sangku	Tempilang	52.386.000,00
45	Buyan Kelumbi	Tempilang	39.042.000,00
46	Penyampak	Tempilang	52.386.000,00
47	Benteng Kota	Tempilang	65.730.000,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

No	Desa	Kecamatan	Realisasi (Rp)
48	Air Lintang	Tempilang	65.730.000,00
49	Sinar Surya	Tempilang	52.386.000,00
50	Simpang Yul	Tempilang	52.386.000,00
51	Sekar Biru	Parittiga	65.730.000,00
52	Telak	Parittiga	39.042.000,00
53	Cupat	Parittiga	65.730.000,00
54	Bakit	Parittiga	39.042.000,00
55	Puput	Parittiga	65.730.000,00
56	Air Gantang	Parittiga	65.730.000,00
57	Kelabat	Parittiga	52.386.000,00
58	Kapit	Parittiga	39.042.000,00
59	Semulut	Parittiga	52.386.000,00
60	Teluk Limau	Parittiga	65.730.000,00
<b>Total</b>			<b>2.916.312.000,00</b>

#### 5.1.3.1 Transfer Antar Daerah

Transfer Antar Daerah merupakan Transfer Pemerintah Daerah ke Pemerintah Daerah Lainnya. Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tidak menganggarkan Transfer Antar Daerah.

#### 5.1.4 Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksud untuk menutup selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat meliputi Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

##### 5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Daerah merupakan penerimaan yang berasal dari penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SiLPA) tahun lalu dan penerimaan kembali pinjaman daerah.

Jumlah Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Penerimaan Daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	Kenaikan/ Penurunan
Penggunaan Silpa	56.562.972.013,70	56.562.972.013,70	107.191.801.770,71	(50.628.829.757,01)	47,23
Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	100.000.000,00	29.500.000,00	6.800.000,00	22.700.000,00	333,82
<b>Total</b>	<b>56.662.972.013,70</b>	<b>56.592.472.013,70</b>	<b>107.198.601.770,71</b>	<b>(50.606.129.757,01)</b>	<b>47,21</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Penggunaan Silpa Tahun Sebelumnya dan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah. Realisasi Penggunaan Silpa Tahun Sebelumnya sebesar Rp56.562.972.013,70 terdiri dari Penggunaan Silpa Kas di Kas Daerah sebesar Rp43.463.077.105,89, silpa Dana JKN sebesar Rp206.776.381,00, silpa Dana BLUD sebesar Rp10.292.430.076,81, silpa Dana BOK Rp2.461.692.108,00 dan silpa Kas Lainnya di Sekolah sebesar Rp138.996.342,00. Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah merupakan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada masyarakat berupa pinjaman perkuatan modal UMKM, pinjaman kelompok nelayan dan Koperasi serta penerimaan atas pinjaman kepada Kelompok Kebun Kelapa Sawit Rakyat (KKSR).

**5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran Pembiayaan merupakan pengeluaran yang penggunaannya untuk penyertaan modal Pemerintah Daerah.

Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2024 tidak dianggarkan dikarenakan keterbatasan kemampuan keuangan daerah.

**5.1.4.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)**

Merupakan penjumlahan surplus/defisit dengan selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan (Pembiayaan Neto). Anggaran dan Realisasi SiLPA adalah sebagai berikut :

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pembiayaan Netto	56.662.972.013,70	56.592.472.013,70	99,88
Surplus/(Defisit)	(56.662.972.013,70)	(42.900.024.511,79)	75,71
<b>SiLPA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.692.447.501,91</b>	



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

5.2

### LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan dan penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perubahan saldo anggaran lebih Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tahun 2024 dan tahun 2023 adalah dengan uraian sebagai berikut :

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Saldo Anggaran Lebih Awal (1)	<b>56.562.972.013,70</b>	<b>107.191.801.770,71</b>
Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan(2)	<b>56.562.972.013,70</b>	<b>107.191.801.770,71</b>
<i>Sub Total (3) = (1) – (2)</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) (4)	13.692.447.501,91	56.562.972.013,70
<i>Sub Total (5) = (3) +(4)</i>	<b>13.692.447.501,91</b>	<b>56.562.972.013,70</b>
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya (6)	0,00	0,00
Lain-Lain (7)	0,00	0,00
<i>Saldo Anggaran Lebih Akhir (5) + (6) + (7)</i>	<b>13.692.447.501,91</b>	<b>56.562.972.013,70</b>

1. SAL Awal adalah akumulasi saldo yang berasal dari SILPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan SILPA tahun berjalan ditambah/dikurangi dengan penyesuaian lainnya yang diperkenankan. SAL Awal tahun 2024 adalah sebesar Rp56.562.972.013,70 merupakan SAL Akhir per 31 Desember 2023. Saldo Anggaran Lebih awal meliputi saldo awal Kas di BUD, Bendahara Pengeluaran OPD, Bendahara Pengeluaran BLUD, Kas di Bendahara JKN dan Kas Lainnya serta Kas Lainnya di Sekolah.
2. Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan merupakan saldo anggaran lebih yang digunakan sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan. Pada tahun 2024, penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp56.562.972.013,70.
3. SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi Pendapatan LRA dan Belanja, serta Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. SiLPA tahun 2024 sebesar Rp13.692.447.501,91.
4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya adalah koreksi kesalahan pembukuan yang berhubungan dengan periode sebelumnya yang dilakukan koreksi pada tahun berjalan yang terkait dengan koreksi SiLPA, perhitungan selisih kurs, koreksi kas, dan koreksi utang yang berpengaruh terhadap perhitungan SAL. Pada tahun 2024 tidak terdapat koreksi kesalahan pembukuan.
5. Lain-Lain adalah penyesuaian penggunaan Silpa tahun lalu. Tidak terdapat penyesuaian Silpa tahun lalu.
6. SAL Akhir Tahun 2024 adalah sebesar Rp13.692.447.501,91 mengalami penurunan sebesar Rp42.870.524.511,79 dibandingkan SAL Akhir Tahun 2023 sebesar Rp56.562.972.013,70 atau sebesar 75,79%. Saldo Anggaran Lebih



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

Akhir meliputi saldo awal Kas di BUD, Bendahara Pengeluaran BLUD, Kas di Bendahara JKN dan Kas Lainnya serta Kas Lainnya di Sekolah.

Saldo anggaran lebih awal dan saldo anggaran lebih akhir yang disajikan pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah saldo anggaran lebih APBD, saldo anggaran lebih JKN, saldo anggaran lebih Kas Lainnya di Sekolah dan saldo anggaran lebih BLUD. Pada tahun 2024, Saldo Anggaran Lebih Akhir sebesar Rp13.692.447.501,91, sedangkan pada tahun 2023 Saldo Anggaran Lebih Akhir sebesar Rp56.562.972.013,70.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

## 5.3 NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

### 5.3.1 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

#### 5.3.1.1 Aset Lancar

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Sedangkan aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

##### 5.3.1.1.1 Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah/investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh uang yang harus dipertanggungjawabkan, saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

###### 5.3.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah merupakan aset lancar pemerintah daerah baik berupa giro maupun deposito. Total rekening giro Pemerintah Kabupaten Bangka Barat per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.166.698.573,95.

Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 dalam bentuk rekening giro adalah sebagai berikut :

Nomor Rekening	Bank	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
162.30.00001	BPD Sumsel Babel	374.398.744,87	6.572.857.007,71
162.30.00009	BPD Sumsel Babel	7.533.621,81	20.118.541.496,81
162.30.00015	BPD Sumsel Babel	175.399.109,59	14.273.373.793,48
162.30.00016	BPD Sumsel Babel	11.341.427,00	64.541.460,00
162.30.00017	BPD Sumsel Babel	0,00	4.432.474,00
162.30.00018	BPD Sumsel Babel	0,00	244.250.854,50
162.30.00019	BPD Sumsel Babel	2.971.030,50	437.682.529,50
162.30.00020	BPD Sumsel Babel	64.436.866,50	65.635.971,50
162.30.00021	BPD Sumsel Babel	12.803.846,00	861.204.186,00
162.30.00022	BPD Sumsel Babel	140.819.905,00	170.171.604,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

Nomor Rekening	Bank	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
162.30.00023	BPD Sumsel Babel	18.416.902,00	85.772.037,00
162.30.00024	BPD Sumsel Babel	24.384.075,00	260.871.550,00
162.30.00028	BPD Sumsel Babel	68.449.914,50	0,00
333.533.3799	PT. Bank Nasional Indonesia	59.856.174,00	207.886.714,00
2090.01.000.313.303	PT. Bank Rakyat Indonesia	100.021.514,00	3.767.719,00
1690.000.280.9330	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk	105.865.443,18	93.903.390,39
<b>Total</b>		<b>1.166.698.573,95</b>	<b>43.464.892.787,89</b>

Keterangan:

- ❖ Rek No.162.30.00001 dipergunakan sebagai rekening penerimaan Pendapatan Asli Daerah, penyetoran sisa kas dan pendapatan transfer dari provinsi.
- ❖ Rek No.162.30.00009 dipergunakan sebagai rekening penerimaan transfer pusat.
- ❖ Rek No.162.30.00015 dipergunakan sebagai rekening pengeluaran/belanja.
- ❖ Rek No.162.30.00016 dipergunakan sebagai rekening penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.
- ❖ Rek No.162.30.00017 dipergunakan sebagai rekening penerimaan dan penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK).
- ❖ Rek No.162.30.00018 dipergunakan sebagai rekening penerimaan Pajak Restoran.
- ❖ Rek No.162.30.00019 dipergunakan sebagai rekening penerimaan Pajak Reklame.
- ❖ Rek No.162.30.00020 dipergunakan sebagai rekening Pajak Mineral bukan logam dan Batuan.
- ❖ Rek No.162.30.00021 dipergunakan sebagai rekening Pajak BPHTB.
- ❖ Rek No.162.30.00022 dipergunakan sebagai rekening penerimaan Retribusi.
- ❖ Rek No.162.30.00023 dipergunakan sebagai rekening penerimaan Pajak Air Tanah.
- ❖ Rek No.162.30.00024 dipergunakan sebagai rekening penerimaan Pajak Sarang Burung Walet.
- ❖ Rek No.162.30.00028 dipergunakan sebagai rekening penerimaan Pajak Restoran.
- ❖ Rek No. 333.533.3799 dipergunakan sebagai rekening penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.
- ❖ Rek No.2090.01.000.313.303 dipergunakan sebagai rekening penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.
- ❖ Rek No. 169.000.280.9330 dipergunakan sebagai rekening penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

Penunjukan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung sebagai kas daerah tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/72.B/BPKAD/2024 tentang Perubahan ketujuh atas Keputusan Bupati



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

Bangka Barat Nomor :188.45/12/4.4.1.1/2020 tentang Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

Penunjukan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai kas daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/9.A/BPKAD/2022 tentang Penunjukan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Indonesia Sebagai Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

Penunjukan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai kas daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/301/BPKAD/2021 tentang Penunjukan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Indonesia Sebagai Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

Penunjukan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai kas daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/239.C/BPKAD/2021 tentang Penunjukan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Indonesia Sebagai Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

#### **5.3.1.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran**

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikelola oleh bendahara pengeluaran untuk belanja. Rekening Kas di Bendahara Pengeluaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun 2024 adalah sebagai berikut :

<b>OPD</b>	<b>Nomor Rekening</b>	<b>Bank</b>
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1623010071	BPD Sumsel Babel
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1623010076	BPD Sumsel Babel
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	16231000027	BPD Sumsel Babel
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1623010022	BPD Sumsel Babel
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1623010069	BPD Sumsel Babel
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1623010072	BPD Sumsel Babel
Dinas Perikanan	1623010017	BPD Sumsel Babel
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	1623010063	BPD Sumsel Babel
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1623010068	BPD Sumsel Babel
Dinas Lingkungan Hidup	1623010073	BPD Sumsel Babel
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	1623010074	BPD Sumsel Babel
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1623010065	BPD Sumsel Babel
Dinas Komunikasi dan Informatika	1623010061	BPD Sumsel Babel
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1623010075	BPD Sumsel Babel
Dinas Kesehatan	1623010011	BPD Sumsel Babel
Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	1623010066	BPD Sumsel Babel
Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga	16231000010	BPD Sumsel Babel
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	16231000019	BPD Sumsel Babel
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	16231000020	BPD Sumsel Babel



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

OPD	Nomor Rekening	Bank
Kecamatan Mentok	1623010005	BPD Sumsel Babel
Kecamatan Simpang Teritip	1623010006	BPD Sumsel Babel
Kecamatan Kelapa	1623010003	BPD Sumsel Babel
Kecamatan Jebus	1623010008	BPD Sumsel Babel
Kecamatan Parittiga	1623010052	BPD Sumsel Babel
Kecamatan Tempilang	1623010020	BPD Sumsel Babel
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	1623010062	BPD Sumsel Babel
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1623010064	BPD Sumsel Babel
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	1623010060	BPD Sumsel Babel
Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Daerah	1623010067	BPD Sumsel Babel
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	16231000018	BPD Sumsel Babel
Inspektorat Daerah	1623010015	BPD Sumsel Babel
Sekretariat DPRD	1623010021	BPD Sumsel Babel
Sekretariat Daerah	1623010004	BPD Sumsel Babel

Rekening Bendahara Pengeluaran OPD tahun 2024 ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/72.B/BPKAD/2024 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/14/4.4.1.1/2020 Tentang Penetapan Nomor Rekening Bank Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tanggal 01 Maret 2024.

Per 31 Desember 2024 tidak terdapat saldo di Kas Bendahara Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

#### **5.3.1.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan**

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas di Bendahara Penerimaan OPD atas penerimaan pajak dan retribusi. Per 31 Desember 2024 tidak terdapat saldo di Kas Bendahara Penerimaan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

#### **5.3.1.1.1.3 Kas Lainnya**

Kas Lainnya merupakan saldo kas pajak yang belum disetorkan per 31 Desember 2024 dan Saldo kas Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas (BOK). Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.733.407.584,00 terdiri dari saldo BOK Puskesmas sebesar Rp1.512.007.440,00 pada Dinas Kesehatan, kelebihan validasi SP2D atas belanja barang dan jasa pada Dinas Kesehatan sebesar Rp10,00 dan setoran kerugian daerah Sdr. SWD yang menjadi barang bukti Kejaksaan Negeri Mentok sebesar Rp221.400.134,00.

Berikut uraian saldo BOK Puskesmas per 31 Desember 2024 :

FKTP	Nomor Rekening	Bank	31 Desember 2024 (Rp)
Puskesmas Mentok	1590070293	BNI	155.966.062,00
Puskesmas Kundi	1590070260	BNI	154.960.297,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

FKTP	Nomor Rekening	Bank	31 Desember 2024 (Rp)
Puskesmas Sp.Teritip	1590070282	BNI	173.365.498,00
Puskesmas Kelapa	1590070317	BNI	143.175.211,00
Puskesmas Tempilang	1590070306	BNI	200.468.010,00
Puskesmas Jebus	1590070271	BNI	166.594.988,00
Puskesmas Puput	1590070259	BNI	266.993.637,00
Puskesmas Sekar Biru	1590070248	BNI	250.483.737,00
<b>Total</b>			<b>1.512.007.440,00</b>

#### 5.3.1.1.4 Kas di Bendahara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Saldo kas di Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di 4 (empat) Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kesehatan merupakan selisih antara pendapatan dan belanja Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional tahun berjalan ditambah dengan saldo awal tahun. Saldo kas di Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp8.863.550,00 dengan rincian sebagai berikut :

FKTP	Nomor Rekening	Bank	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Puskesmas Mentok	2090-01-000077-30-5	BRI	0,00	142.370.497,00
Puskesmas Kundi	2090-01-000080-30-8	BRI	392,00	5.131,00
Puskesmas Sp.Teritip	2090-01-000083-30-6	BRI	9.005,00	5.002.196,00
Puskesmas Kelapa	2090-01-000079-30-3	BRI	707,00	707,00
Puskesmas Tempilang	2090-01-000078-30-1	BRI	0,00	21.902.728,00
Puskesmas Jebus	2090-01-000124-30-6	BRI	0,00	0,00
Puskesmas Puput	2090-01-000081-30-4	BRI	8.853.446,00	22.670.602,00
Puskesmas Sekar Biru	2090-01-000125-30-2	BRI	0,00	14.824.520,00
<b>Total</b>			<b>8.863.550,00</b>	<b>206.776.381,00</b>

Terdapat 4 (empat) FKTP berstatus BLUD pada tahun 2024, sehingga saldo kas di Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per 31 Desember 2023 disetor ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bangka Barat dengan rincian sebagai berikut :

FKTP	Nomor Rekening	Bank	31 Desember 2023 (Rp)	Tanggal Penyetoran
Puskesmas Mentok	2090-01-000077-30-5	BRI	142.370.497,00	14 Agustus 2024
Puskesmas Kelapa	2090-01-000079-30-3	BRI	707,00	09 April 2025
Puskesmas Tempilang	2090-01-000078-30-1	BRI	21.902.728,00	12 Juli 2024
Puskesmas Sekar Biru	2090-01-000125-30-2	BRI	14.824.520,00	30 April 2024

Rekening Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/311.B/1.20.13/2014 tentang Rekening Penerimaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

#### **5.3.1.1.5 Kas Lainnya di Sekolah**

Kas Lainnya di Sekolah merupakan saldo Kas BOS APBN di sekolah negeri tingkat dasar (SD dan SMP) di wilayah Kabupaten Bangka Barat. Kas Lainnya di Sekolah tahun 2024 sebesar Rp72.707.666,00. Rekening Kas Lainnya di Sekolah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/346/BPKAD/2023 Tanggal 25 Oktober 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/289/BPKAD/2021 tentang Penetapan Nomor Rekening Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

Rincian Saldo Kas Lainnya di Sekolah dapat dilihat pada Lampiran 1.

#### **5.3.1.1.6 Kas di BLUD**

Kas di BLUD merupakan kas yang berada pada BLUD RSUD Sejiran Setason, Puskesmas Mentok, Puskesmas Sekar Biru, Puskesmas Kelapa dan Puskesmas Tempilang Kabupaten Bangka Barat.

Rekening Kas di BLUD ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/346/RSUD.01/2022 tentang Penetapan Nomor Rekening Bank Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Muntok, Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/419/1.02.02/2016 tentang Penetapan Rekening Bank Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat dan Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/318/RSUD.01/2022 tentang Penetapan Nomor Rekening Bank Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Muntok dan Surat Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/13/DINKES/2024 tentang Penetapan Rekening Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Puskesmas Mentok, Puskesmas Sekar Biru, Puskesmas Kelapa dan Puskesmas Tempilang Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2024.

Kas di BLUD Per 31 Desember 2024 sebesar Rp10.713.714.840,96 dengan rincian sebagai berikut :

BLUD	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
RSUD Sejiran Setason	9.711.843.996,94	10.292.430.076,81
Puskesmas Mentok	71.869.630,09	0,00
Puskesmas Sekar Biru	300.766.748,20	0,00
Puskesmas Kelapa	485.300.925,82	0,00
Puskesmas Tempilang	143.933.539,91	0,00
<b>Total</b>	<b>10.713.714.840,96</b>	<b>10.292.430.076,81</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

#### **5.3.1.1.2 Investasi Jangka Pendek**

Investasi Jangka Pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan. Per 31 Desember 2024 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tidak memiliki Investasi Jangka Pendek.

#### **5.3.1.1.3 Piutang**

Piutang merupakan hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang yang dibuktikan dengan dokumen yang sah seperti surat ketetapan pajak, surat ketetapan retribusi atau yang dipersamakan. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tidak memiliki piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik di Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah atau yang sudah diserahkan penagihannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara. Selain itu tidak terdapat jaminan atau sita jaminan terkait piutang.

##### **Pengakuan Piutang**

Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya. Piutang diakui ketika telah diterbitkannya surat ketetapan/dokumen yang sah misalnya surat ketetapan pajak, surat ketetapan retribusi atau pun surat perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban yang jelas.

##### **Pengukuran Piutang**

Piutang disajikan senilai yang dapat direalisasikan yaitu nilai piutang dikurangi dengan nilai penyisihan piutang. Penyisihan piutang adalah estimasi atau perkiraan yang dilakukan untuk piutang tidak tertagih pada akhir periode yang dibentuk senilai persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan kualitas piutang.

#### **5.3.1.1.4 Piutang Pajak**

Piutang pajak merupakan hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang dibuktikan dengan penerbitan surat ketetapan pajak daerah kepada wajib pajak. Piutang pajak diakui setelah diterbitkannya surat ketetapan pajak (SKP) atau pun surat ketetapan pajak kurang bayar (SKP-KB), baik untuk jenis pajak yang ditetapkan dengan *Official Assesment* maupun untuk jenis pajak dengan *Self Assesment*. Piutang Pajak per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

<b>Jenis Pajak</b>	<b>31 Desember 2024 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2023 (Rp)</b>
Pajak Restoran	39.822.375,00	7.098.475,00
Pajak Reklame	166.359.393,25	88.425.048,25
Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	12.549.262,00	50.527.250,00
Pajak Sarang Burung Walet	6.770.000,00	1.000.000,00
Pajak Air Tanah	13.358.568,00	14.536.242,00
Pajak Bumi dan Bangunan	13.714.004.232,00	11.664.385.592,00
BPHTB	190.074.200,00	3.000.000,00
<b>Total</b>	<b>14.142.938.030,25</b>	<b>11.828.972.607,25</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

Uraian mutasi Piutang Pajak sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Jenis Pajak	Piutang atas penerbitan SKP-D s.d Tahun 2023	Mutasi Piutang			Koreksi pencatatan Piutang tahun lalu	Piutang sampai dengan 31 Desember 2024
		Piutang atas penerbitan SKP-D s.d Tahun 2023 yang terealisasi di 2024	Piutang 2024 atas penerbitan SKP-D 2024	Penghapusan Piutang di tahun 2024		
		(Rp)	(Rp)	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7=2-3+4+5+6
Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Restoran	7.098.475,00	5.712.250,00	38.436.150,00	0,00	0,00	39.822.375,00
Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Reklame	88.425.048,25	18.794.620,00	96.728.965,00	0,00	0,00	166.359.393,25
Pajak Penerangan jalan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	50.527.250,00	50.527.250,00	12.549.262,00	0,00	0,00	12.549.262,00
Pajak Sarang Burung Walet	1.000.000,00	1.000.000,00	6.770.000,00	0,00	0,00	6.770.000,00
Pajak Air Tanah	14.536.242,00	5.518.032,00	4.340.358,00	0,00	0,00	13.358.568,00
Pajak Bumi dan Bangunan	11.664.385.592,00	486.504.991,00	2.536.123.631,00	0,00	0,00	13.714.004.232,00
BPHTB	3.000.000,00	0,00	187.074.200,00	0,00	0,00	190.074.200,00
Total	<b>11.828.972.607,25</b>	<b>568.057.143,00</b>	<b>2.882.022.566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.142.938.030,25</b>

#### 5.3.1.1.5 Penyisihan Piutang Pajak

Penyisihan Piutang Pajak merupakan estimasi atau perkiraan yang dilakukan untuk piutang pajak tidak tertagih pada akhir periode yang dibentuk senilai persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan kualitas piutang. Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, besarnya penyisihan piutang tidak tertagih (untuk jenis pajak selain PBB) ditentukan sebagai berikut :

No	Kualitas Piutang Pajak	Umur Piutang Pajak	Persentase Penyisihan Piutang Pajak
1.	Lancar	< 1 Tahun	0,5%
2.	Kurang Lancar	1 – 3 Tahun	10%
3.	Diragukan	3 – 5 Tahun	50%
4.	Macet	> 5 Tahun	100%



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

Sedangkan besarnya penyisihan piutang tidak tertagih untuk PBB ditentukan sebagai berikut :

No	Kualitas Piutang PBB	Umur Piutang PBB	Percentase Penyisihan Piutang PBB
1.	Lancar	Sampai dengan 1 Tahun	5%
2.	Kurang Lancar	> 1 Tahun – 3 Tahun	10%
3.	Diragukan	> 3 Tahun – 5 Tahun	50%
4.	Macet	Lebih dari 5 Tahun	100%

Penyisihan piutang pajak berdasarkan jenis pajak per 31 Desember 2024 sebesar Rp6.729.223.528,86 dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Pajak	Nilai Piutang per 31 Desember 2024 (Rp)	Penyisihan piutang per 31 Desember 2024 (Rp)
Pajak Restoran	39.822.375,00	330.803,26
Pajak Reklame	166.359.393,25	28.099.602,20
Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	12.549.262,00	62.746,31
Pajak Sarang Burung Walet	6.770.000,00	33.850,00
Pajak Air Tanah	13.358.568,00	3.075.806,79
Pajak Bumi dan Bangunan	13.714.004.232,00	6.693.685.349,30
BPHTB	190.074.200,00	3.935.371,00
<b>Total</b>	<b>14.142.938.030,25</b>	<b>6.729.223.528,86</b>

Mutasi Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Jenis Pajak	Penyisihan Piutang s.d Tahun 2023 (Rp)	Mutasi Penyisihan Piutang			Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024 (Rp)	Penyisihan Piutang sampai dengan 31 Desember 2024 (Rp)
		Nilai Penyisihan Piutang atas Pelunasan Piutang di Tahun 2024 (Rp)	Penghapusan Penyisihan Piutang atas Penghapusan Piutang (Rp)	Koreksi catat Penyisihan Piutang (Rp)		
I	2	3	4	5	6	7=(2)-(3+4)+(5)+(6)
Pajak Restoran	35.492,38	28.561,25	0,00	0,00	323.872,13	330.803,26
Pajak Reklame	16.201.569,65	93.973,10	0,00	0,00	11.992.005,65	28.099.602,20
Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	252.636,25	0,00	0,00	0,00	62.746,31	315.382,56
Pajak Sarang Burung Walet	5.000,00	252.636,25	0,00	0,00	33.850,00	(213.786,25)
Pajak Air Tanah	881.295,16	5.000,00	0,00	0,00	2.231.601,79	3.107.896,95
Pajak Bumi dan Bangunan	6.147.362.441,50	37.090,16	0,00	0,00	666.000.160,60	6.813.325.511,94
BPHTB	3.000.000,00	119.677.252,80	0,00	0,00	935.371,00	(115.741.881,80)
<b>Total</b>	<b>6.167.738.434,94</b>	<b>120.094.513,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>681.579.607,48</b>	<b>6.729.223.528,86</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

#### **5.3.1.1.6 Piutang Pajak Netto**

Piutang Pajak Netto merupakan nilai piutang pajak dikurangi dengan penyisihan piutang pajak. Piutang Pajak Netto per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.413.714.501,39 sebagai berikut :

Jenis Pajak	Nilai Piutang Pajak (Rp)	Penyisihan Piutang Pajak(Rp)	Piutang Pajak Netto (Rp)
	1	2	3=1-2
Pajak Restoran	39.822.375,00	330.803,26	39.491.571,74
Pajak Reklame	166.359.393,25	28.099.602,20	138.259.791,05
Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	12.549.262,00	62.746,31	12.486.515,69
Pajak Sarang Burung Walet	6.770.000,00	33.850,00	6.736.150,00
Pajak Air Tanah	13.358.568,00	3.075.806,79	10.282.761,21
Pajak Bumi dan Bangunan	13.714.004.232,00	6.693.685.349,30	7.020.318.882,70
BPHTB	190.074.200,00	3.935.371,00	186.138.829,00
<b>Total</b>	<b>14.142.938.030,25</b>	<b>6.729.223.528,86</b>	<b>7.413.714.501,39</b>

Rincian Piutang dan Penyisihan Piutang Pajak dapat dilihat pada lampiran 2.

#### **5.3.1.1.7 Piutang Retribusi**

Piutang Retribusi merupakan hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang dibuktikan dengan penerbitan surat ketetapan retribusi daerah kepada wajib retribusi. Piutang Retribusi per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

SKPD/OPD	Piutang Retribusi Per 31 Desember 2024 (Rp)	Piutang Retribusi Per 31 Desember 2023 (Rp)
<b>Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>
Retribusi Pasar Grosir	270.000,00	270.000,00
<b>Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian</b>	<b>63.301.800,00</b>	<b>66.088.450,00</b>
Retribusi Pasar Grosir	63.301.800,00	66.088.450,00
<b>Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Transmigrasi</b>	<b>250.239.255,00</b>	<b>257.406.631,00</b>
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	44.173.755,00	51.341.131,00
Surat Izin Tempat Usaha/Gangguan	205.940.500,00	205.940.500,00
Izin Trayek	125.000,00	125.000,00
<b>Dinas Kesehatan</b>	<b>4.582.130.778,00</b>	<b>0,00</b>
Retribusi Pelayanan Kesehatan	4.582.130.778,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4.895.941.833,00</b>	<b>323.765.081,00</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

Uraian mutasi Piutang Retribusi sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

OPD Jenis Retribusi	Piutang Retribusi s.d Tahun 2023	Koreksi Catat (Rp)	SKRD Tahun 2024 Terutang (Rp)	Pelunasan Piutang (Rp)	SKRD Terutang Per 31 Desember 2024 (Rp)
	<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5=I-2+3-4</i>
<b>Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>
Retribusi Pasar Grosir	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
<b>Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian</b>	<b>66.088.450,00</b>	<b>519.000,00</b>	<b>22.786.750,00</b>	<b>25.054.400,00</b>	<b>63.301.800,00</b>
Retribusi Pasar Grosir	66.088.450,00	519.000,00	22.786.750,00	25.054.400,00	63.301.800,00
<b>Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Transmigrasi</b>	<b>257.406.631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.167.376,00</b>	<b>250.239.255,00</b>
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	51.341.131,00	0,00	0,00	7.167.376,00	44.173.755,00
Surat Izin Tempat Usaha/Izin Gangguan	205.940.500,00	0,00	0,00	0,00	205.940.500,00
Izin Trayek	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
<b>Dinas Kesehatan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.582.130.778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.582.130.778,00</b>
Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	4.582.130.778,00	0,00	4.582.130.778,00
<b>Total</b>	<b>323.765.081,00</b>	<b>519.000,00</b>	<b>4.604.917.528,00</b>	<b>32.221.776,00</b>	<b>4.895.941.833,00</b>

Rincian Piutang Retribusi dapat dilihat pada lampiran 3.

#### 5.3.1.1.8 Penyisihan Piutang Retribusi

Penyisihan Piutang Retribusi merupakan estimasi atau perkiraan yang dilakukan untuk piutang retribusi tidak tertagih pada akhir periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan kualitas piutang. Penyisihan piutang retribusi per 31 Desember 2024 sebesar Rp293.302.980,00 dengan rincian sebagai berikut :

SKPD/OPD	Nilai Piutang Retribusi 2023 (Rp)	Penyisihan Piutang Retribusi 2023 (Rp)
<b>Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>
Retribusi Pasar Grosir	270.000,00	270.000,00
<b>Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian</b>	<b>63.301.800,00</b>	<b>42.793.725,00</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

SKPD/OPD	Nilai Piutang Retribusi 2023 (Rp)	Penyisihan Piutang Retribusi 2023 (Rp)
Retribusi Pasar Grosir	63.301.800,00	42.793.725,00
<b>Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Transmigrasi</b>	<b>250.239.255,00</b>	<b>250.239.255,00</b>
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	44.173.755,00	44.173.755,00
Surat Izin Tempat Usaha/Gangguan	205.940.500,00	205.940.500,00
Izin Trayek	125.000,00	125.000,00
<b>Dinas Kesehatan</b>	<b>4.582.130.778,00</b>	<b>0,00</b>
Retribusi Pelayanan Kesehatan	4.582.130.778,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4.895.941.833,00</b>	<b>293.302.980,00</b>

Berikut mutasi penyisihan piutang retribusi per 31 Desember 2024:

Uraian	Penyisihan Piutang Retribusi s.d Tahun 2023 (Rp)	Nilai Penyisihan Piutang atas Pelunasan Piutang Retribusi (Rp)	Beban Penyisihan Piutang Retribusi (Rp)	Koreksi Catat Penyisihan Piutang Retribusi Tahun Sebelumnya (Rp)	Penyisihan Piutang Retribusi 2024 (Rp)
					1-2+3+4
<b>Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>
Retribusi Pasar Grosir	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
<b>Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian</b>	<b>31.993.255,00</b>	<b>800.865,00</b>	<b>11.601.335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.793.725,00</b>
Retribusi Pasar Grosir	31.993.255,00	800.865,00	11.601.335,00	0,00	42.793.725,00
<b>Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Transmigrasi</b>	<b>250.275.091,88</b>	<b>35.836,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.239.255,00</b>
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	44.209.591,88	35.836,88	0,00	0,00	44.173.755,00
Surat Izin Tempat Usaha/Gangguan	205.940.500,00	0,00	0,00	0,00	205.940.500,00
Izin Trayek	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
<b>Dinas Kesehatan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>282.538.346,88</b>	<b>836.701,88</b>	<b>11.601.335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.302.980,00</b>

Penyisihan Piutang Retribusi dapat dilihat pada Lampiran 4.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

#### **5.3.1.9 Piutang Retribusi Netto**

Piutang Retribusi Netto merupakan nilai piutang retribusi dikurangi penyisihan piutang retribusi. Piutang Retribusi Netto per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.602.638.853,00 dengan rincian sebagai berikut :

OPD	Nilai Piutang Retribusi 2024 Rp	Penyisihan Piutang Retribusi 2024 Rp	Piutang Retribusi Netto 2024 Rp
1	2	3	4=2-3
<b>Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>
Retribusi Pasar Grosir	270.000,00	270.000,00	0,00
<b>Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian</b>	<b>63.301.800,00</b>	<b>42.793.725,00</b>	20.508.075,00
Retribusi Pasar Grosir	63.301.800,00	42.793.725,00	20.508.075,00
<b>Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Transmigrasi</b>	<b>250.239.255,00</b>	<b>250.239.255,00</b>	<b>0,00</b>
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	44.173.755,00	44.173.755,00	0,00
Surat Izin Tempat Usaha/Gangguan	205.940.500,00	205.940.500,00	0,00
Izin Trayek	125.000,00	125.000,00	0,00
<b>Dinas Kesehatan</b>	<b>4.582.130.778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.124.501.578,00</b>
Retribusi Pelayanan Kesehatan	4.582.130.778,00	0,00	4.582.130.778,00
<b>Total</b>	<b>4.895.941.833,00</b>	<b>293.302.980,00</b>	<b>4.602.638.853,00</b>

#### **5.3.1.10 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan piutang Dividen atas penyertaan modal Pemerintah Daerah. Tahun 2024, tidak terdapat Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat karena belum dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas Dividen tahun 2024.

#### **5.3.1.11 Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Tidak dilakukan penyisihan terhadap Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dikarenakan seluruh Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan akan terealisasi tahun berikutnya.

#### **5.3.1.12 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Netto**

Tahun 2024 tidak terdapat Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Netto.

#### **5.3.1.13 Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya**

Tahun 2024 tidak terdapat Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya.

#### **5.3.1.14 Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya**

Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya merupakan estimasi atau perkiraan yang dilakukan untuk Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya tidak



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

tertagih pada akhir periode yang dibentuk senilai persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan kualitas piutang. Tahun 2024 tidak dilakukan Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya.

**5.3.1.1.15 Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya Netto**

Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya Netto merupakan selisih antara Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya dengan penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya. Tahun 2024 tidak terdapat Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya Netto.

**5.3.1.1.16 Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan**

Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan merupakan hak dari Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang masih akan diterima dari Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tahun 2024 tidak memiliki Piutang Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan.

**5.3.1.1.17 Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan**

Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan merupakan estimasi atau perkiraan yang dilakukan untuk Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan yang belum diterima pada akhir periode yang dibentuk senilai persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan kualitas piutang.

Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tidak melakukan Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan.

**5.3.1.1.18 Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Netto**

Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Netto merupakan selisih antara Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan dengan penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan.

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 tidak memiliki Piutang Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Netto.

**5.3.1.1.19 Piutang Dana Bagi Hasil/ Bagi Hasil Pajak Provinsi**

Piutang Dana Bagi Hasil/ Bagi Hasil Pajak Provinsi merupakan hak yang masih akan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat berupa Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi.

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 memiliki aset Piutang Dana Bagi Hasil/Bagi Hasil Pajak Provinsi. Piutang Dana Bagi Hasil/Bagi Hasil Pajak Provinsi merupakan Dana Bagi Hasil/Bagi Hasil Pajak Provinsi yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang telah diterbitkan keputusan Gubernur namun belum disalurkan oleh Pemerintah Provinsi. Piutang Dana Bagi Hasil/Bagi Hasil Pajak Provinsi per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp11.860.914.035,00 lokasi Sementara Penerimaan Bagi Hasil Pajak dengan rincian sebagai berikut :



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

No	Jenis Bagi Hasil	Periode	Nilai (Rp)	Nomor SK
1.	Bagi Hasil Pajak Rokok	Triwulan IV (Oktober-November)	1.861.390.553,00	Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No.188.4/16/BAKUDA/2025 tanggal 20 Januari 2025
2.	Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Triwulan IV	6.120.855.774,00	Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No.188.4/23/BAKUDA/2025 tanggal 19 Februari 2025
3.	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	Triwulan IV	2.377.334.199,00	Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No.188.4/24/ BAKUDA/2025 tanggal 19 Februari 2025
4.	Bagi Hasil Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Triwulan IV	1.385.194.649,00	Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No.188.4/24/BAKUDA/2025 tanggal 19 Februari 2025
5.	Bagi Hasil Pajak Pemanfaatan Air Permukaan	Triwulan IV	116.138.860,00	Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No.188.4/24/BAKUDA/2025 tanggal 19 Februari 2025
<b>Total</b>			<b>11.860.914.035,00</b>	

Uraian Mutasi Piutang Dana Bagi Hasil/Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Jenis Bagi Hasil	Piutang per 31 Desember 2023 Rp	Pelunasan Piutang per 31 Desember 2023 pada tahun 2024 Rp	Piutang yang timbul pada tahun 2024 Rp	Piutang Per 31 Desember 2024 Rp
I	2	3	4	5	6=3-4+5
1.	Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	5.968.543.899,00	5.968.543.899,00	1.861.390.553,00	1.861.390.553,00
2.	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	2.357.227.050,00	2.357.227.050,00	6.120.855.774,00	6.120.855.774,00
3.	Bagi Hasil Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.448.310.955,00	1.448.310.955,00	2.377.334.199,00	2.377.334.199,00
4.	Bagi Hasil Pajak Pemanfaatan Air Permukaan	143.476.676,00	143.476.676,00	1.385.194.649,00	1.385.194.649,00
5.	Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok	0,00	0,00	116.138.860,00	116.138.860,00
<b>Total</b>		<b>9.917.558.580,00</b>	<b>9.917.558.580,00</b>	<b>11.860.914.035,00</b>	<b>11.860.914.035,00</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

#### **5.3.1.1.20 Penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil/Bagi Hasil Pajak Provinsi**

Tidak dilakukan penyisihan terhadap Piutang Dana Bagi Hasil/Bagi Hasil Pajak Provinsi dikarenakan seluruh Piutang Dana Bagi Hasil/Bagi Hasil Pajak Provinsi akan terealisasi tahun berikutnya.

#### **5.3.1.1.21 Piutang Dana Bagi Hasil/Bagi Hasil Pajak Provinsi Netto**

Piutang Dana Bagi Hasil/Bagi Hasil Pajak Provinsi Netto merupakan selisih antara Piutang Dana Bagi Hasil/Bagi Hasil Pajak Provinsi dengan penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil/Bagi Hasil Pajak Provinsi. Dengan tidak dilakukannya penyisihan terhadap Piutang Dana Bagi Hasil/Bagi Hasil Pajak Provinsi, maka Piutang Dana Bagi Hasil/Bagi Hasil Pajak Provinsi Netto per 31 Desember 2024 adalah sebesar Piutang Dana Bagi Hasil/Bagi Hasil Pajak Provinsi yaitu Rp11.860.914.035,00.

#### **5.3.1.1.22 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka pendek. Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tidak memiliki Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran.

#### **5.3.1.1.23 Bagian Lancar Pinjaman Dana Perkuatan Modal Masyarakat**

Bagian Lancar Pinjaman Dana Perkuatan Modal Masyarakat merupakan Aset Lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat berupa reklasifikasi dari Investasi non permanen yang sudah melewati batas jatuh tempo pengembaliannya.

Reklasifikasi investasi non permanen menjadi bagian lancar pinjaman dana perkuatan modal masyarakat dilakukan karena adanya tagihan angsuran dana bergulir yang jatuh tempo pada tahun berjalan. Dana bergulir yang jatuh tempo dalam kurun waktu lima tahun diakui sebagai Bagian Lancar Pinjaman Dana Perkuatan Modal Masyarakat berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Barat sebagai berikut :

No	Jenis Pinjaman	OPD Pengelola	Peraturan Bupati	Uraian
1	Fasilitasi pengadaan sarana dan alat bantu penangkapan ikan	DKP	Nomor 18 Tahun 2012 Tanggal 1 Mei 2012	Pinjaman Modal Kegiatan Fasilitasi Pengadaan Sarana dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Tahun 2012
			Nomor 43 Tahun 2013 Tanggal 21 Oktober 2013	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Fasilitasi Pengadaan Sarana dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Tahun 2012
			Nomor 42 Tahun 2015 Tanggal 2 September 2015	Fasilitasi Pinjaman Modal Bagi Nelayan
2	Perkuatan Modal Koperasi KSP	DKUP	Nomor 11 Tahun 2008 Tanggal 23 Desember 2008	Pengelolaan Dana Bergulir
			Nomor 19 Tahun 2009 Tanggal 1 Juni 2009	Program Perkuatan Modal



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

No	Jenis Pinjaman	OPD Pengelola	Peraturan Bupati	Uraian
			Nomor 23 Tahun 2010 Tanggal 20 Mei 2010	Program Perkuatan Modal
3	Fasilitasi Pengembangan UMKM	DKUP	Nomor 15 Tahun 2009 Tanggal 18 Maret 2009	Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten di Bangka Barat
			Nomor 26 Tahun 2011 Tanggal 14 April 2011	Fasilitasi Pengembangan UMKM Kabupaten Bangka Barat

**Pinjaman Dana Kelompok Nelayan Tahun Per 31 Desember 2024**

Tahun penyaluran	Uraian	Nilai penyaluran	Nilai pengembalian	Sisa yang belum dikembalikan
1	2	3	4	5
2012	Dana Perkuatan Modal Fasilitasi Kelompok Nelayan	805.959.000,00	714.102.083,00	91.856.917,00
2013	Dana Perkuatan Modal Fasilitasi Kelompok Nelayan	835.420.000,00	688.979.999,00	146.440.001,00
2014	Dana Perkuatan Modal Fasilitasi Kelompok Nelayan	825.000.000,00	478.731.000,00	346.269.000,00
2015	Dana Perkuatan Modal Fasilitasi Kelompok Nelayan	891.990.000,00	634.070.980,00	257.919.020,00
<b>Total</b>		<b>3.358.369.000,00</b>	<b>2.515.884.062,00</b>	<b>842.484.938,00</b>

**Pinjaman Dana Perkuatan Modal UKM per 31 Desember 2024**

TAHUN	Uraian	Nilai Penyaluran	Nilai Pengembalian	Sisa Yang Belum di Kembalikan
1	2	3	4	5=3-4
2009	UKM Tahun 2009	1.290.500.000,00	1.086.955.000,00	203.545.000,00
2011	UKM Tahun 2011	5.600.000.000,00	5.384.560.250,00	215.439.750,00
<b>Total</b>		<b>6.890.500.000,00</b>	<b>6.471.515.250,00</b>	<b>418.984.750,00</b>

**Pinjaman Dana Perkuatan Modal Koperasi per 31 Desember 2024**

TAHUN	Uraian	Nilai Penyaluran	Nilai Pengembalian	Sisa Yang Belum di Kembalikan
1	2	3	4	5=3-4
2007	Koperasi Tahun 2007	467.340.000,00	467.340.000,00	0,00
2008	Koperasi Tahun 2008	509.000.000,00	451.000.000,00	58.000.000,00
2009	Koperasi Tahun 2009	700.000.000,00	675.627.000,00	24.373.000,00
2010	Koperasi Tahun 2010	700.000.000,00	509.000.000,00	191.000.000,00
<b>Total</b>		<b>2.376.340.000,00</b>	<b>2.102.967.000,00</b>	<b>273.373.000,00</b>

Bagian lancar Pinjaman Dana Perkuatan Modal Masyarakat Tahun 2024 adalah sebesar Rp1.534.342.688,00 terdiri dari Pinjaman Dana Kelompok Nelayan pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp842.484.938,00 dan Dana Perkuatan



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

Modal UKM sebesar Rp418.984.750,00 dan Pinjaman Dana Perkuatan Modal Koperasi sebesar Rp273.373.000,00.

Uraian mutasi Bagian Lancar Pinjaman Dana Perkuatan Modal Masyarakat adalah sebagai berikut :

OPD	Uraian	Saldo per 31 Desember 2023 Rp	Pelunasan Pinjaman di Tahun 2024 Rp	Reklas dari Investasi Non Permanen Rp	Saldo per 31 Desember 2024 Rp
Dinas Kelautan dan Perikanan	Pinjaman Kelompok Nelayan	858.984.938,00	16.500.000,00	0,00	842.484.938,00
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM	Dana Perkuatan Modal Koperasi dan Fasilitasi UKM	705.357.750,00	13.000.000,00	0,00	692.357.750,00
<b>Total</b>		<b>1.563.842.688,00</b>	<b>29.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.534.342.688,00</b>

#### **5.3.1.1.24 Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman Dana Perkuatan Modal Masyarakat**

Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman Dana Perkuatan Modal Masyarakat adalah estimasi atau perkiraan yang dilakukan untuk pinjaman dana perkuatan modal masyarakat tidak tertagih pada akhir periode yang dibentuk senilai persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan kualitas piutang. Penyisihan piutang Bagian Lancar Pinjaman Dana Perkuatan Modal Masyarakat per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.534.342.688,00 dengan rincian sebagai berikut :

OPD	Nilai Bagian Lancar Pinjaman Dana Perkuatan Modal Masyarakat Rp	Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman Dana Perkuatan Modal Masyarakat Rp
<b>Dinas Kelautan dan Perikanan</b>		
Pinjaman kepada Kelompok Nelayan Tahun 2012	91.856.917,00	91.856.917,00
Pinjaman kepada Kelompok Nelayan Tahun 2013	146.440.001,00	146.440.001,00
Pinjaman kepada Kelompok Nelayan Tahun 2014	346.269.000,00	346.269.000,00
Pinjaman kepada Kelompok Nelayan Tahun 2015	257.919.020,00	257.919.020,00
<b>Sub Total 1</b>	<b>842.484.938,00</b>	<b>842.484.938,00</b>
<b>Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian</b>		
Dana Perkuatan Modal Koperasi Tahun 2008	58.000.000,00	58.000.000,00
Dana Perkuatan Modal Koperasi Tahun 2009	24.373.000,00	24.373.000,00
Dana Perkuatan Modal Koperasi Tahun 2010	190.500.000,00	190.500.000,00
Dana Fasilitasi UKM Tahun 2009	203.545.000,00	203.320.000,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

OPD	Nilai Bagian Lancar Pinjaman Dana Perkuatan Modal Masyarakat Rp	Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman Dana Perkuatan Modal Masyarakat Rp
Dana Fasilitasi UKM Tahun 2011	215.439.750,00	215.664.750,000
<b>Sub Total 2</b>	<b>691.857.750,00</b>	<b>691.857.750,00</b>
<b>Total 1 + 2</b>	<b>1.534.342.688,00</b>	<b>1.534.342.688,00</b>

Penyisihan terhadap bagian lancar pinjaman dana perkuatan modal masyarakat adalah sebesar 100% dari nilai bagian lancar pinjaman dana perkuatan modal masyarakat tersebut dikarenakan telah melewati batas waktu pelunasan selama 5 lima tahun.

#### **5.3.1.1.25 Bagian Lancar Pinjaman Dana Perkuatan Modal Masyarakat Netto**

Bagian Lancar Pinjaman Dana Perkuatan Modal Masyarakat Netto adalah Bagian Lancar Pinjaman Dana Perkuatan Modal Masyarakat dikurangi dengan Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman Dana Perkuatan Modal Masyarakat. Bagian Lancar Pinjaman Dana Perkuatan Modal Masyarakat Netto per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

OPD	Nilai Bagian Lancar Pinjaman Dana Perkuatan Modal Masyarakat Rp	Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman Dana Perkuatan Modal Masyarakat Rp	Bagian Lancar Pinjaman Dana Perkuatan Modal Masyarakat Netto Rp
	1	2	3=1-2
<b>Dinas Kelautan dan Perikanan</b>			
Pinjaman kepada Kelompok Nelayan Tahun 2012	91.856.917,00	91.856.917,00	0,00
Pinjaman kepada Kelompok Nelayan Tahun 2013	146.440.001,00	146.440.001,00	0,00
Pinjaman kepada Kelompok Nelayan Tahun 2014	346.269.000,00	346.269.000,00	0,00
Pinjaman kepada Kelompok Nelayan Tahun 2015	257.919.020,00	257.919.020,00	0,00
<b>Sub Total 1</b>	<b>842.484.938,00</b>	<b>842.484.938,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian</b>			
Dana Perkuatan Modal Koperasi Tahun 2008	58.000.000,00	58.000.000,00	0,00
Dana Perkuatan Modal Koperasi Tahun 2009	24.373.000,00	24.373.000,00	0,00
Dana Perkuatan Modal Koperasi Tahun 2010	190.500.000,00	190.500.000,00	0,00
Dana Fasilitasi UKM Tahun 2009	203.320.000,00	203.320.000,00	0,00
Dana Fasilitasi UKM Tahun 2011	215.664.750,000	215.664.750,000	0,00
<b>Sub Total 2</b>	<b>691.857.750,00</b>	<b>691.857.750,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total 1 + 2</b>	<b>1.534.342.688,00</b>	<b>1.534.342.688,00</b>	<b>0,00</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

#### **5.3.1.1.26 Piutang Lain-lain Pendapatan yang Sah**

Piutang lain-lain pendapatan yang sah merupakan hak yang masih akan diterima oleh entitas pelaporan dari entitas lainnya.

Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tidak memiliki aset Piutang Lain-lain Pendapatan yang Sah.

#### **5.3.1.1.27 Penyisihan Piutang Lain-lain Pendapatan yang Sah**

Tidak dilakukan penyisihan terhadap Piutang Lain-lain Pendapatan yang Sah dikarenakan seluruh Piutang Lain-lain Pendapatan yang Sah akan terealisasi tahun berikutnya. Tidak dilakukan penyisihan terhadap Piutang Lain-lain Pendapatan yang Sah dikarenakan seluruh Piutang Lain-lain Pendapatan yang Sah diperkirakan akan terealisasi tahun berikutnya.

#### **5.3.1.1.28 Piutang Lain-lain Pendapatan yang Sah Netto**

Piutang Lain-lain Pendapatan yang Sah Netto merupakan selisih antara Piutang Lain-lain Pendapatan yang Sah dengan penyisihan Piutang Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tidak memiliki aset Piutang Lain-lain Pendapatan yang Sah Netto.

#### **5.3.1.1.29 Persediaan**

Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah Kabupaten Bangka Barat, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual kembali dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu paling lama atau maksimal 1 (satu) tahun. Dengan demikian, persediaan berupa:

- a. barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka operasional pemerintah daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai dan barang bekas pakai;
- b. barang atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih dan penolong dalam proses produksi;
- c. barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, seperti alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur;
- d. barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya hewan, bibit tanaman, barang jadi atau bangunan yang selesai dikerjakan untuk selanjutnya dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- e. barang-barang untuk berjaga-jaga atau strategis seperti cadangan minyak, cadangan beras, dan cadangan bahan pokok lainnya yang dibutuhkan masyarakat.

##### **Penilaian Persediaan**

Saldo persediaan merupakan saldo hasil pemeriksaan persediaan (*stock opname*) per 31 Desember 2024 dan dinilai berdasarkan biaya perolehan persediaan yang terakhir.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

**Pengakuan Persediaan**

Persediaan diakui pada saat:

- a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, atau
- b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

**Penatausahaan Persediaan**

**Rincian Persediaan**

Persediaan untuk 31 Desember 2024 terdiri dari barang pakai habis, alat tulis kantor, barang cetakan, obat-obatan, alat kesehatan, bibit ikan dan barang persediaan lainnya yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat.

Salah satu perolehan persediaan adalah pembelian yang bersumber dari dana APBD. Pembelian tersebut tidak serta merta diakui sebagai persediaan. Terdapat pembelian yang diakui sebagai belanja jasa dan/atau menjadi aset.

Belanja persediaan berdasarkan LRA merupakan belanja yang dicatat oleh PPK OPD berdasarkan laporan realisasi anggaran yang terdapat pada aplikasi SIMDA Keuangan, sedangkan belanja persediaan yang dicatat dalam laporan persediaan merupakan belanja persediaan berdasarkan laporan Pengurus Barang.

Perbandingan Belanja Persediaan berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Persediaan yang disajikan dalam laporan persediaan Pengurus Barang adalah sebagai berikut :

No	OPD	Belanja Persediaan berdasarkan LRA (Rp)	Belanja Persediaan yang dicatat dalam Laporan Persediaan (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5 = 3-4
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	1.172.731.640,00	201.359.990,00	971.371.650,00
2	Dinas Kesehatan	10.638.915.362,00	11.685.986.589,45	(1.047.071.227,45)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	650.126.100,00	3.775.988.991,00	(3.125.862.891,00)
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan	61.560.000,00	120.278.200,00	(58.718.200,00)
	Dinas Perhubungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	434.582.000,00	1.111.132.200,00	(676.550.200,00)
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	482.943.890,00	233.051.700,00	249.892.190,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	242.160.362,00	148.975.950,00	93.184.412,00
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Desa	581.633.520,00	224.505.500,00	357.128.020,00
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	739.735.850,00	609.528.750,00	130.207.100,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	2.985.240.570,00	2.388.837.720,00	596.402.850,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

No	OPD	Belanja Persediaan berdasarkan LRA (Rp)	Belanja Persediaan yang dicatat dalam Laporan Persediaan (Rp)	Selisih (Rp)
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	611.417.700,00	578.644.520,00	32.773.180,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.011.685.033,00	412.890.250,00	598.794.783,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	492.234.400,00	156.848.500,00	335.385.900,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	0,00	0,00	0,00
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	1.304.268.310,00	178.207.200,00	1.126.061.110,00
14	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	574.856.100,00	114.196.100,00	460.660.000,00
15	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi	3.775.000,00	1.000.000,00	2.775.000,00
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	333.647.400,00	204.682.000,00	128.965.400,00
16	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.536.196.400,00	679.763.100,00	856.433.300,00
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	283.997.800,00	142.188.200,00	141.809.600,00
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	21.226.500,00	9.188.500,00	12.038.000,00
	Dinas Perikanan	281.939.450,00	158.595.450,00	123.344.000,00
19	Sekretariat Daerah	5.304.023.453,00	5.420.057.700,00	(116.034.247,00)
20	Sekretariat DPRD	3.484.501.207,00	813.158.585,00	2.671.342.622,00
21	Kecamatan Mentok	1.123.503.870,00	546.324.500,00	577.179.370,00
22	Kecamatan Simpang Teritip	245.251.500,00	113.673.595,00	131.577.905,00
23	Kecamatan Jebus	243.961.600,00	130.184.600,00	113.777.000,00
24	Kecamatan Kelapa	493.378.100,00	295.505.800,00	197.872.300,00
25	Kecamatan Tempilang	195.573.350,00	101.727.800,00	93.845.550,00
26	Kecamatan Parittiga	282.196.000,00	166.276.000,00	115.920.000,00
27	Inspektorat Daerah	167.614.750,00	92.294.500,00	75.320.250,00
28	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	0,00	0,00	0,00
	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah	393.679.900,00	138.944.000,00	254.735.900,00
29	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	576.390.400,00	297.636.800,00	278.753.600,00
30	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	410.340.996,00	243.204.400,00	167.136.596,00
31	Badan Kepgawainan dan Pengembangan Sumber	317.456.700,00	168.760.000,00	148.696.700,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

No	OPD	Belanja Persediaan berdasarkan LRA (Rp)	Belanja Persediaan yang dicatat dalam Laporan Persediaan (Rp)	Selisih (Rp)
	Daya Manusia Daerah			
32	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.278.396.010,00	118.277.160,00	1.160.118.850,00
33	BLUD RSUD	5.967.023.140,84	5.379.402.450,87	587.620.689,97
34	BLUD Puskesmas Mentok	487.856.165,00	389.553.917,00	98.302.248,00
35	BLUD Puskesmas Kelapa	415.618.311,00	291.760.111,00	123.858.200,00
36	BLUD Puskesmas Sekarbiru	354.675.198,00	303.827.197,50	50.848.000,50
37	BLUD Puskesmas Tempilang	468.480.643,00	372.128.713,00	96.351.930,00
<b>Jumlah</b>		<b>46.654.794.680,84</b>	<b>38.518.547.239,82</b>	<b>8.136.247.441,02</b>

Secara ringkas penyebab selisih belanja persediaan berdasarkan LRA dan belanja persediaan yang dicatat dalam laporan persediaan antara lain adalah hutang, reklas dari dan ke beban hibah, reklas dari dan ke pemeliharaan, reklas dari dan ke aset tetap serta pembulatan belanja.

Mutasi Belanja LRA ke Penerimaan Persediaan

Realisasi Anggaran Tahun 2024 (Rp)		46.654.794.680,84
Bertambah :		
- Hutang	2.680.169.357,00	
- Penerimaan Retur/Recall	15.967.472,20	
- Reklas dari beban pemeliharaan	0,00	
- Reklas dari Beban Hibah	7.251.370.541,00	
- Reklas dari Beban jasa	0,00	
- Pembulatan	284.677,10	
- Koreksi Harga	1.300,00	
- Reklas dari Belanja Modal	519.356.000,00	
<b>Jumlah bertambah (Rp)</b>		<b>10.467.149.347,30</b>
Berkurang :		
- Reklas ke Beban jasa	18.254.417.153,00	
- Koreksi harga	0,00	
- Reklas ke aset	33.830.000,00	
- Reklas ke pemeliharaan	0,00	
- Reklas ke beban hibah	0,00	
- Pembulatan	815.920,24	
- Hutang tahun sebelumnya	314.333.715,08	
<b>Jumlah berkurang (Rp)</b>		<b>18.603.396.788,32</b>
<b>Jumlah Penerimaan dari LRA (Rp)</b>		<b>38.518.547.239,82</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

Dalam penyajian nilai persediaan di neraca, pembelian yang diakui sebagai belanja persediaan adalah belanja persediaan yang disajikan dalam laporan persediaan Pengurus Barang.

Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp24.866.603.152,58 dan Rp22.881.952.049,64 dengan mutasi bertambah dan berkurang sebagai berikut :

<b>Saldo Akhir per 31 Desember 2023 Audited (Rp)</b>		<b>22.881.952.049,64</b>
Mutasi Bertambah		
	Pembelian	38.518.547.239,82
	Hibah	5.084.092.327,40
	Dropping	19.735.916.395,71
	Perolehan Lainnya	10.182.000,00
	Retur	0,00
	Pengembalian	0,00
	<b>Jumlah Mutasi Bertambah</b>	<b>63.348.737.962,93</b>
Mutasi Berkurang		
	Pemakaian	41.627.238.682,62
	Penghapusan	80.273.200,00
	Penyerahan/Dijual ke Masyarakat	0,00
	Hibah	6.363.403.413,86
	Expired/Rusak	1.132.884.845,65
	Pemusnahan	19.446.293,24
	Peminjaman	0,00
	Reklas ke BMD	0,00
	Dropping	12.127.637.740,42
	Retur	1.038.800,00
	<b>Jumlah Mutasi Berkurang</b>	<b>61.351.922.975,79</b>
	<b>Saldo Akhir per 31 Desember 2024 (Rp)</b>	<b>24.866.603.152,40</b>

Persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp24.866.603.152,40. Rincian persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 berdasarkan jenis persediaan adalah sebagai berikut :

**Daftar Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023**

<b>Jenis Persediaan</b>	<b>31 Desember 2024 Audited (Rp)</b>	<b>31 Desember 2023 Audited (Rp)</b>
Bahan Habis Pakai dan Cetakan	972.039.466,00	927.632.623,00
Obat dan Alat Kesehatan	14.390.808.922,40	14.534.310.445,64
Bahan Percontohan	25.715.000,00	25.715.000,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

Jenis Persediaan	31 Desember 2024 <i>Audited</i> (Rp)	31 Desember 2023 <i>Audited</i> (Rp)
Cadangan Pangan/makanan/sembako	159.745.560,00	170.290.158,00
Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	0,00	3.000.000,00
Hewan Ternak	0,00	0,00
Tanah	0,00	0,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	223.492.950,00	223.492.950,00
Barang Inventaris	9.094.801.254,00	6.997.510.873,00
<b>Total</b>	<b>24.866.603.152,40</b>	<b>22.881.952.049,64</b>

Rincian Persediaan dapat dilihat pada lampiran 5.

Persediaan dikelompokkan menjadi :

- Persediaan berupa *supplies* terdiri atas barang pakai habis, alat tulis kantor, barang cetakan berupa blanko KTP/KK, obat-obatan, alat kesehatan, bahan percontohan, dan barang yang dimaksudkan untuk dijual. Saldo persediaan berupa *supplies* tersebut berasal dari OPD termasuk BLUD. Saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp15.548.308.948,40 terdiri dari Persediaan pada Organisasi Perangkat Daerah sebesar Rp14.217.440.940,81 dan Persediaan pada BLUD sebesar Rp1.330.868.007,59. Rincian supplies per 31 Desember 2024 pada masing-masing OPD adalah sebagai berikut :

No	OPD	Nilai Persediaan Berupa <i>Supplies</i> (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	2.300.000,00
2.	Dinas Kesehatan	12.484.862.396,81
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	221.000,00
4.	Dinas Perhubungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	32.964.640,00
5.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	615.100,00
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	72.145.900,00
7.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa	60.000,00
8.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	630.974.239,00
9.	Dinas Lingkungan Hidup	29.000.000,00
10.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	736.347.316,00
11.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	105.076.409,00
12.	Dinas Komunikasi dan Informatika	9.759.000,00
13.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	25.715.000,00
14.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	555.000,00
15.	Dinas Penanaman Modal , Pelayanan Terpadu Satu Pintu	23.363.600,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

No	OPD	Nilai Persediaan Berupa Supplies (Rp)
16.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.120.000,00
17.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	299.000,00
18.	Dinas Perikanan	1.100.000,00
19.	Sekretariat Daerah	1.850.000,00
20.	Sekretariat DPRD	5.323.000,00
21.	Kecamatan Mentok	12.005.800,00
22.	Kecamatan Simpang Teritip	1.924.440,00
23.	Kecamatan Jebus	490.000,00
24.	Kecamatan Kelapa	10.000,00
25.	Kecamatan Tempilang	1.775.000,00
26.	Kecamatan Parittiga	210.000,00
27.	Inspektorat Daerah	840.000,00
28.	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah	162.000,00
29.	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	4.683.000,00
30.	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	9.938.200,00
31.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	14.410.000,00
32.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	298.000,00
33.	BLUD RSUD	1.260.700.976,43
34.	BLUD Puskesmas Mentok	36.014.943,66
35.	BLUD Puskesmas Kelapa	26.474.395,00
36.	BLUD Puskesmas Sekarbiru	7.472.132,50
37.	BLUD Puskesmas Tempilang	205.560,00
38.	Sekolah	6.042.900,00
<b>Total</b>		<b>15.548.308.948,40</b>

- b. Persediaan berupa barang inventaris lainnya yang dimaksudkan akan diserahkan kepada pihak ketiga ataupun masyarakat sampai dengan tahun 2024 adalah sebesar Rp9.318.294.204,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	OPD Nama Persediaan	Nilai (Rp)
1.	<b>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>3.551.034.391,00</b>
	1. Sambungan Rumah Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Sungai Daeng (Tahun 2022)	223.492.950,00
	2. Pembangunan Aula Kodim di Kec. Mentok	2.182.213.341,00
	3. Pembangunan Sarpras Rusun Polres Kab. Bangka Barat	489.010.000,00
	4. Pembangunan Ruang Tahanan Polres Kab. Bangka Barat	228.706.100,00
	5. Pembangunan Penyediaan Sub Sistem Pengelolaan Setempat (Jamban Sangku Kac. Tempilang)	85.060.000,00
	Pembangunan Penyediaan Sub Sistem Pengelolaan Setempat (Jamban Belo Laut)	85.100.000,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

No	OPD Nama Persediaan	Nilai (Rp)
	7. Pembangunan Penyediaan Sub Sistem Pengelolaan Setempat (Jamban Kelapa) 8. Pembangunan Penyediaan Sub Sistem Pengelolaan Setempat (Jamban Kelekak Kabung)	167.552.000,00 89.900.000,00
<b>2.</b>	<b>Dinas Perhubungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman</b>	<b>2.075.695.013,00</b>
	1. Pembangunan Fasilitas Darat Pelabuhan (Tahun 2020) 2. Pembangunan Jalan Perkuburan Cina Menjelang (Tahun 2023) 3. Pembangunan Pagar Kuburan Desa Peradong 4. Pembangunan Pagar Kuburan Dusun Tayu Desa Ketap 5. Pembangunan Pagar Kuburan Desa Mayang 6. Pembangunan Pagar Kuburan Desa Belo Laut 7. Pembangunan Sumur Bor Desa Dendang	712.042.213,00 546.380.000,00 49.125.000,00 210.465.800,00 199.476.900,00 261.723.900,00 96.481.200,00
<b>3.</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>	<b>3.688.564.800,00</b>
	1. Mitsubishi Pajero Sport (4 unit) 2. Interior Partisi Ruang (1 paket) 3. Interior Ruang Rapat (1 paket) 4. AC 1½ PK (1 unit) 5. Sound System (1 set) 6. Televisi 60 inch (2 unit) 7. Kursi Rapat (7 unit) 8. Toyota Zennix (1 unit) 9. Infocus (1 unit) 10. Laptop (2 unit) 11. Printer (3 unit) 12. Front Desk (1 paket) 13. Cabinet Box Kulkas (1 paket) 14. Garasi Parkir (1 paket) 15. Gordyn (1 paket) 16. Karpet (1 paket) 17. Kursi Tunggu (2 set) 18. Media Baliho (2 unit) 19. Wallpaper (1 paket) 20. Kursi Rapat (8 unit) 21. Jasa Konsultan (1 paket)	2.598.000.000,00 12.972.000,00 97.867.100,00 6.970.000,00 7.980.000,00 19.940.000,00 8.330.000,00 623.800.000,00 8.000.000,00 24.000.000,00 15.000.000,00 116.172.000,00 16.966.000,00 21.730.000,00 22.560.000,00 6.670.000,00 13.000.000,00 31.070.000,00 20.440.000,00 9.250.000,00 7.847.700,00
<b>4.</b>	<b>Kecamatan Kelapa</b>	<b>3.000.000,00</b>
	1. Peti Jenazah	3.000.000,00
<b>Total</b>		<b>9.318.294.204,00</b>

Sering kali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut Pengurus Barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil stock opname. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kedaluwarsa, atau rusak. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak disajikan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

Terdapat persediaan yang telah kedaluwarsa, rusak, dan usang senilai Rp97.058.423,26 yang tidak disajikan sebagai persediaan yaitu :

No	OPD	Jenis Persediaan	Nilai (Rp)
1.	Puskesmas Simpang Teritip	Obat-obatan	45.212.442,45
2.	Puskesmas Jebus	Obat-obatan	20.767.000,70
3.	Puskesmas Kundi	Obat-obatan	496.601,75
4.	Puskesmas Kelapa	Obat-obatan	3.855.143,56
5.	Puskesmas Tempilang	Obat-obatan	26.727.234,80
<b>Total</b>			<b>97.058.423,26</b>

### 5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

#### 5.3.1.2.1 Investasi Non Permanen

Investasi Non-Permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang tidak termasuk dalam Investasi Permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

##### 5.3.1.2.1.1 Investasi Dana Perkuatan Modal Masyarakat

Investasi Dana Perkuatan Modal Masyarakat merupakan pinjaman dana perkuatan modal kepada kelompok petani kelapa sawit berupa dana bergulir. Investasi Dana Perkuatan Modal Masyarakat Kabupaten Bangka Barat disalurkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2011 Tentang Dana Pinjaman Kebun Kelapa Sawit Rakyat Tanggal 23 November 2011 dan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 55 Tahun 2011 Tentang Dana Pinjaman Kebun Kelapa Sawit Rakyat Tanggal 16 Oktober 2012. Dalam Peraturan Bupati tersebut tidak mengatur jangka waktu pelunasan, sehingga sisa pinjaman dana perkuatan modal tetap disajikan pada Investasi Dana Perkuatan Modal Masyarakat.

Pinjaman Dana Perkuatan Modal KKSR per 31 Desember 2024 :

Tahun	Uraian	Nilai Penyaluran	Nilai Pengembalian	Sisa Yang Belum di Kembalikan
1	2	3	4	5=3-4
2014	KKSR Tahun 2011	1.499.986.500,00	1.498.000.233,45	1.986.266,55
2015	KKSR Tahun 2012	2.800.000.000,00	1.728.884.620,00	1.071.115.380,00
<b>Total</b>		<b>4.299.986.500,00</b>	<b>3.226.884.853,45</b>	<b>1.073.101.646,55</b>

Rincian Investasi Dana Perkuatan Modal Masyarakat Tahun 2024 sebesar Rp1.073.101.646,55 adalah sebagai berikut :



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

Organisasi Perangkat Daerah dan Nama Program	31 Desember 2024 Rp	31 Desember 2023 Rp
<b>Dinas Pertanian dan Pangan</b>		
Pinjaman bagi Kelompok Kebun Kelapa Sawit Rakyat KKSR Tahun 2011	1.986.266,55	1.986.266,55
Pinjaman bagi Kelompok Kebun Kelapa Sawit Rakyat KKSR Tahun 2012	1.071.115.380,00	1.071.115.380,00
<b>Total</b>	<b>1.073.101.646,55</b>	<b>1.073.101.646,55</b>

Mutasi Investasi Dana Perkuatan Modal Masyarakat di Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**REKAPITULASI INVESTASI DANA PERKUATAN MODAL MASYARAKAT  
PER 31 DESEMBER 2024 KABUPATEN BANGKA BARAT**

Organisasi Perangkat Daerah	Per 31 Des 2023 Rp	Pemberian Pinjaman di tahun 2024 Rp	Pengembalian Pinjaman di tahun 2024 Rp	Per 31 Des 2024 Rp
I	2	3	4	5=2+3-4
<b>Dinas Pertanian dan Peternakan</b>				
Pinjaman bagi Kelompok Kebun Kelapa Sawit Rakyat KKSR Tahun 2011	1.986.266,55	0,00	0,00	1.986.266,55
Pinjaman bagi Kelompok Kebun Kelapa Sawit Rakyat KKSR Tahun 2012	1.071.115.380,00	0,00	0,00	1.071.115.380,00
<b>Total</b>	<b>1.073.101.646,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073.101.646,55</b>

### 5.3.1.2.2 Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

#### 5.3.1.2.2.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Nama Investee	31 Desember 2024 Rp	31 Desember 2023 Rp
PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	34.700.000.000,00	34.700.000.000,00
PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Belitung	4.517.500.000,00	4.517.500.000,00
BUMD Bangka Barat Sejahtera	99.667.405,00	131.445.745,00
PDAM. Tirta Sejiran Setason	9.006.274.109,00	8.932.801.917,00
<b>Total</b>	<b>48.323.441.514,00</b>	<b>48.281.747.662,00</b>

Mutasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah di Tahun 2024 adalah sebagai berikut :



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

Nama Investee	Kepemilikan	Penyertaan Modal sampai dengan 31 Desember 2023 Rp	Penyertaan Modal Tahun 2024 Rp	Laba/Rugi dan Penyesuaian rugi Investee Tahun 2024* dan Koreksi Catat Rp	Sampai dengan 31 Desember 2024 Rp
<b>Metode Harga Perolehan</b>					
PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	2,28%	34.700.000.000,00	0,00	tidak mempengaruhi	34.700.000.000,00
PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Belitung	10,33%	4.517.500.000,00	0,00	tidak mempengaruhi	4.517.500.000,00
<b>Metode Ekuitas</b>					
BUMD Bangka Barat Sejahtera	100,00%	131.445.745,00	0,00	(31.778.340,00)	99.667.405,00
PDAM Tirta Sejiran Setason	100,00%	8.932.801.917,00	0,00	73.472.192,00	9.006.274.109,00
<b>Total</b>		<b>48.281.747.662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.693.852,00</b>	<b>48.323.441.514,00</b>

\*Laba/Rugi *Investee* hanya mempengaruhi penyertaan modal dengan metode ekuitas.

Penjelasan penyertaan modal Kabupaten Bangka Barat sampai dengan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tidak melakukan penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bangka Barat pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung sampai dengan Tahun 2024 adalah sebesar Rp34.700.000.000,00. Pengakuan penyertaan modal pada BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung adalah dengan metode harga perolehan, sehingga laba rugi usaha PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung tidak mempengaruhi nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Penyertaan Modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangka Barat pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.
2. Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tidak melakukan penyertaan modal pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Belitung. Nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bangka Barat pada Bank Perkreditan Syariah Bangka Belitung sampai dengan Tahun 2024 adalah sebesar Rp4.517.500.000,00. Pengakuan penyertaan modal adalah dengan metode harga perolehan, sehingga laba rugi usaha Bank Perkreditan Syariah Bangka Belitung tidak mempengaruhi nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Penyertaan Modal pada Bank Perkreditan Syariah Bangka Belitung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Pada PT. Bank Pembangunan Rakyat Syariah Bangka Belitung.

3. Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tidak melakukan penyertaan modal pada PD. Bangka Barat Sejahtera. Pengakuan penyertaan modal pada PD. Bangka Barat Sejahtera adalah dengan metode ekuitas dengan artian bahwa 100% adalah milik Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sehingga laba rugi usaha tahun berjalan mempengaruhi nilai penyertaan modal. Nilai penyertaan modal sampai dengan Tahun 2024 adalah sebesar Rp99.667.405,00, yaitu penyertaan modal sampai dengan Tahun 2023 sebesar Rp131.445.745,00 dikurangi dengan rugi tahun 2024 sebesar Rp1.618.035,00 dan koreksi catat utang pajak tahun 2023 sebesar Rp30.160.305,00. Laporan Keuangan Bangka Barat Sejahtera Tahun 2023 tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Penyertaan Modal pada PD. Bangka Barat Sejahtera berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Pada PD. Bangka Barat Sejahtera.
4. Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tidak melakukan penyertaan modal pada PDAM Tirta Sejiran Setason. Pengakuan penyertaan modal pada PDAM Tirta Sejiran Setason adalah dengan metode ekuitas dengan artian bahwa 100,00% adalah milik Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sehingga laba rugi usaha tahun berjalan mempengaruhi nilai penyertaan modal. Nilai penyertaan modal sampai dengan tahun 2024 adalah sebesar Rp9.006.274.109,00, yaitu penyertaan modal sampai dengan tahun 2023 sebesar Rp8.932.801.917,00 dan ditambah dengan laba Tahun 2024 sebesar Rp73.472.192,00. Laporan Keuangan PDAM Tirta Sejiran Setason tahun 2024 telah diaudit oleh auditor independen dengan opini wajar. Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Sejiran Setason berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Pada PDAM Tirta Sejiran Setason.

Kepemilikan saham Kabupaten Bangka Barat per 31 Desember 2024 sebesar Rp48.323.441.514,00 atas penyertaan modal adalah sebagai berikut :

Nama Investee	Penyertaan Modal per 31 Desember 2024 Rp	Saham			Agio saham	Total Saham	Sisa Yang Belum Dijadikan Saham
		Jumlah lembar	Nominal Per Lembar Saham Rp	Nilai Rp			
I	2	3	4	5=3x4	6	7=5+6	8=2-7
Metode Harga Perolehan							
PT. BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	34.700.000.000,00	23.865	1.000.000,00	23.865.000.000,00	10.834.710.000,00	34.699.710.000,00	290.000,00
PT. BPR Syariah Bangka Belitung	4.517.500.000,00	450.000	10.000	4.500.000.000,00	17.500.000,00	4.517.500.000,00	0,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

Nama Investee	Penyertaan Modal per 31 Desember 2024 Rp	Saham			Agio saham	Total Saham	Sisa Yang Belum Dijadikan Saham
		Jumlah lembar	Nominal Per Lembar Saham Rp	Nilai Rp			
Metode Ekuitas							
BUMD Bangka Barat Sejahtera	99.667.405,00			99.667.405,00		99.667.405,00	0,00
PDAM Tirta Sejiran Setason	9.006.274.109,00			9.006.274.109,00		9.006.274.109,00	0,00
Total	48.323.441.514,00			37.470.941.514,00	10.852.210.000,00	48.323.151.514,00	290.000,00

### 5.3.1.3 Aset Tetap

Aset Tetap adalah Barang Milik Daerah berupa aset berwujud yang memiliki dan atau dikuasai Pemerintah Daerah yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, mempunyai nilai material dan dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang dapat diperoleh secara sah, termasuk aset tetap idle dan aset tetap kemitraan yang direklasifikasi ke aset lainnya dan berdasarkan peraturan Bupati Bangka Barat tentang Kebijakan Akutansi, aset tersebut mempunyai nilai yang dapat dikategorikan sebagai aset tetap.

#### Pengakuan Aset Tetap

Suatu aset tetap untuk dapat diakui sebagai aset tetap, maka aset tersebut harus berwujud dan memenuhi empat kriteria sebagai berikut :

- Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
- Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas.
- Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

#### Penilaian Aset Tetap

Nilai aset tetap merupakan nilai aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sampai dengan 31 Desember 2024. Aset tetap dicatat senilai harga perolehannya, yaitu jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung misalnya biaya persiapan tempat, biaya pengiriman awal, biaya pemasangan, biaya profesional, biaya konstruksi dan biaya kepanitiaan.

#### Nilai Tercatat Aset Tetap



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

Nilai tercatat (carrying amount) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan, kecuali untuk aset tetap yang tidak disusutkan seperti tanah, aset tetap lainnya dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Nilai tercatat tanah, aset tetap lainnya dan KDP adalah seluru biaya perolehan aset tersebut hingga dapat dipergunakan.

Perolehan Aset bersumber dari dana APBD, droping dan Hibah. Untuk realisasi APBD tahun 2024 Kabupaten Bangka Barat sebesar Rp107.059.382.139,64 namun yang tercatat sebagai aset tetap yang diperoleh dari pengadaan sebesar Rp109.386.962.623,00. Selisih nilai tersebut berasal dari rekonsiliasi yang dilakukan antara PPK OPD dengan Pengurus Barang OPD, untuk memperoleh data yang akurat terkait pengakuan aset atas pengeluaran APBD.

Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi mutasi (bertambah/berkurang) pengeluaran APBD menjadi aset, diantaranya :

a. Bertambah:

- belanja pemeliharaan;
- pembulatan bertambah pembagian harga perolehan secara proporsional;
- hutang;
- reklas antar golongan; dan
- reclas dari barang dan jasa (jika terdapat belanja barang dan jasa seperti belanja persediaan, honor, biaya perjalanan dinas, dan lain-lain yang menurut kriterianya memenuhi kriteria sebagai aset).

b. Berkurang:

- belanja pemeliharaan;
- reclas ke barang dan jasa;
- pembulatan berkurang pembagian harga perolehan secara proporsional;
- hutang;
- reclas antar golongan; dan
- hibah.

c. Aset di Bawah Kapitalisasi adalah aset yang tidak masuk ke dalam neraca karena tidak memenuhi kriteria nilai perolehan minimum aset tetap.

d. Aset Tidak Berwujud

Buletin Teknis SAP Nomor 11 tentang Aset Tidak Berwujud (ATB) menyebutkan bahwa Aset Tidak Berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki pemerintah daerah. Aset tidak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan di masa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut.

Secara keseluruhan dapat diungkapkan bertambah dan berkurang aset tetap sebagai berikut :



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

<b>Belanja Modal LRA Tahun 2024 (Rp)</b>		<b>107.059.382.139,64</b>
Bertambah :		
- Belanja Pemeliharaan	859.024.636,00	
- Pembulatan	114,36	
- Hutang	20.751.632.012,00	
- Reklas Antar Golongan	5.941.756.738,00	
- Belanja Barang dan Jasa	409.664.400,00	
<b>Jumlah bertambah (Rp)</b>		<b>27.962.077.900,36</b>
Berkurang :		
- Belanja Pemeliharaan	243.893.032,00	
- Belanja Barang dan Jasa	531.254.000,00	
- Pembulatan	9,00	
- Hutang	16.300.862.920,00	
- Reklas Antar Golongan	5.941.756.738,00	
- Hibah	0,00	
<b>Jumlah berkurang (Rp)</b>		<b>23.017.766.699,00</b>
<b>Aset di Bawah Kapitalisasi (Rp)</b>		<b>3.033.531.518,00</b>
<b>Aset Tidak Berwujud (Rp)</b>		<b>44.400.000,00</b>
<b>Realisasi belanja yang dicatat sebagai Aset Tetap Tahun 2024 (Rp)</b>		<b>108.925.761.823,00</b>

Rincian Laporan Realisasi Anggaran tahun 2024 yang diakui sebagai aset tetap yang berasal dari belanja APBD :

<b>Belanja Modal LRA Tahun 2024 (Rp)</b>		<b>94.758.540.466,64</b>
Bertambah :		
- Belanja Pemeliharaan	838.375.080,00	
- Pembulatan	114,36	
- Hutang	20.751.632.012,00	
- Reklas Antar Golongan	3.046.835.156,00	
- Belanja Barang dan Jasa	332.899.400,00	
<b>Jumlah bertambah (Rp)</b>		<b>24.969.741.762,36</b>
Berkurang :		
- Belanja Pemeliharaan	243.893.032,00	
- Belanja Barang dan Jasa	466.931.000,00	
- Pembulatan	7,00	
- Hutang	15.933.571.200,00	
- Reklas Antar Golongan	3.046.835.156,00	
- Hibah	0,00	
<b>Jumlah berkurang (Rp)</b>		<b>19.691.230.395,00</b>
<b>Aset di Bawah Kapitalisasi (Rp)</b>		<b>116.775.393,00</b>
<b>Aset Tidak Berwujud (Rp)</b>		<b>44.400.000,00</b>
<b>Realisasi belanja yang dicatat sebagai Aset Tetap Tahun 2024 (Rp)</b>		<b>99.875.876.441,00</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

Rincian Laporan Realisasi Anggaran tahun 2024 yang diakui sebagai aset tetap yang berasal dari belanja BLUD :

<b>Belanja Modal LRA Tahun 2024 (Rp)</b>		<b>5.514.052.053,00</b>
Bertambah :		
- Belanja Pemeliharaan	20.649.556,00	
- Pembulatan	0,00	
- Hutang	0,00	
- Reklas Antar Golongan	2.793.382.081,00	
- Belanja Barang dan Jasa	5.280.000,00	
<b>Jumlah bertambah (Rp)</b>		<b>2.819.311.637,00</b>
Berkurang :		
- Belanja Pemeliharaan	0,00	
- Belanja Barang dan Jasa	52.425.000,00	
- Pembulatan	2,00	
- Hutang	367.291.720,00	
- Reklas Antar Golongan	2.793.382.081,00	
- Hibah	0,00	
<b>Jumlah berkurang (Rp)</b>		<b>3.213.098.803,00</b>
<b>Aset di Bawah Kapitalisasi (Rp)</b>		<b>45.500.995,00</b>
<b>Aset Tidak Berwujud (Rp)</b>		<b>0,00</b>
<b>Realisasi belanja yang dicatat sebagai Aset Tetap Tahun 2024 (Rp)</b>		<b>5.074.763.892,00</b>

Rincian Laporan Realisasi Anggaran tahun 2024 yang diakui sebagai aset tetap yang berasal dari belanja JKN :

<b>Belanja Modal LRA Tahun 2024 (Rp)</b>		<b>74.786.400,00</b>
Bertambah :		
- Belanja Pemeliharaan	0,00	
- Pembulatan	0,00	
- Hutang	0,00	
- Reklas Antar Golongan	0,00	
- Belanja Barang dan Jasa	510.000,00	
<b>Jumlah bertambah (Rp)</b>		<b>510.000,00</b>
Berkurang :		
- Belanja Pemeliharaan	0,00	
- Belanja Barang dan Jasa	0,00	
- Pembulatan	0,00	
- Hutang	0,00	
- Reklas Antar Golongan	0,00	
- Hibah	0,00	
<b>Jumlah berkurang (Rp)</b>		<b>0,00</b>
<b>Aset di Bawah Kapitalisasi (Rp)</b>		<b>3.660.000,00</b>
<b>Aset Tidak Berwujud (Rp)</b>		<b>0,00</b>
<b>Realisasi belanja yang dicatat sebagai Aset Tetap Tahun 2024 (Rp)</b>		<b>71.636.400,00</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

Rincian Laporan Realisasi Anggaran tahun 2024 yang diakui sebagai aset tetap yang berasal dari belanja BOS :

<b>Belanja Modal LRA Tahun 2024 (Rp)</b>		<b>6.712.003.220,00</b>
Bertambah :		
- Belanja Pemeliharaan		0,00
- Pembulatan		0,00
- Hutang		0,00
- Reklas Antar Golongan		101.539.501,00
- Belanja Barang dan Jasa		70.975.000,00
<b>Jumlah bertambah (Rp)</b>		<b>172.514.501,00</b>
Berkurang :		
- Belanja Pemeliharaan		0,00
- Belanja Barang dan Jasa		11.898.000,00
- Pembulatan		0,00
- Hutang		0,00
- Reklas Antar Golongan		101.539.501,00
- Hibah		0,00
<b>Jumlah berkurang (Rp)</b>		<b>113.437.501,00</b>
<b>Aset di Bawah Kapitalisasi (Rp)</b>		<b>2.867.595.130,00</b>
<b>Aset Tidak Berwujud (Rp)</b>		<b>0,00</b>
<b>Realisasi belanja yang dicatat sebagai Aset Tetap Tahun 2024 (Rp)</b>		<b>3.903.485.090,00</b>

Rincian Laporan Realisasi Anggaran tahun 2024 yang diakui sebagai aset tetap per golongan adalah sebagai berikut :

Golongan Aset Tetap	LRA (Rp)	Mutasi Bertambah	Mutasi Berkurang	Aset di Bawah Kapitalisasi	Aset Tak Berwujud	Aset Tetap (Rp)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Tanah	0,00	296.646.000,00	0,00	0,00	0,00	296.646.000,00
Peralatan dan Mesin	20.170.550.842,00	2.051.645.650,00	291.078.748,00	510.382.388,00	44.400.000,00	21.376.335.356,00
Gedung dan Bangunan	32.599.542.695,00	4.456.427.687,00	19.443.587.550,00	13.400.000,00	0,00	17.598.982.832,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	48.440.286.471,64	18.728.445.722,36	167.834.000,00	0,00	0,00	67.000.898.194,00
Aset Tetap Lainnya	5.849.002.131,00	1.718.141.987,00	3.115.266.401,00	2.509.749.130,00	0,00	1.942.128.587,00
Konstruksi dalam Pengerjaan		0,00	710.770.854,00	0,00	0,00	710.770.854,00
<b>Total</b>	<b>107.059.382.139,64</b>	<b>27.962.077.900,36</b>	<b>23.017.766.699,00</b>	<b>3.033.531.518,00</b>	<b>44.400.000,00</b>	<b>108.925.761.823,00</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

Rincian Laporan Realisasi Anggaran tahun 2024 per OPD yang diakui sebagai aset tetap adalah sebagai berikut :

NO	OPD	LRA (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Aset di bawah kapitalisasi (Rp)	Aset Tak Berwujud (Rp)	Aset tetap (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4-5-6-7
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	13.761.828.850,00	3.541.098.787,00	2.084.997.286,00	2.881.714.730,00	0,00	12.336.215.621,00
2	Dinas Kesehatan	7.291.002.000,00	336.976.449,00	177.404.668,00	3.660.000,00	0,00	7.446.913.781,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	57.731.496.411,64	16.598.833.159,36	16.085.421.200,00	0,00	0,00	58.244.908.371,00
4	Dinas Perhubungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	5.386.361.500,00	2.154.488.388,00	460.001.000,00	0,00	0,00	7.080.848.888,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	152.579.968,00	0,00	0,00	1.369.425,00	0,00	151.210.543,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	220.880.000,00	41.625.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	257.505.000,00
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Desa	104.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	2.000.000,00	0,00	102.000.000,00
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	19.900.000,00	680.000,00	0,00	680.000,00	0,00	19.900.000,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	1.401.850.000,00	54.450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.456.300.000,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	164.152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.152.000,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.322.037.949,00	33.900.000,00	930.000,00	44.550.000,00	0,00	1.310.457.949,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	136.792.500,00	67.200.000,00	0,00	0,00	44.400.000,00	159.592.500,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	13.600.000,00	203.524.000,00	0,00	900.000,00	0,00	216.224.000,00
14	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	2.906.591.560,00	195.430.435,00	53.316.035,00	24.000.000,00	0,00	3.024.705.960,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	560.837.393,00	20.000.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	575.637.393,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

NO	OPD	LRA (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Aset di bawah kapitalisasi (Rp)	Aset Tak Berwujud (Rp)	Aset tetap (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8= 3+4-5-6-7
	Perizinan Terpadu Satu Pintu						
16	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.752.330.665,00	705.102.461,00	363.850.731,00	450.000,00	0,00	3.093.132.395,00
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	130.157.000,00	2.990.000,00	0,00	2.477.000,00	0,00	130.670.000,00
18	Dinas Perikanan	0,00	23.300.000,00	0,00	0,00	0,00	23.300.000,00
19	Sekretariat DPRD	5.636.896.290,00	530.480.580,00	221.447.002,00	188.700,00	0,00	5.945.741.168,00
20	Sekretariat Daerah	498.421.000,00	475.131.004,00	342.099.974,00	1.740.668,00	0,00	629.711.362,00
21	Kecamatan Mentok	489.640.000,00	89.531.000,00	0,00	0,00	0,00	579.171.000,00
22	Kecamatan Simpang Teritip	20.000.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	20.000.000,00
23	Kecamatan Jebus	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
24	Kecamatan Kelapa	144.175.000,00	53.725.000,00	0,00	0,00	0,00	197.900.000,00
25	Kecamatan Tempilang	35.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	20.000.000,00
26	Kecamatan Parittiga	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00
27	Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah	84.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000.000,00
29	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	64.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.600.000,00
30	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	80.200.000,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	80.200.000,00
31	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	353.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.000.000,00
32	Badan Kesatuan Bangsa Politik	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00
33	BLUD RSUD	5.068.748.953,00	2.793.382.081,00	3.160.673.803,00	13.469.995,00	0,00	4.687.987.236,00
34	BLUD Puskesmas Mentok	107.684.000,00	25.929.556,00	0,00	3.450.000,00	0,00	130.163.556,00
35	BLUD Puskesmas Kelapa	4.995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.995.000,00
36	BLUD Puskesmas Sekarbiru	100.440.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	85.440.000,00
37	BLUD	232.184.100,00	0,00	52.425.000,00	13.581.000,00	0,00	166.178.100,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

NO	OPD	LRA (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Aset di bawah kapitalisasi (Rp)	Aset Tak Berwujud (Rp)	Aset tetap (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8= 3+4-5-6-7
	Puskesmas Tempilang						
	Total	107.059.382.139,64	27.962.077.900,36	23.017.766.699,00	3.033.531.518,00	44.400.000,00	108.925.761.823,00

Rincian dan Mutasi Aset Tetap

Nilai aset tetap yang disajikan sebagai aset tetap pada neraca per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.143.092.982.258,00 dan Rp2.991.977.208.544,00 dengan mutasi bertambah dan berkurang sebagai berikut :

**Mutasi Bertambah dan Mutasi Berkurang Aset Tetap**  
**Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2024**

Golongan Aset Tetap	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi Bertambah (Rp)	Mutasi Berkurang (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Tanah	154.637.341.232,00	316.978.040,00	15.724.040,00	154.938.595.232,00
Peralatan dan Mesin	403.352.708.976,00	32.872.085.027,00	11.885.431.043,00	424.339.362.960,00
Gedung dan Bangunan	704.915.064.506,00	42.561.072.620,00	20.498.991.912,00	726.977.145.214,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.710.307.522.236,00	105.967.567.626,00	559.948.220,00	1.815.715.141.642,00
Aset Tetap Lainnya	17.728.434.769,00	1.942.128.587,00	0,00	19.670.563.356,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	1.036.136.825,00	710.770.854,00	294.733.825,00	1.452.173.854,00
<b>Total Aset Tetap Bruto</b>	<b>2.991.977.208.544,00</b>	<b>184.370.602.754,00</b>	<b>33.254.829.040,00</b>	<b>3.143.092.982.258,00</b>
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1.700.134.730.161,00)	(113.812.371.316,00)	(4.449.034.901,00)	(1.809.498.066.576,00)
<b>Total Aset Tetap Netto</b>	<b>1.291.842.478.383,00</b>	<b>70.558.231.438,00</b>	<b>28.805.794.139,00</b>	<b>1.333.594.915.682,00</b>

Penjelasan mutasi aset tetap adalah sebagai berikut :

Saldo Akhir per 31 Desember 2023 (Rp)			2.991.977.208.544,00
Mutasi Bertambah			
1.	Pengadaan/Belanja Modal	108.925.761.823,00	
2.	Hibah	11.693.074.925,00	
3.	Mutasi Antar OPD	29.706.552.511,00	
4.	Koreksi Nilai	20.362.005,00	
5.	Reklas Dari Persediaan	0,00	
6.	Reklas	32.179.613.590,00	
7.	Belum Tercatat	1.845.237.900,00	
<b>Jumlah Mutasi Bertambah (Rp)</b>			<b>184.370.602.754,00</b>
Mutasi Berkurang			
1.	Penghapusan	889.952.727,00	
2.	Mutasi Antar OPD	29.731.527.511,00	
3.	Koreksi Nilai/Persediaan	13.040.000,00	
4.	Hibah	0,00	



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

5.	Reklas	2.620.308.802,00	
	<b>Jumlah Mutasi Berkurang (Rp)</b>		<b>33.254.829.040,00</b>
	<b>Saldo Akhir per 31 Desember 2024 (Rp)</b>		<b>3.143.092.982.258,00</b>

- ❖ Mutasi bertambah adalah penambahan atas aset tetap
  - Pengadaan/Belanja Modal adalah hasil pengadaan atau realisasi anggaran tahun 2024 yang diakui sebagai aset tetap.
  - Hibah adalah penerimaan atas barang yang bersumber dari hibah kementerian dan masyarakat.
  - Mutasi antar OPD adalah penambahan aset tetap dari :
    - Satu unit OPD ke Unit OPD lain dalam Kabupaten Bangka Barat;
    - Unit OPD ke sub unit OPD;
    - Pengelola ke Unit OPD.
  - Koreksi Nilai adalah koreksi tambah atas nilai suatu aset berdasarkan dokumen atau koreksi atas suatu aset yang ternyata dikemudian hari diketahui bahwa barang milik daerah yang tercatat dalam Buku Inventaris tersebut nilainya berubah.
  - Reklas dari persediaan adalah perpindahan belanja persediaan yang diakui sebagai aset tetap.
  - Reklas adalah perpindahan dari satu golongan aset ke golongan aset yang lain, dari aset extra komptable ke aset intra komptable, atau dari aset tetap ke aset properti investasi.
  - Kapitalisasi aset adalah penambahan nilai suatu aset akibat adanya kegiatan pemeliharaan atau renovasi atas satu aset yang sudah ada sebelumnya.
- ❖ Mutasi berkurang adalah pengurangan atas aset tetap
  - Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Dalam hal Barang Milik Daerah yang sudah tidak berada dalam Penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah harus dilakukan penghapusan Barang Milik Daerah dari daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna.
  - Mutasi antar OPD adalah pengurangan aset tetap dari satu unit OPD ke Unit OPD lain dalam Kabupaten Bangka Barat.
    - Satu unit OPD ke Unit OPD lain dalam Kabupaten Bangka Barat;
    - Unit OPD ke sub unit OPD;
    - Unit OPD ke Pengelola.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

- Koreksi Nilai/Persediaan adalah koreksi kurang atas nilai suatu aset berdasarkan dokumen atau koreksi atas suatu aset yang ternyata dikemudian hari diketahui bahwa barang milik daerah yang tercatat dalam Buku Inventaris tersebut bukan aset.
- Hibah adalah pengeluaran atas aset yang diserahkan kepada instansi vertical, pemerintah desa atau masyarakat.
- Reklas adalah perpindahan dari satu golongan aset ke golongan aset yang lain, dari aset extra komptable ke aset intra komptable, atau dari aset properti investasi ke aset tetap.

**Mutasi Aset Tetap OPD per 31 Desember 2024**

<b>OPD</b>	<b>31 Desember 2023 (Audited) (Rp)</b>	<b>Mutasi Bertambah (Rp)</b>	<b>Mutasi Berkurang (Rp)</b>	<b>31 Desember 2024 (Rp)</b>
Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	401.056.916.318,00	26.728.328.851,00	9.706.443.691,00	418.078.801.478,00
Dinas Kesehatan	237.535.978.264,00	14.647.696.172,00	7.999.514.069,00	244.184.160.367,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.871.407.621.454,00	96.520.497.363,00	3.339.110.878,00	1.964.589.007.939,00
Dinas Perhubungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	53.589.674.029,00	7.107.588.793,00	596.362.466,00	60.100.900.356,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	5.459.632.995,00	151.210.543,00	0,00	5.610.843.538,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	487.563.349,00	788.920.500,00	24.975.000,00	1.251.508.849,00
Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.986.613.600,00	102.000.000,00	0,00	3.088.613.600,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	33.245.182.085,00	19.900.000,00	0,00	33.265.082.085,00
Dinas Lingkungan Hidup	35.761.867.411,00	1.456.300.000,00	0,00	37.218.167.411,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.156.262.277,00	164.152.000,00	0,00	4.320.414.277,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

OPD	31 Desember 2023 (Audited) (Rp)	Mutasi Bertambah (Rp)	Mutasi Berkurang (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9.444.028.649,00	1.310.457.949,00	0,00	10.754.486.598,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	7.580.681.156,00	159.592.500,00	0,00	7.740.273.656,00
Dinas Koperasi, Usaha KecilMenengah dan Perdagangan	47.240.787.788,00	216.224.000,00	8.646.086.344,00	38.810.925.444,00
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	0,00	13.197.049.803,00	0,00	13.197.049.803,00
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.946.790.273,00	575.637.393,00	1.526.257.499,00	4.996.170.167,00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	33.821.944.853,00	7.079.471.465,00	194.903.825,00	40.706.512.493,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	18.643.884.156,00	130.670.000,00	0,00	18.774.554.156,00
Dinas Perikanan	9.311.349.923,00	23.300.000,00	0,00	9.334.649.923,00
Sekretariat Daerah	92.119.428.572,00	1.384.791.362,00	444.328.862,00	93.059.891.072,00
Sekretariat DPRD	25.596.579.327,00	6.045.571.168,00	99.830.000,00	31.542.320.495,00
Kecamatan Mentok	11.716.249.095,00	579.171.000,00	85.848.300,00	12.209.571.795,00
Kecamatan Simpang Teritip	5.161.167.834,00	20.000.000,00	0,00	5.181.167.834,00
Kecamatan Jebus	4.823.460.669,00	20.000.000,00	97.556.100,00	4.745.904.569,00
Kecamatan Kelapa	6.306.510.486,00	202.508.000,00	0,00	6.509.018.486,00
Kecamatan Tempilang	4.486.189.497,00	20.000.000,00	0,00	4.506.189.497,00
Kecamatan Parittiga	6.595.895.646,00	45.000.000,00	0,00	6.640.895.646,00
Inspektorat Daerah	2.030.456.192,00	0,00	0,00	2.030.456.192,00
Badan Perencanaan	5.966.499.079,00	84.000.000,00	466.948.006,00	5.583.551.073,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

OPD	31 Desember 2023 (Audited) (Rp)	Mutasi Bertambah (Rp)	Mutasi Berkurang (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah				
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	6.549.618.393,00	64.600.000,00	26.664.000,00	6.587.554.393,00
Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	5.781.137.343,00	80.200.000,00	0,00	5.861.337.343,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	12.494.574.883,00	353.000.000,00	0,00	12.847.574.883,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.386.104.160,00	18.000.000,00	0,00	1.404.104.160,00
BLUD RSUD	23.286.558.788,00	4.687.987.236,00	0,00	27.974.546.024,00
BLUD Puskesmas Mentok	0,00	130.163.556,00	0,00	130.163.556,00
BLUD Puskesmas Kelapa	0,00	4.995.000,00	0,00	4.995.000,00
BLUD Puskesmas Sekarbiru	0,00	85.440.000,00	0,00	85.440.000,00
BLUD Puskesmas Tempilang	0,00	166.178.100,00	0,00	166.178.100,00
Pengelola	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2.991.977.208.544,00</b>	<b>184.370.602.754,00</b>	<b>33.254.829.040,00</b>	<b>3.143.092.982.258,00</b>

### **Masa Manfaat Aset Tetap**

Masa manfaat adalah periode suatu aset tetap yang dapat digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Bangka Barat menetapkan masa manfaat untuk aset tetap per jenis dan per sub aset tetap. Penetapan masa manfaat tersebut menjadi salah satu dasar dalam penghitungan penyusutan aset tetap.

### **Perbedaan Pencatatan Perolehan Aset Tetap**

Terkadang terdapat perbedaan pencatatan perolehan aset tetap yang terjadi antara unit keuangan dengan unit yang mengelola/mencatat aset, umumnya karena adanya



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

pembulatan nilai pada biaya yang membentuk nilai perolehan aset tersebut. Untuk itu dilakukan rekonsiliasi nilai aset tetap antara Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD dengan Pejabat Pengurus Barang minimal per semester dalam rangka pencocokan nilai perolehan aset.

**Kapitalisasi Aset Tetap**

Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh Aset Tetap sehingga siap pakai, untuk meningkatkan kualitas, kapasitas/efesien/ dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.

**Nilai Perolehan Minimum Aset tetap**

Nilai perolehan minimum aset tetap yang menjadi penentu apakah suatu aset tetap masuk ke dalam neraca atau tidak berlaku untuk aset tetap peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, aset tetap lainnya berupa buku, hewan/ternak dan tumbuhan. Sedangkan untuk aset tetap tanah, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya berupa barang bercorak kesenian dan konstruksi dalam pengerjaan tidak memiliki nilai perolehan minimum, sehingga seluruh aset tetap tersebut dalam kondisi baik akan disajikan dalam neraca.

Nilai perolehan minimum aset tetap yang ditetapkan sesuai Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kebijaksanaan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat adalah sebagai berikut :

**Daftar Nilai Perolehan Minimum Aset Tetap**

No	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	Tanah	0,00
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	500.000,00
2.2	Alat-alat Angkutan	500.000,00
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	500.000,00
2.4	Alat-alat Pertanian/Perternakan	500.000,00
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	500.000,00
2.6	Alat-alat Studio dan Alat Komunikasi	500.000,00
2.7	Alat-alat Kedokteran	500.000,00
2.8	Alat-alat Laboratorium	500.000,00
2.9	Alat-alat Keamanan	500.000,00
2.10	Komputer	500.000,00
2.11	Alat Eksplorasi	500.000,00
2.12	Alat Pengeboran	500.000,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

No	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
2.13	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	500.000,00
2.14	Alat Bantu Eksplorasi	500.000,00
2.15	Alat Keselamatan Kerja	500.000,00
2.16	Alat Peraga	500.000,00
2.17	Peralatan Proses/Produksi	500.000,00
2.18	Rambu-Rambu	500.000,00
2.19	Peralatan Olahraga	500.000,00
3	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	10.000.000,00
3.2	Monumen	10.000.000,00
3.3	Bangunan Menara	10.000.000,00
3.4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	10.000.000,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	0,00
4.2	Bangunan Air/Irigasi	0,00
4.3	Instalasi	0,00
4.4	Jaringan	0,00
5	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:	
5.1	Bahan Perpustakaan	100.000,00
5.2	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	0,00
5.3	Hewan	100.000,00
5.4	Biodata Perairan	0,00
5.5	Tanaman	100.000,00
5.6	Barang Koleksi Non Budaya	0,00
5.7	Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00

#### **Pengeluaran Setelah Perolehan**

Pengeluaran belanja modal yang nilainya melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan sesuai Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat mengatur bahwa perbaikan terhadap aset tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas mengubah masa manfaat aset tetap yang bersangkutan, dan dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan daerah serta tidak untuk dijual, maka pengeluaran belanja modal tersebut harus dikapitalisasi.

Perbaikan meliputi:

1. Renovasi

Renovasi adalah perbaikan Aset Tetap yang rusak dan/atau penggantian bagian Aset Tetap dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas serta



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

umur teknis.

2. Overhaul

Overhaul adalah kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan masa manfaat, serta mempertahankan dan/atau meningkatkan kualitas dan/atau kapasitas.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap ditetapkan sebagai berikut :

1. Peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya minimum 10% dari harga perolehan;
2. Gedung dan bangunan yang nilainya minimum 25 % dari harga perolehan;
3. Jalan, irigasi, dan jaringan yang nilainya minimum 10% dari harga perolehan;
4. Pengeluaran yang tidak termasuk dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut diatas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Batas minimum kapitalisasi aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk:

1. Pengadaan/pembelian tanah;
2. Pengadaan/pembelian/pembuatan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan, barang bercorak kesenian, hewan/ternak, dan tumbuhan.

Pengeluaran Belanja Barang dan Jasa yang mengakibatkan adanya perolehan aset tetap hingga siap pakai, peningkatan kapasitas/efisiensi dan memperpanjang umur teknis barang milik daerah dilakukan kapitalisasi.

Pengeluaran yang tidak dikapitalisasi terdiri dari:

1. Pengeluaran belanja pemeliharaan rutin yang bertujuan untuk mempertahankan fungsi aset tetap yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja.
2. Pengeluaran Belanja Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi yang tidak memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi.
3. Pengeluaran belanja barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa baik untuk dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Perubahan Masa Manfaat Aset Tetap akibat adanya perbaikan dilakukan dengan berpedoman pada tabel Masa Manfaat Aset Tetap akibat Perbaikan.

### **Pencatatan Ekstra Komptabel**

Pencatatan Ekstra Komptabel adalah penatausahaan aset tetap untuk nilai aset tetap di bawah nilai minimal kapitalisasi atau aset tetap yang karena sifat, kondisi dan keberadaanya, tidak perlu dilaporkan dalam neraca.

Pencatatan Ekstra Komptabel dilakukan terhadap:

1. Aset tetap yang nilai perolehannya tidak memenuhi batasan minimum kapitalisasi;
2. Aset tak berwujud;
3. Aset yang secara permanen sudah dihentikan atau dilepas dari penggunaan aktif pemerintah karena rusak berat sehingga tidak bisa digunakan lagi secara normal dalam operasional dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang;
4. Aset yang dipinjamkan oleh instansi lain untuk jangka waktu tertentu;



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

5. Aset yang digunakan oleh instansi lain untuk tujuan akhir diserahkan; dan
6. Aset hilang/tidak diketahui keberadaannya.

Khusus untuk aset tak berwujud, dalam penatausahaan aset tetap dimasukkan ke dalam ekstra komptabel, namun di neraca disajikan sebagai aset tak berwujud dan dilakukan penghitungan amortisasi.

#### **5.3.1.3.1 Tanah**

Aset tetap tanah merupakan tanah yang dikuasai dan dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Sedangkan tanah yang dikuasai namun dipergunakan oleh pihak lain diklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

##### **Penilaian Tanah**

Aset tetap tanah dinilai berdasarkan harga perolehannya. Biaya perolehan tanah menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan masih harus dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya pembebasan lahan, biaya *land clearing*, biaya terkait pengurusan atau perolehan hak atau sertifikat tanah, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap digunakan.

##### **Nilai Tercatat Tanah**

Aset tanah tidak dilakukan penyusutan, sehingga nilai tercatat (*carrying amount*) aset tanah adalah sama dengan nilai perolehan aset tetap tanah.

##### **Nilai Batasan Kapitalisasi Tanah**

Aset tetap tanah tidak memiliki nilai batasan minimal kapitalisasi, sehingga seluruh nilai aset tetap tanah disajikan dalam neraca.

Mutasi bertambah dan berkurang terhadap Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024 yang diakui sebagai aset tetap untuk golongan tanah adalah sebagai berikut:

<b>Realisasi Anggaran tahun 2024 (Rp)</b>		<b>0,00</b>
<b>Bertambah :</b>		
- Belanja Pemeliharaan	0,00	
- Pembulatan	0,00	
- Hutang	296.646.000,00	
- Reklas Antar Golongan	0,00	
- Belanja Barang dan Jasa	0,00	
<b>Jumlah bertambah (Rp)</b>		<b>296.646.000,00</b>
<b>Berkurang :</b>		
- Belanja Pemeliharaan	0,00	
- Belanja Barang dan Jasa	0,00	
- Pembulatan	0,00	
- Hutang	0,00	



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

- Reklas Antar Golongan	0,00	
- Hibah	0,00	
<b>Jumlah berkurang (Rp)</b>		<b>0,00</b>
<b>Aset di Bawah Kapitalisasi (Rp)</b>		<b>0,00</b>
<b>Realisasi belanja yang dicatat sebagai Aset Tetap Tanah Tahun 2024 (Rp)</b>		<b>296.646.000,00</b>

Terdapat mutasi tambah dari hutang senilai Rp296.646.000,00 yang merupakan pembebasan lahan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) seluas 30.270 m<sup>2</sup> yang berlokasi di Kecamatan Jebus berdasarkan hasil reviu Inspektorat Daerah Nomor 700.1.2.1/014/ITDA/2025 tanggal 30 Januari 2025.

Nilai aset tetap berupa tanah per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp154.938.595.232,00 dan Rp154.637.341.232,00.

Mutasi bertambah nilai aset tetap tanah sebesar Rp316.978.040,00 dan mutasi berkurang sebesar Rp15.724.040,00.

Penjelasan mutasi aset tetap tanah adalah sebagai berikut :

<b>Saldo Akhir per 31 Desember 2023 Audited (Rp)</b>		<b>154.637.341.232,00</b>
Mutasi Bertambah		
1. Pengadaan/Belanja Modal	296.646.000,00	
2. Hibah	0,00	
3. Mutasi Antar OPD	15.724.040,00	
4. Koreksi Nilai	0,00	
5. Reklas Dari Persediaan	0,00	
6. Reklas	0,00	
7. Belum Tercatat	4.608.000,00	
<b>Jumlah Mutasi Bertambah</b>		<b>316.978.040,00</b>
Mutasi Berkurang		
1. Dihapus	0,00	
2. Mutasi Antar OPD	15.724.040,00	
3. Koreksi Nilai/Persediaan	0,00	
4. Hibah	0,00	
5. Reklas	0,00	
<b>Jumlah Mutasi Berkurang</b>		<b>15.724.040,00</b>
<b>Saldo Akhir per 31 Desember 2024 (Rp)</b>		<b>154.938.595.232,00</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

Secara lebih rinci, mutasi penambahan aset tetap tanah per OPD adalah sebagai berikut :

<b>OPD</b>	<b>31 Desember 2023 (Audited) (Rp)</b>	<b>Mutasi Bertambah (Rp)</b>	<b>Mutasi Berkurang (Rp)</b>	<b>31 Desember 2024 (Rp)</b>
Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	11.086.540.863,00	0,00	0,00	11.086.540.863,00
Dinas Kesehatan	3.597.221.676,00	0,00	0,00	3.597.221.676,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	121.108.656.252,00	296.646.000,00	0,00	121.405.302.252,00
Dinas Perhubungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	2.753.174.561,00	0,00	0,00	2.753.174.561,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	274.696.905,00	0,00	0,00	274.696.905,00
Dinas Lingkungan Hidup	2.921.754.280,00	0,00	0,00	2.921.754.280,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	24.128.000,00	0,00	0,00	24.128.000,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	2.182.618.354,00	0,00	15.724.040,00	2.166.894.314,00
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	0,00	15.724.040,00	0,00	15.724.040,00
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.519.020.100,00	0,00	0,00	1.519.020.100,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.056.291.180,00	0,00	0,00	2.056.291.180,00
Dinas Perikanan	110.350.000,00	0,00	0,00	110.350.000,00
Sekretariat Daerah	4.562.892.187,00	0,00	0,00	4.562.892.187,00
Sekretariat DPRD	275.753.000,00	0,00	0,00	275.753.000,00
Kecamatan Mentok	579.015.560,00	0,00	0,00	579.015.560,00
Kecamatan Simpang Teritip	9.239.550,00	0,00	0,00	9.239.550,00
Kecamatan Jebus	440.061.560,00	0,00	0,00	440.061.560,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

OPD	31 Desember 2023 (Audited) (Rp)	Mutasi Bertambah (Rp)	Mutasi Berkurang (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Kecamatan Kelapa	609.886.644,00	4.608.000,00	0,00	614.494.644,00
Kecamatan Tempilang	303.854.560,00	0,00	0,00	303.854.560,00
Kecamatan Parittiga	222.186.000,00	0,00	0,00	222.186.000,00
Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
BLUD RSUD	0,00	0,00	0,00	0,00
BLUD Puskesmas Mentok	0,00	0,00	0,00	0,00
BLUD Puskesmas Kelapa	0,00	0,00	0,00	0,00
BLUD Puskesmas Sekarbiru	0,00	0,00	0,00	0,00
BLUD Puskesmas Tempilang	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengelola	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>154.637.341.232,00</b>	<b>316.978.040,00</b>	<b>15.724.040,00</b>	<b>154.938.595.232,00</b>

Batas minimum kapitalisasi aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk pengadaan/pembelian tanah.

Pengeluaran Belanja Barang dan Jasa yang mengakibatkan adanya perolehan aset tetap hingga siap pakai. Peningkatan kapasitas/efisiensi dan memperpanjang umur teknis barang milik daerah dilakukan kapitalisasi.

Pengeluaran yang tidak dikapitalisasi terdiri dari:

1. Pengeluaran belanja pemeliharaan rutin yang bertujuan untuk mempertahankan fungsi aset tetap yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja.
2. Pengeluaran Belanja Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi yang tidak memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi.
3. Pengeluaran belanja barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa baik untuk dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

#### Pengakuan Tanah

1. Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Terdapat tanah yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat namun belum ada bukti kepemilikan yang sah karena berbagai kondisi yang menyebabkan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat belum dapat mengurus bukti kepemilikan atas tanah-tanah tersebut.

Daftar Tanah yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat namun belum ada bukti kepemilikan yang sah adalah sebagai berikut :

No	OPD	Alamat/ Lokasi	Tahun Perolehan	Ukuran	Harga (Rp)	Pengguna	Keterangan
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga						
	Sekolah di Kec. Jebus	Dusun Kampak, Kec. Jebus	1981	7.000 M <sup>2</sup>	35.000.000,00	SDN 16 JEBUS	Tanah tersebut berstatus Hutan Lindung
	Sekolah di Kec. Kelapa	Dusun Lagok, Desa Kacung				SDN 25 Kelapa	Merupakan tanah milik PT. Bumi Permai Lestari
		Dusun Suban, Desa Terentang				SDN 26 Kelapa	Merupakan tanah milik PT. Bumi Permai Lestari
	Sekolah di Kec. Parittiga	Desa Bakit	2021		1,00	SMPN 4 Parittiga	
2	Dinas Kesehatan						
	Puskesmas di Kec. Teritip	Desa Simpang Gong	2008	625 M <sup>2</sup>	3.125.000	Polindes Sp. Gong	Merupakan Tanah Desa Simpang Gong
		Desa Air Nyatoh		195 M	248.000	Polindes Air Nyatoh	Tanah tersebut diakui oleh masyarakat setempat
		Puskesmas Kec. Jebus	Dusun Rukam	187 M	219.000	Pustu Rukam	Tanah tersebut diakui oleh masyarakat setempat
			Desa Ketap	385,80 M	1.929.000	Poskesdes Ketap	Merupakan tanah Desa
			Desa Sinar Manik	450 M	2.250.000	Rumah Para Medis	Tanah tersebut diakui oleh masyarakat setempat
	Puskesmas di Kec. Parittiga	Dusun Penganak	2006	694,60 M	4.966.390	Pustu Air Gantang	Tanah tersebut berstatus Hutan Lindung
		Desa Cupat	1998	600 M	4.290.000	Polindes Cupat	Kawasan Pertambangan PT. Timah dan Hutan Produksi
		Desa Kapit	1988	375 M	1.875.000	Poskesdes Kapit	Merupakan tanah Desa
	Puskesmas di Kec. Tempilang	Desa Air Lintang	1978	162,40 M	812.000	Pustu Air Lintang	Merupakan tanah Desa
		Desa Buyan Kelumbi	1994	280,50 M	1.402.500	Poskesdes Buyan Kelumbi	Merupakan tanah Desa
		Desa Sangku	1996	300 M	1.500.000	Poskesdes Sangku	Merupakan tanah Desa



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

No	OPD	Alamat/ Lokasi	Tahun Perolehan	Ukuran	Harga (Rp)	Pengguna	Keterangan
		Desa Simpang Yul	2000	197 M	689.500	Polindes Simpang Yul	Merupakan tanah Desa
		Desa Sinar Surya	2006	546 M	262.080	Polindes Sinar Surya	Merupakan tanah Desa
		Desa Tanjung Nyiur	2008	578 M	2.023.000	Poskesdes Tanjung Nyiur	Merupakan tanah Desa
		Dusun Buyan. Desa Buyan Kelumbi	2008	600 M	3.000.000	Poskesdes Buyan	Merupakan tanah Desa

2. Dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Daftar tanah milik Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang di atasnya dibangun oleh masyarakat tanpa persetujuan ataupun perjanjian hukum dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian BMD	Pemanfaatan	Perolehan	Subjek Pemakai Hasil Investigasi	Luas (m <sup>2</sup> )	OPD/ Instansi	Harga Sewa yang Ditetapkan Tahun 2017 (Rp)	Lokasi	Keterangan
1.	Tanah Eks SDN 262	Sebagian Tanah untuk Bengkel dan Warung Kopi Kebun Nanas	P3D Bangka Induk Ke Bangka Barat Tahun 2003	Sdr.Muzakir	50	Pengelola	688.000,00	Jl. Hos Cokroaminoto RT/RW. 01/02 Kampung Air Terjun Kel. Sungai Daeng	- Telah dilakukan investigasi Kepemilikan - Telah dilakukan Pengamanan Berupa Papan Nama Kepemilikan
2.	Tanah GOR Muntok	Sebagian Tanah untuk Kantin GOR	Hibah PT Timah Tahun 1998	Sdr.Arlan	84.5	Pengelola	3.317.000,00	GOR Jl. Jend. Sudirman Kel. Sungai Daeng	- Telah dilakukan Pendekatan/Pemberitahuan secara lisan tentang penjelasan kepada subjek hukum yang memanfaatkan



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

No	Uraian BMD	Pemanfaatan	Perolehan	Subjek Pemakai Hasil Investigasi	Luas (m <sup>2</sup> )	OPD/ Instansi	Harga Sewa yang Ditetapkan Tahun 2017 (Rp)	Lokasi	Keterangan
3.	Tanah GOR Muntok	Sebagian Tanah untuk Billiard Center	Hibah PT Timah Tahun 1998	Sdr.Arlan	84,5	Pengelola	3.317.000,00	GOR Jl. Jend. Sudirman Kel. Sungai Daeng	BMD tanggal 15 November 2016 - Telah dilakukan Penilaian Sewa - Telah dilayangkan surat pemberitahuan 1, 2 dan terakhir Sewa BMD
									berisi himbauan mengajukan Pemanfaatan BMD Berupa Sewa
Total								7.322.000,00	

3. Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sampai dengan Semester II Tahun 2024 tidak terdapat tanah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang sertifikat bukti kepemilikannya ganda.
4. Tanah dapat diperoleh melalui pembelian, pertukaran aset, hibah/donasi, dan lain-lain. Perolehan tanah melalui pembelian secara tunai diakui sebagai aset tetap-tanah, dan mengurangi Kas Umum Negara/Daerah pada neraca. Dalam rangka penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran, perolehan tanah melalui pembelian diakui sebagai belanja modal. Perolehan tanah melalui hibah/donasi diakui sebagai penambah nilai tanah pada neraca, dan sebagai pendapatan-LO, Perolehan tanah melalui pembelian kredit diakui sebagai aset tetap tanah, dan sebagai kewajiban pada neraca.
5. Tanah wakaf yang digunakan oleh instansi pemerintah tidak disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah karena Pemerintah tidak memiliki dan/atau tidak menguasai tanah wakaf tersebut. Sampai dengan 31 Desember 2024 tidak terdapat tanah wakaf yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

Daftar Tanah yang sudah bersertifikat :

No	Nama Pada Sertifikat	Luas (m <sup>2</sup> )	No Sertifikat	Tahun	OPD Pengguna
1	Gedung DPRD	15.282	153	2011	
2	DISHUBPARINFORM	2.659	154	2011	DINKOMINFO
3	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.547	155	2011	
4	DISPERINDAGKOP dan UKM	3.076	156	2011	DKUP
5	Dinas Pekerjaan Umum	11.174	157	2011	DPUPR
6	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	5.742	158	2011	BPKAD
7	DIKPORA	5.677	159	2011	
8	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	3.814	160	2011	DISPARBUD
9	Gedung Kantor Arsip dan Perpustakaan	3.285	161	2011	
10	Ruang Terbuka Hijau dan Lapangan Upacara	29.261	169	2013	
11	Ruang Terbuka Hijau	8.559	172	2013	
12	Kantor Pengelolaan Hutan Produksi	2.820	177	2014	
13	Gedung Metrologi	3.111	186	2018	
14	Gedung Uji Kelayakan Kendaraan	4.032	187	2018	
<b>Total</b>		<b>101.039</b>			

Sedangkan tanah yang ditempati OPD lain belum bersertifikat.

Catatan:

1. OPD belum mencatat tanah pada masing-masing buku inventaris karena belum ada penyerahan dari Sekretariat Daerah;
2. Tanah yang belum bersertifikat karena tanah masih berstatus Hutan Lindung (HL), dan sekarang masih dalam proses permohonan pengalihan status tanah dari HL menjadi APL ke Pemerintah Pusat.

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2018 dan tahun 2019 telah melakukan pengukuran kembali tanah komplek pemda tersebut yang dilakukan secara bertahap yaitu:

1. Tahap I pengukuran ulang dengan cara menggunakan drone dan tahap ini telah selesai dilakukan, sedangkan
2. Tahap II pengukuran ulang dengan cara memasang patok beton dan membuat titik GPS, masih dalam proses penyelesaian hingga terbitnya laporan keuangan ini.

Sehingga ukuran yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan pengukuran ulang belum dapat disajikan.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

### 5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Aset tetap peralatan dan mesin dinilai berdasarkan harga perolehannya. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan masih harus dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

#### Nilai Tercatat Peralatan dan Mesin

Nilai tercatat (*carrying amount*) aset tetap peralatan dan mesin adalah nilai buku aset tetap tersebut, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset tersebut setelah dikurangi akumulasi penyusutannya.

#### Nilai Batasan Minimum Kapitalisasi Peralatan dan Mesin

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, nilai minimal kapitalisasi untuk aset peralatan dan mesin yaitu sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00.

#### Rincian dan Mutasi Peralatan dan Mesin

Mutasi bertambah dan berkurang terhadap Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024 yang diakui sebagai aset tetap untuk golongan peralatan dan mesin adalah sebagai berikut:

Realisasi Anggaran tahun 2024 (Rp)		20.170.550.842,00
<b>Bertambah :</b>		
- Belanja Pemeliharaan	0,00	
- Pembulatan	5,00	
- Hutang	843.423.270,00	
- Reklas Antar Golongan	1.073.787.375,00	
- Belanja Barang dan Jasa	134.435.000,00	
<b>Jumlah bertambah</b>		<b>2.051.645.650,00</b>
<b>Berkurang :</b>		
- Belanja Pemeliharaan	61.021.974,00	
- Belanja Barang dan Jasa	66.053.000,00	
- Pembulatan	9,00	
- Hutang	0,00	
- Reklas Antar Golongan	158.803.765,00	
- Hibah	0,00	
<b>Jumlah berkurang</b>		<b>285.878.748,00</b>
<b>Aset di Bawah Kapitalisasi</b>		<b>515.582.388,00</b>
<b>Aset Tak Berwujud</b>		<b>44.400.000,00</b>
Realisasi belanja yang dicatat sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2024 (Rp)		21.376.335.356,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

Nilai aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp424.339.362.960,00 dan Rp403.352.708.976,00. Mutasi bertambah nilai aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp32.872.085.027,00 dan mutasi berkurang sebesar Rp11.885.431.043,00.

**Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin**

<b>Saldo Akhir Per 31 Desember 2023 (Rp)</b>		<b>403.352.708.976,00</b>
<b>Mutasi Bertambah (Rp)</b>		
1.	Pengadaan/Belanja Modal	21.376.335.356,00
2.	Hibah	667.166.917,00
3.	Mutasi Antar OPD	10.221.982.249,00
4.	Koreksi nilai/persediaan	20.362.005
5.	Reklas Dari Persediaan	0,00
6.	Reklas	586.238.500,00
7.	Belum Tercatat	0,00
<b>Jumlah Mutasi Bertambah</b>		<b>32.872.085.027,00</b>
<b>Mutasi Berkurang (Rp)</b>		
1.	Penghapusan	0,00
2.	Mutasi Antar OPD	10.221.982.249,00
3.	Koreksi Nilai/Persediaan	0,00
4.	Hibah	0,00
5.	Reklas	1.663.448.794,00
<b>Jumlah Mutasi Berkurang</b>		<b>11.885.431.043,00</b>
<b>Saldo Akhir per 31 Desember 2024 (Rp)</b>		<b>424.339.362.960,00</b>

Secara lebih rinci, mutasi penambahan aset tetap peralatan dan mesin per OPD adalah sebagai berikut :

<b>OPD</b>	<b>31 Desember 2023 (Audited) (Rp)</b>	<b>Mutasi Bertambah (Rp)</b>	<b>Mutasi Berkurang (Rp)</b>	<b>31 Desember 2024 (Rp)</b>
Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	114.933.947.037,00	5.324.004.451,00	784.279.671,00	119.473.671.817,00
Dinas Kesehatan	126.345.545.611,00	13.898.753.158,00	7.549.189.354,00	132.695.109.415,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10.694.912.472,00	86.250.000,00	0,00	10.781.162.472,00
Dinas Perhubungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	15.366.749.764,00	16.800.005,00	596.362.466,00	14.787.187.303,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	4.649.369.195,00	151.210.543,00	0,00	4.800.579.738,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

OPD	31 Desember 2023 (Audited) (Rp)	Mutasi Bertambah (Rp)	Mutasi Berkurang (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	487.563.349,00	703.365.500,00	0,00	1.190.928.849,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Desa	1.503.699.985,00	92.000.000,00	0,00	1.595.699.985,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	10.170.564.948,00	19.900.000,00	0,00	10.190.464.948,00
Dinas Lingkungan Hidup	14.853.880.318,00	1.456.300.000,00	0,00	16.310.180.318,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.515.458.077,00	164.152.000,00	0,00	2.679.610.077,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.390.762.866,00	526.487.000,00	0,00	5.917.249.866,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	4.258.058.806,00	159.592.500,00	0,00	4.417.651.306,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	4.103.307.943,00	16.900.000,00	1.197.974.804,00	2.922.233.139,00
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	0,00	2.581.276.618,00	0,00	2.581.276.618,00
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.805.495.162,00	575.637.393,00	748.791.780,00	2.632.340.775,00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	6.796.194.658,00	601.458.366,00	0,00	7.397.653.024,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.566.965.492,00	130.670.000,00	0,00	2.697.635.492,00
Dinas Perikanan	1.956.177.216,00	23.300.000,00	0,00	1.979.477.216,00
Sekretariat Daerah	25.052.057.382,00	1.101.160.362,00	444.328.862,00	25.708.888.882,00
Sekretariat DPRD	8.764.508.719,00	1.303.921.136,00	0,00	10.068.429.855,00
Kecamatan Mentok	1.545.883.388,00	111.531.000,00	0,00	1.657.414.388,00
Kecamatan Simpang Teritip	755.936.840,00	20.000.000,00	0,00	775.936.840,00
Kecamatan Jebus	1.477.383.113,00	20.000.000,00	97.556.100,00	1.399.827.013,00
Kecamatan Kelapa	1.471.565.137,00	73.725.000,00	0,00	1.545.290.137,00
Kecamatan Tempilang	603.493.939,00	20.000.000,00	0,00	623.493.939,00
Kecamatan Parittiga	1.367.055.299,00	45.000.000,00	0,00	1.412.055.299,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

OPD	31 Desember 2023 (Audited) (Rp)	Mutasi Bertambah (Rp)	Mutasi Berkurang (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Inspektorat Daerah	1.084.261.442,00	0,00	0,00	1.084.261.442,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2.977.959.259,00	84.000.000,00	466.948.006,00	2.595.011.253,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	3.312.602.519,00	25.850.000,00	0,00	3.338.452.519,00
Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	4.328.821.570,00	80.200.000,00	0,00	4.409.021.570,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	4.234.711.791,00	353.000.000,00	0,00	4.587.711.791,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	686.161.500,00	18.000.000,00	0,00	704.161.500,00
BLUD RSUD	16.291.654.179,00	2.721.512.895,00	0,00	19.013.167.074,00
BLUD Peskesmas Mentok	0,00	109.514.000,00	0,00	109.514.000,00
BLUD Puskesmas Kelapa	0,00	4.995.000,00	0,00	4.995.000,00
BLUD Puskesmas Sekarbiru	0,00	85.440.000,00	0,00	85.440.000,00
BLUD Puskesmas Tempilang	0,00	166.178.100,00	0,00	166.178.100,00
<b>Total</b>	<b>403.352.708.976,00</b>	<b>32.872.085.027,00</b>	<b>11.885.431.043,00</b>	<b>424.339.362.960,00</b>

Pengeluaran Belanja Barang dan Jasa yang mengakibatkan adanya perolehan aset tetap hingga siap pakai, peningkatan kapasitas/efisiensi dan memperpanjang umur teknis barang milik daerah dilakukan kapitalisasi.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap ditetapkan untuk peralatan dan mesin dan peralatan olahraga adalah yang nilainya minimum 10,00% dari harga perolehan. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya.

Pengeluaran yang tidak dikapitalisasi terdiri dari:

1. Pengeluaran belanja pemeliharaan rutin yang bertujuan untuk mempertahankan fungsi aset tetap yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja.
2. Pengeluaran Belanja Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi yang tidak memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi.
3. Pengeluaran belanja barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa baik untuk dipasarkan maupun tidak dipasarkan.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

Penyusutan aset tetap peralatan dan mesin dilakukan dengan metode garis lurus (straight line).

Berikut nilai aset tetap peralatan dan mesin per OPD :

**Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin OPD**  
**Per 31 Desember 2024**

OPD	Nilai Bruto Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Nilai Buku Aset Tetap Peralatan dan Mesin
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	119.473.671.817,00	94.504.407.663,00	24.969.264.154,00
Dinas Kesehatan	132.695.109.415,00	102.315.764.648,00	30.379.344.767,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10.781.162.472,00	9.466.420.267,00	1.314.742.205,00
Dinas Perhubungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	14.787.187.303,00	9.791.704.680,00	4.995.482.623,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	4.800.579.738,00	4.624.541.369,00	176.038.369,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.190.928.849,00	801.903.029,00	389.025.820,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Desa	1.595.699.985,00	1.342.469.260,00	253.230.725,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	10.190.464.948,00	9.538.726.625,00	651.738.323,00
Dinas Lingkungan Hidup	16.310.180.318,00	11.641.123.467,00	4.669.056.851,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.679.610.077,00	2.187.152.262,00	492.457.815,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.917.249.866,00	4.924.558.096,00	992.691.770,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	4.417.651.306,00	3.896.506.790,00	521.144.516,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	2.922.233.139,00	2.834.472.387,00	87.760.752,00
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	2.581.276.618,00	1.069.253.609,00	1.512.023.009,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

OPD	Nilai Bruto Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Nilai Buku Aset Tetap Peralatan dan Mesin
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.632.340.775,00	2.038.148.505,00	594.192.270,00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	7.397.653.024,00	6.651.473.967,00	746.179.057,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.697.635.492,00	1.803.577.678,00	894.057.814,00
Dinas Perikanan	1.979.477.216,00	1.891.317.773,00	88.159.443,00
Sekretariat Daerah	25.708.888.882,00	22.689.705.564,00	3.019.183.318,00
Sekretariat DPRD	10.068.429.855,00	7.508.529.556,00	2.559.900.299,00
Kecamatan Mentok	1.657.414.388,00	1.266.678.197,00	390.736.191,00
Kecamatan Simpang Teritip	775.936.840,00	753.883.506,00	22.053.334,00
Kecamatan Jebus	1.399.827.013,00	1.172.512.493,00	227.314.520,00
Kecamatan Kelapa	1.545.290.137,00	1.197.538.727,00	347.751.410,00
Kecamatan Tempilang	623.493.939,00	563.861.106,00	59.632.833,00
Kecamatan Parittiga	1.412.055.299,00	1.326.115.633,00	85.939.666,00
Inspektorat Daerah	1.084.261.442,00	1.011.805.608,00	72.455.834,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2.595.011.253,00	2.388.878.474,00	206.132.779,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	3.338.452.519,00	3.163.674.234,00	174.778.285,00
Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	4.409.021.570,00	4.249.831.343,00	159.190.227,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	4.587.711.791,00	4.113.706.684,00	474.005.107,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	704.161.500,00	560.318.949,00	143.842.551,00
BLUD RSUD	19.013.167.074,00	10.003.603.623,00	9.009.563.451,00
BLUD Puskesmas Mentok	109.514.000,00	7.624.814,00	101.889.186,00
BLUD Puskesmas Kelapa	4.995.000,00	333.000,00	4.662.000,00
BLUD Puskesmas Sekarbiru	85.440.000,00	4.272.000,00	81.168.000,00
BLUD Puskesmas Tempilang	166.178.100,00	14.847.545,00	151.330.555,00
<b>Total</b>	<b>424.339.362.960,00</b>	<b>333.321.243.131,00</b>	<b>91.018.119.829,00</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

### 5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

#### Biaya Perolehan Gedung dan Bangunan

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan masih harus dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai gedung dan bangunan tersebut siap digunakan.

#### Nilai Tercatat Gedung dan Bangunan

Nilai tercatat (*carrying amount*) aset tetap gedung dan bangunan adalah nilai buku aset tetap tersebut, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset tersebut setelah dikurangi akumulasi penyusutannya.

#### Nilai Batasan Minimum Kapitalisasi Gedung dan Bangunan

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, nilai minimal kapitalisasi untuk gedung dan bangunan adalah sama dengan atau lebih Rp10.000.000,00.

Jika biaya perolehan per satuan gedung dan bangunan kurang dari nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap gedung dan bangunan, maka OPD mengakui/mencatat perolehan gedung dan bangunan sebagai beban operasional, dan oleh karena itu tidak disajikan di dalam neraca, namun diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Mutasi bertambah dan berkurang terhadap Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024 yang diakui sebagai aset tetap untuk golongan Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:

Realisasi Anggaran tahun 2024		32.599.542.695,00
<b>Bertambah :</b>		
- Belanja Pemeliharaan	838.375.080,00	
- Pembulatan	1,00	
- Hutang	1.323.225.153,00	
- Reklas Antar Golongan	2.180.413.053,00	
- Belanja Barang dan Jasa	114.414.400,00	
<b>Jumlah bertambah</b>		<b>4.456.427.687,00</b>
<b>Berkurang :</b>		
- Belanja Pemeliharaan	182.871.058,00	
- Belanja Barang dan Jasa	460.001.000,00	
- Pembulatan	0,00	
- Hutang	16.300.862.920,00	
- Reklas Antar Golongan	2.499.852.572,00	
- Hibah	0,00	
<b>Jumlah berkurang</b>		<b>19.443.587.550,00</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

Aset di Bawah Kapitalisasi		13.400.000,00
Realisasi belanja yang dicatat sebagai Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2024 (Rp)		17.598.982.832,00

Rincian dan Mutasi Gedung dan Bangunan

Nilai aset tetap berupa gedung dan bangunan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp726.977.145.214,00 dan Rp704.915.064.506,00.

Mutasi bertambah nilai aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp42.561.072.620,00 dan mutasi berkurang sebesar Rp20.498.991.912,00.

Penjelasan mutasi aset tetap gedung dan bangunan adalah sebagai berikut :

<b>Saldo Akhir per 31 Desember 2023 (Rp)</b>		<b>704.915.064.506,00</b>
<b>Mutasi Bertambah (Rp)</b>		
1. Pengadaan/Belanja Modal	17.598.982.832,00	
2. Hibah	5.853.565.902,00	
3. Mutasi Antar OPD	18.909.748.002,00	
4. Koreksi Nilai/Persediaan	0,00	
5. Reklas Dari Persediaan	0,00	
6. Reklas	172.035.984,00	
7. Belum Tercatat	26.739.900,00	
<b>Jumlah Mutasi Bertambah</b>		<b>42.561.072.620,00</b>
<b>Mutasi Berkurang (Rp)</b>		
1. Penghapusan	889.952.727,00	
2. Mutasi Antar OPD	18.934.723.002,00	
3. Koreksi Nilai/Persediaan	12.190.000,00	
4. Hibah	0,00	
5. Reklas	662.126.183,00	
<b>Jumlah Mutasi Berkurang</b>		<b>20.498.991.912,00</b>
<b>Saldo Akhir per 31 Desember 2024 (Rp)</b>		<b>726.977.145.214,00</b>

Secara lebih rinci, mutasi penambahan aset tetap gedung dan bangunan per OPD adalah sebagai berikut :

OPD	31 Desember 2023 (Audited) (Rp)	Mutasi Bertambah (Rp)	Mutasi Berkurang (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	259.632.716.593,00	20.728.997.418,00	8.710.578.918,00	271.651.135.093,00
Dinas Kesehatan	96.184.862.466,00	283.226.600,00	320.506.750,00	96.147.582.316,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan	119.081.482.118,00	151.850.000,00	3.339.110.878,00	115.894.221.240,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

OPD	31 Desember 2023 (Audited) (Rp)	Mutasi Bertambah (Rp)	Mutasi Berkurang (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Ruang				
Dinas Perhubungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	9.165.210.014,00	840.139.980,00	0,00	10.005.349.994,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	806.007.300,00	0,00	0,00	806.007.300,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	85.555.000,00	24.975.000,00	60.580.000,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Desa	1.365.960.790,00	0,00	0,00	1.365.960.790,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	10.576.913.782,00	0,00	0,00	10.576.913.782,00
Dinas Lingkungan Hidup	6.857.329.538,00	0,00	0,00	6.857.329.538,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.545.224.200,00	0,00	0,00	1.545.224.200,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.131.389.741,00	783.970.949,00	0,00	3.915.360.690,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	1.534.594.600,00	0,00	0,00	1.534.594.600,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	39.677.945.790,00	0,00	7.372.126.347,00	32.305.819.443,00
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	0,00	10.351.577.991,00	0,00	10.351.577.991,00
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.355.162.086,00	0,00	619.181.719,00	1.735.980.367,00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	16.280.635.950,00	4.485.854.490,00	0,00	20.766.490.440,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	13.026.446.857,00	0,00	0,00	13.026.446.857,00
Dinas Perikanan	4.385.533.815,00	0,00	0,00	4.385.533.815,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

<b>OPD</b>	<b>31 Desember 2023 (Audited) (Rp)</b>	<b>Mutasi Bertambah (Rp)</b>	<b>Mutasi Berkurang (Rp)</b>	<b>31 Desember 2024 (Rp)</b>
Sekretariat Daerah	60.150.107.245,00	190.486.000,00	0,00	60.340.593.245,00
Sekretariat DPRD	15.409.989.017,00	4.496.489.192,00	0,00	19.906.478.209,00
Kecamatan Mentok	6.745.198.147,00	0,00	85.848.300,00	6.659.349.847,00
Kecamatan Simpang Teritip	4.363.907.444,00	0,00	0,00	4.363.907.444,00
Kecamatan Jebus	2.735.315.996,00	0,00	0,00	2.735.315.996,00
Kecamatan Kelapa	3.236.224.074,00	124.175.000,00	0,00	3.360.399.074,00
Kecamatan Tempilang	3.520.707.548,00	0,00	0,00	3.520.707.548,00
Kecamatan Parittiga	4.779.747.847,00	0,00	0,00	4.779.747.847,00
Inspektorat Daerah	881.865.000,00	0,00	0,00	881.865.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2.484.806.742,00	0,00	0,00	2.484.806.742,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	3.034.426.669,00	38.750.000,00	26.664.000,00	3.046.512.669,00
Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.402.303.000,00	0,00	0,00	1.402.303.000,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	7.743.348.295,00	0,00	0,00	7.743.348.295,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	664.873.460,00	0,00	0,00	664.873.460,00
BLUD RSUD	2.154.828.382,00	0,00	0,00	2.154.828.382,00
BLUD Puskesmas Mentok	0,00	0,00	0,00	0,00
BLUD Puskesmas Kelapa	0,00	0,00	0,00	0,00
BLUD Puskesmas Sekabiru	0,00	0,00	0,00	0,00
BLUD Puskesmas Tempilang	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>704.915.064.506,00</b>	<b>42.561.072.620,00</b>	<b>20.498.991.912,00</b>	<b>726.977.145.214,00</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

Pengeluaran Belanja Barang dan Jasa yang mengakibatkan adanya perolehan aset tetap hingga siap pakai, peningkatan kapasitas/efisiensi dan memperpanjang umur teknis barang milik daerah dilakukan kapitalisasi.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap ditetapkan untuk gedung dan bangunan yang nilainya minimum 25,00% dari harga perolehan.

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut diatas, diperlakukan sebagai biaya.

Pengeluaran yang tidak dikapitalisasi terdiri dari:

1. Pengeluaran belanja pemeliharaan rutin yang bertujuan untuk mempertahankan fungsi aset tetap yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja.
2. Pengeluaran Belanja Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi yang tidak memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi.
3. Pengeluaran belanja barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa baik untuk dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Penyusutan aset tetap gedung dan bangunan dilakukan dengan metode garis lurus (straight line).

Berikut nilai aset tetap gedung dan bangunan per OPD:

**Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan OPD  
per 31 Desember 2024**

OPD	Nilai Bruto Aset Tetap Gedung dan Bangunan (Rp)	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan (Rp)	Nilai Buku Aset Tetap Gedung dan Bangunan (Rp)
Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	271.651.135.093,00	79.497.428.384,00	192.153.706.709,00
Dinas Kesehatan	96.147.582.316,00	26.361.779.220,00	69.785.803.096,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	115.894.221.240,00	5.505.902.427,00	110.388.318.813,00
Dinas Perhubungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	10.005.349.994,00	1.188.459.273,00	8.816.890.721,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	806.007.300,00	249.615.924,00	556.391.376,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	60.580.000,00	908.700,00	59.671.300,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Desa	1.365.960.790,00	401.747.996,00	964.212.794,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

<b>OPD</b>	<b>Nilai Bruto Aset Tetap Gedung dan Bangunan (Rp)</b>	<b>Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan (Rp)</b>	<b>Nilai Buku Aset Tetap Gedung dan Bangunan (Rp)</b>
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	10.576.913.782,00	2.786.530.035,00	7.790.383.747,00
Dinas Lingkungan Hidup	6.857.329.538,00	1.827.969.784,00	5.029.359.754,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.545.224.200,00	461.924.686,00	1.083.299.514,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.915.360.690,00	774.139.290,00	3.141.221.400,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	1.534.594.600,00	399.997.060,00	1.134.597.540,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	32.305.819.443,00	8.005.008.013,00	24.300.811.430,00
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	10.351.577.991,00	398.280.156,00	9.953.297.835,00
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.735.980.367,00	522.915.583,00	1.213.064.784,00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	20.766.490.440,00	4.249.568.894,00	16.516.921.546,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	13.026.446.857,00	1.467.096.480,00	11.559.350.377,00
Dinas Perikanan	4.385.533.815,00	1.443.821.415,00	2.941.712.400,00
Sekretariat Daerah	60.340.593.245,00	14.498.657.213,00	45.841.936.032,00
Sekretariat DPRD	19.906.478.209,00	3.334.621.998,00	16.571.856.211,00
Kecamatan Mentok	6.659.349.847,00	1.510.670.913,00	5.148.678.934,00
Kecamatan Simpang Teritip	4.363.907.444,00	921.835.142,00	3.442.072.302,00
Kecamatan Jebus	2.735.315.996,00	1.067.528.116,00	1.667.787.880,00
Kecamatan Kelapa	3.360.399.074,00	1.303.369.783,00	2.057.029.291,00
Kecamatan Tempilang	3.520.707.548,00	1.188.697.251,00	2.332.010.297,00
Kecamatan Parittiga	4.779.747.847,00	924.842.718,00	3.854.905.129,00
Inspektorat Daerah	881.865.000,00	287.563.985,00	594.301.015,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2.484.806.742,00	716.449.590,00	1.768.357.152,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	3.046.512.669,00	813.347.987,00	2.233.164.682,00
Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.402.303.000,00	425.279.331,00	977.023.669,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	7.743.348.295,00	2.508.558.461,00	5.234.789.834,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

OPD	Nilai Bruto Aset Tetap Gedung dan Bangunan (Rp)	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan (Rp)	Nilai Buku Aset Tetap Gedung dan Bangunan (Rp)
Manusia Daerah			
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	664.873.460,00	208.961.367,00	455.912.093,00
BLUD RSUD	2.154.828.382,00	178.229.844,00	1.976.598.538,00
BLUD Puskesmas Mentok	0,00	0,00	0,00
BLUD Puskesmas Kelapa	0,00	0,00	0,00
BLUD Puskesmas Sekarbiru	0,00	0,00	0,00
BLUD Puskesmas Tempilang	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>726.977.145.214,00</b>	<b>165.431.707.019,00</b>	<b>561.545.438.195,00</b>

#### 5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Biaya Perolehan Jalan Irigasi dan Jaringan

Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan masih harus dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap digunakan.

Nilai Batasan Minimum Kapitalisasi Jalan Irigasi dan Jaringan

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, bahwa jalan, irigasi dan jaringan tidak memiliki nilai minimum kapitalisasi, sehingga seluruh jalan irigasi dan jaringan yang dalam kondisi baik dan digunakan dalam operasional disajikan di neraca.

Nilai Tercatat Jalan Irigasi dan Jaringan

Nilai tercatat (*carrying amount*) aset tetap jalan, irigasi dan jaringan adalah nilai buku aset tetap tersebut, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset tersebut setelah dikurangi akumulasi penyusutannya.

Mutasi bertambah dan berkurang terhadap Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024 yang diakui sebagai aset tetap untuk golongan Jalan Irigasi dan Jaringan adalah sebagai berikut:

<b>Realisasi Anggaran tahun 2024</b>		<b>48.440.286.471,64</b>
<b>Bertambah :</b>		
- Belanja Pemeliharaan	0,00	
- Pembulatan	108,36	
- Hutang	17.770.526.735,00	



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

- Reklas Antar Golongan	911.918.879,00	
- Belanja Barang dan Jasa	46.000.000,00	
<b>Jumlah bertambah</b>		<b>18.728.445.722,36</b>
<b>Berkurang :</b>		
- Belanja Pemeliharaan	0,00	
- Belanja Barang dan Jasa	0,00	
- Pembulatan	0,00	
- Hutang	0,00	
- Reklas Antar Golongan	167.834.000,00	
- Hibah	0,00	
<b>Jumlah berkurang</b>		<b>167.834.000,00</b>
<b>Aset di Bawah Kapitalisasi</b>		<b>0,00</b>
<b>Realisasi belanja yang dicatat sebagai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024 (Rp)</b>		<b>67.000.898.194,00</b>

Rincian dan Mutasi Jalan Irigasi dan Jaringan

Nilai aset tetap berupa jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp1.815.715.141.642,00 dan Rp1.710.307.522.236,00.

Mutasi bertambah nilai aset tetap jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp105.967.567.626,00 dan mutasi berkurang sebesar Rp559.948.220,00.

Penjelasan mutasi aset tetap jalan, irigasi dan jaringan adalah sebagai berikut :

<b>Saldo Akhir per 31 Desember 2023 (Rp)</b>		<b>1.710.307.522.236,00</b>
<b>Mutasi Bertambah (Rp)</b>		
1. Pengadaan/Belanja Modal	67.000.898.194,00	
2. Hibah	5.172.342.106,00	
3. Mutasi Antar OPD	559.098.220,00	
4. Koreksi Nilai/Persediaan	0,00	
5. Reklas Dari Persediaan	0,00	
6. Reklas	31.421.339.106,00	
7. Belum Tercatat	1.813.890.000,00	
<b>Jumlah Mutasi Bertambah</b>		<b>105.967.567.626,00</b>
<b>Mutasi Berkurang (Rp)</b>		



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

1.	Dihapus	0,00	
2.	Mutasi Antar OPD	559.098.220,00	
3.	Koreksi Nilai/Persediaan	850.000,00	
4.	Hibah	0,00	
5.	Reklas	0,00	
	<b>Jumlah Mutasi Berkurang</b>		<b>559.948.220,00</b>
	<b>Saldo Akhir per 31 Desember 2024 (Rp)</b>		<b>1.815.715.141.642,00</b>

Secara lebih rinci, mutasi penambahan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan per OPD adalah sebagai berikut :

OPD	31 Desember 2023 (Audited) (Rp)	Mutasi Bertambah (Rp)	Mutasi Berkurang (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Dinas Pendidikan, Kepemudaan. dan Olahraga	4.792.741.930,00	430.754.582,00	211.585.102,00	5.011.911.410,00
Dinas Kesehatan	11.114.866.111,00	259.635.930,00	129.817.965,00	11.244.684.076,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.620.424.241.612,00	95.985.751.363,00	0,00	1.716.409.992.975,00
Dinas Perhubungan Perumahan, dan Kawasan Permukiman	25.982.193.190,00	6.250.648.808,00	0,00	32.232.841.998,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Desa	83.379.200,00	10.000.000,00	0,00	93.379.200,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	11.903.617.597,00	0,00	0,00	11.903.617.597,00
Dinas Lingkungan Hidup	11.127.386.075,00	0,00	0,00	11.127.386.075,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

OPD	31 Desember 2023 (Audited) (Rp)	Mutasi Bertambah (Rp)	Mutasi Berkurang (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	95.580.000,00	0,00	0,00	95.580.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	582.436.022,00	0,00	0,00	582.436.022,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	1.786.485.750,00	0,00	0,00	1.786.485.750,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	1.259.011.961,00	0,00	60.261.153,00	1.198.750.808,00
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	0,00	248.471.154,00	0,00	248.471.154,00
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	567.633.025,00	0,00	158.284.000,00	409.349.025,00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	8.603.211.688,00	1.794.538.179,00	0,00	10.397.749.867,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	576.898.686,00	0,00	0,00	576.898.686,00
Dinas Perikanan	2.824.043.900,00	0,00	0,00	2.824.043.900,00
Sekretariat Daerah	2.258.211.990,00	0,00	0,00	2.258.211.990,00
Sekretariat DPRD	836.047.341,00	230.559.900,00	0,00	1.066.607.241,00
Kecamatan Mentok	2.591.333.000,00	467.640.000,00	0,00	3.058.973.000,00
Kecamatan Simpang Teritip	28.500.000,00	0,00	0,00	28.500.000,00
Kecamatan Jebus	170.700.000,00	0,00	0,00	170.700.000,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

OPD	31 Desember 2023 (Audited) (Rp)	Mutasi Bertambah (Rp)	Mutasi Berkurang (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Kecamatan Kelapa	988.094.631,00	0,00	0,00	988.094.631,00
Kecamatan Tempilang	42.335.000,00	0,00	0,00	42.335.000,00
Kecamatan Parittiga	221.008.000,00	0,00	0,00	221.008.000,00
Inspektorat Daerah	54.540.250,00	0,00	0,00	54.540.250,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	99.741.000,00	0,00	0,00	99.741.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	190.283.800,00	0,00	0,00	190.283.800,00
Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	43.895.673,00	0,00	0,00	43.895.673,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	503.658.947,00	0,00	0,00	503.658.947,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	35.069.200,00	0,00	0,00	35.069.200,00
BLUD RSUD	520.376.657,00	289.567.710,00	0,00	809.944.367,00
BLUD Puskesmas Mentok	0,00			
BLUD Puskesmas Kelapa	0,00			
BLUD Puskesmas Sekarbiru	0,00			
BLUD Puskesmas Tempilang	0,00			
<b>Total</b>	<b>1.710.307.522.236,00</b>	<b>105.967.567.626,00</b>	<b>559.948.220,00</b>	<b>1.815.715.141.642,00</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

Pengeluaran Belanja Barang dan Jasa yang mengakibatkan adanya perolehan aset tetap hingga siap pakai, peningkatan kapasitas/efisiensi dan memperpanjang umur teknis barang milik daerah dilakukan kapitalisasi.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap ditetapkan untuk jalan, irigasi, dan jaringan yang nilainya minimum 10,00% dari harga perolehan.

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya.

Pengeluaran yang tidak dikapitalisasi terdiri dari:

1. Pengeluaran belanja pemeliharaan rutin yang bertujuan untuk mempertahankan fungsi aset tetap yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja.
2. Pengeluaran Belanja Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi yang tidak memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi.
3. Pengeluaran belanja barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa baik untuk dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Penyusutan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan dilakukan dengan metode garis lurus (straight line).

Berikut nilai aset tetap jalan, irigasi dan jaringan per OPD :

**Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan OPD**  
**Per 31 Desember 2024**

OPD	Nilai Bruto Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan (Rp)	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan (Rp)	Nilai Bersih Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan (Rp)
Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	5.011.911.410,00	1.246.110.699,00	3.765.800.711,00
Dinas Kesehatan	11.244.684.076,00	3.472.717.373,00	7.771.966.703,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.716.409.992.975,00	1.267.190.504.129,00	449.219.488.846,00
Dinas Perhubungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	32.232.841.998,00	14.479.784.454,00	17.753.057.544,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Desa	93.379.200,00	31.689.853,00	61.689.347,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	11.903.617.597,00	8.051.844.389,00	3.851.773.208,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

OPD	Nilai Bruto Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan (Rp)	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan (Rp)	Nilai Bersih Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan (Rp)
Dinas Lingkungan Hidup	11.127.386.075,00	8.246.178.105,00	2.881.207.970,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	95.580.000,00	31.691.637,00	63.888.363,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	582.436.022,00	168.964.239,00	413.471.783,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	1.786.485.750,00	1.072.029.417,00	714.456.333,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	1.198.750.808,00	431.031.552,00	767.719.256,00
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	248.471.154,00	87.086.997,00	161.384.157,00
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	409.349.025,00	154.062.143,00	255.286.882,00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	10.397.749.867,00	1.972.305.569,00	8.425.444.298,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	576.898.686,00	106.071.236,00	470.827.450,00
Dinas Perikanan	2.824.043.900,00	740.752.814,00	2.083.291.086,00
Sekretariat Daerah	2.258.211.990,00	1.034.502.222,00	1.223.709.768,00
Sekretariat DPRD	1.066.607.241,00	242.109.871,00	824.497.370,00
Kecamatan Mentok	3.058.973.000,00	1.113.978.900,00	1.944.994.100,00
Kecamatan Simpang Teritip	28.500.000,00	8.800.000,00	19.700.000,00
Kecamatan Jebus	170.700.000,00	34.424.245,00	136.275.755,00
Kecamatan Kelapa	988.094.631,00	304.625.272,00	683.469.359,00
Kecamatan Tempilang	42.335.000,00	21.964.636,00	20.370.364,00
Kecamatan Parittiga	221.008.000,00	165.210.958,00	55.797.042,00
Inspektorat Daerah	54.540.250,00	23.225.768,00	31.314.482,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	99.741.000,00	38.646.555,00	61.094.445,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	190.283.800,00	71.224.925,00	119.058.875,00
Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	43.895.673,00	23.572.274,00	20.323.399,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	503.658.947,00	116.505.228,00	387.153.719,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

OPD	Nilai Bruto Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan (Rp)	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan (Rp)	Nilai Bersih Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan (Rp)
Manusia Daerah			
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	35.069.200,00	12.102.168,00	22.967.032,00
BLUD RSUD	809.944.367,00	51.398.798,00	758.545.569,00
BLUD Puskesmas Mentok		0,00	0,00
BLUD Puskesmas Kelapa		0,00	0,00
BLUD Puskesmas Sekarbiru		0,00	0,00
BLUD Puskesmas Tempilang		0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.815.715.141.642,00</b>	<b>1.310.745.116.426,00</b>	<b>504.970.025.216,00</b>

#### 5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Aset Tetap Lainnya terdiri dari buku-buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, hewan, biota perairan, tanaman, barang koleksi non budaya, aset tetap dalam renovasi.

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan masih harus dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap dipakai.

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan.

##### Nilai Batasan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya yang memiliki nilai minimum kapitalisasi adalah buku dan hewan/ternak dan tumbuhan, yaitu:

1. Nilai batasan minimum kapitalisasi buku perpustakaan adalah Rp100.000,00;
2. Nilai batasan minimum kapitalisasi barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga adalah Rp0,00;
3. Nilai batasan minimum kapitalisasi hewan, ternak, tumbuhan pohon dan tumbuhan tanaman hias adalah Rp100.000,00.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

Sehingga aset tetap lainnya berupa buku dan hewan/ternak dan tumbuhan yang melampaui nilai batasan minimum kapitalisasi dan dalam kondisi baik, akan disajikan dan dilaporkan di neraca. Sebaliknya, jika tidak melampaui nilai batasan minimal kapitalisasi ataupun dalam kondisi rusak berat, maka aset tetap tersebut tidak disajikan dalam neraca.

Sedangkan untuk aset tetap lainnya berupa alat kesenian/barang bercorak kesenian karena tidak memiliki nilai batasan minimal kapitalisasi, maka seluruh aset tetap tersebut jika dalam kondisi baik akan disajikan seluruhnya di neraca.

**Nilai Tercatat aset tetap lainnya**

Nilai tercatat (*carrying amount*) aset tetap lainnya adalah nilai buku aset tetap tersebut yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset tersebut.

Aset Tetap Lainnya berupa buku perpustakaan, hewan dan tanaman tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Mutasi bertambah dan berkurang terhadap Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran yang diakui sebagai aset tetap untuk golongan Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut:

<b>Realisasi Anggaran tahun 2024</b>		<b>5.849.002.131,00</b>
<b>Bertambah :</b>		
- Belanja Pemeliharaan	20.649.556,00	
- Pembulatan	0,00	
- Hutang	0,00	
- Reklas Antar Golongan	1.682.492.431,00	
- Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
<b>Jumlah bertambah</b>		<b>1.718.141.987,00</b>
<b>Berkurang :</b>		
- Belanja Pemeliharaan	0,00	
- Belanja Barang dan Jasa	0,00	
- Pembulatan	0,00	
- Hutang	0,00	
- Reklas Antar Golongan	3.115.266.401,00	
- Hibah	0,00	
<b>Jumlah berkurang</b>		<b>3.115.266.401,00</b>
<b>Aset di Bawah Kapitalisasi</b>		<b>2.509.749.130,00</b>
<b>Aset Tak Berwujud</b>		<b>0,00</b>
<b>Realisasi belanja yang dicatat sebagai Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 (Rp)</b>		<b>1.942.128.587,00</b>

**Rincian dan Mutasi aset tetap lainnya**

Nilai aset tetap lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp19.670.563.356,00 dan Rp17.728.434.769,00.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

Mutasi bertambah nilai aset tetap lainnya sebesar Rp1.942.128.587,00 dan mutasi berkurang sebesar Rp0,00.

Penjelasan mutasi aset tetap lainnya adalah sebagai berikut :

<b>Saldo Akhir per 31 Desember 2023 (Rp)</b>		<b>17.728.434.769,00</b>
<b>Mutasi Bertambah (Rp)</b>		
1.	Pengadaan/Belanja Modal	1.942.128.587,00
2.	Hibah	0,00
3.	Mutasi Antar OPD	0,00
4.	Koreksi Nilai/Persediaan	0,00
5.	Reklas Dari Persediaan	0,00
6.	Reklas	0,00
7.	Belum Tercatat	0,00
<b>Jumlah Mutasi Bertambah</b>		<b>1.942.128.587,00</b>
<b>Mutasi Berkurang (Rp)</b>		
1.	Penghapusan	0,00
2.	Mutasi Antar OPD	0,00
3.	Koreksi Nilai/Persediaan	0,00
4.	Hibah	0,00
5.	Reklas	0,00
<b>Jumlah Mutasi Berkurang</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo Akhir per 31 Desember 2024 (Rp)</b>		<b>19.670.563.356,00</b>

Rincian Aset Tetap Lainnya per rincian objek adalah sebagai berikut:

<b>Aset Tetap Lainnya</b>	<b>Nilai (Rp)</b>
Bahan Perpustakaan	11.075.887.751,00
Barang Bercorak Kebudayaan/Kesenian	2.028.724.068,00
Hewan	246.000.000,00
Biota Perairan	32.799.992,00
Tanaman	0,00
Barang Koleksi Non Budaya	0,00
Aset Tetap Dalam Renovasi	6.287.151.545,00
<b>Total</b>	<b>19.670.563.356,00</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

Secara lebih rinci, mutasi penambahan aset tetap lainnya per OPD dengan rincian sebagai berikut :

<b>OPD</b>	<b>31 Desember 2023 (Audited) (Rp)</b>	<b>Mutasi Bertambah (Rp)</b>	<b>Mutasi Berkurang (Rp)</b>	<b>31 Desember 2024 (Rp)</b>
Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	10.610.969.895,00	244.572.400,00	0,00	10.855.542.295,00
Dinas Kesehatan	3.842.400,00	0,00	0,00	3.842.400,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perhubungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	322.346.500,00	0,00	0,00	322.346.500,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	4.256.500,00	0,00	0,00	4.256.500,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Desa	33.573.625,00	0,00	0,00	33.573.625,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	319.388.853,00	0,00	0,00	319.388.853,00
Dinas Lingkungan Hidup	1.517.200,00	0,00	0,00	1.517.200,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	315.312.020,00	0,00	0,00	315.312.020,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	1.542.000,00	0,00	0,00	1.542.000,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	17.903.740,00	0,00	0,00	17.903.740,00
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	218.500.000,00	00,0	0,00	218.500.000,00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	274.383.632,00	0,00	0,00	274.383.632,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	417.281.941,00	0,00	0,00	417.281.941,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

OPD	31 Desember 2023 (Audited) (Rp)	Mutasi Bertambah (Rp)	Mutasi Berkurang (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Dinas Perikanan	35.244.992,00	0,00	0,00	35.244.992,00
Sekretariat Daerah	96.159.768,00	0,00	0,00	96.159.768,00
Sekretariat DPRD	10.612.250,00	0,00	0,00	10.612.250,00
Kecamatan Mentok	254.819.000,00	0,00	0,00	254.819.000,00
Kecamatan Simpang Teritip	3.584.000,00	0,00	0,00	3.584.000,00
Kecamatan Jebus	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Kelapa	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00
Kecamatan Tempilang	15.798.450,00	0,00	0,00	15.798.450,00
Kecamatan Parittiga	5.898.500,00	0,00	0,00	5.898.500,00
Inspektorat Daerah	9.789.500,00	0,00	0,00	9.789.500,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	403.992.078,00	0,00	0,00	403.992.078,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	12.305.405,00	0,00	0,00	12.305.405,00
Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	6.117.100,00	0,00	0,00	6.117.100,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	12.855.850,00	0,00	0,00	12.855.850,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
BLUD RSUD	4.319.699.570,00	1.676.906.631,00	0,00	5.996.606.201,00
BLUD Puskesmas Mentok	0,00	20.649.556,00	0,00	20.649.556,00
BLUD Puskesmas Kelapa	0,00	0,00	0,00	0,00
BLUD Puskesmas Sekarbiru	0,00	0,00	0,00	0,00
BLUD Puskesmas Tempilang	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>17.728.434.769,00</b>	<b>1.942.128.587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.670.563.356,00</b>

Batas minimum kapitalisasi aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk pengadaan/pembelian/pembuatan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan, barang bercorak kesenian, hewan/ternak, dan tumbuhan.

Aset tetap lainnya yang dikapitalisasi dibukukan dan dilaporkan di dalam Neraca. Aset tetap lainnya yang tidak dikapitalisasi tidak disajikan dalam Neraca, namun tetap diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

### **5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) merupakan aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. KDP mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran atau belum mencapai 100,00% pengjerjaannya (belum selesai/dilanjutkan tahun berikutnya).

#### **Pengakuan KDP**

Suatu aset berwujud harus diakui sebagai KDP jika:

1. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
2. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal;
3. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

#### **Penilaian KDP**

Nilai KDP menggambarkan jumlah akumulasi biaya yang telah dikeluarkan melalui belanja modal untuk memperoleh aset tetap tersebut sampai akhir tahun pelaporan. Biaya tersebut merupakan biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi :

1. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia; biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
2. Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
3. Biaya penyewaan sarana dan peralatan;
4. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

Dan biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan konstruksi tertentu, antara lain:

1. Asuransi;
2. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
3. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya tersebut dialokasikan dengan metode yang sistematis, rasional dan konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama.

#### **Nilai Tercatat KDP**

Karena aset tetap KDP tidak dihitung penyusutannya, maka nilai tercatat untuk aset tetap KDP adalah sama dengan nilai perolehan aset tetap tersebut, yaitu jumlah akumulasi biaya yang telah dikeluarkan melalui belanja modal untuk memperoleh aset tetap tersebut sampai akhir tahun pelaporan.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

Mutasi bertambah dan berkurang terhadap Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024 yang diakui sebagai aset tetap untuk golongan Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah sebagai berikut:

<b>Realisasi Anggaran tahun 2023 (Rp)</b>		<b>0,00</b>
<b>Bertambah :</b>		
- Belanja Pemeliharan		0,00
- Pembulatan		0,00
- Hutang	517.810.854,00	
- Reklas Antar Golongan	93.145.000,00	
- Belanja Barang dan Jasa	99.815.000,00	
<b>Jumlah bertambah (Rp)</b>		<b>710.770.854,00</b>
<b>Berkurang :</b>		
- Belanja Pemeliharaan		0,00
- Belanja Barang dan Jasa		0,00
- Pembulatan		0,00
- Utang		0,00
- Reklas Antar Golongan		0,00
- Hibah		0,00
<b>Jumlah berkurang (Rp)</b>		<b>0,00</b>
<b>Realisasi belanja yang dicatat sebagai Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 (Rp)</b>		<b>710.770.854,00</b>

**Daftar Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan**  
**Per 31 Desember 2024**

<b>Uraian</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
<b>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>		<b>98.329.000,00</b>
DED Jalan	2021	98.329.000,00
<b>Dinas Kesehatan</b>		<b>495.720.484,00</b>
Rumah Sakit Pratama Kelapa (Master Plan)	2014	193.958.000,00
Jasa Konsultan Perencana Gedung Farmasi	2023	95.682.000,00
Jasa Konsultan Penyusunan DED (Rumah Sakit Type D Jebus)	2024	99.158.742,00
Jasa Konsultan Penyusunan DED (Rumah Sakit Type D Kelapa)	2024	97.271.742,00
Jasa Konsultan Perencana Rehab Sedang/Berat Puskesmas Jebus (Ruang Rawat Inap)	2024	9.650.000,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

<b>Uraian</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
<b>Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan</b>		<b>199.324.000,00</b>
Jasa Konsultan DED Pasar Mentok	2024	99.686.000,00
Jasa Konsultan FS Pembebasan Lahan Pasar Mentok Lama	2024	99.638.000,00
<b>Dinas Pariwisata dan Kebudayaan</b>		<b>351.215.430,00</b>
Landscape jalan setapak Gunung Menumbing	2018	7.130.000,00
Buku Pengetahuan Umum ( buku Penyusunan DED/SID Pariwisata batu rakit	2019	104.010.000,00
Jasa Kons tempat parkir di Menumbing	2020	15.670.000,00
Jasa Kons perencana turis information center (TIC)	2020	16.170.000,00
Jasa Kons Perencana Landscape Menumbing	2020	10.615.000,00
Jasa Kons Perencana Masterplan Gunung Menumbing	2024	99.815.000,00
Jasa Kons Perencana DED Gunung Menumbing	2024	97.805.430,00
<b>Sekretariat Daerah</b>		<b>93.145.000,00</b>
Jasa Konsultan Perencana Rehab Kantor Bupati	2024	93.145.000,00
<b>Sekretariat DPRD</b>		<b>214.439.940,00</b>
Jasa Kons Perencana Rehab Gedung Kantor	2021	99.869.000,00
Jasa Kons Perencana Interior Gedung Kantor	2021	99.970.000,00
Jasa Kons Perencana Lansdcape Kantor	2024	14.600.940,00
<b>Sub Total</b>		<b>1.452.173.854,00</b>

Terdapat Konstruksi Dalam Pengerajan yang tetap dilanjutkan namun belum dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya) karena pekerjaan konstruksi tersebut belum dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

#### **Mutasi KDP**

Mutasi KDP yang terjadi selama Tahun 2024 bertambah sebesar Rp710.770.854,00 dan mutasi berkurang sebesar Rp294.733.825,00.

Penjelasan mutasi aset tetap KDP adalah sebagai berikut :

<b>Saldo Akhir per 31 Desember 2023 (Rp)</b>		<b>1.036.136.825,00</b>
<b>Mutasi Bertambah (Rp)</b>		
1. Pengadaan/Belanja Modal	710.770.854,00	
2. Hibah	0,00	



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

3.	Mutasi Antar OPD	0,00	
4.	Koreksi Nilai/Persediaan	0,00	
5.	Belum Tercatat	0,00	
6.	Reklas	0,00	
7.	Selain Pengadaan	0,00	
	<b>Jumlah Mutasi Bertambah</b>		<b>710.770.854,00</b>
	<b>Mutasi Berkurang (Rp)</b>		
1.	Dihapus	0,00	
2.	Mutasi Antar OPD	0,00	
3.	Koreksi Nilai/Persediaan	0,00	
4.	Hibah	0,00	
5.	Reklas	294.733.825,00	
	<b>Jumlah Mutasi Berkurang</b>		<b>294.733.825,00</b>
	<b>Saldo Akhir per 31 Desember 2024 (Rp)</b>		<b>1.452.173.854,00</b>

#### Mutasi Penambahan KDP

Penambahan KDP di Tahun 2024 merupakan penambahan dari pengadaan aset tetap yang belum sempurna/selesai proses konstruksi maupun pengadaannya. Aset tetap yang belum selesai proses pembangunannya tersebut dikategorikan konstruksi dalam pengerjaan. Jika aset tetap tersebut sudah selesai proses pengadaannya, sudah diserahterimakan dan siap digunakan, maka aset tetap tersebut akan dipindahkan ke dalam golongan aset tetap sesuai golongan asetnya.

#### Mutasi Berkurang KDP

1. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
2. Reklas adalah perpindahan dari satu golongan aset ke golongan aset yang lain. KDP dapat dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria berikut :
  - a) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
  - b) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

Suatu KDP dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan sudah diserahterimakan dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya. Rincian nilai aset KDP yang direklas pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

Uraian	Tahun	Jumlah (Rp)
<b>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</b>		<b>194.903.825,00</b>
Jasa Kons Perencana Masterplan Boozem Pantai Teluk Rubiah	2023	99.519.825,00
Jasa Kons Perencana DED Boozem Pantai Iklim Teluk Rubiah	2023	95.384.000,00
<b>Sekretariat DPRD</b>		<b>99.830.000,00</b>
Jasa Konsultan Perencana Gedung Kantor	2023	99.830.000,00
<b>Sub Total</b>		<b>294.733.825,00</b>

Rincian KDP per OPD Tahun 2024 sebagai berikut :

OPD	31 Desember 2023 (Audited) (Rp)	Mutasi Bertambah (Rp)	Mutasi Berkurang (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Kesehatan	289.640.000,00	206.080.484,00	0,00	495.720.484,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	98.329.000,00	0,00	0,00	98.329.000,00
Dinas Perhubungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	0,00	199.324.000,00	0,00	199.324.000,00
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

OPD	31 Desember 2023 (Audited) (Rp)	Mutasi Bertambah (Rp)	Mutasi Berkurang (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	348.498.825,00	197.620.430,00	194.903.825,00	351.215.430,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00
Sekretariat Daerah	0,00	93.145.000,00	0,00	93.145.000,00
Sekretariat DPRD	299.669.000,00	14.600.940,00	99.830.000,00	214.439.940,00
Kecamatan Mentok	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Simpang Teritip	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Jebus	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Kelapa	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Tempilang	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Parittiga	0,00	0,00	0,00	0,00
Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
BLUD RSUD	0,00	0,00	0,00	0,00
BLUD Puskesmas Mentok	0,00	0,00	0,00	0,00
BLUD Puskesmas Kelapa	0,00	0,00	0,00	0,00
BLUD Puskesmas Sekarbiru	0,00	0,00	0,00	0,00
BLUD Puskesmas Tempilang	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.036.136.825,00</b>	<b>710.770.854,00</b>	<b>294.733.825,00</b>	<b>1.452.173.854,00</b>

#### Penghentian KDP

Dalam beberapa kasus suatu KDP dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena tidak tersedianya dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca. Namun apabila pembangunan



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

KDP direncanakan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen, maka saldo KDP tersebut harus dikeluarkan dari neraca.

#### **5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan**

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Metode penyusutan yang digunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*). Metode garis lurus atau *straight line* method adalah metode penyusutan dimana besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama umur ekonomis dari aset tetap yang bersangkutan. Metode ini dipilih karena metode ini dianggap sebagai metode yang paling mudah dan sederhana.

Penyusutan aset tetap diakui dengan nilai penyusutan untuk masing-masing periode dan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.

Masa Manfaat adalah periode suatu Aset Tetap yang dapat digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Penyusutan dilakukan terhadap Aset Tetap berupa:

- a. peralatan dan mesin;
- b. gedung dan bangunan; dan
- c. jalan, irigasi, dan jaringan;

Penyusutan tidak dilakukan terhadap:

- a. Aset Tetap yang direklasifikasi sebagai aset lainnya dalam neraca berupa Aset Tetap Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Tetap *Idle*;
- b. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan/atau telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk diproses TGR atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan untuk dilakukan penghapusan;
- d. Aset tetap yang direncanakan untuk dipindah tangankan; dan
- e. Aset Tetap berupa tanah, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerajan.

#### **Metode dan Penghitungan Penyusutan Aset Tetap**

Metode penyusutan aset tetap yang digunakan adalah metode garis lurus dengan nilai residu adalah Rp0,00 (nol Rupiah). Metode ini dipilih karena metode ini dianggap sebagai metode yang paling mudah dan sederhana. Metode garis lurus (*straight line*



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

*method) merupakan metode yang menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.*

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, bahwa perhitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan per tahun, namun karena sistem pencatatan akrual dan aplikasi SIMDA BMD yang menggunakan metode per bulan dalam penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap.

Masa manfaat aset tetap dapat dilihat berdasarkan tabel berikut :

Kode Barang				Uraian	Masa Manfaat(Tahun)
1	3	2		Golongan Peralatan Dan Mesin	
1	3	2	01	Alat Besar	
1	3	2	01	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	01	Alat-Alat Besar Apung	8
1	3	2	01	Alat-Alat Bantu	7
1	3	2	02	Alat Angkutan	
1	3	2	02	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	02	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1	3	2	02	Alat Angkutan Apung Bermotor	10
1	3	2	02	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	02	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	
1	3	2	03	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	03	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	03	Alat Ukur	5
1	3	2	04	Alat Pertanian	
1	3	2	04	Alat Pengolahan	4
1	3	2	05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	
1	3	2	05	Alat Kantor	5
1	3	2	05	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	05	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	06	Alat Studio. Komunikasi. dan Pemancar	
1	3	2	06	Alat Studio	5
1	3	2	06	Alat Komunikasi	5
1	3	2	06	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	06	Peralatan Komunikasi Navigasi	5
1	3	2	07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	
1	3	2	07	Alat Kedokteran	5



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

Kode Barang					Uraian	Masa Manfaat(Tahun)
1	3	2	07	02	Alat Kesehatan Umum	5
1	3	2	08		Alat Laboratorium	
1	3	2	08	01	Unit Alat Laboratorium	8
1	3	2	08	02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	08	03	Alat Peraga Praktek Sekolah	10
1	3	2	08	04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15
1	3	2	08	05	Alat Proteksi Radiasi/ Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	08	06	Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory (Batam)	10
1	3	2	08	07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	08	08	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	08	09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumen	8
1	3	2	09		Alat Persenjataan	
1	3	2	09	01	Senjata Api	10
1	3	2	09	02	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	09	03	Senjata Sinar	3
1	3	2	09	04	Alat Khusus Kepolisian	3
1	3	2	10		Komputer	
1	3	2	10	01	Komputer Unit	5
1	3	2	10	02	Peralatan Komputer	5
1	3	2	11		Alat Eksplorasi	
1	3	2	11	01	Alat Eksplorasi Topografi	7
1	3	2	11	02	Alat Eksplorasi Geofisika	7
1	3	2	12		Alat Pengeboran	
1	3	2	12	01	Alat Pengeboran Mesin	7
1	3	2	12	02	Alat Pengeboran Non Mesin	7
1	3	2	13		Alat Produksi. Pengolahan. dan Pemurnian	
1	3	2	13	01	Sumur	7
1	3	2	13	02	Produksi	7
1	3	2	13	03	Pengolahan dan Pemurnian	7
1	3	2	14		Alat Bantu Eksplorasi	
1	3	2	14	01	Alat Bantu Eksplorasi	7
1	3	2	14	02	Alat Bantu Produksi	7
1	3	2	15		Alat Keselamatan Kerja	
1	3	2	15	01	Alat Deteksi	5
1	3	2	15	02	Alat Pelindung	5
1	3	2	15	03	Alat SAR	5



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

Kode Barang					Uraian	Masa Manfaat(Tahun)
1	3	2	15	04	Alat Kerja Penerbangan	5
1	3	2	16		Alat Peraga	
1	3	2	16	01	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	4
1	3	2	17		Peralatan Proses/Produksi	
1	3	2	17	01	Unit Peralatan Proses/Produksi	5
1	3	2	18		Rambu-Rambu	
1	3	2	18	01	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	5
1	3	2	18	02	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5
1	3	2	18	03	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	5
1	3	2	19		Peralatan Olah Raga	
1	3	2	19	01	Peralatan Olah Raga	5
1	3	3			<b>Golongan Gedung Dan Bangunan</b>	
1	3	3	01		Bangunan Gedung	
1	3	3	01	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	01	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	02		Monumen	
1	3	3	02	01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
1	3	3	03		Bangunan Menara	
1	3	3	03	01	Bangunan Menara Perambuan	40
1	3	3	04		Tugu Titik Kontrol/ Pasti	
1	3	3	04	01	Tugu/Tanda Batas	50
1	3	4			<b>Golongan Jalan, Irigasi, Dan Jaringan</b>	
1	3	4	01		Jalan dan Jembatan	
1	3	4	01	01	Jalan	10
1	3	4	01	02	Jembatan	50
1	3	4	02		Bangunan Air	
1	3	4	02	01	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	02	02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
1	3	4	02	03	Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	25
1	3	4	02	04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai Dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	02	05	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	30
1	3	4	02	06	Bangunan Air Bersih/ Baku	40
1	3	4	02	07	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	03		Instalasi	
1	3	4	03	01	Instalasi Air Bersih/Air Baku	30
1	3	4	03	02	Instalasi Air Kotor	30



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

Kode Barang					Uraian	Masa Manfaat(Tahun)
1	3	4	03	03	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	03	04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	03	05	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	03	06	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	03	07	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	03	08	Instalasi Gas	30
1	3	4	03	09	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	03	10	Intalasi Lain	20
1	3	4	04		Jaringan	
1	3	4	04	01	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	04	02	Jaringan Listrik	40
1	3	4	04	03	Jaringan Telepon	20
1	3	4	04	04	Jaringan Gas	30

Perhitungan penyusutan dilakukan secara bulanan tanpa memperhitungkan tanggal perolehan pada bulan tersebut dan disajikan laporannya secara semesteran. Adapun rumus perhitungan nya dipengaruhi oleh kondisi sebagai berikut :

1) Aset Tetap tanpa adanya kapitalisasi

Aset tetap tanpa adanya kapitalisasi disusutkan berdasarkan nilai perolehannya dibagi estimasi masa manfaat, tanpa memperhitungkan nilai sisa dengan contoh perhitungan sebagai berikut :

**DAFTAR PENYUSUTAN ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN**

Sampai dengan 31-Des-2016

Bidang : Sekwan / DPRD

Unit Organisasi : Sekretariat Dewan

Sub Unit Organisasi : Sekretariat Dewan

UPB : Sekretariat Dewan

No	Kode Aset	No. Reg	Nama Aset	Masa Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Sisa Masa Manfaat		Akumulasi Penyusutan 1 Jan 2016 (Rp)	Penyusutan		Akumulasi Penyusutan 31 Des 2016 (Rp)	Nilai Buku (Rp)
						Thn	Bln		Semester I (Rp)	Semester II (Rp)		
	1. Gedung dan Bangunan				6.000.000.000			650.000.000	60.000.000	60.000.000	770.000.000	5.230.000.000
1	1.11.1.1.1	1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	8/2010	6.000.000.000	43	7	650.000.000	60.000.000	60.000.000	770.000.000	5.230.000.000



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

	<b>GEDUNG KANTOR</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Nilai	<b>6.000.000.000,00</b>
2	Tanggal Perolehan	19 Agustus 2010
3	Masa Manfaat 50 Tahun (50 x 12 Bln) Agustus 2010 - Juli 2060	600 Bulan
4	Penyusutan Perbulan (6.000.000.000/600 Bulan)	10.000.000,00
5	Akumulasi Penyusutan sd 31 Des 2015 (65 Bulan)	65 Bulan
	- 19/08/2010 sd 31/12/2010 = 5 Bln	5 Bulan
	- 01/01/2011 sd 31/12/2015 = 60 Bln	60 Bulan
	65 Bulan x Rp.10.000.000	<b>650.000.000,00</b>
6	Penyusutan Tahun 2016 (12 Bulan)	
	- Semester 1 = 6 Bulan x Rp10.000.000	60.000.000,00
	- Semester 2 = 6 Bulan x Rp10.000.000	60.000.000,00
7	Akumulasi Penyusutan sd 31 Des 2016 (77 Bulan)	<b>770.000.000,00</b>
8	Nilai Buku Per 31 Desember 2016	<b>5.230.000.000,00</b>
9	Sisa Masa Manfaat sd 31 Desember 2016 (600-77 Bulan)	<b>523 Bulan</b>
	- 43 Tahun = 43 x 12 Bln (sd 2059)	516 Bulan
	- 7 Bulan (di tahun 2060)	7 Bulan

Pada metode perhitungan di atas jumlah bulan penyusutan pada tahun 2010 hanya dihitung 5 bulan dari bulan Agustus sampai dengan Desember 2010 dan tidak dihitung 12 bulan (1 tahun penuh) karena SIMDA BMD menggunakan perhitungan penyusutan aset berdasarkan model bulanan dan bukan menggunakan metode tahunan.

Untuk perhitungan penyusutan perbulan didapat dari nilai perolehan aset dibagi dengan masa manfaat aset sesuai dengan kebijakan akuntansi yang diberlakukan pada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dengan nilai penyusutan setiap bulannya sebesar Rp10.000.000,00 (Rp6.000.000.000,00/600 bulan).

Sehingga untuk penyusutan tahun 2016 semester I dan II adalah masing-masing sebesar Rp60.000.000,00 (6 Bulan x Rp10.000.000,00) dengan akumulasi penyusutan sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp770.000.000,00 dan nilai buku aset Rp5.230.000.000,00 (Rp6.000.000.000,00-Rp770.000.000,00) dengan nilai sisa manfaat 43 tahun dan 7 bulan atau 523 bulan.

**2) Aset Tetap Dengan Kapitalisasi**

Aset tetap yang dikapitalisasi memperhitungkan akumulasi dan nilai buku sebelum kapitalisasi dilakukan serta sisa manfaat aset dari aset awal ditambah dengan



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

manfaat tambahan dari kapitalisasi yang dilakukan. Contoh perhitungan aset tetap dengan kapitalisasi (renovasi) dapat disajikan sebagai berikut :

**DAFTAR PENYUSUTAN ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN**  
Sampai dengan 31-Des-2017

Bidang : Sekwan / DPRD  
Unit Organisasi : Sekretariat Dewan  
Sub Unit Organisasi : Sekretariat Dewan  
UPB : Sekretariat Dewan

No	KODE ASET	NO. REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT	AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2017	PENYUSUTAN		AKUMULASI I PENYUSUTAN 31 Des 2017	NILAI BUKU
								Semester I	Semester II		
1.	Gedung dan Bangunan				6.000.000.000		770.000.000	56.557.659	54.836.489	881.394.148	5.218.605.852
1	1.11.1.1.1	1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	8	2010	6.000.000.000	43	7	770.000.000	56.557.659	881.394.148

A	GEDUNG KANTOR	KETERANGAN
1	Nilai	<b>6.000.000.000,00</b>
2	Tanggal Perolehan	19 Agustus 2010
3	Masa Manfaat 50 Tahun (50 x 12 Bln) Agustus 2010 - Juli 2060	600 Bulan
4	Penyusutan Perbulan (6.000.000.000/600 Bulan)	10.000.000,00
5	Akumulasi Penyusutan sd 31 Des 2015 (65 Bulan)	65 Bulan
	- 19/08/2010 sd 31/12/2010 = 5 Bln	5 Bulan
	- 01/01/2011 sd 31/12/2015 = 60 Bln	60 Bulan
	65 Bulan x 10.000.000	<b>650.000.000,00</b>
6	Penyusutan Tahun 2016 (12 Bulan)	
	- Semester 1 = 6 Bulan x 10.000.000	60.000.000,00
	- Semester 2 = 6 Bulan x 10.000.000	60.000.000,00
7	Akumulasi Penyusutan sd 31 Des 2016 (77 Bulan)	<b>770.000.000,00</b>
8	Nilai Buku Per 31 Desember 2016	<b>5.230.000.000,00</b>
9	Sisa Masa Manfaat sd 31 Desember 2016 (600-77 Bulan)	523 Bulan
	- 43 Tahun = 43 x 12 Bln (sd 2059)	516 Bulan
	- 7 Bulan (di tahun 2060)	7 Bulan

B	GEDUNG KANTOR (KAPITALISASI)	KETERANGAN
1	Nilai Kapitalisasi	100.000.000,00
2	Nilai Perolehan Setelah Kapitalisasi (A1+B1)	6.100.000.000,00
3	Tanggal Perolehan Kapitalisasi	01 Maret 2017



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

B	GEDUNG KANTOR (KAPITALISASI)	KETERANGAN
4	Tambahan Masa Manfaat Kapitalisasi 5 Tahun (5 x 12 Bulan)	60 Bulan
5	Nilai Disusutkan (NB 2016 + NKAPITALISASI-PENY 2 BLN 1 JAN -28 FEB ) A8 + B1-20.000.000	5.310.000.000,00
6	Sisa Masa Manfaat sd 01/03/2017 (TIDAK BOLEH LEBIH 600 BLN <=A3)	581
	- Masa 31 Desember 2016 sd 1 Maret 2017 (A9-2 BLN) 523 BLN-2 BLN	521
	- Tambahan Masa Kapitalisasi (B4)	60
7	Besarnya Penyusutan Perbulan di Tahun 2017	
	- Januari - Februari 2017 (2 Bulan) Menggunakan Penyusutan Awal Sebelum Kapitalisasi	10.000.000,00
	- Maret - Desember 2017 (10 Bulan) Menggunakan Penyusutan Kapitalisasi (B5/B6)	9.139.415,00
8	Penyusutan Tahun 2017	<b>111.394.148,00</b>
	- Semester I	56.557.659,00
	1 Jan 2017 - 28 Februari 2017 ( 2 Bln x 10.000.000 (B7)) = 20.000.000	
	1 Maret 2017 - 31 Desember 2017 ( 4 Bln x 9.139.415 (B7)) = 36.557.659	
	- Semester II = 6 Bulan x B 7 ( 6 Bulan x 9.139.415)	54.836.489,00
9	Akumulasi Penyusutan sd Per 31 Desember 2017 (A7 + B8)	881.394.148,00
10	Nilai Buku Per 31 Desember 2017	5.218.605.852,00
11	Sisa Masa Manfaat sd 31 Desember 2017 (A9+B4-12 Bulan)	571
	- 47 Tahun = 47 x 12 Bln (Sd Tahun 2064)	564
	- 7 Bulan (di tahun 2065)	7

Pada perhitungan di atas terlihat perbedaan perhitungan metode aset tanpa adanya kapitalisasi dengan metode kapitalisasi. Hal ini karena sudah memperhitungkan umur manfaat tambahan dari renovasi tanpa menambah masa manfaat aset melebihi selama 50 tahun (600 bulan) dalam contoh diatas setelah kapitalisasi masa manfaat aset tersebut menjadi 581 bulan.

Nilai aset yang akan disusutkan setelah penambahan biaya renovasi menjadi Rp5.310.000.000,00 per 1 Maret 2017 sehingga mulai Maret 2017 (penambahan biaya kapitalisasi tersebut dimulai sejak 1 Maret 2017) biaya penyusutan perbulan berubah yang awal Rp10.000.000,00 menjadi Rp9.139.415,00.

Akumulasi Penyusutan sampai dengan Per 31 Desember 2017 (A7 + B8) menjadi Rp881.394.148,00. Sehingga Nilai Buku Per 31 Desember 2017 menjadi Rp5.218.605.852,00 dengan Sisa Masa Manfaat sampai dengan 31 Desember 2017 (A9+B4-12 Bulan) tersisa 47 tahun 7 Bulan atau sama dengan 571 bulan.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap per Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**Akumulasi Penyusutan Aset Tetap OPD**  
**Per 31 Desember 2024**

<b>OPD</b>	<b>Nilai Bruto Aset Tetap (Rp)</b>	<b>Akumulasi Penyusutan (Rp)</b>	<b>Nilai Bersih Aset Tetap (Rp)</b>
Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	418.078.801.478,00	175.247.946.746,00	242.830.854.732,00
Dinas Kesehatan	244.184.160.367,00	132.150.261.241,00	112.033.899.126,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.964.589.007.939,00	1.282.162.826.823,00	682.426.181.116,00
Dinas Perhubungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	60.100.900.356,00	25.459.948.407,00	34.640.951.949,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	5.610.843.538,00	4.874.157.293,00	736.686.245,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.251.508.849,00	802.811.729,00	448.697.120,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Desa	3.088.613.600,00	1.775.907.109,00	1.312.706.491,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	33.265.082.085,00	20.377.101.049,00	12.887.981.036,00
Dinas Lingkungan Hidup	37.218.167.411,00	21.715.271.356,00	15.502.896.055,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.320.414.277,00	2.680.768.585,00	1.639.645.692,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10.754.486.598,00	5.867.661.625,00	4.886.824.973,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	7.740.273.656,00	5.368.533.267,00	2.371.740.389,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	38.810.925.444,00	11.270.511.952,00	27.540.413.492,00
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	13.197.049.803,00	1.554.620.762,00	11.642.429.041,00
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.996.170.167,00	2.715.126.231,00	2.281.043.936,00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	40.706.512.493,00	12.873.348.430,00	27.833.164.063,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	18.774.554.156,00	3.376.745.394,00	15.397.808.762,00
Dinas Perikanan	9.334.649.923,00	4.075.892.002,00	5.258.757.921,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

OPD	Nilai Bruto Aset Tetap (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Bersih Aset Tetap (Rp)
Sekretariat Daerah	93.059.891.072,00	38.222.864.999,00	54.837.026.073,00
Sekretariat DPRD	31.542.320.495,00	11.085.261.425,00	20.457.059.070,00
Kecamatan Mentok	12.209.571.795,00	3.891.328.010,00	8.318.243.785,00
Kecamatan Simpang Teritip	5.181.167.834,00	1.684.518.648,00	3.496.649.186,00
Kecamatan Jebus	4.745.904.569,00	2.274.464.854,00	2.471.439.715,00
Kecamatan Kelapa	6.509.018.486,00	2.805.533.782,00	3.703.484.704,00
Kecamatan Tempilang	4.506.189.497,00	1.774.522.993,00	2.731.666.504,00
Kecamatan Parittiga	6.640.895.646,00	2.416.169.309,00	4.224.726.337,00
Inspektorat Daerah	2.030.456.192,00	1.322.595.361,00	707.860.831,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	5.583.551.073,00	3.143.974.619,00	2.439.576.454,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	6.587.554.393,00	4.048.247.146,00	2.539.307.247,00
Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	5.861.337.343,00	4.698.682.948,00	1.162.654.395,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	12.847.574.883,00	6.738.770.373,00	6.108.804.510,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.404.104.160,00	781.382.484,00	622.721.676,00
BLUD RSUD	27.974.546.024,00	10.233.232.265,00	17.741.313.759,00
BLUD Puskesmas Mentok	130.163.556,00	7.624.814,00	122.538.742,00
BLUD Puskesmas Kelapa	4.995.000,00	333.000,00	4.662.000,00
BLUD Puskesmas Sekarbiru	85.440.000,00	4.272.000,00	81.168.000,00
BLUD Puskesmas Tempilang	166.178.100,00	14.847.545,00	151.330.555,00
<b>Total</b>	<b>3.143.092.982.258,00</b>	<b>1.809.498.066.576,00</b>	<b>1.333.594.915.682,00</b>

**Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

Nilai akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.809.498.066.576,00 dan Rp1.700.134.730.161,00.

Penjelasan mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap adalah sebagai berikut :

<b>Saldo Akhir per 31 Desember 2023 (Rp)</b>		<b>1.700.134.730.161,00</b>
<b>Mutasi Bertambah (Rp)</b>		
1. Beban Penyusutan Aset Tetap Tahun 2024	99.465.831.707,00	
2. Beban Penyusutan Reklas/Hapus	18.908.773,00	
3. Hibah	0,00	
4. Mutasi Antar OPD	2.153.377.114,00	
5. Koreksi Akumulasi	9,00	



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

6.	Belum Tercatat	0,00	
7.	Reklas	12.174.253.713,00	
8.	Kapitalisasi Aset	0,00	
<b>Jumlah Mutasi Bertambah</b>			<b>113.812.371.316,00</b>
<b>Mutasi Berkurang (Rp)</b>			
1.	Dihapus	195.278.718,00	
2.	Mutasi Antar OPD	2.153.377.114,00	
3.	Koreksi Akumulasi	4.619.263,00	
4.	Hibah	0,00	
5.	Reklas	2.095.759.806,00	
<b>Jumlah Mutasi Berkurang</b>			<b>4.49.034.901,00</b>
<b>Saldo Akhir per 31 Desember 2024 (Rp)</b>			<b>1.809.498.066.576,00</b>

Rincian mutasi bertambah dan berkurang akumulasi penyusutan aset tetap per OPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

OPD	31 Desember 2023 (Audited) (Rp)	Mutasi Bertambah (Rp)	Mutasi Berkurang (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	158.687.667.383,00	17.167.219.913,00	606.940.550,00	175.247.946.746,00
Dinas Kesehatan	119.731.080.643,00	13.118.482.359,00	699.301.761,00	132.150.261.241,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.219.613.417.074,00	63.108.512.135,00	559.102.386,00	1.282.162.826.823,00
Dinas Perhubungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	23.149.847.831,00	2.906.463.042,00	596.362.466,00	25.459.948.407,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	4.736.207.166,00	137.950.127,00	0,00	4.874.157.293,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	203.481.629,00	599.330.100,00	0,00	802.811.729,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Desa	1.681.233.447,00	94.673.662,00	0,00	1.775.907.109,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	19.654.463.516,00	722.637.533,00	0,00	20.377.101.049,00
Dinas Lingkungan Hidup	20.527.944.673,00	1.187.326.683,00	0,00	21.715.271.356,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

OPD	31 Desember 2023 (Audited) (Rp)	Mutasi Bertambah (Rp)	Mutasi Berkurang (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.281.117.852,00	399.650.733,00	0,00	2.680.768.585,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.463.724.536,00	403.937.089,00	0,00	5.867.661.625,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	5.029.765.466,00	338.767.801,00	0,00	5.368.533.267,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	10.896.647.452,00	673.831.779,00	299.967.279,00	11.270.511.952,00
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	0,00	1.554.620.762,00	0,00	1.554.620.762,00
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.414.491.519,00	120.252.161,00	819.617.449,00	2.715.126.231,00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	11.055.743.884,00	1.817.604.546,00	0,00	12.873.348.430,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.811.170.910,00	565.574.484,00	0,00	3.376.745.394,00
Dinas Perikanan	3.891.147.392,00	184.744.610,00	0,00	4.075.892.002,00
Sekretariat Daerah	35.363.853.914,00	3.164.859.585,00	305.848.500,00	38.222.864.999,00
Sekretariat DPRD	9.975.250.931,00	1.110.010.494,00	0,00	11.085.261.425,00
Kecamatan Mentok	3.392.454.783,00	498.873.227,00	0,00	3.891.328.010,00
Kecamatan Simpang Teritip	1.590.685.887,00	93.832.761,00	0,00	1.684.518.648,00
Kecamatan Jebus	2.232.607.535,00	137.013.419,00	95.156.100,00	2.274.464.854,00
Kecamatan Kelapa	2.530.320.227,00	275.213.555,00	0,00	2.805.533.782,00
Kecamatan Tempilang	1.680.240.905,00	94.282.088,00	0,00	1.774.522.993,00
Kecamatan Parittiga	2.303.754.042,00	112.415.267,00	0,00	2.416.169.309,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

OPD	31 Desember 2023 (Audited) (Rp)	Mutasi Bertambah (Rp)	Mutasi Berkurang (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Inspektorat Daerah	1.284.215.837,00	38.379.524,00	0,00	1.322.595.361,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah	3.488.524.890,00	122.188.139,00	466.738.410,00	3.143.974.619,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	3.899.985.470,00	148.261.676,00	0,00	4.048.247.146,00
Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	4.573.637.857,00	125.045.091,00	0,00	4.698.682.948,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	6.432.878.982,00	305.891.391,00	0,00	6.738.770.373,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	733.934.118,00	47.448.366,00	0,00	781.382.484,00
BLUD RSUD	7.823.232.410,00	2.409.999.855,00	0,00	10.233.232.265,00
BLUD Puskesmas Mentok	0,00	7.624.814,00	0,00	7.624.814,00
BLUD Puskesmas Kelapa	0,00	333.000,00	0,00	333.000,00
BLUD Puskesmas Sekarbiru	0,00	4.272.000,00	0,00	4.272.000,00
BLUD Puskesmas Tempilang	0,00	14.847.545,00	0,00	14.847.545,00
<b>Total</b>	<b>1.700.134.730.161,00</b>	<b>113.812.371.316,00</b>	<b>4.449.034.901,00</b>	<b>1.809.498.066.576,00</b>

Aset Tetap Bernilai Buku Rp0,00 (Nol Rupiah)

Aset tetap yang sudah disusutkan seluruh nilainya hingga nilainya bukunya menjadi Rp0,00 (Nol Rupiah). Namun secara teknis aset itu dalam kondisi baik dan masih dapat dimanfaatkan, oleh karena itu aset tetap tersebut masih tetap dicatat dan disajikan dalam kelompok aset tetap yang bersangkutan dan dilaporkan dalam neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya. Berikut rincian data aset tetap yang bernilai buku Rp0,00 (Nol Rupiah):



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

OPD	Nilai Perolehan Aset Tetap yang Bernilai Buku Nol Rupiah (Rp)
Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	69.334.313.064,00
Dinas Kesehatan	75.675.948.118,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	829.131.711.797,00
Dinas Perhubungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	11.727.258.095,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	4.422.096.655,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	702.137.350,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Desa	1.209.989.485,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	14.894.700.309,00
Dinas Lingkungan Hidup	15.622.968.360,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.835.552.072,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.895.414.599,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	3.388.752.406,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	2.685.774.582,00
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	710.621.374,00
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.907.111.381,00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	6.386.219.403,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.274.878.063,00
Dinas Perikanan	1.799.473.661,00
Sekretariat Daerah	20.537.995.480,00
Sekretariat DPRD	5.986.913.873,00
Kecamatan Mentok	1.233.267.152,00
Kecamatan Simpang Teritip	747.536.840,00
Kecamatan Jebus	962.443.113,00
Kecamatan Kelapa	623.807.638,00
Kecamatan Tempilang	545.308.939,00
Kecamatan Parittiga	1.450.175.299,00
Inspektorat Daerah	989.711.442,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah	2.598.642.760,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	2.995.424.022,00
Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	3.940.018.670,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	3.652.942.016,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	524.112.501,00
BLUD RSUD Sejiran Setason	4.616.019.034,00
BLUD Puskesmas Mentok	0,00
BLUD Puskesmas Kelapa	0,00
BLUD Puskesmas Sekarbiru	0,00
BLUD Puskesmas Tempilang	0,00
<b>Total</b>	<b>1.098.009.239.553,00</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

Jika aset tetap tersebut dalam kondisi rusak berat maka aset tetap tersebut dilaporkan dalam aset lainnya. Aset tetap dalam kondisi nilai bukunya menjadi Rp0,00 (Nol Rupiah) dapat dilakukan penghapusannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Aset Bernilai di Bawah Kapitalisasi**

Terdapat Aset di Bawah Kapitalisasi Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

<b>OPD</b>	<b>Nilai Aset Di Bawah Kapitalisasi (Rp)</b>
Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	80.281.958.381,00
Dinas Kesehatan	2.576.715.298,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	69.192.975,00
Dinas Perhubungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	1.173.213.550,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	63.845.259,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14.050.000,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Desa	83.149.407,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	239.269.483,00
Dinas Lingkungan Hidup	395.999.420,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	17.342.762,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	182.471.187,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	226.022.957,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	267.652.758,00
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	109.131.224,00
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	38.035.000,00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	312.271.847,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.020.834.414,00
Dinas Perikanan	54.021.929,00
Sekretariat Daerah	457.901.128,00
Sekretariat DPRD	322.230.888,00
Kecamatan Mentok	245.145.627,00
Kecamatan Simpang Teritip	87.937.624,00
Kecamatan Jebus	67.019.766,00
Kecamatan Kelapa	273.489.425,00
Kecamatan Tempilang	75.522.452,00
Kecamatan Parittiga	51.681.500,00
Inspektorat Daerah	69.924.586,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah	183.838.391,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	49.425.667,00
Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	88.311.822,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

OPD	Nilai Aset Di Bawah Kapitalisasi (Rp)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	361.146.316,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	151.136.884,00
BLUD RSUD Sejiran Setason	382.386.102,00
BLUD Puskesmas Mentok	3.450.000,00
BLUD Puskesmas Kelapa	0,00
BLUD Puskesmas Sekarbiru	15.000.000,00
BLUD Puskesmas Tempilang	13.581.000,00
<b>Total</b>	<b>90.024.307.029,00</b>

#### 5.3.1.4 Aset Lainnya

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, bahwa suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomis masa yang akan datang. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tersebut sudah tidak memenuhi definisi aset tetap sehingga harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Aset tetap dimaksud adalah aset tetap yang memiliki kondisi rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtempahanan proses penjualan, sewa beli, penghibahan dan penyertaan modal.

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain.

Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

**Aset Lainnya**  
**Per 31 Desember 2024**

Keterangan	31 Desember 2024 Rp	31 Desember 2023 Rp
Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
Tuntutan Perbendaharaan	0,00	0,00
Tuntutan Ganti Rugi	2.337.635.114,15	2.363.054.662,15
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tak Berwujud	4.506.921.583,00	4.462.521.583,00
Amortisasi Aset Tak Berwujud	(4.237.390.535,00)	(4.172.305.435,00)
Aset Lain-lain	257.348.610.297,00	318.902.772.874,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(67.000.379.939,00)	(76.872.148.227,00)
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	0,00	77.944,00
<b>Total</b>	<b>192.955.396.520,15</b>	<b>244.683.973.401,15</b>

#### **5.3.1.4.1 Tagihan Penjualan Angsuran**

Tagihan Penjualan Angsuran merupakan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tidak memiliki Tagihan Penjualan Angsuran.

#### **5.3.1.4.2 Tuntutan Perpendaharaan**

Tuntutan perpendaharaan merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

#### **5.3.1.4.3 Tuntutan Ganti Rugi**

Tuntutan ganti rugi merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat memiliki Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp2.337.635.114,15 yang terdapat pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason.

Mutasi saldo Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2024:

Nama	Saldo TGR Per 1 Januari 2024 (Rp)	TGR Tahun 2024 (Rp)	Jumlah Pengembalian TGR Tahun 2024 (Rp)	Saldo TGR Tahun 2024 (Rp)
1	2	3	4	5= 2+3-4
Sdr. YW	2.363.054.662,15	0,00	25.419.548,00	2.337.635.114,15
<b>Total</b>	<b>2.363.054.662,15</b>	<b>0,00</b>	<b>25.419.548,00</b>	<b>2.337.635.114,15</b>

#### **5.3.1.4.4 Kemitraan dengan Pihak Ketiga**

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tidak memiliki Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

#### **5.3.1.4.5 Aset Tak Berwujud**

Aset tak berwujud merupakan aset yang berupa aplikasi/*software* tertentu atau aplikasi/*software* khusus yang masih digunakan untuk menunjang kerja pegawai,



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

sedangkan aplikasi/*software* yang tidak digunakan lagi diklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Khusus untuk aset tak berwujud, dalam penatausahaan aset tetap dimasukkan ke dalam ekstra komptabel namun di neraca disajikan sebagai aset tak berwujud dan dilakukan penghitungan amortisasinya.

**Mutasi Aset Tak Berwujud**

Aset tak berwujud per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp4.506.921.583,00 dan Rp4.462.521.583,00.

Rincian mutasi aset tak berwujud adalah sebagai berikut :

No	OPD	31 Desember 2023 Audited Rp	Mutasi Bertambah Rp	Mutasi Berkurang Rp	31 Desember 2024 Rp
1.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	161.000.000,00	0,00	0,00	161.000.000,00
2.	Dinas Kesehatan	218.221.000,00	0,00	0,00	218.221.000,00
3.	Dinas Perhubungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	144.035.500,00	0,00	0,00	144.035.500,00
4.	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.242.835.743,00	44.400.000,00	0,00	2.287.235.743,00
5.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	10.191.185,00	0,00	0,00	10.191.185,00
6.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	418.165.000,00	0,00	0,00	418.165.000,00
7.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	78.077.333,00	0,00	0,00	78.077.333,00
8.	Sekretariat DPRD	38.919.100,00	0,00	0,00	38.919.100,00
9.	Kecamatan Mentok	85.785.000,00	0,00	0,00	85.785.000,00
10.	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah	62.200.000,00	0,00	0,00	62.200.000,00
11.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	375.421.722,00	0,00	0,00	375.421.722,00
12.	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	284.850.000,00	0,00	0,00	284.850.000,00
13.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	216.320.000,00	0,00	0,00	216.320.000,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

No	OPD	31 Desember 2023 Audited Rp	Mutasi Bertambah Rp	Mutasi Berkurang Rp	31 Desember 2024 Rp
14.	BLUD RSUD	126.500.000,00	0,00	0,00	126.500.000,00
	<b>Total</b>	<b>4.462.521.583,00</b>	<b>44.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.506.921.583,00</b>

#### 5.3.1.4.6 Amortisasi Aset Tak Berwujud

Metode dan Penghitungan Amortisasi Aset Tak Berwujud

Metode amortisasi aset tak berwujud yang digunakan adalah metode garis lurus dengan nilai residu adalah Rp0,00 Nol Rupiah.

Metode garis lurus *straight line method* merupakan metode yang menetapkan tarif amortisasi untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat bahwa perhitungan dan pencatatan amortisasi aset tak berwujud dilakukan per tahun.

Formula besaran persentase amortisasi per bulan adalah:

Persentase amortisasi per bulan = Nilai yang dapat diamortisasi : 12

Masa Manfaat

Berikut daftar Aset tidak berwujud, akumulasi amortisasi dan nilai buku aset tak berwujud Kabupaten Bangka Barat per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

No	OPD	Aset Tidak Berwujud Rp	Akumulasi Amortisasi Rp	Nilai Buku Rp
1.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	161.000.000,00	45.316.667,00	115.683.333,00
2.	Dinas Kesehatan	218.221.000,00	218.221.000,00	0,00
3.	Dinas Perhubungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	144.035.500,00	40.939.875,00	103.095.625,00
4.	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.287.235.743,00	2.244.315.743,00	42.920.000,00
5.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	10.191.185,00	10.191.185,00	0,00
6.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	418.165.000,00	418.165.000,00	0,00
7.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	78.077.333,00	70.245.243,00	7.832.090,00
8.	Sekretariat DPRD	38.919.100,00	38.919.100,00	0,00
9.	Kecamatan Mentok	85.785.000,00	85.785.000,00	0,00
10.	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah	62.200.000,00	62.200.000,00	0,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

No	OPD	Aset Tidak Berwujud Rp	Akumulasi Amortisasi Rp	Nilai Buku Rp
11.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	375.421.722,00	375.421.722,00	0,00
12.	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	284.850.000,00	284.850.000,00	0,00
13.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	216.320.000,00	216.320.000,00	0,00
14.	BLUD RSUD	126.500.000,00	126.500.000,00	0,00
<b>Total</b>		<b>4.506.921.583,00</b>	<b>4.237.390.535,00</b>	<b>269.531.048,00</b>

#### 5.3.1.4.7 Aset Lain-lain

Aset lain-lain merupakan aset Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang dimiliki oleh pemerintah daerah yaitu :

- secara permanen sudah dihentikan atau dilepas dari penggunaan aktif pemerintah karena rusak berat sehingga tidak bisa digunakan lagi secara normal dalam operasional dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang,
- dipinjampaikan oleh instansi lain untuk jangka waktu tertentu,
- digunakan oleh instansi lain untuk tujuan akhir diserahkan,
- aset hilang/tidak diketahui keberadaannya, dan
- kerugian daerah yang belum ditetapkan sebagai tuntutan perbendaharaan.

Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Pada neraca per 31 Desember 2024 disajikan aset lain-lain sebesar Rp257.348.610.297,00 berupa aset rusak berat, aset *idle* atau aset yang belum dimanfaatkan oleh OPD lain yang dikelola oleh Pengelola Barang, dan aset yang dipinjampaikan/dimanfaatkan oleh instansi lain untuk jangka waktu tertentu dan kerugian daerah yang dikarenakan bendahara yang belum ditetapkan sebagai tuntutan perbendaharaan.

Rincian Aset lain-lain tahun 2024 adalah sebagai berikut:

OPD	Rusak Berat Rp	Dimanfaatkan Pihak Lain Rp	Aset <i>Idle</i> Rp	Kerugian Daerah Rp	Treasury Deposit Facility Rp
Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	7.197.578.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Kesehatan	9.917.381.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.161.441.431,00	96.100.360.807,00	0,00	0,00	0,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

OPD	Rusak Berat Rp	Dimanfaatkan Pihak Lain Rp	Aset Idle Rp	Kerugian Daerah Rp	Treasury Deposit Facility Rp
Dinas Perhubungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	684.231.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	391.840.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Desa	1.353.070.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	888.431.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	577.057.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	585.848.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	119.687.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	2.291.655.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	268.572.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	158.495.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

OPD	Rusak Berat Rp	Dimanfaatkan Pihak Lain Rp	Aset Idle Rp	Kerugian Daerah Rp	Treasury Deposit Facility Rp
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.911.010.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	4.893.751.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	511.583.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perikanan	147.391.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sekretariat Daerah	686.691.963,00	4.279.960.515,00	0,00	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	450.090.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Mentok	954.289.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Simpang Teritip	114.654.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Jebus	376.343.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Kelapa	554.395.000,00	193.370.000,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Tempilang	332.890.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Parittiga	216.033.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inspektorat Daerah	171.622.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah	943.192.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	532.366.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	387.539.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Kepegawai dan Pengembangan Sumber Daya	323.769.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

OPD	Rusak Berat Rp	Dimanfaatkan Pihak Lain Rp	Aset Idle Rp	Kerugian Daerah Rp	Treasury Deposit Facility Rp
Manusia Daerah					
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	380.000.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BLUD RSUD Sejiran Setason	194.390.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BLUD Puskesmas Mentok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BLUD Puskesmas Kelapa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BLUD Puskesmas Sekarbiru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BLUD Puskesmas Tempilang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPKD/Pengelola	0,00	0,00	110.499.877.447,00	0,00	2.597.742.000,00
<b>Total</b>	<b>43.677.299.528,00</b>	<b>100.573.691.322,00</b>	<b>110.499.877.447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.597.742.000,00</b>

Terdapat *Treasury Deposit Facility* (TDF) Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 senilai Rp2.597.742.000,00 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan DBH dan/atau DAU Yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*. TDF disajikan sebagai Aset Lain-lain berdasarkan surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor : 900.1.14.1/7481/Keuda.

**Mutasi Aset Rusak Berat**

Aset rusak berat per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp43.677.299.528,00 dan Rp41.173.663.536,00.

Rincian mutasi bertambah dan berkurang aset rusak berat per OPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

OPD	31 Desember 2023 (Audited) (Rp)	Mutasi Bertambah (Rp)	Mutasi Berkurang (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	7.957.856.694,00	554.356.183,00	1.314.634.090,00	7.197.578.787,00
Dinas Kesehatan	9.245.958.063,00	671.423.722,00	0,00	9.917.381.785,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

<b>OPD</b>	<b>31 Desember 2023 (Audited) (Rp)</b>	<b>Mutasi Bertambah (Rp)</b>	<b>Mutasi Berkurang (Rp)</b>	<b>31 Desember 2024 (Rp)</b>
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.597.520.760,00	1.563.920.671,00	0,00	5.161.441.431,00
Dinas Perhubungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	90.915.000,00	593.316.316,00	0,00	684.231.316,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	391.840.156,00	0,00	0,00	391.840.156,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Desa	1.353.070.586,00	0,00	0,00	1.353.070.586,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	888.431.967,00	0,00	0,00	888.431.967,00
Dinas Lingkungan Hidup	577.057.245,00	0,00	0,00	577.057.245,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	585.848.900,00	0,00	0,00	585.848.900,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	119.687.592,00	0,00	0,00	119.687.592,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	2.291.655.571,00	0,00	0,00	2.291.655.571,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	269.772.703,00	0,00	1.200.000,00	268.572.703,00
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	0,00	158.495.983,00	0,00	158.495.983,00
Dinas Penanaman Modal,	2.068.306.602,00	0,00	157.295.983,00	1.911.010.619,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

<b>OPD</b>	<b>31 Desember 2023 (Audited) (Rp)</b>	<b>Mutasi Bertambah (Rp)</b>	<b>Mutasi Berkurang (Rp)</b>	<b>31 Desember 2024 (Rp)</b>
Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	4.854.160.691,00	39.590.584,00	0,00	4.893.751.275,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	511.583.166,00	0,00	0,00	511.583.166,00
Dinas Perikanan	147.391.620,00	0,00	0,00	147.391.620,00
Sekretariat Daerah	686.691.963,00	0,00	0,00	686.691.963,00
Sekretariat DPRD	450.090.424,00	0,00	0,00	450.090.424,00
Kecamatan Mentok	954.289.540,00	0,00	0,00	954.289.540,00
Kecamatan Simpang Teritip	114.654.398,00	0,00	0,00	114.654.398,00
Kecamatan Jebus	278.786.949,00	97.556.100,00	0,00	376.343.049,00
Kecamatan Kelapa	554.395.000,00	0,00	0,00	554.395.000,00
Kecamatan Tempilang	332.890.123,00	0,00	0,00	332.890.123,00
Kecamatan Parittiga	216.033.000,00	0,00	0,00	216.033.000,00
Inspektorat Daerah	171.622.267,00	0,00	0,00	171.622.267,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah	645.085.927,00	298.106.506,00	0,00	943.192.433,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	532.366.950,00	0,00	0,00	532.366.950,00
Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	387.539.240,00	0,00	0,00	387.539.240,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	323.769.590,00	0,00	0,00	323.769.590,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	380.000.300,00	0,00	0,00	380.000.300,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

OPD	31 Desember 2023 (Audited) (Rp)	Mutasi Bertambah (Rp)	Mutasi Berkurang (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
BLUD RSUD Sejiran Setason	194.390.549,00	0,00	0,00	194.390.549,00
BLUD Puskesmas Mentok	0,00	0,00	0,00	0,00
BLUD Puskesmas Kelapa	0,00	0,00	0,00	0,00
BLUD Puskesmas Sekarbiru	0,00	0,00	0,00	0,00
BLUD Puskesmas Tempilang	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>41.173.663.536,00</b>	<b>3.976.766.065,00</b>	<b>1.473.130.073,00</b>	<b>43.677.299.528,00</b>

**Mutasi Aset *Idle***

Aset *idle* atau aset yang belum dimanfaatkan oleh OPD lain yang dikelola oleh Pengelola Barang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp110.499.877.447,00 dan Rp110.474.902.447,00.

Rincian mutasi bertambah dan berkurang aset *idle* Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

OPD	31 Desember 2023 (Audited) (Rp)	Mutasi Bertambah (Rp)	Mutasi Berkurang (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Pengelola	110.474.902.447,00	24.975.000,00	0,00	110.499.877.447,00

Rincian Aset *idle* dapat dilihat pada lampiran 6.

Berikut rincian aset dipinjam/pakai/dimanfaatkan oleh instansi lain untuk jangka waktu tertentu:

No	OPD	Aset Pinjam Pakai/ Dimanfaatkan pihak lain	Nilai (Rp)	Instansi Pinjam Pakai
1	Sekretariat Daerah	Peralatan dan Mesin	4.279.960.515,00	Pihak Ketiga
2	Dinas Pekerjaan Umum	Gedung dan bangunan	3.268.379.000,00	Masyarakat dan pihak ketiga
		Jalan Irigasi dan Jaringan	92.831.981.807,00	
3	Kecamatan Kelapa	Kendaraan Dinas	193.370.000,00	Kejaksaan Negeri Bangka Barat
<b>Total</b>			<b>100.573.691.322,00</b>	

Rincian Aset Pinjam Pakai dapat dilihat pada lampiran 7.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

#### 5.3.1.4.8 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain merupakan Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat dan Aset yang dipinjamkan ke Instansi pemerintah. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain Tahun 2024 sebesar Rp67.00.379.939,00 dengan rincian per OPD sebagai berikut :

OPD	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain (Rp)
Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	3.841.091.282,00
Dinas Kesehatan	9.273.921.683,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	34.126.081.187,00
Dinas Perhubungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	683.425.482,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	390.551.155,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Desa	1.305.793.322,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	734.211.348,00
Dinas Lingkungan Hidup	551.288.030,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	580.688.901,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	117.373.469,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	1.746.930.556,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	267.407.566,00
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	147.699.133,00
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.878.737.091,00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.015.703.572,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	503.619.408,00
Dinas Perikanan	83.379.304,00
Sekretariat Daerah	4.093.375.971,00
Sekretariat DPRD	425.512.558,00
Kecamatan Mentok	912.894.872,00
Kecamatan Simpang Teritip	86.747.485,00
Kecamatan Jebus	343.597.777,00
Kecamatan Kelapa	743.530.883,00
Kecamatan Tempilang	329.488.923,00
Kecamatan Parittiga	212.233.237,00
Inspektorat Daerah	169.245.673,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah	738.025.686,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	529.828.218,00
Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	383.285.500,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	274.152.097,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	380.000.300,00
BLUD RSUD Sejiran Setason	130.558.270,00
BLUD Puskesmas Mentok	0,00
BLUD Puskesmas Kelapa	0,00
BLUD Puskesmas Sekarbiru	0,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

OPD	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain (Rp)
BLUD Puskesmas Tempilang	0,00
<b>Total</b>	<b>67.000.379.939,00</b>

#### **5.3.1.4.9 Kas yang Dibatasi Penggunaannya**

Kas yang Dibatasi Penggunaannya adalah kas yang tidak dapat digunakan secara bebas untuk membiayai belanja daerah. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tidak memiliki Kas yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024.

#### **5.3.1.5 Properti Investasi**

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- a) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
- b) dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

#### **5.3.1.5.1 Properti Investasi**

Properti Investasi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat per 31 Desember 2024 sebesar Rp107.770.000,00 merupakan 1 (satu) unit Bangunan Gedung Kantor Permanen pada Dinas Kesehatan (RSUD Sejiran Setason) yang disewakan kepada pihak ketiga.

#### **5.3.1.5.2 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi**

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Metode penyusutan yang digunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*). Metode garis lurus atau *straight line* method adalah metode penyusutan dimana besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama umur ekonomis dari aset tetap yang bersangkutan. Metode ini dipilih karena metode ini dianggap sebagai metode yang paling mudah dan sederhana.

Penyusutan Properti Investasi diakui dengan nilai penyusutan untuk masing-masing periode dan diakui sebagai pengurang nilai tercatat Properti Investasi dalam neraca. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Properti Investasi dalam neraca.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 59 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Properti Investasi, penyusutan Properti Investasi adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan untuk menghitung akumulasi penyusutan properti investasi sesuai dengan masa manfaat atau tarif penyusutan aset tetap.

Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat per 31 Desember 2024 sebesar Rp40.234.133,00.

### 5.3.2 Kewajiban

Kewajiban per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2024 Rp	31 Desember 2023 Rp
Kewajiban Jangka Pendek	53.080.679.893,66	22.112.824.936,70
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>53.080.679.893,66</b>	<b>22.112.824.936,70</b>

#### 5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek tahun 2024 sebesar Rp53.080.679.893,66 terdiri dari:

1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga tahun 2024 sebesar Rp1.113.713,00.
2. Utang Belanja/ Utang Kepada Pihak Ketiga di OPD tahun 2024 sebesar Rp48.629.337.486,65 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai Rp
1	Utang Belanja Pegawai 2024	10.012.640,00
2	Utang Belanja Pegawai Berdasarkan SK Bupati	433.178.385,00
3	Utang Belanja Persediaan Berdasarkan SK Bupati	3.427.536.932,00
4	Utang Belanja Jasa	49.720.944,00
5	Utang Belanja Jasa Berdasarkan SK Bupati	17.954.151.790,00
6	Utang Belanja Pemeliharaan Berdasarkan SK Bupati	1.253.913.679,00
7	Utang Belanja Perjalanan Dinas Berdasarkan SK Bupati	1.582.699.268,00
8	Utang Belanja Hibah Berdasarkan SK Bupati	3.904.265.520,00
9	Utang Belanja Bantuan Sosial Berdasarkan SK Bupati	335.459.000,00
10	Utang Belanja Modal Berdasarkan SK Bupati	19.678.399.328,65
<b>Total</b>		<b>48.629.337.486,65</b>

3. Utang Jangka Pendek lainnya tahun 2024 sebesar Rp4.275.351.132,00 merupakan utang belanja pada BLUD.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

4. Pendapatan diterima tahun 2024 dimuka sebesar Rp174.877.562,01.

**5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga**

Tahun 2024 Utang Perhitungan Fihak Ketiga Kabupaten Bangka Barat sebesar Rp1.113.713,00 merupakan Utang Pajak Penghasilan Pasal 22 yang Belum Disetor pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.

**5.3.2.1.2 Utang Belanja/Utang Kepada Pihak Ketiga**

Utang Belanja/Utang Kepada Pihak Ketiga Tahun 2024 sebesar Rp48.629.337.486,65 merupakan utang belanja Organisasi Perangkat Daerah. Dari Utang Belanja/Utang Kepada Pihak Ketiga Tahun 2024 sebesar Rp48.629.337.486,65, terdapat utang belanja/utang kepada pihak ketiga yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebesar Rp48.569.603.902,65.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

Rincian Utang Belanja/Utang Kepada Pihak Ketiga Per OPD tahun 2024 :

OPD	Utang Belanja Pegawai Rp	Utang Belanja Barang Rp	Utang Belanja Jasa Rp	Utang Belanja Pemeliharaan Rp	Utang Belanja Perjalanan Dinas Rp	Utang Belanja Hibah Rp	Utang Belanja Bantuan Sosial Rp	Utang Belanja Modal Rp	Total Utang Belanja Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=2+3+4+6+7+8+9
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	0,00	147.028.600,00	1.585.565.700,00	24.884.100,00	59.212.328,00	828.059.520,00	290.000.000,00	1.397.024.500,00	4.331.774.748,00
Dinas Kesehatan	0,00	1.849.994.362,00	12.182.604.260,00	25.960.000,00	100.846.666,00	0,00	0,00	10.218.000,00	14.169.623.288,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	71.121.600,00	2.042.887.672,00	721.675.229,00	36.097.213,00	2.808.917.100,00	0,00	15.794.653.158,65	21.475.351.972,65
Dinas Perhubungan, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	99.100.800,00	0,00	0,00	96.481.200,00	28.759.000,00	1.296.288.000,00	1.520.629.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	15.824.700,00	0,00	0,00	31.120.000,00	0,00	0,00	0,00	46.944.700,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	0,00	58.477.200,00	60.686.636,00	0,00	66.719.801,00	0,00	0,00	0,00	185.883.637,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

OPD	Utang Belanja Pegawai Rp	Utang Belanja Barang Rp	Utang Belanja Jasa Rp	Utang Belanja Pemeliharaan Rp	Utang Belanja Perjalanan Dinas Rp	Utang Belanja Hibah Rp	Utang Belanja Bantuan Sosial Rp	Utang Belanja Modal Rp	Total Utang Belanja Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=2+3+4+6+7+8+9
Dinas Pertanian dan Pangan	0,00	22.844.700,00	26.599.132,00	2.284.600,00	108.159.639,00	0,00	0,00	0,00	159.888.071,00
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	890.062,00	0,00	3.820.000,00	0,00	0,00	54.450.000,00	59.160.062,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	64.564.800,00	736.187,00	0,00	16.920.000,00	0,00	0,00	0,00	82.220.987,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.900.000,00	29.900.000,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	3.873.600,00	52.402.000,00	725.219.500,00	3.000.000,00	41.804.000,00	0,00	0,00	22.800.000,00	849.099.100,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

OPD	Utang Belanja Pegawai Rp	Utang Belanja Barang Rp	Utang Belanja Jasa Rp	Utang Belanja Pemeliharaan Rp	Utang Belanja Perjalanan Dinas Rp	Utang Belanja Hibah Rp	Utang Belanja Bantuan Sosial Rp	Utang Belanja Modal Rp	Total Utang Belanja Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=2+3+4+6+7+8+9
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan	26.217.482,00	2.836.850,00	202.556.293,00	338.182.000,00	16.603.781,00	0,00	0,00	4.200.000,00	590.596.406,00
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dagangan	6.881.616,00	15.385.000,00	215.049.148,00	6.075.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	263.390.764,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	11.300.000,00	157.315.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.238.730,00	415.854.580,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	11.041.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.041.170,00
Dinas Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
Sekretariat Daerah	83.469.640,00	566.958.360,00	87.569.516,00	14.015.000,00	102.716.841,00	170.807.700,00	16.700.000,00	191.500.000,00	1.233.737.057,00
Sekretariat DPRD	10.231.200,00	400.511.810,00	74.637.354,00	71.237.750,00	880.774.121,00	0,00	0,00	446.870.940,00	1.884.263.175,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

OPD	Utang Belanja Pegawai Rp	Utang Belanja Barang Rp	Utang Belanja Jasa Rp	Utang Belanja Pemeliharaan Rp	Utang Belanja Perjalanan Dinas Rp	Utang Belanja Hibah Rp	Utang Belanja Bantuan Sosial Rp	Utang Belanja Modal Rp	Total Utang Belanja Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=2+3+4+6+7+8+9
Kecamatan Muntok	0,00	69.827.000,00	971.586,00	7.500.000,00	27.376.096,00	0,00	0,00	89.531.000,00	195.205.682,00
Kecamatan Kelapa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.725.000,00	53.725.000,00
Inspektorat Kabupaten	0,00	0,00	2.657.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657.817,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Bangka Barat	0,00	0,00	101.749.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.749.684,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	83.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.340,00
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	312.517.487,00	14.556.800,00	343.707.027,00	39.100.000,00	17.000.900,00	0,00	0,00	0,00	726.882.214,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

OPD	Utang Belanja Pegawai Rp	Utang Belanja Barang Rp	Utang Belanja Jasa Rp	Utang Belanja Pemeliharaan Rp	Utang Belanja Perjalanan Dinas Rp	Utang Belanja Hibah Rp	Utang Belanja Bantuan Sosial Rp	Utang Belanja Modal Rp	Total Utang Belanja Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=2+3+4+6+7+8+9
Badan Kepergawainan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0,00	53.898.600,00	65.394.000,00	0,00	57.398.482,00	0,00	0,00	0,00	176.691.082,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	10.004.550,00	16.850.000,00	0,00	16.129.400,00	0,00	0,00	0,00	42.983.950,00
Jumlah	<b>443.191.025,00</b>	<b>3.427.536.932,00</b>	<b>18.003.872.734,00</b>	<b>1.253.913.679,00</b>	<b>1.582.699.268,00</b>	<b>3.904.265.520,00</b>	<b>335.459.000,00</b>	<b>19.678.399.328,65</b>	<b>48.629.337.486,65</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

#### **5.3.2.1.3 Utang Jangka Pendek Lainnya**

Utang Belanja/Utang Kepada Pihak Ketiga Tahun 2024 sebesar Rp4.275.351.132,00 merupakan utang belanja Badan Layanan Umum Daerah.

Utang Jangka Pendek Lainnya per BLUD tahun 2024:

<b>BLUD</b>	<b>Utang Jangka Pendek Lainnya (Rp)</b>
Dinas Kesehatan	3.893.006.525,00
BLUD Sejiran Setason	12.330.000,00
BLUD Puskesmas Mentok	27.700.100,00
BLUD Puskesmas Sekar Biru	79.723.300,00
BLUD Puskesmas Kelapa	262.591.207,00
<b>Total</b>	<b>4.275.351.132,00</b>

#### **5.3.2.1.4 Kewajiban-Penerimaan Kas yang belum teridentifikasi kepemilikannya**

Kewajiban-Penerimaan Kas yang belum teridentifikasi kepemilikannya merupakan penerimaan yang masuk ke kas daerah, namun belum diketahui jenis penerimaannya. Kewajiban-Penerimaan Kas yang belum teridentifikasi kepemilikannya tahun 2024 yang disajikan di neraca sebesar Rp0,00.

#### **5.3.2.1.5 Pendapatan diterima dimuka**

Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan yang telah diterima secara kas, namun belum menjadi hak pemerintah daerah. Pendapatan diterima dimuka yang disajikan di neraca sebesar Rp174.877.562,01 merupakan penerimaan pajak reklame tahun 2024 yang telah diterima di kas daerah namun belum menjadi hak Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dikarenakan pajak reklame tersebut merupakan pajak yang dibayar untuk masa pajak 2024 sampai dengan 2025 yang terdapat pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat. Perhitungan pendapatan diterima dimuka berdasarkan SIMDA Pendapatan Daerah.

Rincian Pendapatan diterima dimuka dapat dilihat pada lampiran 8.

#### **5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang**

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tidak memiliki Kewajiban Jangka Panjang.

#### **5.3.3 Ekuitas**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

<b>Ekuitas</b>	<b>31 Desember 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
<b>Ekuitas</b>		
Ekuitas	1.581.325.400.303,14	1.669.230.176.041,34



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

## **5.4 LAPORAN OPERASIONAL**

### **5.4.1 Pendapatan-LO**

Pendapatan LO merupakan pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

#### **5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LO**

Pendapatan Asli Daerah LO merupakan pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang terdiri dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi, pendapatan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah yang telah diterima pembayarannya serta yang belum diterima pembayarannya namun sudah diakui sebagai piutang pajak di neraca. Pendapatan Asli Daerah atas pelunasan Piutang Pajak Daerah tidak diakui sebagai Pendapatan Asli Daerah-LO.

##### **5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LO**

Pendapatan Pajak Daerah-LO merupakan pendapatan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang berasal dari pajak yang dipungut dari wajib pajak berdasarkan subjek dan objek pajak. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah merupakan Organisasi perangkat daerah yang mengelola pajak daerah. Pendapatan Pajak Daerah-LO merupakan pendapatan pajak daerah yang telah diterima pembayarannya serta yang belum diterima pembayarannya namun sudah diakui sebagai piutang pajak di Neraca. Pendapatan Pajak Daerah atas pelunasan Piutang Pajak Daerah tidak diakui sebagai Pendapatan Pajak Daerah-LO. Pendapatan Pajak Daerah-LO tahun 2024 sebesar Rp34.620.267.390,11 dan tahun 2023 sebesar Rp28.377.469.192,87 dengan rincian sebagai berikut :

Nomor Referensi	Jenis Pajak	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	% Kenaikan /Penurunan
4.1.1.1.1	Pajak Hotel	82.905.733,00	164.261.141,00	(81.355.408,00)	49,53
4.1.1.1.2	Pajak Restoran	2.663.466.584,00	2.649.191.746,00	14.274.838,00	0,54
4.1.1.1.3	Pajak Hiburan	25.950.000,00	30.239.325,00	(4.289.325,00)	14,18
4.1.1.1.4	Pajak Reklame	392.101.637,11	302.098.588,87	90.003.048,24	29,79
4.1.1.1.5	Pajak Penerangan Jalan	16.891.086.694,00	14.463.924.454,00	2.427.162.240,00	16,78
4.1.1.1.6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	729.709.450,00	857.591.412,00	(127.881.962,00)	14,91
4.1.1.1.7	Pajak Parkir	9.600.000,00	5.388.400,00	4.211.600,00	78,16
4.1.1.1.8	Pajak Air Tanah	115.932.526,00	116.984.101,00	(1.051.575,00)	0,90
3.1.1.1.9	Pajak Sarang Burung Walet	276.599.025,00	319.079.700,00	(42.480.675,00)	13,31
4.1.1.1.10	Pajak Bumi dan Bangunan P2	8.029.241.881,00	6.860.095.425,00	1.169.146.456,00	17,04



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

Nomor Referensi	Jenis Pajak	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	% Kenaikan /Penurunna
4.1.1.1.11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	5.403.673.860,00	2.608.614.900,00	2.795.058.960,00	107,15
	<b>Total</b>	<b>34.620.267.390,11</b>	<b>28.377.469.192,87</b>	<b>6.242.798.197,24</b>	<b>22,00</b>

Pendapatan pajak daerah LO tahun 2024 sebesar Rp34.620.267.390,11 jika disandingkan dengan pendapatan pajak LRA sebesar Rp32.340.169.274,00 terdapat perbedaan sebesar Rp2.280.098.116,11. Perbedaan tersebut dikarenakan :

1. Penerbitan SKPD tahun 2024 namun belum diterima pembayarannya sebesar Rp2.882.022.566,00 dan disajikan sebagai pendapatan LO tahun 2024.
2. Pelunasan atas piutang pajak tahun 2023 yang diterima pada tahun 2024 sebesar Rp568.057.143,00 yang tidak disajikan sebagai pendapatan LO tahun 2024.
3. Pendapatan diterima dimuka pajak reklame tahun 2024 sebesar Rp174.877.562,01 yang telah diterima pembayarannya namun belum menjadi hak Pemerintah daerah sehingga tidak disajikan sebagai pendapatan LO tahun 2024.
4. Pendapatan diterima dimuka pajak reklame tahun 2023 sebesar Rp141.010.255,12 yang menjadi hak Pemerintah Daerah di tahun 2024 dan disajikan sebagai pendapatan LO tahun 2024.

Perbedaan nilai tersebut dijelaskan dalam tabel berikut :

Jenis Pajak	Pendapatan Pajak yang masuk ke kas daerah s.d Bulan Desember 2024 (Pendapatan Pajak-LRA) Rp	Piutang Pajak atas penerbitan Surat Ketetapan Pajak Tahun 2024 Rp	Pelunasan Piutang s.d Tahun 2023 di tahun 2024 Rp	Pendapatan diterima dimuka tahun 2024 Rp	Pendapatan diterima dimuka tahun 2023 Rp	Pendapatan LO tahun 2024 Rp
1	2	3	4	5	6	7=2+3-4+5-6
Pajak Hotel	82.905.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.905.733,00
Pajak Restoran	2.630.742.684,00	38.436.150,00	5.712.250,00	0,00	0,00	2.663.466.584,00
Pajak Hiburan	25.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.950.000,00
Pajak Reklame	348.034.599,00	96.728.965,00	18.794.620,00	174.877.562,01	141.010.255,12	392.101.637,11
Pajak Penerangan Jalan	16.891.086.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.891.086.694,00
Pajak Parkir	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	767.687.438,00	12.549.262,00	50.527.250,00	0,00	0,00	729.709.450,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

Jenis Pajak	Pendapatan Pajak yang masuk ke kas daerah s.d Bulan Desember 2024 (Pendapatan Pajak-LRA) Rp	Piutang Pajak atas penerbitan Surat Ketetapan Pajak Tahun 2024 Rp	Pelunasan Piutang s.d Tahun 2023 di tahun 2024 Rp	Pendapatan diterima dimuka tahun 2024 Rp	Pendapatan diterima dimuka tahun 2023 Rp	Pendapatan LO tahun 2024 Rp
1	2	3	4	5	6	7=2+3-4+5-6
Pajak Sarang Burung Walet	270.829.025,00	6.770.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	276.599.025,00
Pajak Air Tanah	117.110.200,00	4.340.358,00	5.518.032,00	0,00	0,00	115.932.526,00
Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)	5.979.623.241,00	2.536.123.631,00	486.504.991,00	0,00	0,00	8.029.241.881,00
BPHTB	5.216.599.660,00	187.074.200,00	0,00	0,00	0,00	5.403.673.860,00
<b>Total</b>	<b>32.340.169.274,00</b>	<b>2.882.022.566,00</b>	<b>568.057.143,00</b>	<b>174.877.562,01</b>	<b>141.010.255,12</b>	<b>34.620.267.390,11</b>

#### 5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Pendapatan retribusi daerah merupakan pendapatan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Pendapatan Retribusi Daerah-LO merupakan pendapatan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang berasal dari retribusi yang dipungut dari wajib retribusi berdasarkan subjek dan objek retribusi. Pendapatan Retribusi Daerah atas pelunasan Piutang Retribusi Daerah tidak diakui sebagai Pendapatan Retribusi Daerah-LO. Pendapatan Retribusi Daerah-LO tahun 2024 sebesar Rp19.605.392.566,68 dan tahun 2023 sebesar Rp7.806.382.177,00 dengan rincian sebagai berikut :

Nomor Referensi	Jenis Retribusi	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	% Kenaikan /Penurunan
4.1.1.2.1	Pelayanan Kesehatan	14.777.637.614,68	3.280.462.700,00	11.497.174.914,68	350,47
4.1.1.2.2	Pelayanan Persampahan	792.953.000,00	733.087.000,00	59.866.000,00	8,17
4.1.1.2.3	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	84.422.000,00	104.873.000,00	(20.451.000,00)	19,50
4.1.1.2.4	Pelayanan Pasar	428.117.238,00	307.208.200,00	120.909.038,00	39,36
4.1.1.2.5	Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	99.128.700,00	(99.128.700,00)	100,00
4.1.1.2.6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	22.763.500,00	26.536.000,00	(3.772.500,00)	14,22
4.1.1.2.7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	297.240.000,00	(297.240.000,00)	100,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

Nomor Referensi	Jenis Retribusi	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	% Kenaikan /Penurunan
4.1.1.2.8	Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	522.995.627,00	(522.995.627,00)	100,00
4.1.1.2.10	Pasar Grosir/Pertokoan	107.660.100,00	263.732.846,00	(156.072.746,00)	59,18
4.1.1.2.12	Retribusi Terminal-Fasilitas Lainnya di Terminal	69.024.800,00	92.512.000,00	(23.487.200,00)	25,39
4.1.1.2.13	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	711.362.000,00	1.040.073.000,00	(328.711.000,00)	31,60
4.1.1.2.14	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	11.700.000,00	34.088.000,00	(22.388.000,00)	65,68
4.1.1.2.15	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	322.226.000,00	647.633.000,00	(325.407.000,00)	50,25
4.1.1.2.16	Penjualan Produksi Usaha Daerah	0,00	7.900.000,00	(7.900.000,00)	100,00
4.1.1.2.17	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	453.701.250,00	0,00	453.701.250,00	100,00
4.1.1.2.18	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	470.437.000,00	0,00	470.437.000,00	100,00
4.1.1.2.19	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	180.760.000,00	0,00	180.760.000,00	100,00
4.1.1.2.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	78.500.000,00	0,00	78.500.000,00	100,00
4.1.1.2.21	Izin Mendirikan Bangunan	0,00	348.912.104,00	(348.912.104,00)	100,00
4.1.1.2.22	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.036.978.064,00	0,00	1.036.978.064,00	100,00
4.1.1.2.23	IMTA	57.150.000,00	0,00	57.150.000,00	100,00
<b>Total</b>		<b>19.605.392.566,68</b>	<b>7.806.382.177,00</b>	<b>11.799.010.389,68</b>	<b>151,15</b>

Pendapatan retribusi daerah LO tahun 2024 sebesar Rp19.605.392.566,68 jika disandingkan dengan pendapatan retribusi LRA sebesar Rp15.032.696.814,68 terdapat perbedaan sebesar Rp4.572.695.752,00. Perbedaan tersebut dikarenakan :



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

1. Penerbitan SKRD tahun 2024 namun belum diterima pembayarannya sebesar Rp4.604.917.528,00 dan disajikan sebagai pendapatan LO tahun 2024;
2. Pelunasan Piutang tahun 2023 sebesar Rp32.221.776,00 yang tidak diakui sebagai pendapatan retribusi LO tahun 2024.

Perhitungan Pendapatan Retribusi-LO tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Jenis Retribusi	Pendapatan Retribusi yang masuk ke kas daerah (Pendapatan Retribusi-LRA) (Rp)	Pelunasan atas Piutang Retribusi s.d Tahun 2023 di Tahun 2024 (Rp)	Piutang Retribusi atas penerbitan Surat Ketetapan Retribusi (SKRD) Tahun 2024 (Rp)	Pendapatan Retribusi-LO Tahun 2024 (Rp)
1	2	3	4	5=2+3+4
Pelayanan Kesehatan	10.195.506.836,68	0,00	4.582.130.778	14.777.637.614,68
Pelayanan Persampahan	792.953.000,00	0,00	0,00	792.953.000,00
Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	84.422.000,00	0,00	0,00	84.422.000,00
Pelayanan Pasar	428.117.238,00	0,00	0,00	428.117.238,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	22.763.500,00	0,00	0,00	22.763.500,00
Pasar Grosir/Pertokoan	109.927.750,00	25.054.400,00	22.786.750,00	107.660.100,00
Retribusi Terminal-Fasilitas Lainnya di Terminal	69.024.800,00	0,00	0,00	69.024.800,00
Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	711.362.000,00	0,00	0,00	711.362.000,00
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	11.700.000,00	0,00	0,00	11.700.000,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	322.226.000,00	0,00	0,00	322.226.000,00
Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	453.701.250,00	0,00	0,00	453.701.250,00
Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	470.437.000,00	0,00	0,00	470.437.000,00
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	180.760.000,00	0,00	0,00	180.760.000,00
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	78.500.000,00	0,00	0,00	78.500.000,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.044.145.440,00	7.167.376,00	0,00	1.036.978.064,00
IMTA	57.150.000,00	0,00	0,00	57.150.000,00
<b>Total</b>	<b>15.032.696.814,68</b>	<b>32.221.776,00</b>	<b>4.604.917.528,00</b>	<b>19.605.392.566,68</b>

#### **5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO**

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan pendapatan atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bangka Barat pada Badan Usaha Milik Daerah. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

Dipisahkan-LO merupakan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang telah diterima pembayarannya maupun yang belum diterima pembayarannya namun sudah diakui sebagai piutang di neraca. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan atas pelunasan piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tidak diakui sebagai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO. Tahun 2024 tidak terdapat pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO.

Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO tahun 2024 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Kode Rek.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	% Kenaikan/ Penurunan
3.1.1.3.1	Dividen PT. BPD Sumsel Babel	0,00	5.966.951.097,57	(5.966.951.097,57)	100,00
3.1.1.3.2	Dividen PT. BPR Syariah Bangka Belitung	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>5.966.951.097,57</b>	<b>(5.966.951.097,57)</b>	<b>100,00</b>

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO tahun 2024 sebesar Rp0,00 jika disandingkan dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA sebesar Rp5.966.951.097,57 terdapat perbedaan sebesar Rp5.966.951.097,57. Perbedaan tersebut dikarenakan Pelunasan atas piutang dividen PT. BPD Sumsel Babel tahun 2023 yang diterima pada tahun 2024 sebesar Rp5.966.951.097,57 yang tidak disajikan sebagai pendapatan LO tahun 2024.

Perhitungan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO tahun 2024 sebesar Rp0,00 adalah sebagai berikut :

Uraian	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang masuk ke kas daerah (Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah - LRA) (Rp)	Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Tahun 2024 (Rp)	Pelunasan Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah s.d Tahun 2023 (Rp)	Pendapatan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah -LO Tahun 2024 (Rp)
1	2	3	4	5 = 2 + 3 - 4
Dividen PT. BPD Sumsel Babel	5.966.951.097,57	0,00	5.966.951.097,57	0,00
Dividen PT. BPR Syariah Bangka Belitung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>5.966.951.097,57</b>	<b>0,00</b>	<b>5.966.951.097,57</b>	<b>0,00</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

#### **5.4.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO**

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO merupakan pendapatan selain Pendapatan Pajak Daerah-LO, Pendapatan Retribusi Daerah-LO dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO.

Rincian Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO tahun 2024 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Nomor Referensi	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	% Kenaikan/ Penurunan
4.1.1.4.1	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	5.230.500,00	606.364.500,00	(601.134.000,00)	99,14
4.1.1.4.2	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	66.010.000,00	92.755.000,00	(26.745.000,00)	28,83
4.1.1.4.3	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.029.774.199,79	848.161.950,04	181.612.249,75	21,41
4.1.1.4.4	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	404.109.663,00	2.792.589.004,00	(2.388.479.341,00)	85,53
4.1.1.4.5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	18.630.474,00	109.401.533,00	(90.771.059,00)	82,97
4.1.1.4.6	Pendapatan Denda Pajak Hotel	4.884.773,00	1.408.236,00	3.476.537,00	246,87
4.1.1.4.7	Pendapatan Denda Pajak Restoran	0,00	7.246.840,00	(7.246.840,00)	100,00
4.1.1.4.8	Pendapatan Denda Pajak Reklame	0,00	10.167.065,00	(10.167.065,00)	100,00
4.1.1.4.9	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	0,00	1.152.225,00	(1.152.225,00)	100,00
4.1.1.4.10	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	0,00	1.440.900,00	(1.440.900,00)	100,00
4.1.1.4.11	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	1.115.200,00	(1.115.200,00)	100,00
4.1.1.4.12	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	141.148.067,00	0,00	141.148.067,00	100,00
4.1.1.4.13	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	364.140,00	0,00	364.140,00	100,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

Nomor Referensi	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	% Kenaikan/ Penurunan
4.1.1.4.14	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	0,00	0,00	0,00	100,00
4.1.1.4.15	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	0,00	0,00	0,00	100,00
4.1.1.4.16	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	10.621.250,00	(10.621.250,00)	100,00
4.1.1.4.17	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	23.104.795.369,11	27.797.930.494,49	(4.693.135.125,38)	16,88
4.1.1.4.18	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	20.589.614,00	0,00	20.589.614,00	100,00
4.1.1.4.19	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	207.054.220,34	0,00	207.054.220,34	100,00
4.1.1.4.20	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	3.375.180.701,59	2.589.233.393,79	785.947.307,80	30,35
<b>Total</b>		<b>28.377.771.721,83</b>	<b>34.869.587.591,32</b>	<b>(6.491.815.869,49)</b>	<b>18,62</b>

Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO tahun 2024 sebesar Rp28.377.771.721,83 jika disandingkan dengan pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah LRA sebesar Rp33.050.184.959,83 terdapat perbedaan sebesar Rp4.672.413.238,00. Perbedaan tersebut dikarenakan :

1. Pelunasan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah tahun 2023 sebesar Rp4.425.593.556,00 yang disajikan pada pendapatan LRA tahun 2024 namun tidak diakui sebagai Pendapatan-LO tahun 2024;
2. Lain-Lain PAD Yang Sah tahun 2024 sebesar Rp25.419.548,00 yang merupakan pelunasan Tuntutan Ganti Rugi pada BLUD yang disajikan pada pendapatan LRA tahun 2024 namun tidak diakui sebagai Lain-Lain PAD Yang Sah-LO tahun 2024.
3. Lain-Lain PAD Yang Sah Tahun 2024 sebesar Rp221.400.134,00 yang merupakan pelunasan Tuntutan Ganti Kerugian pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retibusi tidak diakui sebagai Lain-Lain PAD Yang Sah-LO tahun 2024.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO merupakan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Laporan Realisasi Anggaran ditambah dengan penambahan piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tahun 2024 dan



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

dikurangi pelunasan piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sampai dengan tahun 2023.

Perhitungan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO tahun 2024 sebesar Rp28.377.771.721,83 adalah sebagai berikut :

Uraian	Lain-Lain PAD yang Sah yang masuk ke kas daerah (Lain-Lain PAD yang Sah -LRA) (Rp)	Penerimaan yang diakui di LRA namun tidak diakui sebagai Lain-lain PAD yang Sah- LO (Rp)	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2024 (Rp)	Pelunasan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah s.d Tahun 2023 (Rp)	Lain-Lain PAD yang Sah -LO Tahun 2024 (Rp)
1	2	3	4	5	6=2-3+4-5
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	5.230.500,00	0,00	0,00	0,00	5.230.500,00
Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	66.010.000,00	0,00	0,00	0,00	66.010.000,00
Jasa Giro pada Kas Daerah	1.029.774.199,79	0,00	0,00	0,00	1.029.774.199,79
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	404.109.663,00	0,00	0,00	0,00	404.109.663,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	18.630.474,00	0,00	0,00	0,00	18.630.474,00
Pendapatan Denda Pajak Hotel	4.884.773,00	0,00	0,00	0,00	4.884.773,00
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	141.148.067,00	0,00	0,00	0,00	141.148.067,00
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	364.140,00	0,00	0,00	0,00	364.140,00
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	27.555.808.473,11	25.419.548,00	0,00	4.425.593.556,00	23.104.795.369,11
Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	20.589.614,00	0,00	0,00	0,00	20.589.614,00
Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	207.054.220,34	0,00	0,00	0,00	207.054.220,34
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	3.596.580.835,59	221.400.134,00	0,00	0,00	3.375.180.701,59
<b>Total</b>	<b>33.050.184.959,83</b>	<b>246.819.682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.425.593.556,00</b>	<b>28.377.771.721,83</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

#### **5.4.1.2 Pendapatan Transfer-LO**

##### **5.4.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO**

Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO merupakan pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari pemerintah pusat yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Untuk Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tidak mengakui adanya piutang, sehingga seluruh Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan yang masuk ke kas daerah diakui sebagai pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO.

Rincian Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO tahun 2024 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
4.1.2.1.1	Bagi Hasil Pajak	22.654.639.000,00	44.103.497.277,00	(21.448.858.277,00)	48,63
4.1.2.1.2	Bagi Hasil Sumber Daya Alam	89.345.786.000,00	103.123.190.723,00	(13.777.404.723,00)	13,36
4.1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	468.444.230.163,00	434.631.148.780,00	33.813.081.383,00	7,78
4.1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	116.873.349.822,00	143.869.048.932,00	(26.995.699.110,00)	18,76
<b>Total</b>		<b>697.318.004.985,00</b>	<b>725.726.885.712,00</b>	<b>(28.408.880.727,00)</b>	<b>3,91</b>

Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO tahun 2024 sebesar Rp697.318.004.985,00 jika disandingkan dengan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LRA sebesar Rp727.730.577.985,00 terdapat perbedaan sebesar Rp30.412.573.000,00. Perbedaan tersebut dikarenakan :

1. Dana *Treasury Deposit Facility* (TDF) Bagi Hasil Pajak tahun 2023 sebesar Rp9.473.159.000,00 yang diterima di rekening Kas Umum Daerah pada tahun 2024 disajikan sebagai pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LRA namun tidak diakui sebagai pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO.
2. Dana *Treasury Deposit Facility* (TDF) Bagi Hasil Sumber Daya Alam tahun 2023 sebesar Rp23.537.156.000,00 yang diterima di rekening Kas Umum Daerah pada tahun 2024 disajikan sebagai pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LRA namun tidak diakui sebagai pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO dan Dana *Treasury Deposit Facility* (TDF) Bagi Hasil Sumber Daya Alam tahun 2024 sebesar Rp2.597.742.000,00 diakui sebagai pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO tahun 2024 namun tidak diakui sebagai pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LRA.

##### **5.4.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO**

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO merupakan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya yang terdiri dari penerimaan Dana Insentif Daerah dan Dana Desa.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

Rincian Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya-LO tahun 2024 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Nomor Referensi	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
<b>4.1.2.2.1</b>	<b>Dana Penyesuaian</b>				
4.1.2.2.1.1	Dana Insentif Daerah	7.152.766.000,00	26.956.967.000,00	(19.804.201.000,00)	73,47
4.1.2.2.1.2	Dana Desa	54.949.231.000	54.434.722.000,00	514.509.000,00	0,95
	<b>Total</b>	<b>62.101.997.000,00</b>	<b>81.391.689.000,00</b>	<b>(19.289.692.000,00)</b>	<b>23,70</b>

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO tahun 2024 sebesar Rp62.101.997.000,00 jika disandingkan dengan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRA tahun 2024 sebesar Rp62.101.997.000,00 tidak terdapat perbedaan. Hal ini dikarenakan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang tidak mengakui adanya piutang atas Transfer Pemerintah Pusat Lainnya.

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp19.289.692.000,00. Penurunan ini dikarenakan menurunnya transfer Dana Insentif Daerah dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat.

#### **5.4.1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi-LO**

Transfer Pemerintah Provinsi-LO merupakan pendapatan bagi hasil pajak yang diterima pemerintah kabupaten/kota dari pemerintah provinsi maupun yang belum diterima namun sudah diakui sebagai piutang serta Dana Bantuan dari Provinsi. Pendapatan bagi hasil pajak atas pelunasan Piutang Bagi Hasil Pajak tidak diakui sebagai Pendapatan-LO.

Rincian Transfer Pemerintah Provinsi-LO tahun 2024 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi-LO :

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	25.273.236.923,00	28.466.382.905,00	(3.193.145.982,00)	11,22
Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	5.332.761.903,00	10.823.897.886,00	(5.491.135.983,00)	50,73
Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor(PKB)	10.440.063.370,00	10.480.489.432,00	(40.426.062,00)	0,39
Bagi Hasil Pajak Pemanfaatan Air Permukaan	408.429.133,00	644.094.144,00	(235.665.011,00)	36,59
Bagi Hasil dari Pajak Rokok	11.561.692.826,00	11.057.559.704,00	504.133.122,00	4,56
<b>Total</b>	<b>53.016.184.155,00</b>	<b>61.472.424.071,00</b>	<b>(8.456.239.916,00)</b>	<b>13,76</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

Perhitungan Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO Tahun 2024 sebesar Rp53.016.184.155,00 adalah sebagai berikut :

Uraian	Pendapatan Bagi Hasil Pajak yang masuk ke kas daerah Tahun 2024 (Pendapatan Bagi Hasil Pajak- LRA) (Rp)	Piutang Bagi Hasil Pajak yang timbul pada Tahun 2024 (Rp)	Pelunasan Piutang Bagi Hasil Pajak pada Tahun 2023 atas Piutang Bagi Hasil Pajak s.d Tahun 2024 (Rp)	Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO Tahun 2023 (Rp)
1	2	3	4	5=2+3-4
Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	25.120.925.048,00	6.120.855.774,00	5.968.543.899,00	25.273.236.923,00
Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	5.395.878.209,00	1.385.194.649,00	1.448.310.955,00	5.332.761.903,00
Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	10.419.956.221,00	2.377.334.199,00	2.357.227.050,00	10.440.063.370,00
Bagi Hasil Pajak Pemanfaatan Air Permukaan	435.766.949,00	116.138.860,00	143.476.676,00	408.429.133,00
Bagi Hasil dari Pajak Rokok	9.700.302.273,00	1.861.390.553,00	0,00	11.561.692.826,00
<b>Total</b>	<b>51.072.828.700,00</b>	<b>11.860.914.035,00</b>	<b>9.917.558.580,00</b>	<b>53.016.184.155,00</b>

Transfer Pemerintah Provinsi-LO tahun 2024 sebesar Rp53.016.184.155,00 jika disandingkan dengan Transfer Pemerintah Provinsi-LRA tahun 2024 sebesar Rp51.072.828.700 terdapat perbedaan sebesar Rp1.943.355.455,00. Perbedaan ini dikarenakan :

1. Piutang Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi tahun 2024 sebesar Rp11.860.914.035,00 yang diakui sebagai Transfer Pemerintah Provinsi-LO tahun 2024 namun tidak diakui sebagai Transfer Pemerintah Provinsi-LRA tahun 2024.
2. Pelunasan atas Piutang Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi tahun 2023 sebesar Rp9.917.558.580,00 yang tidak diakui sebagai Transfer Pemerintah Provinsi-LO tahun 2024 namun diakui sebagai Transfer Pemerintah Provinsi-LRA tahun 2024.

#### **5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO**

Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO merupakan pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat dan Pendapatan Lainnya berupa Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

Rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Kode Rek	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	% Kenaikan/ Penurunan
4.1.3.1	Pendapatan Hibah	16.811.157.837,40	10.016.886.492,19	6.794.271.345,21	67,83
4.1.3.2	Pendapatan Lainnya	4.054.330.174,00	10.315.131.119,00	(6.260.800.945,00)	60,70
	<b>Total</b>	<b>20.865.488.011,40</b>	<b>20.332.017.611,19</b>	<b>533.470.400,21</b>	<b>2,62</b>

#### 5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah - LO

Pendapatan Hibah - LO merupakan pendapatan hibah berupa uang dan barang yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Lainnya. Pendapatan hibah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 sebesar Rp16.811.157.837,40 terdiri dari :

OPD	Nilai (Rp)
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	5.939.020.700,00
Dinas Kesehatan	4.658.989.665,40
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	578.922.475,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.163.057.728,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	173.094.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	250.487.181,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	47.586.088,00
<b>Total</b>	<b>16.811.157.837,40</b>

Pendapatan Hibah-LO tahun 2024 sebesar Rp16.811.157.837,40 jika disandingkan dengan Pendapatan Hibah-LRA tahun 2024 yang tidak terealisasi terdapat perbedaan sebesar Rp16.811.157.837,40. Perbedaan tersebut merupakan hibah barang sebesar Rp16.811.157.837,40 yang diterima oleh beberapa OPD yang tidak disajikan pada Pendapatan Hibah-LRA tahun 2024.

Daftar Hibah-LO tahun 2024 yang tidak disajikan pada Pendapatan Hibah-LRA

No.	OPD	Hibah Persediaan (Rp)	Hibah Aset (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	0,00	5.939.020.700,00	5.939.020.700,00
2	Dinas Kesehatan	4.607.404.171,40	51.585.494,00	4.658.989.665,40



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

No.	OPD	Hibah Persediaan (Rp)	Hibah Aset (Rp)	Jumlah (Rp)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	5.163.057.728,00	5.163.057.728,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	47.506.975,00	531.415.500,00	578.922.475,00
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	173.094.000,00	0,00	173.094.000,00
6	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	250.487.181,00	0,00	250.487.181,00
7	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	47.586.088,00	47.586.088,00
<b>Total</b>		<b>5.078.492.327,40</b>	<b>11.732.665.510,00</b>	<b>16.811.157.837,40</b>

Terdapat Hibah berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat dan 4 (empat) unit kendaraan roda dua dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kepada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat pada SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun 2014 dan tahun 2016 sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 9.4/30-9/BNPB/2014 dan Nomor 170/BNPB/07/16 namun baru dicatat sebagai Pendapatan Hibah pada tahun 2024 dikarenakan peralihan kepemilikan atas kendaraan tersebut dilaksanakan pada tahun 2024 dan dicatat sebagai aset tetap pada tahun 2024.

#### **5.4.1.3.2 Pendapatan Dana Darurat - LO**

Pendapatan Dana Darurat adalah pendapatan dari Pemerintah Pusat yang diterima oleh Pemerintah Daerah untuk mengatasi bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa. Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tidak memiliki Pendapatan Dana Darurat-LO.

#### **5.4.1.3.3 Pendapatan Lainnya - LO**

Pendapatan Lainnya-LO merupakan pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Pendapatan Lainnya-LO tahun 2024 sebesar Rp4.054.330.174,00 jika disandingkan dengan Pendapatan Lainnya-LRA tahun 2024 sebesar Rp4.054.330.174,00 tidak terdapat perbedaan.

#### **5.4.2 Beban**

Beban adalah penurunan masa manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

aset atau timbulnya kewajiban. Rincian beban tahun 2024 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Beban Pegawai	413.371.639.752,00	349.629.910.418,76	63.741.729.333,24	18,23
Beban Persediaan	41.724.987.365,40	36.174.761.874,90	5.550.225.490,50	15,34
Beban Jasa	214.175.557.554,35	249.054.577.266,51	(34.879.019.712,16)	14,00
Beban Pemeliharaan	10.188.138.790,00	13.006.450.961,86	(2.818.312.171,86)	21,67
Beban Perjalanan Dinas	48.592.973.730,54	38.817.437.709,50	9.775.536.021,04	25,18
Beban Hibah	41.648.744.470,00	39.591.090.910,00	2.057.653.560,00	5,20
Beban Bantuan Sosial	5.799.053.462,00	3.649.180.236,00	2.149.873.226,00	58,91
Beban Penyisihan Piutang Pajak	681.579.607,48	651.517.282,48	30.062.325,00	4,61
Beban Penyisihan Piutang Retribusi	11.601.335,00	22.857.996,86	(11.256.661,86)	49,25
Beban Penyusutan Aset Tetap	99.484.740.480,00	98.828.989.703,00	655.750.777,00	0,66
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	65.085.100,00	53.214.161,00	11.870.939,00	22,31
Beban Penyusutan Aset Lain-Lain	0,00	1.068.905.465,00	(1.068.905.465,00)	100,00
Beban Transfer	120.749.209.720,00	117.647.054.237,00	3.102.155.483,00	2,64
<b>Total</b>	<b>996.493.311.366,77</b>	<b>948.195.948.222,87</b>	<b>48.297.363.143,90</b>	<b>5,09</b>

#### 5.4.2.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan beban untuk pembayaran gaji PNS/CPNS, Tunjangan Tambahan Penghasilan, Uang Makan, Tunjangan Guru Bersertifikasi dan Non Sertifikasi, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, baik yang telah direalisasikan maupun yang belum direalisasikan namun sudah menjadi kewajiban. Beban pegawai tahun 2024 adalah sebesar Rp413.371.639.752,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Beban Pegawai -LO 2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	201.822.823.673,00
2	Dinas Kesehatan	88.800.659.473,00
3	BLUD Sejiran Setason	0,00
4	BLUD Puskesmas Mentok	1.263.260.301,00
5	BLUD Puskesmas Sekar Biru	861.111.605,00
6	BLUD Puskesmas Kelapa	1.130.800.217,00
7	BLUD Puskesmas Tempilang	978.946.036,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023

No	Uraian	Beban Pegawai -LO 2024 (Rp)
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.421.916.438,00
9	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan	595.319.218,00
10	Dinas Perhubungan, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	2.736.190.119,00
11	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana	3.939.171.190,00
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.045.232.662,00
13	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	3.134.578.896,00
14	Dinas Pertanian dan Pangan	11.509.860.314,00
15	Dinas Lingkungan Hidup	3.190.607.329,00
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.907.278.101,00
17	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.981.237.225,00
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.637.947.276,00
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	661.675.676,00
20	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan	2.521.538.604,00
21	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	844.645.973,00
22	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	615.577.172,00
23	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.012.369.368,00
24	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	3.197.528.001,00
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.801.569.847,00
26	Dinas Kelautan dan Perikanan	402.649.378,00
27	Dinas Perikanan	1.592.533.227,00
28	Sekretariat Daerah	10.944.378.048,00
29	Sekretariat DPRD	15.744.644.483,00
30	Kecamatan Muntok	4.169.835.028,00
31	Kecamatan Simpang Teritip	1.753.726.874,00
32	Kecamatan Jebus	2.733.562.727,00
33	Kecamatan Kelapa	2.661.112.195,00
34	Kecamatan Tempilang	1.929.975.190,00
35	Kecamatan Parittiga	1.840.678.087,00
36	Inspektorat Kabupaten	4.595.179.272,00
37	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	548.968.173,00
38	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Bangka Barat	2.830.882.459,00
39	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.683.194.410,00
40	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	4.164.617.282,00
41	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	3.757.060.146,00
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.406.798.059,00
<b>Total</b>		<b>413.371.639.752,00</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

Perhitungan Beban Pegawai Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Rp
1.	<b>Belanja pegawai mapping - LRA</b>	<b>412.676.783.361,00</b>
2.	<b>Bertambah:</b>	<b>25.449.757,00</b>
	Hutang pegawai 2024	720.306.148,00
3.	<b>Berkurang :</b>	<b>403.087.303,00</b>
	Hutang pegawai 2023	25.449.757,00
4.	<b>Beban Pegawai-LO 2024 (1 + 2 – 3)</b>	<b>413.371.639.752,00</b>

Rincian Hutang Pegawai Tahun 2023 yang dibayar pada Tahun 2024 dan Hutang Pegawai yang timbul pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

OPD	Hutang Pegawai Tahun 2023 yang dibayar pada Tahun 2024 (Rp)	Hutang Pegawai yang timbul pada Tahun 2024 (Rp)
BLUD Puskesmas Mentok	0,00	9.463.080,00
BLUD Puskesma Sekar Biru	0,00	18.698.158,00
BLUD Puskesmas Kelapa	0,00	44.837.678,00
BLUD Puskesmas Tempilang	0,00	204.116.207,00
Dinas Pertanian dan Pangan	11.781.322,00	0,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	1.088.505,00	3.873.600,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan	0,00	26.217.482,00
Sekretariat Daerah	5.871.902,00	10.012.640,00
Inspektorat	6.708.028,00	0,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>25.449.757,00</b>	<b>317.218.845,00</b>

#### 5.4.2.2 Beban Persediaan

Beban Persediaan merupakan beban atas penggunaan persediaan selama satu periode pelaporan. Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*). Beban Persediaan tahun 2024 sebesar Rp41.724.987.365,40.

Rincian Beban Persediaan tahun 2024 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	OPD	Beban Persediaan – LO 2024	Beban Persediaan – LO 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	217.423.465,00	1.977.318.183,00	(1.759.894.718,00)	89,00
2	Dinas Kesehatan	16.261.220.956,16	21.953.308.949,90	(5.692.087.993,74)	25,92



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

No	OPD	Beban Persediaan – LO 2024	Beban Persediaan – LO 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
3	BLUD Sejiran Setason	6.011.603.964,40	0,00	6.011.603.964,40	0,00
4	BLUD Puskesmas Mentok	353.534.971,34	0,00	353.534.971,34	0,00
5	BLUD Puskesmas Sekar Biru	296.349.065,50	0,00	296.349.065,50	0,00
6	BLUD Puskesmas Kelapa	269.015.316,00	0,00	269.015.316,00	0,00
7	BLUD Puskesmas Tempilang	371.949.583,00	0,00	371.949.583,00	0,00
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.187.817.710,00	1.325.063.082,00	4.862.754.628,00	366,98
9	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan	15.000.000,00	495.870.100,00	(480.870.100,00)	96,98
10	Dinas Perhubungan, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	446.147.960,00	0,00	446.147.960,00	0,00
11	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	233.936.790,00	228.721.250,00	5.215.540,00	2,28
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	189.850.349,00	268.433.234,00	(78.582.885,00)	29,27
13	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	225.599.920,00	205.223.450,00	20.376.470,00	9,93
14	Dinas Pertanian dan Pangan	621.448.401,00	783.393.586,00	(161.945.185,00)	20,67
15	Dinas Lingkungan Hidup	2.364.332.120,00	1.892.544.730,00	471.787.390,00	24,93
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	645.086.277,00	547.063.689,00	98.022.588,00	17,92
17	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	430.029.584,00	537.990.668,00	(107.961.084,00)	20,07
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	152.078.600,00	162.859.950,00	(10.781.350,00)	6,62
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	25.715.000,00	171.712.250,00	(145.997.250,00)	85,02
20	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan	152.492.200,00	0,00	152.492.200,00	0,00
21	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	113.948.600,00	0,00	113.948.600,00	0,00
22	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan	22.016.210,00	204.238.790,00	(182.222.580,00)	89,22



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

No	OPD	Beban Persediaan – LO 2024	Beban Persediaan – LO 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
	Transmigrasi				
23	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	181.312.800,00	0,00	181.312.800,00	0,00
24	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	678.385.300,00	435.227.868,00	243.157.432,00	55,87
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	142.323.960,00	183.090.448,00	(40.766.488,00)	22,27
26	Dinas Kelautan dan Perikanan	9.488.500,00	202.252.900,00	(192.764.400,00)	95,31
27	Dinas Perikanan	157.495.450,00	0,00	157.495.450,00	0,00
28	Sekretariat Daerah	1.734.666.563,00	1.903.679.600,00	(169.013.037,00)	8,88
29	Sekretariat DPRD	813.264.585,00	560.812.500,00	252.452.085,00	45,02
30	Kecamatan Mentok	552.159.150,00	285.017.420,00	267.141.730,00	93,73
31	Kecamatan Simpang Teritip	112.497.155,00	101.635.200,00	10.861.955,00	10,69
32	Kecamatan Jebus	129.944.600,00	121.226.000,00	8.718.600,00	7,19
33	Kecamatan Kelapa	295.495.800,00	320.654.850,00	(25.159.050,00)	7,85
34	Kecamatan Tempilang	102.253.800,00	99.521.050,00	2.732.750,00	2,75
35	Kecamatan Parittiga	166.306.000,00	131.490.000,00	34.816.000,00	26,48
36	Inspektorat Kabupaten	92.229.500,00	94.293.100,00	(2.063.600,00)	2,19
37	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah,	213.500,00	108.435.500,00	(108.222.000,00)	99,80
38	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	138.782.000,00	0,00	138.782.000,00	0,00
39	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	294.438.800,00	302.837.400,00	(8.398.600,00)	2,77
40	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	234.181.100,00	268.492.800,00	(34.311.700,00)	12,78
41	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	161.470.000,00	157.518.000,00	3.952.000,00	2,51
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	121.481.760,00	144.835.327,00	(23.353.567,00)	16,12
<b>Total</b>		<b>41.724.987.365,40</b>	<b>36.174.761.874,90</b>	<b>5.550.225.490,50</b>	<b>15,34</b>

Tahun 2024 terdapat kenaikan beban persediaan sebesar Rp5.550.225.490,50. Kenaikan dikarenakan meningkatnya realisasi belanja barang yang menjadi persediaan pada Organisasi Perangkat Daerah.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

Perhitungan Beban Persediaan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	<b>Beban Persediaan Mapping - LRA</b>	<b>38.957.641.223,00</b>
2	<b>Bertambah :</b>	<b>45.692.600.792,88</b>
	Persediaan Awal 2024	22.881.952.049,64
	Persediaan Dari Hibah	5.078.492.327,40
	Reklas dari Belanja Barang & Jasa BLUD	7.275.614.107,84
	Reklas dari belanja Hibah	4.472.248.800,00
	Hutang belanja berdasarkan SK Bupati yang diakui sebagai beban persediaan	5.382.668.123,00
	Hutang Persediaan 2024	75.469.585,00
	Reklas Dari Belanja Aset berdasarkan BA Rekon Pengadaan Pengurus Barang	520.555.800,00
	Koreksi Catat Persediaan	5.600.000,00
3	<b>Berkurang :</b>	<b>42.925.254.650,48</b>
	Persediaan Akhir 2024	24.866.603.152,40
	Hutang Persediaan 2023	191.236.715,08
	Reklas Ke Beban Jasa berdasarkan BA Rekon Pengadaan Pengurus Barang	17.823.774.303,00
	Persediaan kedaluwarsa	7.160.480,00
	Reklas Ke Beban Pemeliharaan berdasarkan BA Rekon Pengadaan Pengurus Barang	4.990.000,00
	Reklas Ke Aset berdasarkan BA Rekon Pengadaan Pengurus Barang	31.490.000,00
4	<b>Beban Persediaan-LO 2024 ( 1 + 2 - 3 )</b>	<b>41.724.987.365,40</b>

Dropping persediaan antar OPD merupakan penyaluran persediaan yang diperoleh dari pengadaan barang dan jasa dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten Bangka Barat. Beban persediaan pada OPD yang menyalurkan persediaan tidak dicatat sebagai beban persediaan, namun dicatat pada beban persediaan OPD yang menerima persediaan sebesar pemakaian.

#### 5.4.2.3 Beban Jasa

Beban Jasa adalah beban atas konsumsi jasa selama satu periode pelaporan. Beban jasa tahun 2024 sebesar Rp214.175.557.554,35.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

Rincian beban jasa tahun 2024 dan tahun 2023 sebagai berikut :

No	OPD	Beban Jasa – LO 2024	Beban Jasa – LO 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	51.027.999.611,00	72.931.141.848,00	(21.903.142.237,00)	30,03
2	Dinas Kesehatan	56.027.298.693,00	76.668.542.345,51	(20.641.243.652,51)	26,92
3	BLUD Sejiran Setason	15.435.609.004,10	0,00	15.435.609.004,10	0,00
4	BLUD Puskesmas Mentok	485.701.537,00	0,00	485.701.537,00	0,00
5	BLUD Puskesmas Sekar Biru	442.696.380,00	0,00	442.696.380,00	0,00
6	BLUD Puskesmas Kelapa	601.118.419,00	0,00	601.118.419,00	0,00
7	BLUD Puskesmas Tempilang	559.743.030,00	0,00	559.743.030,00	0,00
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.918.493.201,25	6.098.408.208,00	820.084.993,25	13,45
9	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan	292.512.694,00	4.875.145.662,00	(4.582.632.968,00)	94,00
10	Dinas Perhubungan, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	2.158.564.331,00	0,00	2.158.564.331,00	0,00
11	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	4.888.731.519,00	5.039.611.003,00	(150.879.484,00)	2,99
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.643.886.737,00	1.735.687.800,00	(91.801.063,00)	5,29
13	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	3.413.303.149,00	3.869.951.263,00	(456.648.114,00)	11,80
14	Dinas Pertanian dan Pangan	2.249.231.542,00	2.690.362.337,00	(441.130.795,00)	16,40
15	Dinas Lingkungan Hidup	7.125.379.621,00	6.995.971.052,00	129.408.569,00	1,85
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.497.606.394,00	1.572.069.382,00	(74.462.988,00)	4,74
17	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.310.661.873,00	2.500.831.504,00	(190.169.631,00)	7,60
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.036.709.021,00	3.937.839.715,00	98.869.306,00	2,51



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

No	OPD	Beban Jasa – LO 2024	Beban Jasa – LO 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	287.166.291,00	4.698.382.769,00	(4.411.216.478,00)	93,89
20	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan	3.142.912.013,00	0,00	3.142.912.013,00	0,00
21	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	1.569.431.424,00	0,00	1.569.431.424,00	0,00
22	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	123.780.959,00	1.388.405.506,00	(1.264.624.547,00)	91,08
23	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.118.514.207,00	0,00	1.118.514.207,00	0,00
24	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	5.963.329.898,00	6.704.329.909,00	(741.000.011,00)	11,05
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.850.451.655,00	1.658.706.454,00	191.745.201,00	11,56
26	Dinas Kelautan dan Perikanan	92.555.247,00	1.043.313.343,00	(950.758.096,00)	91,13
27	Dinas Perikanan	580.163.636,00	0,00	580.163.636,00	0,00
28	Sekretariat Daerah	11.429.671.225,00	16.562.475.631,00	(5.132.804.406,00)	30,99
29	Sekretariat DPRD	6.976.449.215,00	5.839.944.260,00	1.136.504.955,00	19,46
30	Kecamatan Mentok	4.744.174.983,00	5.468.504.756,00	(724.329.773,00)	13,25
31	Kecamatan Simpang Teritip	691.933.405,00	684.305.000,00	7.628.405,00	1,11
32	Kecamatan Jebus	872.174.600,00	859.036.500,00	13.138.100,00	1,53
33	Kecamatan Kelapa	1.545.694.222,00	1.647.867.259,00	(102.173.037,00)	6,20
34	Kecamatan Tempilang	621.246.350,00	619.131.132,00	2.115.218,00	0,34
35	Kecamatan Parittiga	1.038.142.850,00	984.543.050,00	53.599.800,00	5,44
36	Inspektorat Kabupaten	717.310.432,00	828.747.483,00	(111.437.051,00)	13,45
37	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah,	125.436.439,00	1.791.012.234,00	(1.665.575.795,00)	93,00
38	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	1.599.855.920,00	0,00	1.599.855.920,00	0,00
39	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.494.875.949,00	2.209.016.096,00	(714.140.147,00)	32,33



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

No	OPD	Beban Jasa – LO 2024	Beban Jasa – LO 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
40	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	2.274.995.999,00	2.300.576.390,00	(25.580.391,00)	1,11
41	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1.739.126.097,00	2.584.105.176,00	(844.979.079,00)	32,70
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.460.917.782,00	2.266.612.199,00	194.305.583,00	8,57
<b>Total</b>		<b>214.175.557.554,35</b>	<b>249.054.577.266,51</b>	<b>(34.879.019.712,16)</b>	<b>14,00</b>

Tahun 2024 terdapat penurunan beban jasa sebesar Rp34.879.019.712,16. Penurunan ini dikarenakan menurunnya realisasi belanja jasa pada Organisasi Perangkat Daerah.

Perhitungan Beban Jasa Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	<b>Belanja jasa mapping- LRA</b>	<b>136.115.591.575,25</b>
2.	<b>Bertambah :</b>	<b>83.837.067.786,60</b>
	Hutang jasa tahun 2024	3.972.487.368,00
	Hutang belanja berdasarkan SK Bupati yang diakui sebagai beban jasa	17.733.505.215,00
	Reklas dari belanja Barang & Jasa BLUD	18.596.676.093,60
	Reklas dari belanja Barang & Jasa BOK	1.819.556.373,00
	Reklas dari belanja Barang & Jasa BOS	23.883.170.434,00
	Reklas dari belanja Persediaan Berdasarkan BA Rekon PPK OPD dengan Pengurus Barang	17.823.774.303,00
	Reklas dari Belanja aset berdasarkan BA Rekon Pengadaan Pengurus Barang	7.898.000,00
3.	<b>Berkurang :</b>	<b>5.777.101.807,50</b>
	Hutang jasa tahun 2023	5.475.182.407,50
	Reklas ke Aset berdasarkan BA Rekon Pengadaan Pengurus Barang	301.919.400,00
4.	<b>Beban Jasa - LO 2024 (1 + 2 - 3)</b>	<b>214.175.557.554,35</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

#### 5.4.2.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan merupakan beban atas pemeliharaan aset dengan tujuan untuk menambah masa manfaat dan menambah nilai aset. Beban pemeliharaan tahun 2024 adalah sebesar Rp10.188.138.790,00.

Rincian beban pemeliharaan tahun 2024 dan tahun 2023 sebagai berikut :

No	OPD	Beban Pemeliharaan – LO 2024	Beban Pemeliharaan – LO 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	27.784.100,00	1.734.898.042,00	(1.707.113.942,00)	98,40
2	Dinas Kesehatan	191.531.118,00	1.171.324.904,86	(979.793.786,86)	83,65
3	BLUD Sejiran Setason	125.746.769,00	0,00	125.746.769,00	0,00
4	BLUD Puskesmas Mentok	67.830.444,00	0,00	67.830.444,00	0,00
5	BLUD Puskesmas Sekar Biru	68.322.500,00	0,00	68.322.500,00	0,00
6	BLUD Puskesmas Kelapa	21.243.000,00	0,00	21.243.000,00	0,00
7	BLUD Puskesmas Tempilang	20.620.400,00	0,00	20.620.400,00	0,00
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.735.173.386,00	5.276.150.349,00	459.023.037,00	8,70
9	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan	80.540.000,00	663.571.466,00	(583.031.466,00)	87,86
10	Dinas Perhubungan, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	780.705.420,00	0,00	780.705.420,00	0,00
11	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	108.488.000,00	135.441.250,00	(26.953.250,00)	19,90
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	28.975.000,00	5.000.000,00	23.975.000,00	479,50
13	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	10.840.000,00	87.723.560,00	(76.883.560,00)	87,64
14	Dinas Pertanian dan Pangan	17.062.700,00	120.314.500,00	(103.251.800,00)	85,82
15	Dinas Lingkungan Hidup	261.693.500,00	151.738.564,00	109.954.936,00	72,46
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	13.672.840,00	65.330.775,00	(51.657.935,00)	79,07
17	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	20.240.000,00	78.394.000,00	(58.154.000,00)	74,18
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	80.732.224,00	33.290.384,00	47.441.840,00	142,51
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	0,00	411.936.842,00	(411.936.842,00)	100,00
20	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan	413.348.000,00	0,00	413.348.000,00	0,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

No	OPD	Beban Pemeliharaan – LO 2024	Beban Pemeliharaan – LO 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
21	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00	0,00
22	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	45.964.000,00	(45.964.000,00)	100,00
23	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	54.049.500,00	0,00	54.049.500,00	0,00
24	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	77.929.000,00	97.882.650,00	(19.953.650,00)	20,39
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	145.222.000,00	171.689.740,00	(26.467.740,00)	15,42
26	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.000.000,00	73.975.000,00	(72.975.000,00)	98,65
27	Dinas Perikanan	22.811.900,00	0,00	22.811.900,00	0,00
28	Sekretariat Daerah	945.962.974,00	1.139.796.501,00	(193.833.527,00)	17,01
29	Sekretariat DPRD	453.307.608,00	784.307.400,00	(330.999.792,00)	42,20
30	Kecamatan Mentok	62.827.800,00	133.426.034,00	(70.598.234,00)	52,91
31	Kecamatan Simpang Teritip	20.000.000,00	33.250.000,00	(13.250.000,00)	39,85
32	Kecamatan Jebus	11.405.000,00	38.370.000,00	(26.965.000,00)	70,28
33	Kecamatan Kelapa	11.903.000,00	47.125.900,00	(35.222.900,00)	74,74
34	Kecamatan Tempilang	10.425.000,00	48.925.000,00	(38.500.000,00)	78,69
35	Kecamatan Parittiga	9.100.000,00	91.997.500,00	(82.897.500,00)	90,11
36	Inspektorat Kabupaten	16.068.150,00	14.676.000,00	1.392.150,00	9,49
37	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah,	0,00	139.995.000,00	(139.995.000,00)	100,00
38	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	25.640.000,00	0,00	25.640.000,00	0,00
39	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	97.802.650,00	48.655.000,00	49.147.650,00	101,01
40	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	60.481.700,00	16.690.600,00	43.791.100,00	262,37
41	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	74.553.107,00	133.760.000,00	(59.206.893,00)	44,26
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10.050.000,00	10.850.000,00	(800.000,00)	7,37
<b>Total</b>		<b>10.188.138.790,00</b>	<b>13.006.450.961,86</b>	<b>(2.818.312.171,86)</b>	<b>21,67</b>

Tahun 2024 terdapat penurunan beban pemeliharaan sebesar Rp2.818.312.171,86. penurunan ini dikarenakan menurunnya realisasi belanja pemeliharaan pada Organisasi Perangkat Daerah.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

Perhitungan Beban Pemeliharaan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Rp
1.	<b>Belanja Pemeliharaan mapping-LRA</b>	<b>9.219.954.046,00</b>
2.	<b>Bertambah :</b>	<b>1.806.559.824,00</b>
	Hutang belanja berdasarkan SK Bupati yang diakui sebagai beban pemeliharaan	1.253.913.679,00
	Reklas dari Belanja Barang & Jasa BLUD	303.763.113,00
	Reklas dari Belanja Persediaan berdasarkan BA Rekon Pengadaan Pengurus Barang	4.990.000,00
	Reklas dari Belanja aset berdasarkan BA Rekon Pengadaan Pengurus Barang	243.893.032,00
3.	<b>Berkurang :</b>	<b>838.375.080,00</b>
	Reklas ke Aset berdasarkan BA Rekon Pengadaan Pengurus Barang	838.375.080,00
4.	<b>Beban Pemeliharaan -LO 2024 (1 + 2 - 3)</b>	<b>10.188.138.790,00</b>

#### 5.4.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas adalah beban atas perjalanan dinas pegawai dalam satu periode pelaporan, baik perjalanan dinas dalam daerah, perjalanan dinas luar daerah maupun perjalanan dinas luar negeri. Belanja perjalanan dinas tahun 2024 adalah sebesar Rp48.592.973.730,54.

Rincian beban perjalanan dinas tahun 2024 dan tahun 2023 sebagai berikut:

No	OPD	Beban Perjalanan Dinas – LO 2024	Beban Perjalanan Dinas – LO 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	847.960.907,00	1.225.820.910,00	(377.860.003,00)	30,83
2	Dinas Kesehatan	3.841.243.462,00	5.123.268.626,50	(1.282.025.164,50)	25,02
3	BLUD Sejiran Setason	338.097.546,54	0,00	338.097.546,54	0,00
4	BLUD Puskesmas Mentok	107.672.522,00	0,00	107.672.522,00	0,00
5	BLUD Puskesmas Sekar Biru	135.794.821,00	0,00	135.794.821,00	0,00
6	BLUD Puskesmas Kelapa	125.329.399,00	0,00	125.329.399,00	0,00
7	BLUD Puskesmas Tempilang	162.806.732,00	0,00	162.806.732,00	0,00
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	707.666.310,00	729.648.972,00	(21.982.662,00)	3,01
9	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	8.452.560,00	600.198.929,00	(591.746.369,00)	98,59
10	Dinas Perhubungan, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	719.058.173,00	0,00	719.058.173,00	0,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

No	OPD	Beban Perjalanan Dinas – LO 2024	Beban Perjalanan Dinas – LO 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
11	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	834.392.735,00	829.918.812,00	4.473.923,00	0,54
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	286.426.813,00	377.841.881,00	(91.415.068,00)	24,19
13	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	987.540.448,00	725.301.465,00	262.238.983,00	36,16
14	Dinas Pertanian dan Pangan	461.280.371,00	579.745.785,00	(118.465.414,00)	20,43
15	Dinas Lingkungan Hidup	545.375.068,00	623.403.228,00	(78.028.160,00)	12,52
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	306.405.393,00	391.964.375,00	(85.558.982,00)	21,83
17	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.389.840.647,00	2.270.167.307,00	119.673.340,00	5,27
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	646.167.905,00	506.198.121,00	139.969.784,00	27,65
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	0,00	863.126.029,00	(863.126.029,00)	100,00
20	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan	518.199.980,00	0,00	518.199.980,00	0,00
21	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	457.319.318,00	0,00	457.319.318,00	0,00
22	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	75.874.134,00	536.338.235,00	(460.464.101,00)	85,85
23	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	473.674.957,00	0,00	473.674.957,00	0,00
24	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	379.399.903,00	615.366.395,00	(235.966.492,00)	38,35
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	302.811.794,00	289.164.621,00	13.647.173,00	4,72
26	Dinas Kelautan dan Perikanan	19.194.996,00	362.380.024,00	(343.185.028,00)	94,70
27	Dinas Perikanan	230.733.036,00	0,00	230.733.036,00	0,00
28	Sekretariat Daerah	2.894.487.867,00	2.423.377.815,00	471.110.052,00	19,44
29	Sekretariat DPRD	25.331.537.852,00	14.591.173.857,00	10.740.363.995,00	73,61
30	Kecamatan Mentok	145.074.825,00	211.137.502,00	(66.062.677,00)	31,29



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

No	OPD	Beban Perjalanan Dinas – LO 2024	Beban Perjalanan Dinas – LO 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
31	Kecamatan Simpang Teritip	107.415.710,00	94.977.000,00	12.438.710,00	13,10
32	Kecamatan Jebus	127.644.600,00	102.163.500,00	25.481.100,00	24,94
33	Kecamatan Kelapa	156.276.470,00	143.900.720,00	12.375.750,00	8,60
34	Kecamatan Tempilang	126.869.730,00	116.226.780,00	10.642.950,00	9,16
35	Kecamatan Parittiga	139.156.338,00	109.883.300,00	29.273.038,00	26,64
36	Inspektorat Kabupaten	1.198.241.542,00	1.603.558.714,00	(405.317.172,00)	25,28
37	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah,	16.438.778,00	624.431.687,00	(607.992.909,00)	97,37
38	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	440.726.658,00	0,00	440.726.658,00	0,00
39	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	502.469.806,00	706.685.926,00	(204.216.120,00)	28,90
40	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	344.736.197,00	357.470.262,00	(12.734.065,00)	3,56
41	Badan Kepgawainan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	509.849.536,00	486.156.353,00	23.693.183,00	4,87
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	643.327.891,00	596.440.578,00	46.887.313,00	7,86
<b>Total</b>		<b>48.592.973.730,54</b>	<b>38.817.437.709,50</b>	<b>9.775.536.021,04</b>	<b>25,18</b>

Tahun 2024 terdapat kenaikan beban perjalanan dinas sebesar Rp9.775.536.021,04. Kenaikan ini dikarenakan meningkatnya realisasi belanja perjalanan dinas pada Organisasi Perangkat Daerah.

Perhitungan beban perjalanan dinas Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	<b>Belanja Perjalanan Dinas mapping- LRA</b>	<b>43.608.953.442,00</b>
2.	<b>Bertambah :</b>	<b>4.984.020.288,54</b>
	Hutang perjalanan dinas berdasarkan SK Bupati	1.582.699.268,00
	Reklas dari Belanja Barang & Jasa BOK	2.531.620.000,00
	Reklas dari Belanja BLUD	869.701.020,54
3.	<b>Berkurang :</b>	<b>0,00</b>
4.	<b>Beban Perjalanan Dinas-LO 2024 ( 1+2-3)</b>	<b>48.592.973.730,54</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023

#### **5.4.2.6 Beban Hibah**

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Beban Hibah-LO tahun 2024 sebesar Rp41.648.744.470,00, jika disandingkan dengan Belanja Hibah-LRA tahun 2024 sebesar Rp45.025.644.850,00 terdapat perbedaan sebesar Rp3.376.900.380,00 yang terdiri dari :

1. Hutang Belanja berdasarkan Surat Keputusan Bupati yang diakui sebagai Beban Hibah sebesar Rp1.095.348.420,00 berupa Pembangunan TK Bhayangkari sebesar Rp828.059.520,00 pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, hibah pembangunan sumur bor sebesar Rp96.481.200,00 pada Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan hibah barang sebesar Rp120.807.700,00 serta hibah uang sebesar Rp50.000.000,00 pada Sekretariat Daerah.
2. Belanja Hibah berupa barang yang belum diserahkan sebesar Rp4.472.248.800,00 berupa hibah pembangunan jamban pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp427.612.000,00, hibah pagar kuburan pada Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp356.072.000,00 dan Hibah Peralatan dan Mesin pada Sekretariat Daerah sebesar Rp3.688.564.800,00.

Beban Hibah tahun 2024 adalah sebesar Rp41.648.744.470,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Beban Hibah-LO 2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	11.928.745.620,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	566.633.900,00
3	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	296.465.400,00
4	Dinas Perikanan	664.626.400,00
5	Sekretariat Daerah	4.750.000.000,00
6	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	23.442.273.150,00
<b>Total</b>		<b>41.648.744.470,00</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

Perhitungan Beban Hibah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	<b>Belanja Hibah mapping- LRA</b>	<b>45.025.644.850,00</b>
2.	<b>Bertambah :</b> Hutang berdasarkan SK Bupati yang menjadi beban Hibah	<b>1.095.348.420,00</b> 1.095.348.420,00
3.	<b>Berkurang :</b> Reklas menjadi persediaan	<b>4.472.248.800,00</b> 4.472.248.800,00
4.	<b>Beban Hibah-LO 2024 (1+2-3)</b>	<b>41.648.744.470,00</b>

#### 5.4.2.7 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial merupakan transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat yang sifatnya selektif dan tidak berkelanjutan, yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Beban Bantuan Sosial tahun 2024 adalah sebesar Rp5.799.053.462,00, jika disandingkan dengan Belanja Bantuan Sosial - LRA tahun 2024 sebesar Rp5.463.594.462,00 terdapat perbedaan sebesar Rp335.459.000,00 yang merupakan hutang Belanja Bantuan Sosial berdasarkan Surat Keputusan Bupati.

Rincian Beban Bantuan Sosial tahun 2024 dan tahun 2023 sebagai berikut :

No	Uraian	Beban Bantuan Sosial-LO 2024 (Rp)	Beban Bantuan Sosial-LO 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	% Kenaikan/ Penurunan
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	290.000.000,00	360.000.000,00	(70.000.000,00)	19,44
2	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan	0,00	1.424.105.736,00	(1.424.105.736,00)	100,00
3	Dinas Perhubungan, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	3.267.625.212,00	0,00	3.267.625.212,00	0,00
4	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	1.623.028.250,00	1.665.074.500,00	(42.046.250,00)	2,53
5	Sekretariat Daerah	618.400.000,00	195.750.000,00	422.650.000,00	215,91
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	4.250.000,00	(4.250.000,00)	100,00
<b>Total</b>		<b>5.799.053.462,00</b>	<b>3.649.180.236,00</b>	<b>2.149.873.226,00</b>	<b>58,91</b>

Tahun 2024 terdapat kenaikan beban bantuan sosial sebesar Rp2.149.873.226,00 Kenaikan ini dikarenakan meningkatnya realisasi belanja bantuan sosial pada Organisasi Perangkat Daerah.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

Perhitungan beban bantuan sosial Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	<b>Belanja Bantuan Sosial mapping- LRA</b>	<b>5.463.594.462,00</b>
2.	<b>Bertambah :</b>	<b>335.459.000,00</b>
	Hutang Belanja Bantuan Sosial berdasarkan SK Bupati	335.459.000,00
3.	<b>Berkurang :</b>	<b>0,00</b>
4.	<b>Beban Hibah-LO 2024 (1+2-3)</b>	<b>5.799.053.462,00</b>

#### **5.4.2.8 Beban Penyisihan Piutang Pajak**

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban penyisihan piutang tahun 2024 adalah sebesar Rp681.579.607,48. Perhitungan beban penyisihan piutang pajak telah disajikan pada CALK Penyisihan Piutang Pajak di Neraca.

Beban penyisihan piutang pajak tahun 2024 adalah sebagai berikut :

OPD	Jenis Pajak	Beban Penyisihan Piutang Pajak-LO 2024 (Rp)
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	Pajak Restoran	
	Pajak Reklame	11.992.005,65
	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	62.746,31
	Pajak Sarang Burung Walet	33.850,00
	Pajak Air Tanah	2.231.601,79
	Pajak Bumi dan Bangunan	666.000.160,60
<b>Total</b>		<b>681.579.607,48</b>

#### **5.4.2.9 Beban Penyisihan Piutang Retribusi**

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban Penyisihan Piutang Retribusi Tahun 2024 sebesar Rp11.601.335,00. Perhitungan beban penyisihan piutang retribusi telah disajikan pada CALK Penyisihan Piutang Retribusi di Neraca.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

Beban penyisihan piutang retribusi tahun 2024 adalah sebagai berikut :

OPD	Jenis Retribusi	Beban Penyisihan PiutangRetribusi-LO 2024 (Rp)
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	Retribusi Pasar Grosir Dan Atau Pertokoan	11.601.335,00
<b>Total</b>		<b>11.601.335,00</b>

**5.4.2.10 Beban Penyisihan Piutang Bagi Hasil**

Beban Penyisihan Piutang Bagi Hasil merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tidak memiliki Beban Penyisihan Piutang Bagi Hasil.

**5.4.2.11 Beban Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman Perkuatan Modal**

Beban Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman Perkuatan Modal merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tidak memiliki Beban Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman Perkuatan Modal, hal ini dikarenakan Piutang Bagian Lancar Pinjaman Perkuatan Modal telah disisihkan seluruhnya.

**5.4.2.12 Beban Penyisihan Piutang Lainnya**

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tidak memiliki Beban Penyisihan Piutang Lainnya.

**5.4.2.13 Beban Penyusutan Aset Tetap**

Beban Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban penyusutan aset tetap Tahun 2024 adalah sebesar Rp99.484.740.480,00. Beban penyusutan aset tetap akan menambah akumulasi penyusutan. Contoh perhitungan Beban Penyusutan Aset Tetap telah dijelaskan pada CALK Aset Tetap. Nilai Beban penyusutan aset tetap sebesar Rp99.484.740.480,00 diperoleh dari Aplikasi SIMDABMD dan Kertas Kerja perhitungan Beban dan Akumulasi Penyusutan.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

Rincian Beban penyusutan aset tetap Tahun 2024 per OPD adalah sebagai berikut:

No	OPD	Beban Penyusutan Aset Tetap – LO 2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	17.167.219.913,00
2	Dinas Kesehatan	13.118.482.359,00
3	BLUD Sejiran Setason	2.409.999.855,00
4	BLUD Puskesmas Mentok	7.624.814,00
5	BLUD Puskesmas Sekar Biru	4.272.000,00
6	BLUD Puskesmas Kelapa	333.000,00
7	BLUD Puskesmas Tempilang	14.847.545,00
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	51.520.496.918,00
9	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan	0,00
10	Dinas Perhubungan, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	2.906.463.037,00
11	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	137.950.127,00
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	599.330.100,00
13	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	94.673.662,00
14	Dinas Pertanian dan Pangan	722.637.533,00
15	Dinas Lingkungan Hidup	1.187.326.683,00
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	399.650.733,00
17	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	403.937.089,00
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	338.767.801,00
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	0,00
20	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan	673.831.779,00
21	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	435.036.034,00
22	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00
23	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	120.252.161,00
24	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	952.653.660,00
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	565.574.484,00
26	Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00
27	Dinas Perikanan	184.744.610,00
28	Sekretariat Daerah	2.409.779.585,00
29	Sekretariat DPRD	1.110.010.494,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

No	OPD	Beban Penyusutan Aset Tetap – LO 2024 (Rp)
30	Kecamatan Mentok	498.873.227,00
31	Kecamatan Simpang Teritip	93.832.761,00
32	Kecamatan Jebus	137.013.419,00
33	Kecamatan Kelapa	275.213.555,00
34	Kecamatan Tempilang	94.282.088,00
35	Kecamatan Parittiga	112.415.267,00
36	Inspektorat Kabupaten	38.379.524,00
37	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah,	0,00
38	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	122.188.139,00
39	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	148.261.676,00
40	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	125.045.091,00
41	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	305.891.391,00
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	47.448.366,00
<b>Total</b>		<b>99.484.740.480,00</b>

#### 5.4.2.14 Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud

Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud merupakan beban amortisasi atas aset tak berwujud selama satu periode pelaporan. Nilai Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud diperoleh dari Aplikasi SIMDA BMD. Beban amortisasi aset tak berwujud Tahun 2024 adalah sebesar Rp65.085.100,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Beban Amortisasi-LO 2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	32.200.000,00
2	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan	28.807.100,00
3	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.480.000,00
4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.598.000,00
<b>Total</b>		<b>53.214.161,00</b>

#### 5.4.2.15 Beban Penyusutan Aset Lain-Lain

Beban penyusutan aset lain-lain merupakan beban penyusutan atas aset lain-lain selama satu periode pelaporan. Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tidak melakukan penyusutan atas Aset Lain-Lain sesuai dengan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

#### **5.4.2.16 Beban Transfer**

Beban Tranfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban transfer tahun 2024 adalah sebesar Rp120.749.209.720,00. Rincian Beban Transfer Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Beban Transfer ke Desa	116.565.769.800,00
2	Beban Bagi Hasil ke Desa	4.183.439.920,00
<b>Total</b>		<b>120.749.209.720,00</b>

Beban Transfer disajikan sebesar realisasi Transfer ke Desa dan Bagi Hasil ke Desa pada Laporan Realisasi Anggaran.

#### **5.4.2.17 Beban Lain-Lain**

Beban Lain-Lain merupakan beban yang bukan berasal dari belanja operasi dan tidak dianggarkan dalam APBD. Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tidak memiliki Beban Lain-Lain.

#### **5.4.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional**

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional merupakan kenaikan atau penurunan Ekuitas yang berasal dari kegiatan non operasional diantaranya surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya dan defisit penghentian aset. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 mengalami defisit sebesar Rp1.387.348.963,00 sedangkan pada tahun 2023 mengalami defisit sebesar Rp1.397.729.645,00. Defisit sebesar Rp1.387.348.963,00 disebabkan laba operasional BUMD sebesar Rp71.854.157,00, Defisit Penghapusan Aset Tetap tahun 2024 sebesar Rp1.452.042.640,00 dan persediaan kedaluwarsa sebesar Rp4.252.016,00.

##### **5.4.3.1 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya**

Tahun 2024 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya adalah sebesar Rp64.693.677,00 yang merupakan laba pada Perumda Air Minum Tirta Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat sebesar Rp73.472.192,00, rugi Perusahaan Daerah Bangka Barat Sejahtera sebesar Rp1.618.035,00 dan persediaan kedaluwarsa sebesar Rp4.252.016,00.

##### **5.4.3.2 Defisit Penghentian Aset**

Tahun 2024 Defisit penghentian Aset Kabupaten Bangka Barat adalah sebesar Rp1.452.042.640,00 yang merupakan penghentian aset tetap.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

**5.4.4 Pos Luar Biasa**

Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tidak memiliki Pos Luar Biasa.

**5.4.5 Surplus/Defisit - LO**

Surplus/Defisit-LO merupakan surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional. Tahun 2024 Surplus/Defisit-LO sebesar Rp81.975.554.499,75.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

## 5.5 LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu.

### 5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

#### 5.5.1.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Penerimaan Pajak Daerah	32.340.169.274,00	26.506.009.473,00
Penerimaan Retribusi Daerah	15.032.696.814,68	7.781.270.518,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.966.951.097,57	6.844.661.601,09
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	33.044.954.459,83	30.663.731.818,32
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	32.127.798.000,00	34.630.338.277,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	110.285.200.000,00	93.415.826.636,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	468.444.230.163,00	434.631.148.780,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	116.873.349.822,00	104.932.936.254,00
Penerimaan Dana Penyesuaian	62.101.997.000,00	81.391.689.000,00
Penerimaan Bagi Hasil Pajak Provinsi	51.072.828.700,00	63.044.686.182,00
Penerimaan Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi	0,00	35.531.158.000,00
Penerimaan Hibah	0,00	452.000.000,00
Penerimaan Lainnya / JKN	4.054.330.174,00	0,00
<b>Total</b>	<b>931.344.505.505,08</b>	<b>919.825.456.539,41</b>

#### 5.5.1.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Pembayaran Pegawai	412.676.783.361,00	343.907.680.513,00
Pembayaran Barang	283.275.145.984,23	311.937.433.654,49
Pembayaran Hibah	45.025.644.850,00	37.096.716.160,00
Pembayaran Bantuan Sosial	5.463.594.462,00	3.649.180.236,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	116.565.769.800,00	113.918.625.488,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Pembayaran Tak Terduga	0,00	0,00
Pembayaran Bagi Hasil ke Desa	4.183.439.920,00	3.728.428.749,00
<b>Total</b>	<b>867.190.378.377,23</b>	<b>814.238.064.800,49</b>

Arus kas bersih aktivitas operasi sebesar Rp64.154.127.127,85. Penyajian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi pada tahun 2024 telah menyajikan Pendapatan dan Belanja yang bersumber dari Dana BLUD, Dana Kapitasi JKN, Dana BOS APBN dan dana BOK.

#### **5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan**

##### **5.5.2.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan**

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	5.230.500,00	0,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>5.230.500,00</b>	<b>0,00</b>

##### **5.5.2.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan**

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Perolehan Tanah	0,00	0,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	20.170.550.842,00	24.642.389.709,86
Perolehan Gedung dan Bangunan	32.599.542.695,00	61.751.185.849,07
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	48.440.286.471,64	65.901.977.241,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.849.002.131,00	4.226.147.275,00
Perolehan Aset Lainnya	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>107.059.382.139,64</b>	<b>156.521.700.074,93</b>

Arus Kas bersih Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan sebesar Rp107.054.151.639,64. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa mendatang. Pada tahun 2024, penyajian nilai Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan telah menyajikan belanja modal yang bersumber dari Dana BLUD, Dana Kapitasi JKN pada FKTP, Dana BOS APBN dan Dana BOK.

### **5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan**

#### **5.5.3.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pembiayaan**

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pembiayaan per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Pengembalian Sisa Kas Tahun Lalu	0,00	0,00
Pengembalian Belanja Tahun Berjalan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman	29.500.000,00	6.800.000,00
Konversi Nilai Penyertaan Modal	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>29.500.000,00</b>	<b>6.800.000,00</b>

#### **5.5.3.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pembiayaan**

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pembiayaan per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Hutang	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan tahun 2024 sebesar Rp29.500.000,00. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan dan pemberian pinjaman jangka panjang.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

#### **5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran**

##### **5.5.4.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Non Anggaran**

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Non Anggaran Per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Kas Transitoris	0,00	0,00
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	22.384.413.495,00	18.363.963.151,00
<b>Total</b>	<b>22.384.413.495,00</b>	<b>18.363.963.151,00</b>

##### **5.5.4.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Non Anggaran**

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Non Anggaran Per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Kas Transitoris	0,00	0,00
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	22.383.864.782,00	18.364.018.178,00
<b>Total</b>	<b>22.383.864.782,00</b>	<b>18.364.018.178,00</b>

Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga merupakan penerimaan dan pengeluaran PFK pada Bendahara Umum Daerah yaitu penerimaan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21,Taperum, dan Iuran Jaminan Kesehatan.

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris merupakan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak dipengaruhi oleh anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Pemerintah Daerah. Arus Kas Bersih aktivitas Non Anggaran tahun 2024 sebesar Rp548.713,00 yang merupakan saldo pajak di Dinas Pendidikan, Kepemudaaan dan Olahraga sebesar Rp1.113.713,00 dan penyetoran saldo Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun 2023 pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp565.000,00.

#### **5.5.5 Saldo Kas**

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
<b>Kenaikan/Penurunan Kas</b>	<b>(42.869.975.798,79)</b>	<b>(50.927.563.363,01)</b>
<b>Saldo Awal Kas di Kas Daerah, Bendahara Pengeluaran dan BLUD</b>	<b>53.757.322.864,70</b>	<b>107.144.707.626,71</b>
- Saldo Awal Kas di Kas Daerah BUD	43.464.892.787,89	93.149.349.623,97
- Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	52.662.284,00
- Saldo Awal Kas di BLUD	10.292.430.076,81	13.942.695.718,74
<b>Saldo Awal Kas di Bendahara JKN</b>	<b>206.776.381,00</b>	<b>9.290.072,00</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
<b>Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Awal Kas di Bendahara Penerimaan</b>	<b>0,00</b>	<b>6.525.000,00</b>
<b>Saldo Awal Kas Lainnya</b>	<b>2.462.257.108,00</b>	<b>55.027,00</b>
<b>Saldo Awal Kas Dana BOS dan Kas Lainnya di Sekolah</b>	<b>140.827.342,00</b>	<b>37.804.072,00</b>
<b>Saldo Akhir Kas di Kas Daerah, Bendahara Pengeluaran dan BLUD</b>	<b>11.880.413.414,91</b>	<b>53.757.322.864,70</b>
- Saldo Akhir Kas di Kas Daerah	1.166.698.573,95	43.464.892.787,89
- Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
- Saldo Akhir Kas di BLUD	10.713.714.840,96	10.292.430.076,81
<b>Saldo Akhir Kas di Bendahara JKN</b>	<b>8.863.550,00</b>	<b>206.776.381,00</b>
<b>Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Akhir Kas Lainnya</b>	<b>1.733.407.584,00</b>	<b>2.462.257.108,00</b>
<b>Saldo Akhir Kas Dana BOS dan Kas Lainnya di Sekolah</b>	<b>190.271.739,00</b>	<b>140.826.882,00</b>
<b>Saldo Akhir Kas</b>	<b>13.695.392.214,91</b>	<b>56.567.183.235,70</b>

Saldo Akhir Kas yang disajikan pada LAK sebesar Rp13.695.392.214,91 sedangkan SiLPA LRA sebesar Rp13.692.447.501,91 sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp2.944.713,00 yang merupakan utang PFK sebesar Rp1.113.713,00 dan penutupan rekening dana keluarga pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Rp1.831.000,00.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

## 5.6

### LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan perubahan ekuitas pada periode pelaporan dibandingkan dengan periode pelaporan sebelumnya. Perubahan ekuitas tersebut dikarenakan surplus/defisit operasional tahun berjalan dan akibat dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar.

#### 5.6.1

##### **Ekuitas Awal**

Ekuitas awal tahun 2024 merupakan ekuitas akhir tahun 2023 yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Ekuitas awal 2024 adalah sebesar Rp1.669.230.176.041,34.

#### 5.6.2

##### **Surplus/Defisit – LO**

Surplus/Defisit–LO merupakan surplus/defisit operasional tahun berjalan yang merupakan selisih antara pendapatan operasional dan beban operasional. Tahun 2024 Surplus/Defisit-LO adalah sebesar Rp81.975.554.499,75.

#### 5.6.3

##### **Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar**

Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar merupakan dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar yang mengakibatkan perubahan nilai aset sehingga mempengaruhi nilai ekuitas. Dampak kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebesar Rp1.881.647.448,85 dengan uraian sebagai berikut :

Uraian	Nilai Tahun 2024 (Rp)	Nilai Tahun 2023 (Rp)
Koreksi Ekuitas Lainnya	(1.893.521,29)	(31.616.296.898,93)
Penyesuaian Penyisihan Piutang	98.120.298,44	96.354.001,98
Penyesuaian Aset Dibawah Kapitalisasi	(3.036.577.668,00)	(3.327.417.005,00)
Koreksi Nilai	1.058.703.442,00	(47.067.562.355,00)
<b>Total</b>	<b>(1.881.647.448,85)</b>	<b>(81.914.922.256,95)</b>

Koreksi Ekuitas Lainnya tahun 2024 sebesar Rp1.893.521,29 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Jumlah (Rp)
- Pembulatan Aset	104,71
- Setoran Kerugian Daerah an. Yudi W yang seharusnya disetor ke Kas BLUD	(1.815.682,00)
- Penutupan rekening pendidikan keluarga	(77.944,00)
<b>Total</b>	<b>(1.893.521,29)</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

1. Pembulatan merupakan pembulatan nilai perolehan aset, baik pembulatan nilai keatas maupun pembulatan nilai kebawah.
2. Setoran Pengembalian Kerugian Daerah merupakan setoran pengembalian kerugian daerah BLUD RSUD Sejiran Setason yang diterima pada kas daerah yang seharusnya disetor ke Rekening Bendahara Penerimaan BLUD RSUD Sejiran Setason.
3. Penutupan rekening pendidikan keluarga merupakan rekening pendidikan keluarga pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.

Penyesuaian penyisihan piutang sebesar Rp98.120.298,44 merupakan pelunasan atas piutang yang telah dilakukan penyisihan dan koreksi catat penyisihan piutang tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut :

<b>Uraian</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
- Pelunasan piutang pajak	836.701,88
- Koreksi catat penyisihan piutang	67.783.596,56
- Pelunasan piutang bagian lancar	29.500.000,00
<b>Total</b>	<b>98.120.298,44</b>

Penyesuaian Aset dibawah kapitalisasi merupakan penyesuaian atas pengadaan tahun berjalan yang nilai pengadaannya dibawah nilai kapitalisasi aset berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dan perubahan kodefikasi barang milik daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.

Koreksi Nilai tahun 2024 sebesar Rp1.058.703.442,00 merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan nilai aset dan akumulasi penyusutan aset dengan rincian sebagai berikut :

<b>Uraian</b>	<b>Jumlah Rp</b>
- Koreksi catat Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi	(799.605.957,00)
- Koreksi Catat Piutang Pajak/ Retribusi Tahun Lalu	(519.000,00)
- Koreksi Catat Persediaan	5.600.000,00
- Koreksi Catat utang	668.494,00
- Aset Belum tercatat	1.845.237.900,00
- koreksi catat aset	7.322.005,00
<b>Total</b>	<b>1.058.703.442,00</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

#### **5.6.4 Ekuitas Akhir**

Ekuitas akhir Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 sebesar Rp1.585.372.974.092,74.

#### **Penjelasan Lainnya**

Penjelasan Lainnya adalah penjelasan atas kejadian di tahun 2024 maupun hal –hal yang perlu dijelaskan terkait penyusunan laporan keuangan tahun 2024 yaitu:

##### **1. Penyajian Laporan Keuangan**

Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 11 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional, Laporan Realisasi Anggaran, dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih tahun 2023 yang disajikan merupakan laporan konsolidasi antara Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat dan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Sejiran Setason. Sedangkan Arus Kas Dana BOS dan Arus Kas Dana JKN tidak dikonsolidasi pada Laporan Arus Kas.

2. Pada tahun 2024 terdapat kegiatan Prolanis yang merupakan Program Pengelolaan Penyakit Kronis. Program ini adalah upaya yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan dan fasilitas kesehatan atau Puskesmas di Kabupaten Bangka Barat untuk membantu peserta JKN yang menderita penyakit kronis mencapai kualitas hidup optimal. Prolanis bertujuan untuk mengelola dan memantau penyakit kronis, sehingga peserta dapat hidup lebih sehat dan menghindari komplikasi serius yang tidak menggunakan Dana APBD Kabupaten Bangka Barat. Rincian Pendapatan dan Belanja serta saldo Kas kegiatan Prolanis pada tahun 2024 sebagai berikut:

Puskesmas	Status	Saldo Awal Per 1 Januari 2024	Pendapatan	Belanja	Saldo Akhir Per 31 Desember 2024
Puskesmas Kundi	Non BLUD	1.456.600	1.477.100	2.590.000	343.700
Puskesmas Jebus	Non BLUD	4.723.768	7.123.153	11.746.500	100.421
<b>Total</b>		<b>6.180.368</b>	<b>8.600.253</b>	<b>14.336.500</b>	<b>444.121</b>

3. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2024 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2024.

Rincian Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023

No.	Uraian	Kurang Bayar		Lebih Bayar	
		s.d 2023	s.d 2023		
<b>Pajak (1+2)</b>		<b>3.160.847.000,00</b>		<b>3.118.706.000,00</b>	
1	<b>PPh</b>	<b>1.146.966.000,00</b>		<b>27.462.000,00</b>	
	PPPh Pasal 21	1.146.965.000,00		-	
	PPPh Pasal 25/29		1.000,00	27.462.000,00	
2	<b>PBB</b>	<b>2.013.881.000,00</b>		<b>3.091.244.000,00</b>	
	Bagi Rata		-	69.373.000,00	
	Bagian Daerah		2.013.879.000,00	2.997.514.000,00	
	Biaya Pungutan		2.000,00	24.357.000,00	
<b>Sumber Daya Alam (3)</b>		<b>41.074.454.000,00</b>		<b>49.391.136.000,00</b>	
3	<b>Migas</b>	<b>41.074.454.000,00</b>		<b>49.391.136.000,00</b>	
	Minyak Bumi		2.000,00	425.482.000,00	
	Gas Bumi		-	-	
	Minerba		41.072.075.000,00	41.577.084.000,00	
	Panas Bumi		-	-	
	Kehutanan		2.377.000,00	44.571.000,00	
	Perikanan		-	2.091.556.000,00	
	Perkebunan Sawit		-	5.252.443.000,00	
<b>Total</b>		<b>44.235.301.000,00</b>		<b>52.509.842.000,00</b>	

4. Nilai Jaminan yang diagunkan dalam pemberian pinjaman perkuatan modal kelompok nelayan pada Dinas Kelautan dan Perikanan.

Dalam penyaluran pinjaman perkuatan modal kelompok nelayan, penerima pinjaman diwajibkan untuk memberikan jaminan atas pinjaman tersebut. Berikut rincian jaminan atas pinjaman perkuatan modal kelompok nelayan tahun 2012-2015:

**Dana Fasilitasi Pengadaan Sarana dan Alat Bantu Penangkapan Ikan**  
**Tahun 2012**

No	Nama Kelompok & Ketua	Alamat	RUB Rp	Nilai Jaminan Rp	Keterangan
1	Menanti Ketua : Husin	Desa sukal Kec. Muntok	74.500.000,00	48.804.000,00	<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023

No	Nama Kelompok & Ketua	Alamat	RUB Rp	Nilai Jaminan Rp	Keterangan
2	Biru Laut Ketua : Muhadi Rahman	Desa Sekar Biru Kec. Parit Tiga	70.590.000,00	91.519.000,00	<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>
3	Teluk Akek Ketua : Hamzah	Desa Pusuk Kec. Kelapa	75.000.000,00	128.340.000,00	<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>
4	Gelem Guntong Ketua : Azikin	Desa Air Lintang Kec. Tempilang	29.280.000,00	63.320.000,00	<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>
5	Jiran Siantan Ketua : M. Ridwan	Desa Tanjung Kec. Muntok	75.000.000,00	75.000.000,00	<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>
6	Belanak Ketua : Saifudin	Desa Air Menduyung Kec. Simp. Teritip	74.765.000,00	78.100.000,00	<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>
<b>Jumlah</b>			<b>399.135.000,00</b>	<b>485.083.000,00</b>	

**Dana Fasilitasi Pengadaan Sarana dan Alat Bantu Penangkapan Ikan**  
**Tahun 2013**

No	Nama Kelompok & Ketua	Alamat	RUB Rp	Nilai Jaminan Rp	Keterangan
1	Barokah I Ketua : Dede Ibrahim	Kp. Tanjung Kec. Muntok	50.000.000,00		<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>
2	Barokah 2 Ketua : Erwan	Kp. Tanjung Kec. Muntok	40.000.000,00	90.000.000,00	<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>
3	Kp. Air Terjun Ketua : Surtejo	Kp. Tanjung Kec. Muntok	75.000.000,00	89.112.500,00	<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>
4	Karya Bahari Ketua : Sugeng	Dsn. Pait Kec. Muntok	75.000.000,00	163.800.000,00	<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>
5	Sinar Matahari Ketua : Latan	Ds. Air Nyatoh Kec. Sp. Teritip	46.065.000,00	55.928.125,00	<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023

No	Nama Kelompok & Ketua	Alamat	RUB Rp	Nilai Jaminan Rp	Keterangan
6	Hiu Putih Ketua : Romli	Ds. Kundi Kec. Sp. Teritip	72.800.000,00	90.646.375,00	Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan
7	Beting Tunggul Ketua : Agus	Ds. Pusuk Kec. Kelapa	75.000.000,00	90.228.000,00	Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan
8	Goyang Kelabat Ketua : Abdu Rasyid	Ds. Pusuk Kec. Kelapa	75.000.000,00	115.056.000,00	Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan
9	Pasir Kuning 1 Ketua : Arsyad	Ds. Air Lintang Kec. Kelapa	75.000.000,00	108.600.000,00	Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan
10	Pasir Kuning 2 Ketua : Supriadi	Ds. Air Lintang Kec. Tempilang	37.500.000,00	66.500.000,00	Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan
<b>Jumlah</b>			<b>621.365.000,00</b>	<b>869.871.000,00</b>	

**Dana Fasilitasi Pengadaan Sarana dan Alat Bantu Penangkapan Ikan**  
**Tahun 2014**

No	Nama Kelompok & Ketua	Alamat	RUB Rp	Nilai Jaminan Rp	Keterangan
1	Teluk Rubiah Jaya Ketua : Maulana	Kp. Tanjung Kec. Muntok	20.000.000,00	25.850.000,00	Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan
2	Kolek Bersama Ketua : Erwan	Desa. S. Daeng kec. Muntok	60.000.000,00	67.200.000,00	Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan
3	Rumpun Tanjung Ular Ketua : Ten Njuk San	Desa. Air Putih Kec. Muntok	20.000.000,00	20.520.000,00	Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan
4	Teluk Rubiah Ketua : Suwandi	Kel. Tanjung Kec. Muntok	75.000.000,00	78.000.000,00	Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan
5	Dsn. Tanjung Punai Ketua : Damsah	Dsn. Tj Punai Kec. Muntok	60.000.000,00	70.850.000,00	Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023

No	Nama Kelompok & Ketua	Alamat	RUB Rp	Nilai Jaminan Rp	Keterangan
6	Meluber Ketua : Deki s	Ds. Air Nyatoh Kec. Sp. Teritip	60.000.000,00	78.250.000,00	Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan
7	Ketapang Ketua : Sumarto	Ds. Air Nyatoh Kec. Sp. Teritip	48.000.000,00	48.250.000,00	Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan
8	Beting Kandis Ketua : Suhaimi S	Ds. Pusuk Kec. Kelapa	75.000.000,00	86.140.000,00	Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan
9	Teluk Kandis Ketua : Asmawi	Ds. Pusuk Kec. Kelapa	52.000.000,00	52.300.000,00	Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan
10	Raja Karang Ketua : Marzuki	Ds. Bakit Kec. Parit tiga	75.000.000,00	76.120.000,00	Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan
11	Mutiara Laut Ketua : Suadi	Ds. Bakit Kec. Parit Tiga	75.000.000,00	77.440.000,00	Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan
12	Karang Berang Berang Ketua : Efendi	Ds. S. Buluh Kec. Jebus	75.000.000,00	75.084.000,00	Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan
13	Teluk Akop Ketua : Sahbandi	Ds. Air Lintang Kec. Tempilang	75.000.000,00	129.725.000,00	Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan
<b>Jumlah</b>			<b>750.000.000,00</b>	<b>885.729.000,00</b>	

**Dana Fasilitasi Pengadaan Sarana dan Alat Bantu Penangkapan Ikan**  
**Tahun 2015**

No	Nama Kelompok & Ketua	Alamat	RUB Rp	Nilai Jaminan Rp	Keterangan
1	Tj Putra Bahari Ketua : Imran Hasan	Kel. Tanjung Kec. Muntok	52.500.000,00	52.600.000	Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023

No	Nama Kelompok & Ketua	Alamat	RUB Rp	Nilai Jaminan Rp	Keterangan
2	Selindung Jaya Ketua : Adin	Dsn. Selindung Kec. Muntok	41.000.000,00	41.360.000	Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan
3	Harapan Semesta Ketua : Sudarso	Kel. Tanjung Kec. Muntok	17.250.000,00	17.800.000	Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan
4	Ketam Ketua : Burhanudin	Kel. Tanjung Kec. Muntok	43.500.000,00	43.700.000,00	Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan
5	Sinar Tj. Harapan Ketua : Ardani B	Kel. Tanjung Kec. Muntok	73.500.000,00	73.560.000,00	Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan
6	Sinar Cahaya Ketua : Rusdan	Kel. Tanjung Kec. Muntok	48.750.000,00	49.440.000,00	Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan
7	Kuat Bersama Ketua : H. Nurdin	Kel. Tanjung Kec. Muntok	75.000.000,00	79.700.000,00	Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan
8	Mandiri Usaha Bersama Ketua : Junaili	Kel. Tanjung Kec. Muntok	40.000.000,00	40.000.000,00	Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan
9	Tapak Nelayan Ketua : Andreas	Kel. S. Daeng Kec. Muntok	62.500.000,00	62.680.000,00	Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan
10	Issamsi Ketua : Iskandar	Ds. Pangek Kec. Sp. Teriti[	36.240.000,00	36.248.000,00	Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan
11	Sinar Laut Mandiri Ketua : Abdul K	Ds. Bukit Terak Kec. Sp. Teritip	36.000.000,00	36.000.000,00	Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan
12	Samudera Ketua : Ba'in	Ds. Kundu Kec. Sp. Teritip	32.000.000,00	32.000.000,00	Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan
13	Sinar Harapan Laut 1 Ketua : Subuhari	Ds. Air lintang Kec. Tempilang	75.000.000,00	117.720.000,00	Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023

No	Nama Kelompok & Ketua	Alamat	RUB Rp	Nilai Jaminan Rp	Keterangan
14	Sinar Harapan Laut 2 Ketua : Muslimin	Ds. Air Lintang Kec. Tempilang	75.000.000,00	139.230.000,00	<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>
15	Sinar Abadi 1 Ketua : Abesor	Ds. Air Lintang Kec. Tempilang	75.000.000,00	129.304.000,00	<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>
16	Teluk Akik Ketua : Kasir Munir	Ds. Pusuk Kec. Kelapa	50.000.000,00	50.064.000,00	<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>
17	Teluk Kelabat Jaya Ketua : Kamaludin	Ds. Pusuk Kec. Kelapa	58.750.000,00	59.760.000,00	<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>
<b>Jumlah</b>			<b>891.990.000,00</b>	<b>1.061.166.000,00</b>	

5. Terdapat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah pada BLUD Sejiran Setason sebesar Rp 2.337.635.114,15, kertas kerja piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dapat dilihat pada lampiran 9.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023

## BAB 6

### PENUTUP

Kami meyakini bahwa laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan keuangan yang harus disampaikan kepada publik. Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dilaksanakan menggunakan prinsip transparansi, akuntabel, efektif dan efisien sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan tujuan *New Public Management*.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat merupakan salah satu kelengkapan dari laporan pertanggungjawaban akhir tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Laporan keuangan ini disusun menggunakan prinsip standar akuntansi pemerintahan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan ini menyajikan laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan sebagai suatu kesatuan yang komprehensif dan menggambarkan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

Laporan keuangan disajikan sedemikian rupa agar dapat dipahami secara mudah dan jelas oleh para pengguna laporan keuangan yang tidak terbatas hanya pada tingkat manajemen entitas pelaporan, badan pemeriksa ataupun kalangan pembaca tertentu, namun juga pada masyarakat publik. Pengungkapan informasi dalam laporan keuangan yang baik dan lebih lengkap akan menghindari terjadinya *information gap* dan *bias* yang tidak diharapkan. Catatan atas laporan keuangan memuat penjelasan atas elemen-elemen laporan keuangan yang lebih lengkap dan akurat, berupa pengungkapan yang memadai dan diperlukan demi memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan dan demi penyajian laporan keuangan yang wajar tanpa pengecualian.

**BUPATI BANGKA BARAT,**

**MARKUS**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

## BAB 6

### PENUTUP

Kami meyakini bahwa laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan keuangan yang harus disampaikan kepada publik. Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dilaksanakan menggunakan prinsip transparansi, akuntabel, efektif dan efisien sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan tujuan *New Public Management*.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat merupakan salah satu kelengkapan dari laporan pertanggungjawaban akhir tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Laporan keuangan ini disusun menggunakan prinsip standar akuntansi pemerintahan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan ini menyajikan laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan sebagai suatu kesatuan yang komprehensif dan menggambarkan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

Laporan keuangan disajikan sedemikian rupa agar dapat dipahami secara mudah dan jelas oleh para pengguna laporan keuangan yang tidak terbatas hanya pada tingkat manajemen entitas pelaporan, badan pemeriksa ataupun kalangan pembaca tertentu, namun juga pada masyarakat publik. Pengungkapan informasi dalam laporan keuangan yang baik dan lebih lengkap akan menghindari terjadinya *information gap* dan *bias* yang tidak diharapkan. Catatan atas laporan keuangan memuat penjelasan atas elemen-elemen laporan keuangan yang lebih lengkap dan akurat, berupa pengungkapan yang memadai dan diperlukan demi memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan dan demi penyajian laporan keuangan yang wajar tanpa pengecualian.

